SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

RENJA PERUBAHAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29,
Kode Pos 66233
T U L U N G A G U N G

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:**

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan.

KEDUA : Renja Perubahan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

KETIGA : Renja Perubahan Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal , 8 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RAHAJU P. BINTARA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271996031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini atas dasar Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan yang baik oleh Dinas Pendidikan. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Renja Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini.

Akhir kata kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaannya yang kemudian tidak mendapatkan suatu hambatan dan dapat meningkatkan kinerja dan mendorong pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tulungagung yang semakin baik.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, 14 AGUSTUS 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RAHAJU P. BINTARA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271996031004

NIP. 196901271996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N 6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 71

BAB IV PENUTUP..... 129

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung melaksankan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Pendidikan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perubahan menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perubahan mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perubahan OPD juga diintegrasikan dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan, sejumlah peraturan telah digunakan sebagi dasar, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
6. Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan :baerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rertcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timut Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan Dinas Pendidikan selama 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja (Renja Perubahan) ini adalah:

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pendidikan;
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak kegiatan dalam kegiatan pembangunan Pendidikan yang terencana dan memiliki akuntabilitas;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2025;
4. Mensinergikan berbagai unsur dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulungagung;
5. Menciptakan komitmen yang kuat bagi seluruh pelaku pembangunan di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung;
6. Mampu memprediksi kebutuhan anggaran secara indikatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dari Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Tabel T- C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tulungagung

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s/d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**346.000.000,00**		**805.346.007.463,00**		**87.770.881.052,00**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		0		100				0	
	0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)*			100	346.000.000,00	100	346.000.000,00	0	-	0	-

	0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*			2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	0	-		
	0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*			5	196.000.000,00	5	196.000.000,00	0	-		
	0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)*				-	100	790.679.258.663,00	0	87.647.881.052,00	0	-
	0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					6500	790.454.738.663,00	17854	87.647.881.052,00		
	0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					12	217.320.000,00	0	-		
	0.00.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					5	7.200.000,00	0	-		
	0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat_Daerah (Dokumen)*				-		524.822.800,00		-	0	-
	0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					3	203.000.000,00	0	-		

	0.00.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					1000	321.822.800,00	0	-		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		893.532.600,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					12	22.296.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					25	334.312.500,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					6	109.800.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					24	215.750.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					60	211.373.500,00	0	-		

	0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milih daerah yang tersedia (Unit)*				-		78.000.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (undefined)					undefined		0		0	
	0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					200	78.000.000,00	0	-		
	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)*				-	100	12.529.113.400,00	0	102.900.000,00	0	-
	0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					12	503.399.800,00	1	1.650.000,00		
	0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					96	12.025.713.600,00	37	101.250.000,00		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		295.280.000,00		20.100.000,00	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	

	0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					7	179.010.000,00	1	15.000.000,00		
	0.00.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*					12	12.000.000,00	3	-		
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					50	60.900.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					10	43.370.000,00	3	5.100.000,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
2	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun (%)***	**100**	**-**		**30.589.469.000,00**	**100**	**159.017.664.000,00**		**10.505.603.500,00**	**0**	
			Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun (%)	100				100				0	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun (%)*			0	-	100	77.586.165.200,00	0	27.512.000,00	0	-
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)*			0	-	1	-	0	-		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)*					6	590.000.000,00	0	-		

	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)*					3	100.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)*					6	200.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)*					10	1.257.500.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					10	150.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*						-	0	-		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					2	100.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*					50	150.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)*						-	0	-		

	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*						600.000.000,00		27.512.000,00		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)					400		50			
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)*					50	74.000.000,00	0	-		
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)*						3.050.000.000,00		-		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan)					40		0			

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*						58.881.750.000,00		-			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan)					631		0				
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)*						-		-			
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)*						-					
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)*					856	1.219.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)*					10	1.945.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)*						-					
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*					6	1.085.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi*					20	1.067.708.200,00	0	-			

		Sekolah	*Sedang/Berat (Unit)*											
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*						55.000.000,00		-			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan)					631		0				
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					30	1.629.758.000,00	0	-			
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*						5.050.000.000,00		-			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta)					34604		0				
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)*					40	381.449.000,00	0	-			
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun (%)*				-	100	51.923.424.000,00		44.881.500,00	0	-	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)*					6	-		-			
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas*					30	450.000.000,00	0	-			

		Sekolah	*Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)*											
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					37	600.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					2	-					
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					8	250.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					8	250.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*					15	300.000.000,00		-			
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*					10	100.000.000,00	0	-			
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*						5.150.000.000,00		-			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					23750		0				

			(Peserta)										
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*						767.400.000,00		-		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)					750		0			
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)*					1200	91.600.000,00		-		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)*						1.330.000.000,00		31.604.000,00		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan)					100		0			
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*						41.928.200.000,00		13.277.500,00		

			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan)					100		0			
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*						50.000.000,00		-		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan)					37127		0			
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*					1	200.000.000,00		-		
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					7	-		-		
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)*					2	456.224.000,00		-		
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia 3-6 tahun (%)*				24.542.539.000,00	100	26.074.654.800,00		8.875.800.000,00	0	-
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)*			11	564.981.000,00	7	684.659.800,00	0	-		
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)*			0	-	4	-	0	-		
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	*Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)*			0	-		-	0	-		

	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*				-		-		-		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta)			0		20000		0			
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)*			192	50.000.000,00	500	491.600.000,00	0	-		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*				4.640.000.000,00		3.062.500.000,00		-		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan)			104		982		0			
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*				18.023.200.000,00		17.806.600.000,00		8.875.800.000,00		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan)			982		998		992			

	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)*			0	-	1000	-	0	-		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*			2	941.354.000,00	2		0	-		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*			0	-	30	-	0	-		
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)*			6	278.004.000,00	6	4.029.295.000,00	0	-		
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*				45.000.000,00				-		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan)			1		3000		0			
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)*			0	-	5		0	-		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia 7-21 tahun (%)*				6.046.930.000,00	100	3.433.420.000,00		1.557.410.000,00	0	-
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*				-		-		-		

			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta)			0		500		0				
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*				150.000.000,00		183.600.000,00		-			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan)			21		35		0				
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*				3.088.430.000,00		3.249.820.000,00		1.557.410.000,00			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan)			21		43		21				
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)*			0	-	100	-	0	-			

	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)*				2.808.500.000,00				-		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta)			59		23846		0			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
3	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase kurikulum muatan lokal yang dirumuskan (%)***		**-**		**-**	**99**	**153.889.400,00**	**0**	**-**	**0**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan ()*				-		-		-	0	-
			Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan (%)					100		0		0	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)*					1	-	0	-		
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal yang dirumuskan (%)*				-	100	153.889.400,00	0	-	0	-

	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)*					1	153.889.400,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
4	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK (%)***		**-**		**-**	**100**	**250.000.000,00**	**0**	**-**	**0**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Distribusi GTK (%)*				-	100	250.000.000,00	0	-	0	-
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)*					1	100.000.000,00	0	-		
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)*					1	150.000.000,00	0	-		

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
5	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Persentase perizinan pendidikan yang diterbitkan (%)***		-		-	**100**	**100.000.000,00**	**0**	-	**0**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Laporan Dokumen Penerbitan Perizinan (Laporan)*				-		50.000.000,00		-	0	-
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)*						50.000.000,00	0	-		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase perizinan pendidikan yang diterbitkan (%)*			0	-	100	50.000.000,00	0	-	0	-
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)*					1	50.000.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
6	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	***Persentase lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan bahasa dan sastra (%)***		-		-	**100**	**50.000.000,00**	**0**	-	**0**	

	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra (%)*				-	100	50.000.000,00	0	-	0	-
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)*					1	50.000.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
7	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**45.045.000,00**		**51.232.200,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				40.980.000,00		47.092.200,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	5.042.000,00	12	6.964.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	35.188.000,00	12	39.441.200,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			12	750.000,00	12	687.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				4.065.000,00		4.140.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			12	4.065.000,00	12	4.140.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
8	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**43.605.000,00**		**43.605.000,00**		**-**	**0**	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				43.605.000,00		43.605.000,00		-	0	-	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0		
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			9	4.370.000,00	9	5.045.400,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			63	37.835.000,00	60	37.139.900,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			2	1.400.000,00	2	1.419.700,00	0	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
9	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**39.000.000,00**		**48.360.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	39.000.000,00		48.360.000,00		-	0	-	

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			47	2.568.500,00	77	3.068.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			1108	29.765.500,00	627	35.940.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			12110	6.666.000,00	12226	9.352.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
10	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**34.080.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		34.080.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					5	3.368.400,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					43	28.760.400,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					2	1.951.200,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
11	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**31.904.700,00**		**31.904.700,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				31.904.700,00		31.904.700,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	2.078.800,00	12	2.078.800,00	0	-		

	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	26.448.200,00	12	26.448.200,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			12	3.377.700,00	12	3.377.700,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
12	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**46.080.000,00**		**46.080.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				46.080.000,00		46.080.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			17	2.850.000,00	17	3.988.200,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			100	40.330.000,00	100	39.089.300,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			8	2.900.000,00	8	3.002.500,00	0	-		

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
13	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**46.080.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		29.500.500,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					92	2.613.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					1999	25.093.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					1335	1.794.500,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		16.579.500,00		-	0	-

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					264	16.579.500,00	0	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
14	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**36.320.000,00**		**36.320.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	36.320.000,00		36.320.000,00		-	0	-	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0		
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			4	4.902.000,00	4	4.902.000,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	28.838.000,00	12	28.838.000,00	0	-			

	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	2.580.000,00	4	2.580.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
15	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)***		**-**		**28.405.000,00**		**28.405.000,00**		**-**	**0**	
			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				20.808.600,00		20.808.600,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	2.808.800,00	12	2.808.800,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	15.751.200,00	12	15.751.200,00	0	-		

	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			12	2.248.600,00	12	2.248.600,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				7.596.400,00		7.596.400,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			3	1.380.000,00	3	1.380.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			4	6.216.400,00	4	6.216.400,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
16	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**26.790.000,00**		**26.790.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				21.085.000,00		19.401.800,00		-	0	-	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0		
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			3	854.000,00	3	854.000,00	4	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			60	16.931.000,00	49	15.367.800,00	59	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			3	3.300.000,00	3	3.180.000,00	3	-			
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				5.705.000,00		7.388.200,00		-	0	-	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0		
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			4	2.840.000,00	6	4.260.000,00	6	-			
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			1	2.865.000,00	1	3.128.200,00	1	-			

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
17	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		-		-		**46.485.000,00**		-	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		37.773.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					70	3.483.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					36	31.277.400,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					2	3.012.600,00	0	-		

	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		8.712.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		0		0	
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					1	8.712.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
18	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**22.325.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		19.504.600,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	20	1.638.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	20	14.882.300,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	10	2.983.700,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	-		2.820.400,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			0	-	1	2.820.400,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
19	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**48.780.000,00**		**48.780.000,00**		**-**	**0**	

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	45.940.000,00		45.940.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	2.700.000,00	15	2.700.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			80	39.040.000,00	100	39.040.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	4.200.000,00	6	4.200.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	2.840.000,00		2.840.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	

	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			4	2.840.000,00	4	2.840.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
20	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**43.335.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		43.335.000,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	10	957.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	80	38.293.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	10	4.085.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

21	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**100**	**11.581.200,00**		**32.142.200,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			100	11.581.200,00		30.192.200,00		-	0	-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0	
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			7	810.300,00	7	3.187.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			28	9.160.100,00	28	22.904.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	1.610.800,00	6	4.100.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			100	-		1.950.000,00		-	0	-

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		100		0		0		
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			0	-	5	1.950.000,00	0	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
22	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**34.420.000,00**		**-**	**0**		
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		32.960.000,00		-	0		-
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		100		0		0		
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	8	1.916.400,00	0	-			

	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	62	27.362.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	2	3.681.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		1.460.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			0	-	2	1.460.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
23	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**20.500.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		20.500.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	4	2.268.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	51	15.732.000,00	0	-		

	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	4	2.500.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
24	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**48.330.000,00**		**48.330.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	44.110.000,00		44.110.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			4	2.445.000,00	15	2.445.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			40	37.885.000,00	100	37.885.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			20	3.780.000,00	8	3.780.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	4.220.000,00		4.220.000,00		-	0	-

	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			6	4.220.000,00	6	4.220.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
25	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**25.800.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		25.800.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	6	1.500.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	80	20.130.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	8	4.170.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
26	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**33.291.100,00**		**33.291.100,00**		**-**	**0**	

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				27.531.200,00		27.531.200,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	3.197.900,00	10	3.197.900,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	19.883.300,00	10	19.883.300,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	4.450.000,00	10	4.450.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				5.759.900,00		5.759.900,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			1	1.460.000,00	1	1.460.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			1	4.299.900,00	1	4.299.900,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

27	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**14.025.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		14.025.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	30	12.525.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	2	1.500.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
28	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**16.605.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		16.605.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					80	15.525.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					10	1.080.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

29	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**17.820.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		17.820.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	3	16.488.000,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	2	1.332.000,00	0	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
30	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**12.065.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (Dokumen)*				-		12.065.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dokumen Laporan)*						12.065.000,00		-			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dokumen)					12		0			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
31	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**36.540.000,00**		**36.540.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	36.540.000,00		36.540.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	1.408.000,00	10	2.843.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	32.192.000,00	10	31.057.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	2.940.000,00	10	2.640.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
32	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**37.271.600,00**		**40.365.000,00**		**-**	**0**	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	37.271.600,00		40.365.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	3.843.500,00	10	5.529.600,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	28.056.000,00	10	31.348.100,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	5.372.100,00	10	3.487.300,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
33	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**30.895.000,00**		**30.460.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				30.895.000,00		30.460.000,00		-	0	-

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (bulan Paket)*				1.588.400,00		1.521.300,00		-			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (bulan)			3		12		0				
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (bulan Paket)*				27.449.000,00		27.102.700,00		-			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (bulan)			24		12		0				
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (bulan Paket)*				1.857.600,00		1.836.000,00		-			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (bulan)			3		12		0				
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		-		-		0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*				-		-		-			

			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (bulan)			0		12		0			
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*				-		-		-		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (bulan)			0		12		0			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

34	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**100**	**21.446.200,00**		**24.510.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			100	19.346.700,00		21.750.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			31	1.102.900,00	31	1.090.100,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			823	16.145.000,00	887	18.559.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			1020	2.098.800,00	1026	2.100.900,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			100	2.099.500,00		2.760.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			5	2.099.500,00	4	2.760.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

35	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**44.640.000,00**		**44.640.000,00**		**-**	**0**		
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				36.600.000,00		37.540.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			7	3.992.000,00	7	3.951.700,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			53	28.912.000,00	53	29.912.600,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			5	3.696.000,00	4	3.675.700,00	0	-			
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				8.040.000,00		7.100.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			2	2.840.000,00	2	7.100.000,00	0	-			

	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			1	5.200.000,00		-	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
36	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**21.360.000,00**		**21.450.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				15.639.500,00		16.890.200,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			6	1.509.500,00	5	1.897.400,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			60	12.236.000,00	56	12.919.300,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	1.894.000,00	4	2.073.500,00	0	-		

	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				5.720.500,00		4.559.800,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			4	2.840.000,00	3	2.110.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			3	2.880.500,00	2	2.449.800,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
37	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**20.330.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		17.570.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					2	840.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					57	15.051.300,00	0	-		

	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					2	1.678.700,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		2.760.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					4	2.760.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
38	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**100**	**27.500.000,00**		**27.500.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			100						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			100	21.405.000,00		21.405.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (bulan Paket)*			7	2.290.000,00		2.290.000,00		-		

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (bulan)			12		12		0			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			24	18.056.000,00	24	18.056.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (bulan Paket)*			0	1.059.000,00		1.059.000,00		-		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (bulan)			12		12		0			
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	6.095.000,00		6.095.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			3	2.150.000,00	3	2.150.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			5	3.945.000,00	5	3.945.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
39	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**18.920.000,00**		**18.920.000,00**		**-**	**0**	

			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				15.110.400,00		15.119.300,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			3	1.280.400,00	1	1.275.800,00	1	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			3	12.310.000,00	3	12.329.300,00	3	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			2	1.520.000,00	1	1.514.200,00	2	-			
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				3.809.600,00		3.800.700,00		-	0		-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			2	1.420.000,00	2	1.420.000,00	2	-			
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			2	2.389.600,00	2	2.380.700,00	2	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														

40	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**27.000.000,00**		**27.000.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				27.000.000,00		27.000.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	3.095.000,00	10	3.095.000,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	19.828.100,00	10	19.828.100,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	4.076.900,00	10	4.076.900,00	0	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
41	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**17.800.000,00**		**17.800.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				17.800.000,00		17.800.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	2.618.000,00	12	2.618.000,00	0	-			

	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			12	15.182.000,00	12	15.182.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
42	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**45.640.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		45.640.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	13	2.917.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	47	39.020.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	6	3.703.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
43	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**37.407.100,00**		**37.415.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	37.407.100,00		37.415.000,00		-	0	-

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	1.870.000,00	10	1.870.000,00		-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	31.620.000,00	10	31.620.000,00		-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	3.917.100,00	10	3.925.000,00		-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
44	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**32.700.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		32.700.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					15	3.267.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					10	25.356.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					10	4.077.000,00	0	-		

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
45	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**26.180.000,00**		**26.180.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				26.180.000,00		26.180.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			60	2.570.300,00	60	2.570.300,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			594	22.004.800,00	800	22.004.800,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			1113	1.604.900,00	500	1.604.900,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
46	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**44.505.000,00**		**44.505.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				39.555.000,00		39.555.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			25	6.000.000,00	25	6.000.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			120	30.055.000,00	120	30.055.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			25	3.500.000,00	25	3.500.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				4.950.000,00		4.950.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			10	4.950.000,00	10	4.950.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
47	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**19.415.000,00**		**19.415.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	17.305.000,00		17.305.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			8	2.057.000,00	8	2.057.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			52	14.075.000,00	52	14.075.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			10	1.173.000,00	10	1.173.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	2.110.000,00		2.110.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			3	2.110.000,00	3	2.110.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
48	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**-**		**19.800.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	-		19.800.000,00		-	0	-

	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	7	3.279.200,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	40	15.680.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	2	840.800,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
49	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**18.525.000,00**		**18.525.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				18.525.000,00		18.525.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	1.383.000,00	10	1.383.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			40	15.321.000,00	40	15.321.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	1.821.000,00	4	1.821.000,00	0	-		

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
50	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**13.680.000,00**	**0**	**13.680.000,00**		**13.680.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*		12.260.000,00	0	12.260.000,00		12.260.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			7	976.000,00	7	976.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			49	9.724.000,00	49	9.724.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			5	1.560.000,00	5	1.560.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*		1.420.000,00	0	1.420.000,00		1.420.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			2	1.420.000,00	2	1.420.000,00	0	-		

Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
51	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**3,00**		**14.060.000,00**		**-**	**0**	
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				3,00		14.060.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	3,00	12	1.560.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			0	-	824	11.600.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			0	-	9340	900.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
52	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**27.405.000,00**		**27.405.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)			0						0	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	26.715.000,00		26.715.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			9	2.012.000,00	9	2.012.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			63	21.261.000,00	63	21.261.000,00	0	-		
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	3.442.000,00	4	3.442.000,00	0	-		
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*			0	690.000,00		690.000,00		-	0	-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			1	690.000,00	1	690.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
53	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**		**-**		**17.200.000,00**		**-**	**0**	
			Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)									0	

	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*				-		17.200.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*						1.773.000,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*						13.690.000,00	0	-			
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*						1.737.000,00	0	-			
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)*				-		-		-	0		-
	0.00.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*						-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
54	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***		**-**	**0**	**13.500.000,00**		**13.500.000,00**		**-**	**0**		
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			0	13.500.000,00		13.500.000,00		-	0		-
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			44	12.250.000,00	44	12.250.000,00	0	-			

	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	0	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													
55	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun (%)***		**-**		**-**		**500.000.000,00**		**64.407.000,00**	**0**	
			Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun (%)									0	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun (%)*				-		250.000.000,00		62.457.000,00	0	-
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*						250.000.000,00		62.457.000,00		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)					2500		500			
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun (%)*				-		250.000.000,00		1.950.000,00	0	-
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*						250.000.000,00		1.950.000,00		

			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)					2000		50			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													
Predikat Kinerja													

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tulungagung
Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENDIDIKAN							970.865.185.948,00	970.518.281.065,74	955.192.222.605,39							1.004.329.289.134,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							970.865.185.948,00	970.518.281.065,74	955.192.222.605,39							1.004.329.289.134,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							970.865.185.948,00	970.518.281.065,74	955.192.222.605,39							1.004.329.289.134,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	901.110.274.948,00	806.704.317.868,74	757.708.871.591,39							784.139.588.710,00	
	1	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100%	100%	550.000.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00			-	-	Kab. Tulungagung		156.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.50.000.000,00	1.50.000.000,00	94.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			53.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	136.000.000,00	165.871.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			213.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100%	100%	785.105.753.148,00	790.879.258.665,74	790.879.258.665,74			-	-	Kab. Tulungagung		784.974.129.064,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6500 Orang/Bulan	6500 Orang/Bulan	784.860.073.148,00	790.464.798.665,74	745.770.706.901,39	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Non Pajak-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-			784.640.120.064,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	215.480.000,00	217.310.000,00	217.310.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			247.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.1.200.000,00	7.200.000,00	12.480.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0 6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	-			-	7 Dokumen	524.811.800,00	524.811.800,00	524.811.800,00			-	-	Kab. Tulungagung		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	203.000.000,00	203.000.000,00	58.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			188.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows

1	01	01	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1000 Orang	1000 Orang	211.812.000,00	211.812.000,00	442.481.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.105.500,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Lembaga Pendidikan Dasar		2.229.158.650,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	009	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.298.000,00	22.290.000,00	50.000.100,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			58.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	009	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

Activate Windows

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	281.008.400,00	558.512.500,00	371.609.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			395.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	109.800.600,00	109.800.600,00	78.811.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			95.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	225.750.000,00	225.750.000,00	167.010.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	-			592.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

1	01	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	228.607.000,00	211.373.500,00	135.837.500,00	Kab. Tulungagung Tulungagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempromosikan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prasasti olahraga, kesetaraan gender serta pemajuan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	-			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			Undefined Undefined	7 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00			-	-	Masing-masing bidang pembinaan		560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	000	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100%	100%	12.456.178.400,00	12.541.178.400,00	12.541.178.400,00			-	Peningkatan pelayanan dasar	Lembaga Pendidikan Dasar		14.982.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	419.599.800,00	503.599.800,00	479.599.800,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	12.025.715.800,00	12.025.715.800,00	12.025.715.800,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			14.530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100%	100%	612.111.900,00	794.991.900,00	794.991.900,00			-	-	Masing-masing bidang pembinaan dan lembaga		794.996.305,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	186.150.000,00	179.010.000,00	179.010.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows

	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Mebel																				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	60 Unit	60.900.000,00	60.900.000,00	72.220.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	3 Unit	43.370.000,00	43.370.000,00	50.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun				100 %	100 %	168.983.912.000,00	162.970.064.000,00	174.329.825.000,00								217.193.700.400,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	-			100 %	100 %	86.128.207.200,00	77.836.165.200,00	77.836.165.200,00			-	-	Lembaga Pendidikan Sekolah		131.688.817.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																				
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	195.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	831.597.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			713.395.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																				
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	386.610.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.217.376.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	2.437.664.000,00	1.257.500.000,00	1.925.468.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			3.655.422.150,00	DINAS PENDIDIKAN

1	01	02	2.0	000	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dak Fisik-Bidang Pendidikan	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	001	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	-	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	001	Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah																			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	001	Pengadaan Mebel Sekolah																			
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	001	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	002	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	003	Pengembangan Kalir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	74.000.000,00	70.000.000,00	74.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	002	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	5.126.000.000,00	5.050.000.000,00	5.150.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				651 Satuan Pendidikan	651 Satuan Pendidikan	62.860.000.000,00	58.881.750.000,00	58.881.750.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dak Non Fisik-	-	-			60.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	003	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			

Activate Windows

						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	005	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																								
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			0.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	008	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				896 Orang	896 Orang	2.210.000.000,00	2.210.000.000,00	2.210.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Penyediaan Infrastruktur TIK																								
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				10 Paket	10 Paket	1.865.000.000,00	1.645.000.000,00	2.084.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Penyediaan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																								
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Pembangunan Ruang Kelas Baru																								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				20 Unit	30 Unit	1.078.868.200,00	1.067.708.200,00	1.067.708.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	009	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				031 Satuan Pendidikan	031 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	005	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah																								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				30 Ruang	30 Ruang	3.367.797.000,00	1.620.798.000,00	2.018.798.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	006	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				54804 Peserta Didik	54804 Peserta Didik	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	005	Pengadaan Alat Praktik dan Penga Peserta Didik																								
						Jumlah Alat Praktik dan Penga Peserta Didik yang Tersedia				40 Paket	40 Paket	0,00	981.449.000,00	981.449.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	DAU yang Ditentukan	-	-			0.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows

1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun				100 %	100 %	50.476.058.000,00	51.175.434.000,00	51.175.434.000,00			-	-	Lembaga Pendidikan Sekolah		52.796.882.800,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	000	Pembangunan Laboratorium																									
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.308.691.700,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	001	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																									
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	9 Unit	609.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dikl Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			1.484.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	001	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah																									
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				37 Ruang	3 Ruang	2.451.109.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dikl Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			5.773.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	001	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																									
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				2 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			107.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	001	Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah																									
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				8 Ruang	8 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			470.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	001	Rehabilitasi Sedang Berat Laboratorium																									
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				8 Ruang	3 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			599.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	003	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																									
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				15 Unit	15 Unit	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dikl Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			997.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	002	Pengadaan Mebel Sekolah																									
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			596.311.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	005	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																									
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				23750 Peserta Didik	23750 Peserta Didik	5.150.000.000,00	5.150.000.000,00	5.150.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.189.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	009	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																									

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

						Jumlah siswa yang mengikuti lomba kompetisi akademik dan non akademik				750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	680.000.000,00	767.400.000,00	715.173.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			836.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Pengembangan Kurr Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1230 Orang	100 Orang	98.000.000,00	91.800.000,00	97.110.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			239.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	1.355.000.000,00	1.550.000.000,00	2.050.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			2.842.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	004	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	40.421.780.000,00	41.918.200.000,00	41.918.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOP-BOS Reguler	-	-			124.258.148.800,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	006	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				27.127 Satuan Pendidikan	104 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			59.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	005	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ditambah				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			230.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	0 Ruang	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik Bidang Pendidikan	-	-			241.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	006	Pengadaan Alat Praktik dan Perga Peserta Didik																		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	546.000.000,00	456.124.000,00	466.224.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan	-	-			950.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0	006	Penyediaan infrastruktur TIK																		
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkata n pelayanan			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	01	2.02		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia 5-6 Tahun	-			100 %	100 %	2.430.916.800,00	26.710.654.800,00	26.710.654.800,00			-	-	Lembaga Pendidikan Anak		2.718.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	7 Unit	1.353.654.800,00	653.654.800,00	654.654.800,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik Bidang Pendidikan	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	000	Pengadaan Mebel PAUD																	
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	0 Paket	58.333.000,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	Peningkatan Kapasitas			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	000	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																	
							Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Bantuan PAUD	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	001	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20000 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	001	Pengembangan Sdm Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	584 Orang	401.600.000,00	401.600.000,00	401.600.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	001	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				992 Satuan Pendidikan	991 Satuan Pendidikan	5.062.500.000,00	5.062.500.000,00	5.627.500.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	001	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				998 Satuan Pendidikan	998 Satuan Pendidikan	16.023.200.000,00	17.800.000.000,00	17.800.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1000 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	005	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows

1	01	00	2.0	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	106.600.000,00	4.020.106.000,00	4.020.106.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	004	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																										
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				8000 Satuan Pendidikan	8000 Satuan Pendidikan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	004	Rehabilitasi sedang berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang berat				5 Ruang	3 Ruang	888.444.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan	-	-			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	005	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	Peningkatan pelayanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0 4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia 7-21 tahun	-			100%	0,00%	5.128.480.000,00	6.240.820.000,00	6.240.820.000,00			-	-	Lembaga Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetar		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	001	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																										
						Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	001	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																										
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				35 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	00	2.0	001	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																										
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	5.088.480.000,00	6.240.820.000,00	6.240.820.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan Semua Ke/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.0	001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	004	Penyelenggaraan Proses Belajar bag. Peserta Didik																		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				21846 Peserta Didik	21501 Peserta Didik	1.890.000.000,00	1.807.400.000,00	10.225.900.000,00	Kab. Tulungagung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.0	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	Peningkatan pelayanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	29			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang dikurasikan				99 %	99 %	150.000.000,00	153.889.400,00	153.889.400,00							750.000.000,00	
	1	01	29	2.0 1.		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan	-			100 % 1000	100 % 1000	175.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan pelayanan dasar	Lembaga Pendidikan Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	29	2.0	006	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				1 Orang	0 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung Boyolangu, Bali	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	29	2.0 2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal yang dirumuskan	-			100 %	100 %	175.000.000,00	153.889.400,00	153.889.400,00			-	Peningkatan pelayanan dasar	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	29	2.0	009	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	153.889.400,00	153.889.400,00	Kab. Tulungagung Boyolangu, Bali	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	54			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	759.827.034,00							1.150.000.000,00	
	1	01	54	2.0 1.		Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bag. Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Distribusi GTK	-			100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang	Lembaga Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	04	2.0	000	Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Bal	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang pendidika			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.0	000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bgi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	859.857.094,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Bal	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang pendidika			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase jenis izin pendidikan yang diterbitkan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1	01	05	2.0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Dokumen Penerbitan Perizinan	-				1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan pelayanan	Lembaga Pendidikan Dasar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Bal	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.0 2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase jenis izin pendidikan yang diterbitkan	-			100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan pelayanan dasar	Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal/Kesetar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Bal	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan bahasa dan sastra				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							400.000.000,00	
	1	01	06	2.0 1		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penyelenggaranya Oleh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	-			100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan pelayanan dasar	Lembaga Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	06	2.0	000	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	1 Bahasa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						SMPN 1 Tulungagung								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
7	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Tulungagung		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.964.000,00	6.964.000,00	6.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.546.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.441.200,00	39.441.200,00	39.441.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			43.385.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	687.000,00	687.000,00	687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			825.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Tulungagung		791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.471.500,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Tulungagung							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
8	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Tulungagung			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	5.045.400,00	5.045.400,00	5.045.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.549.940,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	37.139.900,00	37.139.900,00	37.139.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.853.890,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.561.670,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 3 Tulunggagung									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
9	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39									784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 3 Tulunggagung		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				77 Paket	77 Paket	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				627 Paket	627 Paket	35.940.000,00	35.940.000,00	35.940.000,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12226 Paket	12226 Paket	9.352.000,00	9.352.000,00	9.352.000,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 4 Tulungagung								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 4 Tulungagung			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		3.368.400,00	3.368.400,00	3.368.400,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Botoran	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.515.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket		28.760.400,00	28.760.400,00	28.760.400,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Botoran	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket		1.951.200,00	1.951.200,00	1.951.200,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Botoran	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.652.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 5 Tulunggagung								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
11	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 5 Tulunggagung			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		2.078.800,00	2.078.800,00	2.078.800,00	Kab. Tulunggagung, Tulunggagung, Kedungpoko	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		26.448.200,00	26.448.200,00	26.448.200,00	Kab. Tulunggagung, Tulunggagung, Kedungpoko	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			29.048.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		3.377.700,00	3.377.700,00	3.377.700,00	Kab. Tulunggagung, Tulunggagung, Kedungpoko	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.707.700,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 6 Tulunggagung									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
12	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 6 Tulunggagung			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	3.988.200,00	3.988.200,00	3.988.200,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.135.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	39.089.300,00	39.089.300,00	39.089.300,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			44.363.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.002.500,00	3.002.500,00	3.002.500,00	Kab. Tulungagung, Tulunggagung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Boyolangu								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
13	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Boyolangu			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				92 Paket	92 Paket		2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.874.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1999 Paket	1999 Paket		25.093.000,00	25.093.000,00	25.093.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			27.602.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1335 Paket	1335 Paket		1.794.500,00	1.794.500,00	1.794.500,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.973.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Boyolangu			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				264 Unit	264 Unit		16.579.500,00	16.579.500,00	16.579.500,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			18.237.450,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Kedungwaru									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
14	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.155.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Kedungwaru		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		4.902.000,00	4.902.000,00	4.902.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		28.838.000,00	28.838.000,00	28.838.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Plandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Plandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Kedungwaru								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
15	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Kedungwaru			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		2.808.800,00	2.808.800,00	2.808.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		15.751.200,00	15.751.200,00	15.751.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		2.248.600,00	2.248.600,00	2.248.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Kedungwaru			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit		1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit		6.216.400,00	6.216.400,00	6.216.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 3 Kedungwaru								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
16	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39										784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 3 Kedungwaru					2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket		854.000,00	854.000,00	854.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			854.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Paket	49 Paket		15.367.800,00	15.367.800,00	15.367.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.367.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket		3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 3 Kedungwaru					791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																						
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit		4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		3.128.200,00	3.128.200,00	3.128.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.128.200,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Ngantru							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
17	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Ngantru			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	3.483.000,00	3.483.000,00	3.483.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.749.020,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	31.277.400,00	31.277.400,00	31.277.400,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			34.991.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.012.600,00	3.012.600,00	3.012.600,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.268.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %	412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Ngantru			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.712.000,00	8.712.000,00	8.712.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.089.160,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 2 Ngantru								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Ngantru			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket		1.638.600,00	1.638.600,00	1.638.600,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Srikaton	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.621.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket		14.882.300,00	14.882.300,00	14.882.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			17.760.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		2.983.700,00	2.983.700,00	2.983.700,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Srikaton	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.963.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Ngantru			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		2.820.400,00	2.820.400,00	2.820.400,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Srikaton	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.212.100,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Ngunut								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
19	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Ngunut			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket		39.040.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Ngunut			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit		2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Ngunut									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
20	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 2 Ngunut		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	957.000,00	957.000,00	957.000,00	Kab. Tulunggagung, Ngunut, Samir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	58.293.000,00	58.293.000,00	58.293.000,00	Kab. Tulunggagung, Ngunut, Samir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	Kab. Tulunggagung, Ngunut, Samir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 3 Ngunut								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
21	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39									784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 3 Ngunut		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket		3.187.600,00	3.187.600,00	3.187.600,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.509.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket		22.904.600,00	22.904.600,00	22.904.600,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			22.905.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket		4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 3 Ngunut		791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Ngunut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.295.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Rejotangan								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
22	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39										784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 %	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	Lembaga Pendidikan SMPN 1 Rejotangan					2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket		1.916.400,00	1.916.400,00	1.916.400,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Rejotangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.108.040,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				62 Paket	62 Paket		27.362.600,00	27.362.600,00	27.362.600,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Rejotangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.098.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket		3.681.000,00	3.681.000,00	3.681.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Rejotangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.049.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-					791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																					
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit		1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Rejotangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.606.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Rejotangan									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00		
23	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00		
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.494.800,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	15.732.000,00	15.732.000,00	15.732.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.915.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.806.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

					SMPN 1 Sumbergempol								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
24	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sumberdadi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket		37.885.000,00	37.885.000,00	37.885.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sumberdadi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket		3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sumberdadi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit		4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sumberdadi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 2 Sumbergempol								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
25	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Junjung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket		20.130.000,00	20.130.000,00	20.130.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Junjung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket		4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Junjung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Kalidawir								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
26	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		3.197.900,00	3.197.900,00	3.197.900,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Kalidawir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.198.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		19.883.300,00	19.883.300,00	19.883.300,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Kalidawir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			19.885.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Kalidawir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit		1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Kalidawir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.686.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		4.299.900,00	4.299.900,00	4.299.900,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Kalidawir	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Kalidawir								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
27	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.665,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.433.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	12.525.000,00	12.525.000,00	12.525.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Banyuurip	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			12.525.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Banyuurip	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 3 Kalidawir								970.863.185.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.825,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.185.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.825,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.185.548,00	970.318.281.063,74	953.192.222.825,39								1.004.329.289.129,00	
28	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket		15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Joho	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Joho	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Pucanglaban								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00		
29	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.665,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00		
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-		2.433.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.488.000,00	16.488.000,00	16.488.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	

						SWPK 2 Pusangjaban								970.865.083.548,00	970.816.261.063,14	968.149.221.601,39								1.004.329.289.129,00	
	2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.865.083.548,00	970.816.261.063,14	968.149.221.601,39								1.004.329.289.129,00	
	2.	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.865.083.548,00	970.816.261.063,14	968.149.221.601,39								1.004.329.289.129,00	
30	2.	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100%	801.129.271.548,00	806.794.927.663,14	797.798.871.191,39								784.535.588.724,00	
	2.	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100%	2.202.405.300,00	2.250.075.600,00	2.250.075.600,00			-	Peningkatan pelayanan dasar perkualitas tidang pendidikan dan kesehatan	-			2.423.158.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.	01	01	2.06	0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Pusangjaban, Pusangjaban	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar perkualitas tidang pendidikan dan kesehatan				12.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	-			-	1 Dokumen	12.456.178.400,00	12.541.178.400,00	12.541.178.400,00			-	-	-			14.962.085.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.	01	01	2.08	0000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	12.065.000,00	12.065.000,00	12.065.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				12.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Campurdarat								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
31	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		2.843.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.127.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		31.057.000,00	31.057.000,00	31.057.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			34.163.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.904.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 2 Campurdarat									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
32	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %			801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %			2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.529.600,00	5.529.600,00	5.529.600,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.082.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	31.348.100,00	31.348.100,00	31.348.100,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			34.482.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.487.300,00	3.487.300,00	3.487.300,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Pakel									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
33	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	1.521.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00	Kab. Tulungagung, Paket, Pecuk	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.747.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	27.102.700,00	27.102.700,00	27.102.700,00	Kab. Tulungagung, Paket, Pecuk	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			11.710.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00	Kab. Tulungagung, Paket, Pecuk	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.032.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %	412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 bulan Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Paket, Pecuk	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.507.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Paket, Pecuk	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.894.560,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Pakel									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
34	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %			801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %			2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket			1.090.100,00	1.090.100,00	1.090.100,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Gesikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.213.190,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				887 Paket	887 Paket			18.559.000,00	18.559.000,00	18.559.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Gesikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.401.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1026 Paket	1026 Paket			2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.900,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Gesikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.310.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %			412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																					
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit			2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Gesikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.036.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Bandung								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39										1.004.329.289.129,00	
35	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39										784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-					2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket		3.951.700,00	3.951.700,00	3.951.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.391.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket		29.912.600,00	29.912.600,00	29.912.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.803.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		3.675.700,00	3.675.700,00	3.675.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.065.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-					791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																						
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit		7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.124.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit		0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Bandung								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
36	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		1.897.400,00	1.897.400,00	1.897.400,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bantengan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.087.140,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	56 Paket		12.919.300,00	12.919.300,00	12.919.300,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bantengan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			14.211.230,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		2.073.500,00	2.073.500,00	2.073.500,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bantengan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.280.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	594.991.900,00	594.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit		2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bantengan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.321.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit		2.449.800,00	2.449.800,00	2.449.800,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bantengan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.694.780,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 3 Bandung									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
37	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	840.000,00	840.000,00	840.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bulus	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			932.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	57 Paket	15.051.300,00	15.051.300,00	15.051.300,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bulus	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.549.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.678.700,00	1.678.700,00	1.678.700,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bulus	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.853.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %	412.111.900,00	394.981.900,00	394.981.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Bulus	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.036.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Besuki									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
38	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %			801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %			2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket			2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.519.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket			18.056.000,00	18.056.000,00	18.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			19.861.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket			1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.164.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %			412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																					
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.365.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit			3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.339.500,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 2 Besuki								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
39	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39									784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-				2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		1.275.800,00	1.275.800,00	1.275.800,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Besole	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				1.548.290,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket		12.329.300,00	12.329.300,00	12.329.300,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Besole	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				14.895.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		1.514.200,00	1.514.200,00	1.514.200,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Besole	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				1.839.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-				791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																						
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Besole	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				1.716.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit		2.380.700,00	2.380.700,00	2.380.700,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Besole	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				2.891.405,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Tanggunggunung									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
40	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %			801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %			2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Tanggunggunung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.404.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.828.100,00	19.828.100,00	19.828.100,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Tanggunggunung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			21.810.910,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.076.900,00	4.076.900,00	4.076.900,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Tanggunggunung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.484.590,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 2 Tanggunggunung							970.865.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							970.865.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							970.865.183.548,00	970.318.281.065,74	933.192.222.625,39									1.004.329.289.129,00	
41	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	601.129.271.548,00	606.794.327.665,74	757.798.871.191,39									784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Tenggarejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.879.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.182.000,00	15.182.000,00	15.182.000,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Tenggarejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.700.200,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 1 Kaumon								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
	1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
	1.	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
42	1.	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	601.129.371.548,00	606.794.327.863,74	757.798.871.191,34											784.135.568.729,00		
	1.	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.200.405.300,00	2.250.075.900,00	2.250.075.900,00			-	-	-					2.433.358.480,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan komponen instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	2.917.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	Kab. Tulungagung, Kaumon, Balerejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.208.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				67 Paket	67 Paket	54.020.000,00	54.020.000,00	54.020.000,00	Kab. Tulungagung, Kaumon, Balerejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.140.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.705.000,00	9.705.000,00	9.705.000,00	Kab. Tulungagung, Kaumon, Balerejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			8.073.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
						SMPN 2 Kaumon								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
	1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
	1.	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.865.189.548,00	970.518.281.063,74	969.193.222.825,59											1.004.329.289.129,00		
43	1.	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	601.129.371.548,00	606.794.327.863,74	757.798.871.191,34											784.135.568.729,00		
	1.	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.200.405.300,00	2.250.075.900,00	2.250.075.900,00			-	-	-					2.433.358.480,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan komponen instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.067.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	51.630.000,00	51.630.000,00	51.630.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			84.782.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.205.000,00	9.205.000,00	9.205.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			43.17.500,00	DINAS PENDIDIKAN	

Activate Windows

						SMPN 1 Gondang								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
44	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket		3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.593.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		25.356.000,00	25.356.000,00	25.356.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			27.891.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		4.077.000,00	4.077.000,00	4.077.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.484.700,00	DINAS PENDIDIKAN
						SMPN 2 Gondang								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
45	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket		2.570.300,00	2.570.300,00	2.570.300,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Dukuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.827.330,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				800 Paket	800 Paket		22.004.800,00	22.004.800,00	22.004.800,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Dukuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			24.205.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	500 Paket		1.604.900,00	1.604.900,00	1.604.900,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Dukuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.765.390,00	DINAS PENDIDIKAN

Activate Windows

					SMPN 1 Karangrejo								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
46	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Sembon	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket		30.055.000,00	30.055.000,00	30.055.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Sembon	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Sembon	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-		-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit		4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Sembon	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Karangrejo								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
47	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket		2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Gedangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.262.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	52 Paket		14.075.000,00	14.075.000,00	14.075.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Gedangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.482.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket		1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Gedangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.290.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit		2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Gedangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.321.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SUB No 1 Pagerwojo								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
48	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	804.218.271.548,00	804.794.327.683,74	737.798.87 1.181,39									784.133.588.735,00	
	1	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.303.408.300,00	2.230.075.800,00	2.230.075.800,00				-	-	-			2.415.238.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.279.200,00	5.279.200,00	5.279.200,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Muyosari	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Pagerwojo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	940.800,00	940.800,00	940.800,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Muyosari	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			461.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						SUB No 2 Pagerwojo								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.865.185.548,00	970.318.281.063,74	939.197.222.825,39									1.004.329.289.129,00	
49	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	804.218.271.548,00	804.794.327.683,74	737.798.87 1.181,39									784.133.588.735,00	
	1	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.303.408.300,00	2.230.075.800,00	2.230.075.800,00				-	-	-			2.415.238.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Kedinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.521.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	15.531.000,00	15.531.000,00	15.531.000,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Kedinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.853.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.821.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00	Kab. Tulungagung Pagerwojo, Kedinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.005.100,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 3 Pagerwojo									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
50	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	976.000,00	976.000,00	976.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.073.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Paket	49 Paket	9.724.000,00	9.724.000,00	9.724.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			10.696.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.716.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %	412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.562.000,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN 4 Pagerwojo								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
51	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				824 Paket	824 Paket		11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			9.428.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9340 Paket	9340 Paket		900.000,00	900.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.108.800,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 1 Sendang								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
52	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket		2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				63 Paket	63 Paket		21.261.000,00	21.261.000,00	21.261.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			25.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		3.442.000,00	3.442.000,00	3.442.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %		412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit		690.000,00	690.000,00	690.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.562.000,00	DINAS PENDIDIKAN

					SMPN 2 Sendang								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39								1.004.329.289.129,00	
53	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39								784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %	2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-			2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Kedoyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			623.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	20 Paket	13.690.000,00	13.690.000,00	13.690.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Kedoyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			12.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Kedoyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.736.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			-	100 %	412.111.900,00	394.991.900,00	394.991.900,00			-	-	-			791.936.205,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Kedoyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.099.500,00	DINAS PENDIDIKAN

						SMPN Satu Atap Sendang								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
54	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %		801.129.271.548,00	806.794.327.663,74	757.798.871.191,39							784.135.588.729,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			-	100 %		2.202.405.300,00	2.230.075.900,00	2.230.075.900,00			-	-	-		2.423.258.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket		12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Geger	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			12.372.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Geger	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.262.500,00	DINAS PENDIDIKAN
						TB2KS								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	
55	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun				-	100 %		168.983.912.000,00	162.970.064.000,00	174.329.825.000,00							217.193.700.400,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	-			-	100 %		86.128.207.200,00	77.836.165.200,00	77.836.165.200,00			-	-	-		131.688.817.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	002	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Kampungdalem	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun	-			-	100 %		53.476.958.000,00	52.173.424.000,00	52.173.424.000,00			-	-	-		82.786.882.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.0	003	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Kampungdalem	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
													JUMLAH	970.863.183.548,00	970.318.281.063,74	933.192.222.625,39							1.004.329.289.129,00	

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini kami sajikan tinjauan secara umum tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang tersusun dalam program-program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang meliputi :

- Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 berisi program - program, dimana dari program - program tersebut berisi kegiatan – kegiatan yang didalamnya ada sub kegiatan - sub kegiatan yang diusulkan di kegiatan tahun 2025.
- Judul kegiatan yang diusulkan bersifat makro sehingga dimungkinkan banyak sub kegiatan – sub kegiatan yang dapat diakomodir dari judul tersebut.

Demikian Rencana Kerja Perubahan yang dapat kami susun semoga menjadikan bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan pendidikan di tahun mendatang

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal , 8 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RAHAJU P. BINTARA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271996031004

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan yang disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritikan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini di masa mendatang. Tak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ANNA SAPTI SARIPAH, SKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681109 199202 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 1
I.3. Maksud dan Tujuan 5
I.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAHUN 2025 8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025 119
BAB IV PENUTUP 309

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung s.d Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel III.1	:	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	126

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota [nama daerah] Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dokumen tersebut memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, serta kebutuhan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan kebijakan dan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sektor kesehatan;
2. Perubahan prioritas pembangunan daerah, termasuk adanya program atau kegiatan baru;
3. Pergeseran atau perubahan target indikator kinerja;
4. Penyesuaian pagu anggaran akibat evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025;
5. Kondisi khusus seperti kebutuhan mendesak lainnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung pencapaian target kinerja pada Dinas Kesehatan secara optimal sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 187);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 49).

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan dengan perkembangan situasi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat di daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam mengarahkan sumber daya, sarana prasarana, dan anggaran agar penanganan isu-isu kesehatan di Kabupaten Tulungagung dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

I.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memuat reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Reviu ini mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2025, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir triwulan I.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung s.d Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)***				**229.494.696.707,00**	**0**	**43.533.270.666,00**	0	18,97	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100		100		0		0		
		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100		25		25		
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan (Dokumen)*	1	1	1	226.492.769.407,00	0	43.331.698.584,00	0	19,13	
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*		21662	1850	226.268.803.627,00	0	43.331.698.584,00	0	19,15	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	1	1	1	223.965.780,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)*	1	1	1	15.000.000,00	1	-	100	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	5	1	4	15.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (%)*	100	100	100	319.409.500,00	100	13.300.500,00	100	4,16	
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		3	6	88.218.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		1	4	11.898.000,00	0	5.949.000,00	0	50,00	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	1	1	1	121.325.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	1	1	1	97.968.000,00	0	7.351.500,00	0	7,50	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia (unit)*	4	6	4	108.784.600,00	0	-	0	-	
0.00.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*	1	0	1	100.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	1	1	1	8.784.600,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia (Dokumen)*	1	1	1	2.289.603.200,00	0	188.271.582,00	0	8,22	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	1	1	1	477.400.000,00	0	73.811.582,00	0	15,46	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	1	1	1.812.203.200,00	0	114.460.000,00	0	6,32	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)*	100	100	100	269.130.000,00	0	-	0	-	
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	2	2	2	267.830.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	15	15	15	1.300.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**62.819.134.567,00**	**0**	**12.587.248.420,00**	**0**	20,04	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM (%)*	73	88,89	72	11.341.767.847,00	0	1.406.664.420,00	0	12,40	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)*	1	0	5	-	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)*	12	34	4	50.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)*	5	27	5	85.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)*	40	252	40	85.037.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)*	2	2	2	11.075.590.847,00	0	1.406.664.420,00	0	12,70	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)*	26060	237024	26060	-	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)*	1	1	1	46.140.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	51.033.803.720,00	0	11.180.584.000,00	0	21,91	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	15141	13174	15100	43.963.000,00	0	160.000,00	0	0,36	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	14452	12471	14413	62.595.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	13857	12407	13727	138.441.220,00	0	160.000,00	0	0,12	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	71014	61668	70822	40.080.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	83682	86396	83456	24.679.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	644355	701338	642620	31.280.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	209059	178450	208496	390.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	303986	280138	303168	52.380.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)*	2021	2116	2015	25.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*	13284	14980	13381	1.302.570.100,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*	20262	19342	18709	325.615.000,00	0	2.620.000,00	0	0,80	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)*	1	1	1	50.000.000,00	0	6.550.000,00	0	13,10	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)*	1	1	1	50.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*	1	1	1	1.328.110.000,00	0	4.160.000,00	0	0,31	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)*	1	1	1	13.050.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*	1	1	1	3.700.922.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)*	1	1	1	177.648.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)*	1	1	1	10.200.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*	1	1	1	74.714.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)*	1781	0	1781	10.240.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*	1	1	1	621.580.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)*	1	1	1	41.783.547.000,00	0	11.160.669.000,00	0	26,71	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)*	1	1	1	1.500.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)*	1	1	1	135.278.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*	1	1	1	289.403.000,00	0	4.955.000,00	0	1,71	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*	1	1	1	6.640.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)*	1	1	1	61.272.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*	1115	1608	2478	55.780.000,00	0	1.310.000,00	0	2,35	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*	1434	1234	4162	80.580.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)*	35	35	1061	60.841.900,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)*	1	1	1	10.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*	1	1	1	75.892.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*	100	100	100	333.463.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*	1	2	1	333.463.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (%)*	100	100	100	110.100.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)*	32	99	32	110.100.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase pemberian ijin praktik tenaga kesehatan (%)***	**66,8**	**66,05**	**66,7**	**1.809.993.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik/izin kerja (%)*	87	73,73	87	19.160.000,00	0	-	0	-	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)*	1	1	1	19.160.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan (%)*	65	100	65	673.155.500,00	0	-	0	-	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)*	1	1	1	15.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)*	713	685	713	520.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)*	1	1	1	138.155.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDMK yang mengikuti pelatihan kompetensi teknis di Lingkup Dinkes (%)*	35	24,42	35	1.117.678.000,00	0	-	0	-	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)*	360	339	360	1.117.678.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan (%)***	**90,5**	**87,93**	**90**	**669.902.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)*	100	91,49	100	136.108.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)*	1	141	1	136.108.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah_Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah_Tangga (%)*	100	100	100	46.690.000,00	0	-	0	-	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)*	1	1	1	46.690.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Penerbitan Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah_Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah_Tangga (%)*	100	87,5	100	164.759.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)*	1	1	1	164.759.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (%)*	100	77	100	23.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*	1	1	1	23.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah_Tangga (%)*	60	55	60	299.345.500,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)*	120	72	120	299.345.500,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**2.225.390.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Upaya Strategi Promosi Kesehatan (%)*	63	65	63	1.880.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)*	1	1	1	1.880.000.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengembangan PHBS (%)*	60	52,75	60	159.800.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)*	1	1	1	159.800.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	185.590.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*	1	1	1	185.590.000,00	0	-	0	-	DINAS KESEHATAN
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***		**0**	**83,5**	**532.350.000,00**	**0**	**95.401.822,00**	0	17,92	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai IKM BLUD (-)*				532.350.000,00	0	95.401.822,00	0	17,92	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				532.350.000,00	0	95.401.822,00	0	17,92	UPT PUSKESMAS BESOLE
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**426.856.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	426.856.500,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		239	242	10.809.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		221	231	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1901	1339	63.300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		242	216	4.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		345	267	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	122.188.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	12.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	25.830.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	63.982.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	121.022.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		242	40	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		345	67	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	2.625.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**6.062.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	6.062.500,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	6.062.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESOLE
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***			**100**	**2.625.000.000,00**	**0**	**279.823.479,00**	0	10,66	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		87,16	80	2.625.000.000,00	0	279.823.479,00	0	10,66	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.625.000.000,00	0	279.823.479,00	0	10,66	UPT PUSKESMAS BANDUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**699.108.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	699.108.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		518	660	17.195.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		466	630	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		7168	3645	79.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		67	584	5.625.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		732	722	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	175.122.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	22.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	25.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	134.087.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	233.629.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		0		-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		0	182	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	6.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**27.855.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	27.855.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1		27.855.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANDUNG
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***			**100**	**1.155.000.000,00**	**0**	**268.106.197,00**	0	23,21	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		95,75	80	1.155.000.000,00	0	268.106.197,00	0	23,21	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.155.000.000,00	0	268.106.197,00	0	23,21	UPT PUSKESMAS PAKEL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**548.762.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	548.762.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		293	433	14.536.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		291	414	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2913	2395	21.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		153	384	5.700.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		319	475	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	181.944.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	12.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	20.905.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	108.325.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	175.251.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		200	71	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1	86	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	7.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAKEL
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***		**0**	**83,5**	**2.058.000.000,00**	**0**	**84.453.538,00**	0	4,10	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100	100	100		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82,75	80	2.058.000.000,00	0	84.453.538,00	0	4,10	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.058.000.000,00	0	84.453.538,00	0	4,10	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**			**571.270.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5			571.270.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		274	311	12.527.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			297	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1719	1717	27.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		262	275	8.718.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		260	342	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	163.088.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	12.600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	23.430.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	122.195.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	186.612.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*			1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		262	51	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*			220	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	14.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.200.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.200.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***			**83,5**	**3.045.000.000,00**	**0**	**484.007.471,00**	0	15,90	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100	100	100		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		94,48	80	3.045.000.000,00	0	484.007.471,00	0	15,90	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				3.045.000.000,00	0	484.007.471,00	0	15,90	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**650.022.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	650.022.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		598	800	14.157.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		611	763	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		8500	4420	48.150.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		699	708	6.375.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1373	951	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	195.536.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	10.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	48.140.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	120.575.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	193.929.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*			1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		703	130	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		703	119	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	12.060.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.200.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.200.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.207.500.000,00**	**0**	**235.338.570,00**	0	19,49	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		78,04	80	1.207.500.000,00	0	235.338.570,00	0	19,49	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.207.500.000,00	0	235.338.570,00	0	19,49	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**522.523.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	522.523.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		265	354	23.628.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		238	338	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2892	1955	45.600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		341	313	4.050.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		494	389	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	146.188.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	11.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	14.660.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	97.150.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	161.227.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		12	58	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		494	98	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	15.785.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	2.384.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.400.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.400.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.575.000.000,00**	**0**	**214.184.731,00**	0	13,60	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		78,61	80	1.575.000.000,00	0	214.184.731,00	0	13,60	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.575.000.000,00	0	214.184.731,00	0	13,60	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**567.469.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	567.469.500,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		469	576	14.046.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		430	550	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		4566	3184	82.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		259	511	5.700.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		631	631	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	180.964.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	15.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	19.950.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	72.917.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	162.607.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		259	95	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		631	159	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	12.285.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**34.133.500,00**	**0**	**-**	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	34.133.500,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	34.133.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***			**100**	**1.218.000.000,00**	**0**	**187.551.770,00**	0	15,40	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82,78	80	1.218.000.000,00	0	187.551.770,00	0	15,40	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.218.000.000,00	0	187.551.770,00	0	15,40	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**632.280.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	632.280.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		444	4552	12.480.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		408	434	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		3909	2513	38.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		210	403	9.225.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*			499	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	150.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	13.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	57.516.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	140.525.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	201.234.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		201	75	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		18	125	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	8.800.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.500.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.260.000.000,00**	**0**	**194.256.365,00**	0	15,42	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		85,26	80	1.260.000.000,00	0	194.256.365,00	0	15,42	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.260.000.000,00	0	194.256.365,00	0	15,42	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**601.460.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	601.460.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		336	351	26.559.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		315	335	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2851	1942	66.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		429	311	9.150.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		413	386	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	169.939.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	11.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	26.120.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	101.866.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	186.245.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		429	58	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		413	97	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	2.830.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.600.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.600.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.176.000.000,00**	**0**	**162.439.580,00**	0	13,81	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		79,4	80	1.176.000.000,00	0	162.439.580,00	0	13,81	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.176.000.000,00	0	162.439.580,00	0	13,81	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**534.801.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	532.401.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		454	518	20.233.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		402	495	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		6306	2865	65.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		592	459	8.700.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		583	568	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	151.640.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	20.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	21.680.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	67.872.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	153.414.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		456	85	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		23	143	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		12	1	4.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		12	1	18.712.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	2.400.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	2.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**2.047.500.000,00**	**0**	**539.545.157,00**	0	26,35	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82,25	80	2.047.500.000,00	0	539.545.157,00	0	26,35	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.047.500.000,00	0	539.545.157,00	0	26,35	UPT PUSKESMAS NGUNUT
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**721.621.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	721.621.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		671	661	10.931.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		668	631	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		10177	3653	22.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		747	585	19.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1360	1036	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	223.329.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	10.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	28.280.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	140.175.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	254.688.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		747	108	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		166	182	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	11.917.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**			**8.800.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90			8.800.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.800.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGUNUT
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.068.997.000,00**	**0**	**172.633.074,00**	0	16,15	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)		0	83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		86	80	1.068.997.000,00	0	172.633.074,00	0	16,15	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.068.997.000,00	0	172.633.074,00	0	16,15	UPT PUSKESMAS BALESONO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**657.660.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	657.660.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		489	485	17.166.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		425	463	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2687	2683	55.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		427	430	5.775.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		582	532	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	178.106.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	14.475.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	29.670.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	129.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	218.368.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		427	80	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		4	134	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	9.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.800.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.800.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.800.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BALESONO
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***			**83,5**	**1.386.000.000,00**	**0**	**179.882.188,00**	0	12,98	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100	100	100		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		87,71	80	1.386.000.000,00	0	179.882.188,00	0	12,98	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.386.000.000,00	0	179.882.188,00	0	12,98	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**666.515.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	666.515.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		558	537	15.683.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		561	513	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		5584	2969	31.425.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		514	475	4.350.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1044	683	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	220.060.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	17.550.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	34.790.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	114.150.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	209.465.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		514	88	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1044	148	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	17.120.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	1.922.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.800.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.800.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.800.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**93,75**	**100**	**1.065.435.000,00**	**0**	**257.399.594,00**	0	24,16	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		18,75	80	1.065.435.000,00	0	257.399.594,00	0	24,16	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.065.435.000,00	0	257.399.594,00	0	24,16	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**78,13**	**23**	**617.163.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	43,75	6,5	617.163.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		367	458	42.128.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		327	437	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		8078	2532	24.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		229	406	8.550.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		651	502	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	177.496.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	16.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	27.725.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	117.450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	201.014.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		229	75	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		651	126	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	1.300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.100.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.100.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.780.800.000,00**	**0**	**226.896.698,00**	0	12,74	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		97,41	80	1.780.800.000,00	0	226.896.698,00	0	12,74	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.780.800.000,00	0	226.896.698,00	0	12,74	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**577.275.000,00**	**0**	**-**		-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	574.875.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		540	536	28.116.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		445	512	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2967	2962	51.600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		471	474	6.600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		850	920	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	162.520.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	17.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	27.640.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	86.260.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	162.554.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		471	88	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		50	148	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	21.330.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	11.005.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	2.400.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	2.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**29.395.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	29.395.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	29.395.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***			**83,5**	**2.181.270.000,00**	**0**	**230.484.095,00**	0	10,57	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100	100	100		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		83	80	2.181.270.000,00	0	230.484.095,00	0	10,57	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.181.270.000,00	0	230.484.095,00	0	10,57	UPT PUSKESMAS BEJI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**731.019.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	731.019.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		630	604	53.797.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		626	577	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		5523	3340	54.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		484	535	4.350.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		992	670	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	201.245.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	14.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	26.410.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	97.125.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	189.828.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*		1	1	7.160.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		51	99	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		633	167	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	45.280.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	37.424.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.100.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.100.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BEJI
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.680.000.000,00**	**0**	**179.718.190,00**	**0**	**10,70**	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82,64	80	1.680.000.000,00	0	179.718.190,00	0	10,70	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.680.000.000,00	0	179.718.190,00	0	10,70	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**631.286.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	631.286.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		480	484	9.417.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			462	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		990	2673	45.280.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		426	429	8.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1001	780	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	204.034.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	19.800.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	33.700.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	89.108.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	212.434.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*		1	1	7.447.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		426	79	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1	133	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	615.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**2.124.084.000,00**	**0**	**278.140.325,00**	0	13,09	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		81,75	80	2.124.084.000,00	0	278.140.325,00	0	13,09	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.124.084.000,00	0	278.140.325,00	0	13,09	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**617.359.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	617.359.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		264	745	16.265.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		90	711	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1351	4120	22.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		640	661	6.450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1251	1276	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	189.399.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	21.750.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	48.460.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	104.861.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	196.274.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		618	122	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1	205	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	10.450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	1.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	97,83	90	7.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)***			**83,5**	**1.452.076.000,00**	**0**	**249.984.145,00**	0	17,22	
		Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)	100	100	100		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		83,25	80	1.452.076.000,00	0	249.984.145,00	0	17,22	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.452.076.000,00	0	249.984.145,00	0	17,22	UPT PUSKESMAS SIMO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**632.840.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	632.840.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		508	520	43.685.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		434	497	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		5182	2875	32.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		489	461	8.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		726	723	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	210.133.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	14.700.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	32.323.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	105.224.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	180.114.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		489	85	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		726	143	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	5.660.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.300.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.300.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SIMO
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***		**100**	**100**	**1.995.000.000,00**	**0**	**423.718.081,00**	0	21,24	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		83,75	80	1.995.000.000,00	0	423.718.081,00	0	21,24	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.995.000.000,00	0	423.718.081,00	0	21,24	UPT PUSKESMAS NGANTRU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**624.519.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	624.519.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		453	450	49.942.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		414	430	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		4963	2489	25.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		434	399	8.550.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		1073	779	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	199.345.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	7.650.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	30.015.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	75.738.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	207.119.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		434	74	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1073	124	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	20.160.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.550.000,00**	**0**	**-**	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.550.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.550.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS NGANTRU
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**735.000.000,00**	**0**	**206.316.422,00**	0	28,07	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		84,75	80	735.000.000,00	0	206.316.422,00	0	28,07	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				735.000.000,00	0	206.316.422,00	0	28,07	UPT PUSKESMAS PUCUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**478.261.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	478.261.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		352	345	21.871.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			329	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2347	1906	19.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		266	305	4.125.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		374	379	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	165.293.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	9.750.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	23.115.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	71.756.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	151.446.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		26	57	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		20	95	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		12	1	9.875.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		12	1	1.530.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**7.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	7.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	7.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PUCUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.575.000.000,00**	**0**	**447.634.665,00**	0	28,42	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		86,5	80	1.575.000.000,00	0	447.634.665,00	0	28,42	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.575.000.000,00	0	447.634.665,00	0	28,42	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**588.820.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	588.820.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		327	320	32.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		302	306	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1887	1770	50.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		347	284	9.375.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		256	352	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	163.316.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	14.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	23.830.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	99.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	153.676.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		26	53	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		13	88	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	18.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	22.873.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**9.000.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	9.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	9.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KARANGREJO
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**798.000.000,00**	**0**	**197.825.389,00**	0	24,79	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		88	80	798.000.000,00	0	197.825.389,00	0	24,79	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				798.000.000,00	0	197.825.389,00	0	24,79	UPT PUSKESMAS JELI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**394.101.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	394.101.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		287	292	37.479.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		241	279	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1638	1616	15.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		256	259	6.075.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		301	322	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	120.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	9.300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	22.570.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	62.487.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	116.690.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		256	48	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		12	81	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	3.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.500.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.500.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS JELI
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**2.415.000.000,00**	**0**	**585.238.348,00**	0	24,23	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		83,98	80	2.415.000.000,00	0	585.238.348,00	0	24,23	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.415.000.000,00	0	585.238.348,00	0	24,23	UPT PUSKESMAS KAUMAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**720.515.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	720.515.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		734	728	20.289.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			695	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			4025	38.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		437	646	8.475.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		415	862	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	184.394.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	16.050.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	28.960.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	129.612.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	276.485.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		386	120	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*			201	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	16.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**4.615.000,00**	**0**	**-**	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	4.615.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	4.615.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS KAUMAN
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**1.785.000.000,00**	**0**	**431.092.381,00**	0	24,15	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82	80	1.785.000.000,00	0	431.092.381,00	0	24,15	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.785.000.000,00	0	431.092.381,00	0	24,15	UPT PUSKESMAS GONDANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**603.667.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	603.667.500,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		407	424	26.421.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		428	405	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2327	2342	27.922.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		346	376	5.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		519	465	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	187.540.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	18.750.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	40.340.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	97.515.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	187.859.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		306	70	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		407	117	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	11.320.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	750.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**36.467.500,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	36.467.500,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	36.467.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS GONDANG
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**976.500.000,00**	**0**	**165.655.594,00**	0	16,96	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		86,5	80	976.500.000,00	0	165.655.594,00	0	16,96	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				976.500.000,00	0	165.655.594,00	0	16,96	UPT PUSKESMAS TIUDAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**662.995.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	662.995.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		298	401	42.182.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		276	383	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		4836	2219	46.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		353	356	15.750.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		458	441	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	183.543.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	20.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	10.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	38.010.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	82.577.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	181.583.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		353	66	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		458	111	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	5.430.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	36.570.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**28.438.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	28.438.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	28.438.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS TIUDAN
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***			**100**	**2.100.000.000,00**	**0**	**350.009.136,00**	0	16,67	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		79,91	80	2.100.000.000,00	0	350.009.136,00	0	16,67	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.100.000.000,00	0	350.009.136,00	0	16,67	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**669.068.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	669.068.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		378	435	17.165.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		343	415	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		3119	2404	88.801.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		385	386	2.325.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		971	477	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	189.313.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		83	1	16.500.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (0)*				36.873.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
		()					0		0	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	130.125.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	180.776.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		385	71	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		23	120	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	5.660.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	1.530.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.216.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.216.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.216.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**2.242.380.000,00**	**0**	**509.749.849,00**	0	22,73	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		90,5	80	2.242.380.000,00	0	509.749.849,00	0	22,73	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				2.242.380.000,00	0	509.749.849,00	0	22,73	UPT PUSKESMAS SENDANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**533.276.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	533.276.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		307	377	29.918.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		292	360	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		2529	2085	17.550.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		163	334	9.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		0	414	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	183.507.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	8.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	29.090.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	70.718.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	177.143.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		12	62	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		18	104	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	7.350.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	600.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**8.285.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.285.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.285.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SENDANG
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**682.500.000,00**	**0**	**143.068.348,00**	0	20,96	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		94,75	80	682.500.000,00	0	143.068.348,00	0	20,96	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				682.500.000,00	0	143.068.348,00	0	20,96	UPT PUSKESMAS DONO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**603.229.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	603.229.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (0)*				81.178.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
		0 (0)		200			0		0	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		178	254	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1993	1467	23.625.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		277	236	5.625.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		364	392	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	172.158.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	9.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	18.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	121.231.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	157.962.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		30	44	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		15	73	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	13.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**2.950.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	2.950.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	2.950.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS DONO
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**745.500.000,00**	**0**	**206.492.787,00**	0	27,70	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		83	80	745.500.000,00	0	206.492.787,00	0	27,70	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				745.500.000,00	0	206.492.787,00	0	27,70	UPT PUSKESMAS BESUKI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**451.619.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	451.619.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		289	287	27.306.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*			274	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		1589	1587	22.380.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		253	255	4.350.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		348	316	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	137.875.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	10.650.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	11.202.500,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	75.900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	157.665.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		253	47	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		1	79	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	3.990.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**			**8.000.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	8.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	8.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BESUKI
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***			**100**	**1.365.000.000,00**	**0**	**313.952.130,00**	0	23,00	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		84,47	80	1.365.000.000,00	0	313.952.130,00	0	23,00	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				1.365.000.000,00	0	313.952.130,00	0	23,00	UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**635.479.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	635.479.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		622	597	49.725.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		621	570	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		4109	3298	15.300.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		534	529	11.400.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		662	653	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	190.287.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	14.850.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	41.910.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	104.332.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	204.075.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		1	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		534	98	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		15	164	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	3.150.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	450.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**6.140.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	6.140.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	6.140.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS BANJAREJO
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik (%)***	100	**100**	**100**	**892.500.000,00**	**0**	**143.746.927,00**	0	16,11	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (-)			83,5		0		0	-	
0.00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*nilai IKM BLUD (-)*		82,25	80	892.500.000,00	0	143.746.927,00	0	16,11	
0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*				892.500.000,00	0	143.746.927,00	0	16,11	UPT PUSKESMAS SEMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	1	1		0		0	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**445.883.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	445.883.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		284	446	31.100.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		207	426	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		6971	2465	19.205.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		459	396	10.125.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*		481	507	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*		1	1	119.406.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*		1	1	17.250.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		1	1	21.150.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*		1	1	66.543.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		1	1	143.989.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*		1	1	15.015.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		36	73	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		18	123	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)*		1	1	1.200.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)*		1	1	900.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyajian/updating data dan informasi (%)*		0	100	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		0	1	-	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)***	**94,5**	**95,65**	**94,3**	**10.000.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengembangan UKBM (%)*	90	95,8	90	10.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		1	1	10.000.000,00	0	-	0	-	UPT PUSKESMAS SEMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (Renja s/d Tahun lalu)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Realisasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9
			K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar (%)***	**25**	**93,75**	**23**	**120.000.000,00**	**0**	**-**	0	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik (%)*	6,5	18,75	6,5	120.000.000,00	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*		1	1	120.000.000,00	0	-	0	-	UPTD LABKESDA

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi terhadap capaian Renja Dinas Kesehatan hingga Triwulan I Tahun 2025 menjelaskan untuk capaian realisasi keuangan adalah 17,72%, sedangkan capaian kinerja rata-rata masih tercantum 0, karena indikator yang ada pada dokumen renja Dinas Kesehatan merupakan indikator dengan perhitungan yang bersifat positif yang dapat diukur pada Triwulan ke 4 dengan selesainya laporan, terutama laporan PKP. Dengan melihat penyerapan keuangan yang telah mencapai 17,72% mengindikasikan bahwa walaupun capaian kinerja tercantum 0 pada rata-rata indikator program, kegiatan, sub kegiatan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja sedang dilaksanakan / telah terlaksana namun capaian kinerja belum dapat dilaporkan sampai dengan Triwulan I. Selain itu pada triwulan I dengan persentase capaian keuangan yang masih berada dibawah 25%, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan bahkan ada yang mengalami perubahan dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat, terutama pada kegiatan yang bersumber dana Pemerintah Pusat, serta terdapat kebijakan efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu diperlu perubahan rencana kerja guna menyesuiakan peraturan yang mengikat dan percepatan pencapaian hasil kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil perumusan program dan kegiatan, pada tahun 2025 Dinas Kesehatan merencanakan lima program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
11. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota
12. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
13. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
14. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
15. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
16. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
17. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk

Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

18. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain JasaBoga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
19. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
20. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
21. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23. Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Mebel
9. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
16. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
17. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
19. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
22. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
39. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
40. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan TradisionalLainnya
41. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
43. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
44. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
45. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
46. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
47. Operasional Pelayanan Puskesmas
48. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
49. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan PemberianObat Massal)
50. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
51. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
52. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
53. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
54. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
55. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
56. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
57. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
58. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

59. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
60. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
61. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
62. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
64. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
65. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
66. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
67. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
68. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
69. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

70. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KESEHATAN				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	231.280.318.532,00	220.023.028.623,00	-11.257.289.909,00		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1850 Orang /bulan	1850 Orang /bulan	231.056.352.752,00	219.780.232.843,00	-11.276.119.909,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	223.965.780,00	242.795.780,00	18.830.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0	-15.000.000,00		
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100 %	100 %	319.409.500,00	220.611.000,00	-98.798.500,00		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	88.218.500,00	88.218.500,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.898.000,00	8.632.500,00	-3.265.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	121.325.000,00	57.500.000,00	-63.825.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	97.968.000,00	66.260.000,00	-31.708.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	4 unit	1 unit	108.784.600,00	8.784.600,00	-100.000.000,00		
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0	-100.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8.784.600,00	8.784.600,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	2.279.603.200,00	2.242.803.200,00	-36.800.000,00		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	467.400.000,00	430.600.000,00	-36.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.812.203.200,00	1.812.203.200,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	269.130.000,00	347.474.220,00	78.344.220,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	6 Unit	267.830.000,00	282.940.000,00	15.110.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	69 Unit	1.300.000,00	64.534.220,00	63.234.220,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM	72 %	72 %	11.608.782.059,00	18.344.619.967,00	6.735.837.908,00		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	0 Unit	0	0	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	0 Unit	1.519.934.200,00	0	-1.519.934.200,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	15 Unit	0	4.435.465.200,00	4.435.465.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	3.375.621.779,00	50.000.000,00	-3.325.621.779,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	40 Unit	91.627.000,00	43.410.000,00	-48.217.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	2 Paket	2 Paket	6.436.599.080,00	13.458.004.767,00	7.021.405.687,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Minuman di Fasilitas Kesehatan	Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	26060 Keluarga	26060 Keluarga	50.000.000,00	226.600.000,00	176.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	46.140.000,00	-3.860.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15100 Orang	15100 Orang	150.000.000,00	43.963.000,00	-106.037.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	14413 Orang	14413 Orang	200.000.000,00	62.595.000,00	-137.405.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13727 Orang	13727 Orang	141.001.220,00	32.440.000,00	-108.561.220,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70822 Orang	70822 Orang	100.000.000,00	40.080.000,00	-59.920.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83456 Orang	83456 Orang	35.000.000,00	24.679.500,00	-10.320.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	642620 Orang	642620 Orang	35.000.000,00	31.280.000,00	-3.720.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208496 Orang	208496 Orang	390.000.000,00	762.000.000,00	372.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	303168 Orang	303168 Orang	25.000.000,00	52.380.000,00	27.380.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2015 Orang	2015 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13381 Orang	13381 Orang	1.561.576.800,00	40.993.300,00	-1.520.583.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18709 Orang	18709 Orang	480.795.000,00	44.820.000,00	-435.975.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	123.840.000,00	50.000.000,00	-73.840.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	117.140.000,00	50.000.000,00	-67.140.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.910.000,00	1.298.200.000,00	-517.710.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	59.198.800,00	44.198.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.821.980.000,00	2.546.442.000,00	-1.275.538.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	227.648.500,00	158.760.200,00	-68.888.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.200.000,00	-14.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	74.714.000,00	68.537.000,00	-6.177.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1781 Orang	0 Orang	10.240.000,00	0	-10.240.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	695.650.500,00	198.010.000,00	-497.640.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	36.928.250.000,00	46.727.953.197,00	9.799.703.197,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	59.051.300,00	57.551.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	135.278.000,00	-14.722.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	442.190.000,00	615.479.000,00	173.289.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	6.640.000,00	6.000.000,00	-640.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	131.112.000,00	61.272.500,00	-69.839.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2478 Orang	2478 Orang	250.000.000,00	55.780.000,00	-194.220.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4162 Orang	4162 Orang	100.000.000,00	80.580.000,00	-19.420.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan	1061 Orang	1061 Orang	85.841.900,00	25.000.000,00	-60.841.900,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan malaria						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan	50.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	75.892.500,00	977.148.700,00	901.256.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	491.114.000,00	473.463.000,00	-17.651.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 %	100 %	480.000.000,00	110.100.000,00	-369.900.000,00		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	32 Unit	32 Unit	480.000.000,00	110.100.000,00	-369.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan kesehatan							
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase pemberian ijin praktik tenaga kesehatan**	**66,7 %**	**66,7 %**	**1.930.693.500,00**	**4.271.558.000,00**	**520.556.500,00**		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik/izin kerja	87 %	87 %	30.000.000,00	19.160.000,00	-10.840.000,00		
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	19.160.000,00	-10.840.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan	65 %	65 %	673.155.500,00	3.209.206.000,00	2.536.050.500,00		
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	713 Orang	713 Orang	520.000.000,00	3.115.588.000,00	2.595.588.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	138.155.500,00	78.618.000,00	-59.537.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang mengikuti pelatihan kompetensi teknis di Lingkup Dinkes	35 %	35 %	1.227.538.000,00	1.043.192.000,00	-184.346.000,00		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	360 Orang	360 Orang	1.227.538.000,00	1.043.192.000,00	-184.346.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan**	**90 %**	**90 %**	**865.344.000,00**	**669.902.500,00**	**224.156.000,00**		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	Persentase perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	100 %	100 %	133.730.000,00	136.108.000,00	2.378.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	133.730.000,00	136.108.000,00	2.378.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100 %	100 %	50.000.000,00	46.690.000,00	-3.310.000,00		
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	46.690.000,00	-3.310.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	275.783.500,00	164.759.000,00	-111.024.500,00		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	275.783.500,00	164.759.000,00	-111.024.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	100 %	25.000.000,00	23.000.000,00	-2.000.000,00		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	60 %	60 %	380.830.500,00	299.345.500,00	-81.485.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	120 Unit	120 Unit	380.830.500,00	299.345.500,00	-81.485.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Upaya Strategi Promosi Kesehatan	63 %	63 %	1.880.000.000,00	3.799.000.000,00	1.919.000.000,00		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.880.000.000,00	3.799.000.000,00	1.919.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan PHBS	60 %	60 %	229.900.000,00	149.900.000,00	-80.000.000,00		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	229.900.000,00	149.900.000,00	-80.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	249.090.000,00	163.882.000,00	-85.208.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BESOLE				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 -**	**83,5 -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM BLUD	-	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	532.350.000,00	553.517.591,17	21.167.591,17	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242 Orang	242 Orang	19.129.000,00	22.200.900,00	3.071.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	231 Orang	0 Orang	7.450.000,00	0	-7.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1339 Orang	1339 Orang	78.300.000,00	19.950.000,00	-58.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang	0	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang	216 Orang	4.500.000,00	11.252.400,00	6.752.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	137.188.000,00	118.019.000,00	-19.169.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	1 Dokumen	0	5.850.000,00	5.850.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Kerja dan Olahraga						Besuki, Semua Kel/Desa	Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	6.150.000,00	-8.850.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.830.000,00	15.585.000,00	-10.245.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	864 Orang	0	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	78.982.500,00	50.066.700,00	-28.915.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	131.022.000,00	129.091.000,00	-1.931.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	1 Laporan	0 Laporan	75.000,00	0	-75.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Pemberian Obat Massal)							
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0	-9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.625.000,00	3.612.000,00	987.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	20.700.000,00	470.100,00	-20.229.900,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	26.943.900,00	26.943.900,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.062.500,00	2.700.000,00	-21.362.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BANDUNG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.625.000.000,00	2.718.708.872,84	93.708.872,84	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	660 Orang	660 Orang	29.492.000,00	41.401.800,00	11.909.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	630 Orang	0 Orang	4.100.000,00	0	-4.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3645 Orang	3645 Orang	94.200.000,00	35.251.200,00	-58.948.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	93 Orang	0	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	584 Orang	584 Orang	5.625.000,00	9.528.150,00	3.903.150,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	722 Orang	0 Orang	5.400.000,00	0	-5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	220.272.000,00	213.472.000,00	-6.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.400.000,00	15.600.000,00	-16.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.250.000,00	13.874.500,00	-21.375.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2344 Orang	0	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	134.087.000,00	101.340.350,00	-32.746.650,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	233.629.000,00	214.468.866,00	-19.160.134,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	11.250.000,00	0	-11.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	182 Orang	0 Orang	2.250.000,00	0	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	8.911.000,00	2.911.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	79.200.000,00	525.000,00	-78.675.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	39.008.000,00	39.008.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	1 Dokumen	27.855.000,00	3.809.000,00	-24.046.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS PAKEL				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemerintahan daerah							
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.155.000.000,00	1.511.323.977,29	356.323.977,29	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	433 Orang	433 Orang	14.536.000,00	32.950.000,00	18.414.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414 Orang	0 Orang	17.380.000,00	0	-17.380.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2395 Orang	2395 Orang	112.500.000,00	17.850.000,00	-94.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	61 Orang	0	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	384 Orang	384 Orang	5.700.000,00	12.350.000,00	6.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	475 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0	-3.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	201.003.000,00	159.921.000,00	-41.082.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	12.150.000,00	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.905.000,00	18.096.222,00	-2.808.778,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1520 Orang	0	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	123.325.500,00	75.678.778,00	-47.646.722,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	190.251.000,00	174.256.417,00	-15.994.583,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0	-6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86 Orang	0 Orang	2.250.000,00	0	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.305.000,00	-3.195.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	17.700.000,00	225.000,00	-17.475.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	19.890.000,00	19.890.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	38.227.500,00	5.238.000,00	-32.989.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BANGUNJAYA				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Fasyankes**	**83,5 100 - %**	**83,5 100 - %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik							
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.058.000.000,00	1.860.059.508,88	-197.940.491,12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**-**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	-	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Orang	311 Orang	12.527.000,00	32.802.000,00	20.275.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297 Orang	0 Orang	18.440.000,00	0	-18.440.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1717 Orang	1717 Orang	102.150.000,00	31.658.000,00	-70.492.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	44 Orang	0	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	275 Orang	275 Orang	8.718.000,00	10.925.000,00	2.207.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	342 Orang	0 Orang	5.700.000,00	0	-5.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	193.088.000,00	165.802.000,00	-27.286.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	8.550.000,00	8.550.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.950.000,00	7.350.000,00	-9.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.430.000,00	16.095.000,00	-7.335.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1113 Orang	0	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	122.195.000,00	93.274.066,00	-28.920.934,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	187.281.000,00	171.294.531,00	-15.986.469,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	375.000,00	0	-375.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang	0 Orang	9.750.000,00	0	-9.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	220 Orang	0 Orang	600.000,00	0	-600.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	7.600.000,00	-6.800.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	28.620.000,00	450.000,00	-28.170.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	17.500.934,00	17.500.934,00	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pakel, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	4.405.000,00	-30.195.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS CAMPURDARAT				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Fasyankes**	**83,5 100 - %**	**83,5 100 - %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik							
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.045.000.000,00	2.155.893.842,18	-889.106.157,82	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	14.157.000,00	36.900.000,00	22.743.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	763 Orang	0 Orang	16.270.000,00	0	-16.270.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4420 Orang	4420 Orang	92.700.000,00	41.850.000,00	-50.850.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	112 Orang	0	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	708 Orang	708 Orang	6.375.000,00	22.525.900,00	16.150.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0	-6.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	210.536.000,00	177.551.000,00	-32.985.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.555.000,00	7.555.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	6.750.000,00	-10.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.140.000,00	5.396.000,00	-42.744.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2824 Orang	0	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	130.575.000,00	98.243.600,00	-32.331.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	209.378.000,00	207.521.784,00	-1.856.216,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	130 Orang	0 Orang	8.250.000,00	0	-8.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119 Orang	0 Orang	7.200.000,00	0	-7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.060.000,00	9.450.000,00	-2.610.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.560.000,00	390.000,00	-34.170.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	30.538.500,00	30.538.500,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	27.257.000,00	7.800.000,00	-19.457.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.207.500.000,00	1.409.698.244,98	202.198.244,98	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	23.628.000,00	19.250.000,00	-4.378.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 Orang	0 Orang	10.305.000,00	0	-10.305.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	1955 Orang	1955 Orang	45.600.000,00	27.300.000,00	-18.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	51 Orang	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	313 Orang	313 Orang	4.050.000,00	9.625.000,00	5.575.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	389 Orang	0 Orang	4.200.000,00	0	-4.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	146.188.000,00	145.913.000,00	-275.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.240.000,00	7.240.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.850.000,00	9.600.000,00	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Lingkungan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.660.000,00	16.458.000,00	1.798.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1268 Orang	0	900.000,00	900.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	97.150.500,00	67.412.000,00	-29.738.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	161.227.000,00	167.959.308,00	6.732.308,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	58 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0	-6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan sesuai standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 Orang	0 Orang	3.600.000,00	0	-3.600.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	600.000,00	600.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	15.785.000,00	11.550.000,00	-4.235.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	45.180.000,00	1.170.000,00	-44.010.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	25.025.000,00	25.025.000,00	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ta nggunggunung, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.082.500,00	6.955.000,00	-18.127.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS KALIDAWIR				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 100 - %**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.575.000.000,00	2.211.950.830,59	636.950.830,59	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	576 Orang	576 Orang	14.046.000,00	24.750.000,00	10.704.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	0 Orang	8.200.000,00	0	-8.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3184 Orang	3184 Orang	82.500.000,00	38.850.000,00	-43.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	82 Orang	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	511 Orang	511 Orang	5.700.000,00	17.875.000,00	12.175.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	631 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0	-6.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	180.964.000,00	182.056.000,00	1.092.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.900.000,00	14.100.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	12.512.000,00	-7.438.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2052 Orang	0	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	72.917.500,00	75.722.000,00	2.804.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	162.607.000,00	179.458.134,00	16.851.134,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	600.000,00	0	-600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang	0 Orang	18.000.000,00	0	-18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	159 Orang	0 Orang	10.050.000,00	0	-10.050.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.285.000,00	1.260.500,00	-11.024.500,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	33.960.000,00	229.500,00	-33.730.500,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		upaya kesehatan ibu dan anak						Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	33.475.000,00	33.475.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	43.722.500,00	5.005.000,00	-38.717.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS TUNGGANGRI				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DENGAN PELAYANAN DASAR								
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.218.000.000,00	982.210.468,44	-235.789.531,56	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	4552 Orang	4552 Orang	12.480.000,00	32.802.000,00	20.322.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	0 Orang	12.075.000,00	0	-12.075.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2513 Orang	2513 Orang	99.300.000,00	29.403.200,00	-69.896.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	65 Orang	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	403 Orang	403 Orang	9.225.000,00	11.550.000,00	2.325.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	499 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	215.961.000,00	171.634.000,00	-44.327.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.050.000,00	6.000.000,00	-7.050.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	57.516.000,00	21.114.000,00	-36.402.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1624 Orang	0	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	150.525.000,00	75.143.900,00	-75.381.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	210.093.000,00	221.210.825,00	11.117.825,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	0 Orang	9.150.000,00	0	-9.150.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	125 Orang	0 Orang	1.875.000,00	0	-1.875.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	16.442.800,00	7.642.800,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.820.000,00	228.000,00	-29.592.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		upaya kesehatan ibu dan anak						Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	46.342.100,00	46.342.100,00	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	34.715.000,00	6.643.000,00	-28.072.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DENGAN PELAYANAN DASAR								
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 100 - %**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.260.000.000,00	1.639.057.364,28	379.057.364,28	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	351 Orang	351 Orang	26.559.000,00	35.950.000,00	9.391.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	335 Orang	0 Orang	6.350.000,00	0	-6.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1942 Orang	1942 Orang	113.400.000,00	38.850.000,00	-74.550.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	51 Orang	0	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang	311 Orang	9.150.000,00	9.175.000,00	25.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	386 Orang	0 Orang	7.800.000,00	0	-7.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	189.939.000,00	160.064.000,00	-29.875.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.125.000,00	7.125.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.850.000,00	11.850.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.120.000,00	15.421.500,00	-10.698.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1276 Orang	0	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	111.866.500,00	87.692.500,00	-24.174.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	200.053.000,00	225.388.545,00	25.335.545,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	1.350.000,00	0	-1.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58 Orang	0 Orang	10.800.000,00	0	-10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97 Orang	0 Orang	1.800.000,00	0	-1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.830.000,00	10.550.000,00	7.720.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	31.410.000,00	780.000,00	-30.630.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kelanjutusiaan						Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	25.800.000,00	25.800.000,00	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	31.612.500,00	2.495.000,00	-29.117.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS REJOTANGAN				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**100 83,5 % -**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.176.000.000,00	1.638.299.055,09	462.299.055,09	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	518 Orang	518 Orang	20.233.000,00	24.612.000,00	4.379.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	495 Orang	0 Orang	8.140.000,00	0	-8.140.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2865 Orang	2865 Orang	65.400.000,00	39.711.000,00	-25.689.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	72 Orang	0	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	459 Orang	459 Orang	8.700.000,00	26.623.000,00	17.923.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0	-1.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	151.640.000,00	153.051.000,00	1.411.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.350.000,00	4.350.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.250.000,00	10.800.000,00	-9.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.680.000,00	7.152.000,00	-14.528.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1815 Orang	0	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	67.872.000,00	68.399.600,00	527.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	153.414.000,00	188.531.705,00	35.117.705,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0	-9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	143 Orang	0 Orang	2.250.000,00	0	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.180.000,00	1.680.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.890.000,00	339.000,00	-40.551.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		upaya kesehatan ibu dan anak						Rejotangan, Semua Kel/Desa	Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	22.961.400,00	22.961.400,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	45.770.000,00	5.531.000,00	-40.239.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS NGUNUT				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.047.500.000,00	2.887.354.065,28	839.854.065,28	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	661 Orang	661 Orang	10.931.500,00	16.100.000,00	5.168.500,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0 Orang	29.910.000,00	0	-29.910.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3653 Orang	3653 Orang	132.150.000,00	61.035.000,00	-71.115.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	91 Orang	0	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	585 Orang	585 Orang	19.500.000,00	23.875.000,00	4.375.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1036 Orang	0 Orang	10.800.000,00	0	-10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	245.863.000,00	188.338.000,00	-57.525.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	5.850.000,00	5.850.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	6.300.000,00	-15.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.280.000,00	29.475.000,00	1.195.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2293 Orang	0	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	140.175.000,00	89.042.000,00	-51.133.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	254.688.000,00	215.147.600,00	-39.540.400,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 Orang	0 Orang	35.400.000,00	0	-35.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	182 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.917.500,00	13.200.000,00	1.282.500,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.060.000,00	156.000,00	-50.904.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		upaya kesehatan ibu dan anak						Ngunut, Semua Kel/Desa	Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	31.550.000,00	31.550.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	-	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	33.707.000,00	6.666.000,00	-27.041.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BALESONO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DENGAN PELAYANAN DASAR								
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 100 - %**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.068.997.000,00	1.165.254.503,83	96.257.503,83	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dari kategori sedang ke kategori baik							
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	485 Orang	17.166.000,00	49.503.300,00	32.337.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	0 Orang	7.525.000,00	0	-7.525.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	2683 Orang	74.100.000,00	31.506.780,00	-42.593.220,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	68 Orang	0	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 Orang	430 Orang	5.775.000,00	12.800.150,00	7.025.150,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	532 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0	-3.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	198.939.000,00	168.478.000,00	-30.461.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.475.000,00	6.450.000,00	-8.025.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.670.000,00	11.113.800,00	-18.556.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1707 Orang	0	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	129.000.000,00	107.458.050,00	-21.541.950,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menular dan Tidak Menular						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	218.368.000,00	204.761.800,00	-13.606.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0	-9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	134 Orang	0 Orang	225.000,00	0	-225.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	52.140.000,00	7.263.200,00	-44.876.800,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	39.690.000,00	175.720,00	-39.514.280,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	23.925.000,00	23.925.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	39.637.000,00	4.639.000,00	-34.998.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS SUMBERGEMPOL				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**83,5 100 - %**	**83,5 100 - %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.386.000.000,00	1.544.801.376,18	158.801.376,18	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	537 Orang	537 Orang	15.683.000,00	25.200.000,00	9.517.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	513 Orang	0 Orang	9.750.000,00	0	-9.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2969 Orang	2969 Orang	31.425.000,00	11.776.600,00	-19.648.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	77 Orang	0	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	475 Orang	475 Orang	4.350.000,00	17.200.000,00	12.850.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	0 Orang	24.000.000,00	0	-24.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	220.060.000,00	190.898.000,00	-29.162.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.550.000,00	7.200.000,00	-10.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.790.000,00	16.570.000,00	-18.220.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	-	1917 Orang	0	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	114.150.000,00	103.461.500,00	-10.688.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	209.465.000,00	285.623.213,00	76.158.213,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88 Orang	0 Orang	13.500.000,00	0	-13.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	148 Orang	0 Orang	7.200.000,00	0	-7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.120.000,00	12.994.400,00	-4.125.600,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	134.160.000,00	459.000,00	-133.701.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan	-	1 Dokumen	0	43.200.000,00	43.200.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kelanjutusiaan						Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	26.923.500,00	26.923.500,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.164.000,00	8.886.000,00	-26.278.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BENDILWUNGU				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**100 83,5 % -**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.065.435.000,00	1.357.328.411,10	291.893.411,10	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Persentase faskes dengan nilai ukp	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik							
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	458 Orang	42.128.000,00	44.550.000,00	2.422.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437 Orang	0 Orang	12.630.000,00	0	-12.630.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2532 Orang	2532 Orang	50.700.000,00	29.111.500,00	-21.588.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	65 Orang	0	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	406 Orang	406 Orang	8.550.000,00	15.380.400,00	6.830.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	502 Orang	0 Orang	6.750.000,00	0	-6.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	214.274.000,00	174.152.000,00	-40.122.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000,00	9.150.000,00	-9.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.725.000,00	23.062.600,00	-4.662.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1620 Orang	0	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	117.450.000,00	72.510.400,00	-44.939.600,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menular dan Tidak Menular						Bandung, Semua Kel/Desa	Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	201.014.000,00	180.697.503,00	-20.316.497,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	150.000,00	0	-150.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	0 Orang	7.200.000,00	0	-7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	126 Orang	0 Orang	3.600.000,00	0	-3.600.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	0	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	74.880.000,00	490.500,00	-74.389.500,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	36.122.600,00	36.122.600,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	44.970.000,00	4.376.000,00	-40.594.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BOYOLANGU				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**100 83,5 % -**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.780.800.000,00	1.708.276.576,02	-72.523.423,98	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan/atau UKM sesuai standar							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	536 Orang	28.116.000,00	37.350.000,00	9.234.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	512 Orang	0 Orang	5.970.000,00	0	-5.970.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2962 Orang	2962 Orang	51.600.000,00	31.127.200,00	-20.472.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	77 Orang	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	474 Orang	474 Orang	6.600.000,00	15.252.000,00	8.652.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	920 Orang	0 Orang	600.000,00	0	-600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	162.520.000,00	180.800.000,00	18.280.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.250.000,00	10.800.000,00	-6.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.640.000,00	17.574.600,00	-10.065.400,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Bandung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1919 Orang	0	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	86.260.000,00	75.121.400,00	-11.138.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	162.554.000,00	178.880.271,00	16.326.271,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	675.000,00	0	-675.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88 Orang	0 Orang	16.500.000,00	0	-16.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	148 Orang	0 Orang	2.700.000,00	0	-2.700.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.330.000,00	4.050.000,00	-17.280.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kesehatan reproduksi						Boyolangu, Semua Kel/Desa	Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	45.360.000,00	394.800,00	-44.965.200,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	34.300.000,00	34.300.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.395.000,00	8.585.000,00	-20.810.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BEJI				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**83,5 100 - %**	**83,5 100 - %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.181.270.000,00	2.310.006.740,36	128.736.740,36	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan/atau UKM sesuai standar							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang	604 Orang	53.797.000,00	41.800.000,00	-11.997.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	0 Orang	5.720.000,00	0	-5.720.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3340 Orang	3340 Orang	54.000.000,00	24.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	86 Orang	0	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	535 Orang	535 Orang	4.350.000,00	20.400.000,00	16.050.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	201.245.000,00	204.209.000,00	2.964.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	12.750.000,00	-1.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.410.000,00	31.680.000,00	5.270.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2159 Orang	0	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	97.125.000,00	99.589.000,00	2.464.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	189.828.000,00	211.645.387,00	21.817.387,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	7.160.000,00	7.255.000,00	95.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	1.200.000,00	0	-1.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	167 Orang	0 Orang	3.600.000,00	0	-3.600.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kesehatan sesuai standar							
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	45.280.000,00	8.800.000,00	-36.480.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	39.570.000,00	1.030.000,00	-38.540.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	16.981.000,00	0	-16.981.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat							
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	64.234.000,00	4.376.000,00	-59.858.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS TULUNGAGUNG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 100 - %**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.680.000.000,00	1.773.228.997,24	93.228.997,24	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	484 Orang	484 Orang	9.417.000,00	20.370.000,00	10.953.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	0 Orang	4.070.000,00	0	-4.070.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	2673 Orang	2673 Orang	136.200.000,00	25.954.100,00	-110.245.900,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	70 Orang	0	29.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	429 Orang	8.850.000,00	9.000.600,00	150.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	780 Orang	0 Orang	34.500.000,00	0	-34.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.034.000,00	180.471.000,00	-23.563.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	3.450.000,00	3.450.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	9.000.000,00	-10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Lingkungan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	33.700.000,00	15.000.000,00	-18.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1742 Orang	0	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	89.108.000,00	69.738.000,00	-19.370.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	212.434.000,00	199.352.100,00	-13.081.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	155.818.500,00	5.125.000,00	-150.693.500,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	150.000,00	0	-150.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79 Orang	0 Orang	16.050.000,00	0	-16.050.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0	-3.000.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	615.000,00	3.316.800,00	2.701.800,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	25.590.000,00	415.100,00	-25.174.900,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	52.712.400,00	52.712.400,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	14.293.500,00	0	-14.293.500,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	18.265.000,00	3.927.500,00	-14.337.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS KEDUNGWARU				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.124.084.000,00	2.246.570.616,46	122.486.616,46	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang	16.265.000,00	49.611.100,00	33.346.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang	711 Orang	0 Orang	12.325.000,00	0	-12.325.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4120 Orang	4120 Orang	72.750.000,00	23.121.700,00	-49.628.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	106 Orang	0	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	661 Orang	661 Orang	6.450.000,00	13.327.300,00	6.877.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1276 Orang	0 Orang	4.200.000,00	0	-4.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	200.546.000,00	171.286.000,00	-29.260.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.800.000,00	17.850.000,00	-7.950.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.460.000,00	20.114.200,00	-28.345.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2674 Orang	0	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	104.861.000,00	69.172.900,00	-35.688.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	196.274.000,00	187.610.674,00	-8.663.326,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122 Orang	0 Orang	18.000.000,00	0	-18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0	-1.200.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	29.715.000,00	5.810.000,00	-23.905.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	57.600.000,00	794.200,00	-56.805.800,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	35.745.600,00	35.745.600,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	7.178.000,00	-16.822.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS SIMO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**83,5 100 - %**	**83,5 100 - %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.452.076.000,00	1.575.470.817,54	123.394.817,54	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	520 Orang	520 Orang	43.685.000,00	29.123.000,00	-14.562.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	0 Orang	16.045.000,00	0	-16.045.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2875 Orang	2875 Orang	61.350.000,00	30.600.000,00	-30.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	73 Orang	0	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	461 Orang	461 Orang	8.400.000,00	19.584.000,00	11.184.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	723 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	220.133.000,00	184.292.000,00	-35.841.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.700.000,00	9.450.000,00	-5.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.055.000,00	29.280.000,00	-10.775.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1825 Orang	0	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	125.224.500,00	90.343.300,00	-34.881.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	200.114.000,00	165.609.301,00	-34.504.699,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0	6.933.000,00	6.933.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	143 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.660.000,00	4.410.000,00	-1.250.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kesehatan reproduksi						Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	68.040.000,00	344.000,00	-67.696.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	15.432.700,00	15.432.700,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	39.860.000,00	0	-39.860.000,00	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.542.500,00	12.036.800,00	-36.505.700,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS NGANTRU				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.995.000.000,00	2.052.934.716,98	57.934.716,98	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan/atau UKM sesuai standar							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	450 Orang	49.942.000,00	24.492.000,00	-25.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	0 Orang	9.875.000,00	0	-9.875.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2489 Orang	2489 Orang	74.550.000,00	25.054.400,00	-49.495.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	64 Orang	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	399 Orang	399 Orang	8.550.000,00	9.851.300,00	1.301.300,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	0 Orang	13.125.000,00	0	-13.125.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	229.345.000,00	169.848.000,00	-59.497.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000,00	3.600.000,00	-15.150.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.015.000,00	23.916.600,00	-16.098.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1595 Orang	0	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	90.738.000,00	102.122.700,00	11.384.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	223.350.000,00	186.644.304,00	-36.705.696,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74 Orang	0 Orang	22.500.000,00	0	-22.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	124 Orang	0 Orang	3.750.000,00	0	-3.750.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan malaria						Ngantru, Semua Kel/Desa	Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	20.160.000,00	10.701.600,00	-9.458.400,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	33.090.000,00	711.000,00	-32.379.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	15.827.400,00	15.827.400,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	53.855.000,00	13.116.000,00	-40.739.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS PUCUNG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	735.000.000,00	929.489.285,51	194.489.285,51	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Persentase faskes dengan nilai ukp	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik							
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	345 Orang	21.871.000,00	30.250.000,00	8.379.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	0 Orang	4.100.000,00	0	-4.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1906 Orang	1906 Orang	90.600.000,00	19.352.400,00	-71.247.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	305 Orang	4.125.000,00	8.100.000,00	3.975.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	379 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	180.152.000,00	138.258.000,00	-41.894.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	10.500.000,00	750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.115.000,00	18.039.000,00	-5.076.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1213 Orang	0	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	71.756.000,00	53.670.912,00	-18.085.088,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menular dan Tidak Menular						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	151.446.000,00	132.270.774,00	-19.175.226,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57 Orang	0 Orang	4.200.000,00	0	-4.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang	0 Orang	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.400.000,00	9.300.000,00	-12.100.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000,00	4.037.600,00	-14.862.400,00	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	35.900.088,00	35.900.088,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	83.655.000,00	3.798.000,00	-79.857.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS KARANGREJO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.575.000.000,00	2.015.603.930,37	440.603.930,37	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	320 Orang	320 Orang	32.850.000,00	34.650.000,00	1.800.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	0 Orang	2.925.000,00	0	-2.925.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1770 Orang	1770 Orang	50.400.000,00	27.450.000,00	-22.950.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	45 Orang	0	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	284 Orang	284 Orang	9.375.000,00	15.750.100,00	6.375.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	352 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	163.316.000,00	163.476.000,00	160.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	10.500.000,00	-3.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.830.000,00	16.900.000,00	-6.930.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1116 Orang	0	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	99.900.000,00	91.402.900,00	-8.497.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	153.676.000,00	158.489.111,00	4.813.111,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	0 Orang	12.750.000,00	0	-12.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88 Orang	0 Orang	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.200.000,00	8.820.000,00	-9.380.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	46.770.000,00	797.000,00	-45.973.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	-	1 Dokumen	0	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kelanjutusiaan						Karangrejo, Semua Kel/Desa	Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.412.000,00	7.024.200,00	-13.387.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS JELI				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	798.000.000,00	931.338.773,02	133.338.773,02	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	292 Orang	37.479.000,00	11.100.000,00	-26.379.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	279 Orang	0 Orang	6.950.000,00	0	-6.950.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1616 Orang	1616 Orang	70.200.000,00	21.750.000,00	-48.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	0	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	259 Orang	259 Orang	6.075.000,00	10.800.000,00	4.725.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	322 Orang	0 Orang	1.800.000,00	0	-1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	167.798.000,00	113.855.000,00	-53.943.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	1 Dokumen	0	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Kerja dan Olahraga						Karangrejo, Semua Kel/Desa	Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	6.750.000,00	-6.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.570.000,00	12.249.000,00	-20.321.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1016 Orang	0	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	86.898.000,00	51.066.000,00	-35.832.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	146.690.000,00	104.919.787,04	-41.770.212,96	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Pemberian Obat Massal)							
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	0 Orang	13.350.000,00	0	-13.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81 Orang	0 Orang	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	5.700.000,00	1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	46.740.000,00	753.000,00	-45.987.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	23.275.000,00	23.275.000,00	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Karangrejo, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	36.545.000,00	4.788.500,00	-31.756.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS KAUMAN				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.415.000.000,00	3.785.097.325,79	1.370.097.325,79	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728 Orang	728 Orang	20.289.000,00	35.490.000,00	15.201.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	695 Orang	0 Orang	9.450.000,00	0	-9.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4025 Orang	4025 Orang	103.050.000,00	16.857.600,00	-86.192.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	99 Orang	0	17.550.000,00	17.550.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	646 Orang	646 Orang	8.475.000,00	4.175.200,00	-4.299.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	862 Orang	0 Orang	3.900.000,00	0	-3.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	224.394.000,00	190.203.000,00	-34.191.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	1 Dokumen	0	6.604.400,00	6.604.400,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Kerja dan Olahraga						Kauman, Semua Kel/Desa	Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.050.000,00	12.038.800,00	-4.011.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.960.000,00	22.370.000,00	-6.590.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2501 Orang	0	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	142.924.000,00	85.102.600,00	-57.821.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	276.485.000,00	267.312.800,00	-9.172.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	1 Laporan	0 Laporan	375.000,00	0	-375.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Pemberian Obat Massal)							
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	0 Orang	16.950.000,00	0	-16.950.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	201 Orang	0 Orang	1.950.000,00	0	-1.950.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	16.600.000,00	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	48.570.000,00	675.000,00	-47.895.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	41.264.400,00	41.264.400,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kauman, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.415.000,00	8.000.000,00	-22.415.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS GONDANG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.785.000.000,00	1.987.589.247,45	202.589.247,45	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	424 Orang	26.421.000,00	22.200.000,00	-4.221.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang	405 Orang	0 Orang	7.655.000,00	0	-7.655.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2342 Orang	2342 Orang	75.300.000,00	21.900.000,00	-53.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	58 Orang	0	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang	5.250.000,00	18.975.000,00	13.725.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	187.540.000,00	187.710.000,00	170.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000,00	13.500.000,00	-5.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.340.000,00	31.946.100,00	-8.393.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1464 Orang	0	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	97.515.500,00	43.718.900,00	-53.796.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	187.859.000,00	178.311.400,00	-9.547.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	0 Orang	11.700.000,00	0	-11.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	117 Orang	0 Orang	2.850.000,00	0	-2.850.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.320.000,00	1.570.000,00	-9.750.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	679.000,00	-44.321.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	52.200.000,00	52.200.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	36.467.500,00	8.184.000,00	-28.283.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS TIUDAN				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	976.500.000,00	1.039.260.476,39	62.760.476,39	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	401 Orang	401 Orang	42.182.000,00	53.723.600,00	11.541.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	383 Orang	0 Orang	50.010.000,00	0	-50.010.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2219 Orang	2219 Orang	46.500.000,00	23.853.500,00	-22.646.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	56 Orang	0	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	356 Orang	356 Orang	15.750.000,00	12.955.800,00	-2.794.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	441 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0	-4.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	183.543.000,00	196.338.000,00	12.795.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	1 Dokumen	0	4.521.000,00	4.521.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Kerja dan Olahraga						Gondang, Semua Kel/Desa	Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.850.000,00	13.200.000,00	-7.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0	-10.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.010.000,00	19.293.000,00	-18.717.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1393 Orang	0	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	82.577.000,00	104.810.600,00	22.233.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	181.583.000,00	178.752.799,00	-2.830.201,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66 Orang	0 Orang	13.500.000,00	0	-13.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111 Orang	0 Orang	4.350.000,00	0	-4.350.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.430.000,00	3.843.900,00	-1.586.100,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	36.570.000,00	1.323.000,00	-35.247.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	28.408.600,00	28.408.600,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	55.450.000,00	8.013.000,00	-47.437.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS PAGERWOJO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.100.000.000,00	2.477.783.857,21	377.783.857,21	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	435 Orang	17.165.000,00	80.850.000,00	63.685.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	415 Orang	0 Orang	7.525.000,00	0	-7.525.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2404 Orang	2404 Orang	104.550.000,00	30.076.200,00	-74.473.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	63 Orang	0	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	386 Orang	386 Orang	2.325.000,00	5.900.000,00	3.575.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	477 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0	-4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	189.313.000,00	186.580.000,00	-2.733.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	3.450.000,00	3.450.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	8.250.000,00	-8.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 0	36.873.000,00	17.090.600,00	-19.782.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1567 Orang	0	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	130.125.000,00	108.562.200,00	-21.562.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	180.776.000,00	182.025.486,00	1.249.486,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	0 Orang	5.250.000,00	0	-5.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0	-6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.660.000,00	9.968.000,00	4.308.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	41.340.000,00	1.540.800,00	-39.799.200,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	33.526.200,00	33.526.200,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	16.445.000,00	3.440.000,00	-13.005.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS SENDANG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.242.380.000,00	2.558.915.889,93	316.535.889,93	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377 Orang	377 Orang	29.918.000,00	45.075.000,00	15.157.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	0 Orang	25.550.000,00	0	-25.550.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	2085 Orang	2085 Orang	55.350.000,00	17.550.000,00	-37.800.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	55 Orang	0	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang	9.000.000,00	33.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	414 Orang	0 Orang	900.000,00	0	-900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	198.507.000,00	151.663.000,00	-46.844.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000,00	6.900.000,00	-6.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesehatan Lingkungan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.090.000,00	6.300.000,00	-22.790.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1379 Orang	0	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	81.469.000,00	65.336.000,00	-16.133.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	192.143.000,00	159.308.591,00	-32.834.409,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	900.000,00	0	-900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	62 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0	-9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan sesuai standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104 Orang	0 Orang	1.800.000,00	0	-1.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.350.000,00	3.090.000,00	-4.260.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	65.460.000,00	600.000,00	-64.860.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	82.375.000,00	5.025.000,00	-77.350.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS DONO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	682.500.000,00	955.184.138,74	272.684.138,74	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	0 0	81.178.000,00	33.750.000,00	-47.428.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	0 Orang	13.650.000,00	0	-13.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1467 Orang	1467 Orang	36.000.000,00	29.651.600,00	-6.348.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	-	38 Orang	0	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jiwa Berat Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	236 Orang	236 Orang	5.625.000,00	25.225.000,00	19.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	392 Orang	0 Orang	5.625.000,00	0	-5.625.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	187.158.000,00	167.507.000,00	-19.651.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.250.000,00	7.950.000,00	-6.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.100.000,00	11.100.000,00	-7.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	956 Orang	0	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	130.650.000,00	81.220.000,00	-49.430.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	172.962.000,00	165.695.500,00	-7.266.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	450.000,00	0	-450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0	-4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	73 Orang	0 Orang	2.250.000,00	0	-2.250.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan sesuai standar							
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	750.000,00	750.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	1.150.000,00	-11.850.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.950.000,00	658.400,00	-34.291.600,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	29.772.000,00	29.772.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	34.291.000,00	9.555.000,00	-24.736.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BESUKI				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	745.500.000,00	1.123.743.687,59	378.243.687,59	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	287 Orang	27.306.000,00	19.322.000,00	-7.984.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	0 Orang	14.650.000,00	0	-14.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1587 Orang	1587 Orang	33.000.000,00	13.800.000,00	-19.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	0	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	255 Orang	4.350.000,00	5.675.000,00	1.325.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	0 Orang	2.100.000,00	0	-2.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	137.875.000,00	127.547.000,00	-10.328.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.300.000,00	5.850.000,00	-6.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.202.500,00	9.581.100,00	-1.621.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	-	1016 Orang	0	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						Besuki, Semua Kel/Desa	Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	75.900.000,00	65.063.900,00	-10.836.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	157.665.000,00	151.217.838,00	-6.447.162,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	600.000,00	0	-600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0	-4.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79 Orang	0 Orang	1.050.000,00	0	-1.050.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.990.000,00	11.550.000,00	7.560.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	42.210.000,00	156.000,00	-42.054.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	22.700.000,00	22.700.000,00	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Besuki, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.542.500,00	4.856.000,00	-33.686.500,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS BANJAREJO				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.365.000.000,00	1.989.458.547,77	624.458.547,77	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan/atau UKM sesuai standar							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597 Orang	597 Orang	49.725.000,00	27.500.000,00	-22.225.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	570 Orang	0 Orang	7.125.000,00	0	-7.125.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3298 Orang	3298 Orang	72.000.000,00	17.930.500,00	-54.069.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	85 Orang	0	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	529 Orang	529 Orang	11.400.000,00	25.050.000,00	13.650.000,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	653 Orang	0 Orang	225.000,00	0	-225.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	220.286.120,00	172.655.000,00	-47.631.120,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	9.150.000,00	9.150.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.850.000,00	11.400.000,00	-3.450.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.910.000,00	12.501.500,00	-29.408.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2121 Orang	0	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	128.561.500,00	88.652.500,00	-39.909.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	224.075.000,00	189.394.160,00	-34.680.840,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 Orang	0 Orang	13.500.000,00	0	-13.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	164 Orang	0 Orang	6.750.000,00	0	-6.750.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan	-	1 Orang	0	150.000,00	150.000,00	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan kesehatan malaria						Rejotangan, Semua Kel/Desa	Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	32.500.000,00	29.350.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	82.650.000,00	715.500,00	-81.934.500,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	20.900.000,00	20.900.000,00	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	32.137.500,00	3.794.000,00	-28.343.500,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PUSKESMAS SEMBUNG				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**83,5 100 - %**	**100 83,5 % -**	**283.217.637.832,00**	**278.853.686.389,38**	**41.332.851.881,69**		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	nilai IKM BLUD	80 -	80 -	48.945.392.000,00	56.010.984.746,38	7.065.592.746,38		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	892.500.000,00	915.573.009,88	23.073.009,88	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan/atau UKM sesuai standar							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446 Orang	446 Orang	40.567.000,00	29.250.000,00	-11.317.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	426 Orang	0 Orang	11.425.000,00	0	-11.425.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2465 Orang	2465 Orang	56.250.000,00	18.525.000,00	-37.725.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	56 Orang	0	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	396 Orang	396 Orang	10.125.000,00	18.050.950,00	7.925.950,00	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	507 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	167.361.000,00	127.664.000,00	-39.697.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.250.000,00	8.550.000,00	-8.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.150.000,00	12.719.550,00	-8.430.450,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1399 Orang	0	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	96.543.000,00	59.721.000,00	-36.822.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	163.989.000,00	134.102.596,00	-29.886.404,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	15.015.000,00	14.997.000,00	-18.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0	-300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73 Orang	0 Orang	15.750.000,00	0	-15.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	123 Orang	0 Orang	1.650.000,00	0	-1.650.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kesehatan sesuai standar							
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	3.748.000,00	2.548.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	48.630.000,00	858.000,00	-47.772.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0	14.386.500,00	14.386.500,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyajian/updating data dan informasi	100 %	100 %	636.457.500,00	473.463.000,00	-162.994.500,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	50.209.000,00	0	-50.209.000,00	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**94,3 %**	**94,3 %**	**3.576.484.500,00**	**4.307.958.000,00**	**1.537.515.500,00**		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Cakupan pengembangan UKBM	90 %	90 %	1.466.584.500,00	359.058.000,00	-1.107.526.500,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	26.085.000,00	4.331.000,00	-21.754.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPTD LABKESDA				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	**23 %**	**23 %**	**85.017.087.099,00**	**93.059.272.574,04**	**7.846.963.628,80**		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan nilai ukp dan ukm yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6.5 %	6.5 %	72.291.847.540,00	74.131.089.607,04	1.839.242.067,04		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu	LOKASI	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
J U M L A H					**374.607.246.931,00**	**381.162.377.463,42**	**6.555.130.532,42**		

Dari tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa program Dinas Kesehatan mengalami penyesuaian pagu anggaran baik bertambah maupun berkurang terhadap masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2O25.

Adanya penyesuaian target kinerja dan pagu didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun untuk mengakomodir adanya usulan program, kegiatan, dan subkegiatan baru yang belum tercantum dalam Renja Tahun 2025 sebelumnya. Selain itu, perubahan ini juga mencakup penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target kinerja sebagai tindak lanjut atas kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2025 serta menjadi acuan kerja bagi seluruh bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.

Indikator kinerja beserta target dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan juga dituangkan secara jelas, sehingga capaian pelaksanaan dapat diukur pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Peningkatan kinerja Dinas Kesehatan merupakan upaya perwujudan dalam pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, substansi dan muatannya dibatasi pada arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan, sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka peningkatan kinerja.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ANNA SAPTI SARIPAH, SKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681109 199202 2 001

RSUD DR.ISKAK
TULUNGAGUNG

PERUBAHAN

RENJA

2025



0355 322609
www.rsud.tulungagung.go.id
Jl.Wahidin Sudiro Husodo,
Kedungwaru

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD), seiring dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/60/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunannya perubahan Renja RSUD Dr. Iskak Tulungagung tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan I Tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Renja tersebut menjadi pedoman Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

RSUD Dr. Iskak Tulungagung merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK) di bawah Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

RSUD Dr. Iskak Tulungagung sejak 31 Desember 2008 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :

188.45/554/031/2008 telah terakreditasi tingkat Paripurna STARKES dan pada tanggal 12 September 2022 telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 1412/ 2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Fungsi sosial rumah sakit sebagai pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan tetap dijalankan oleh RSUD dr. Iskak Tulungagung, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. RSUD dr. Iskak Tulungagung telah memperoleh penetapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan unggulan. Penetapan tersebut tertuang dalam beberapa keputusan Menteri Kesehatan, yaitu:

a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1342/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkolusis;
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1344/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;
c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging;
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa
e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 Tentang Rumah Jejaring Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefro dan Kesehatan Ibu dan Anak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD. Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
i. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/994/2022 tentang RSUD Dr. Iskak Tulungagung Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
j. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 188/359/KPTS/013/2015 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
l. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
m. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011;
n. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Dr.Iskak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

o. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola RSUD Dr. Iskak Tulungagung;

p. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Sebagai Badan Layananan Umum Daerah;

q. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) Kabpaten Tulungagung Tahun 2025.

r. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah merumuskan rencana kerja RSUD Dr.Iskak Tulungagung untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Dr.Iskak Tulungagung.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Dr. Iskak Tulungagung dalam rencana program kegiatan prioritas dan pengembangan pelayanan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
4. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.
5. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja RSUD Dr. Iskak Tulungagung tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Tribulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD Dr Iskak.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan I Tahun 2025, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Tribulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standard pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut;

d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Tribulan I Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ Tahun 2024 dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkannya RSUD Dr. Iskak Tulungagung menjadi BLUD, maka pola pengelolaan keuangan juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ini mengatur pemberian fleksibilitas tertentu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Iskak Tulungagung tahun 2025 sampai dengan tribulan I dan capaian Renstra sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Tribulan I	Tingkat Realiasasi (%)
1	*\2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 =(7/6)*
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan						
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik**	100%	100%	100%	0	0%
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM BLUD	87,7	86,85	87,3	0	0%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	0	0%
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan nilai kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar**	25%	93,75%	23%	0	0%
1.02.02.2.01	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM	73%	88,89%	72%	0	0%
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	1 unit	1 unit	0	0%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DAK, DBHCHT)	24 unit	55 unit	129 unit	0	0%
1.02.02.2.02	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten / Kota	Presentase faskes dengan nilai UKP dan UKM yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	6,5%	18,75%	6,5%	0	0%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan paripurna pada masyarakat dengan terus meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu sebagai sarana pelayanan kesehatan dibawah Kementerian Kesehatan, perencanaan kinerja RSUD Dr. Iskak Tulungagung harus mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Indikator kinerja RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang telah ditetapkan dalam Renstra secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Pencapaian kinerja sampai dengan bulan Maret tahun 2025 belum maksimal, karena masih awal perjalanan dari tahun anggaran. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Iskak Tulungagung

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025 s/d Maret	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85,64	85,76	86	87	87,3	86,85	0	87,7	-	Survei dilaksanakan dua kali dalam setahun (setiap semester), mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2.3 Analisis Keuangan

Realisasi Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) RSUD Dr.Iskak Tulungagung tahun 2025 sebesar Rp. 379.622.061.000,00 sampai dengan bulan Maret 2025 telah direalisasi sebesar Rp. 98.877.797.891,00 atau 26,05% digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Realisasi Belanja RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan Bulan Maret

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan :	**370.000.000.000,00**	**92.539.788.456,22**	**53,53**
	370.000.000.000,00	92.539.788.456,22	53,53
Belanja :	**379.622.061.000,00**	**98.877.797.891,00**	**26.05**
a. DAU	225.000.000,00	0	0
b. DAK	2.500.000.000,00	0	0
c. DBHCHT	1.897.061.000,00	0	0
d. Anggaran BLUD	370.000.000.000,00	98.877.797.891,00	26,72

Realisasi belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan Bulan Maret

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**370.000.000.000,00**	**98.877.797.891,00**	**25,01**
a	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Anggaran BLUD**	**370.000.000.000,00**	**98.877.797.891,00**	**25,01**
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Anggaran BLUD	370.000.000.000,00	98.877.797.891,00	26,72
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**9.622.061.000,00**	**0**	
a	**Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		4.622.061.000,00	0	
	Pengembangan Rumah Sakit	DAK Fisik,	2.500.000.000,00	0	
	Pengadan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBHCHT, DAU Spesifik	2.122.061.000,00	0	
b	**Kegiatan penyediaan layanan**		5.000.000.000,00	0	0

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten / Kota				
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	DAU	5.000.000.000,00	0	0
Jumlah			**379.622.061.000,00**	**98.877.797.891,00**	**26,05**

Sumber Data : Bagian Keuangan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja Perubahan RSUD dr Iskak Tulungagung tahun 2025 merupakan dokumen penyesuaian anggaran kegiatan beserta indikator kegiatan yang akan dicapai pada periode anggaran perubahan tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Strategis RSUD Dr.Iskak Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, selain itu perubahan Renja Tahun 2025 juga memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan yang telah menetapkan RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Rujukan Penyakit Katastropik . RSUD Dr Iskak melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur juga ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional yang mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan.

RSUD Dr.Iskak Tulungagung selaku Perangkat Daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada urusan pelayanan wajib kesehatan yaitu melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit.

3.1 Tujuan dan Sasaran

RSUD Dr. Iskak merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah Tulungagung. Dinas Kesehatan membantu mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Untuk menjawab tujuan dan sasaran RPD, sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka sasaran RSUD Dr. Iskak sesuai tugasnya menelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sebagai berikut:

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Renstra RSUD dr Iskak : Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dr. Iskak Tulungagung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,65	74,71	74,77
2		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87	87,3	87,7

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Perubahan RPD Kabupaten Tulungagung 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Iskak pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 RSUD Dr.Iskak Tulungagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02										
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**370.000.000.000,00**	**403.441.415.835,08**	**33.441.415.835,08**
		Presentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik	%	100	100					
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**					**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	370.000.000.000 ,00	403.441.415.835,08	33.441.415.835,08
		Nilai IKM BLUD	**-**	**87,3**	**87,3**					
1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							370.000.000.000,00	403.441.415.835,08	33.441.415.835,08
		Jumlah BLUD yang Menyediakan	unit	1 unit kerja	1 unit kerja					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**9.622.061.000,00**	**12.502.061.000,00**	**2.880.000.000,00**
		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan nilai kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar	%	23	23					
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	4.622.061.000,00	5.502.061.000,00	880.000.000,00
		Presentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM	**%**	**72**	**72**					
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							2.122.061.000,00	3.002.061.000,00	880.000.000,00
		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DBHCHT, DAU)	*unit*	*92*	*134*					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
1.02.02.2.01.0022	Sub. Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit							2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(0,00)
		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Sakit (DAK)	unit	1	1					
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	**RSUD Dr.Iskak Tulungagung**	5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000
		Prosentase faskes dengan nilai UKP dan UKM yang naik dari kategori sedang ke kategori baik	**%**	**6,5**	**6,5**					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
1.02.02.2.02.26	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DAU)	dokumen	1	1					

Berdasar tabel diatas, pada Perubahan Renja 2025 ini tidak dilakukan penambahan atau penghapusan program, kegiatan maupun sub kegiatan karena program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada sudah akomodatif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tahun 2025 disusun berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja yang berorentasi pada hasil (*output* dan *outcome*). Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa *output* dan *outcome*. *Money follow program priority*, dengan artian bahwa pemberian alokasi anggaran akan diberikan hamya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr.Iskak Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan beserta bagian-bagian, Wakil Direktur Pelayanan beserta bidang-bidang, dan seluruh staf RSUD Dr.Iskak Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025

4.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Tulungagung, 8 Juli 2025
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

dr. KASIL ROKHMAD, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 200212 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. IDKAK KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	1																			
	1.03																			
1	1.03.01																			
	1.03.01.0.11																			
	1.03.01.0.11.0001																			
2	1.03.03																			
	1.03.03.2.01																			
	1.03.03.2.01.0007																			
	1.03.03.2.01.0013																			
	1.03.03.2.01.0020																			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			[illegible]				[illegible]	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	J U M L A H								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

RSUD CAMPURDARAT
DR KARNENI

Pelayanan Responsif dengan Hati

2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr. Karneni Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr Karneni Kabupaten Tulungagung dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr Karneni Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritikan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr Karneni Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini di masa mendatang. Tak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr Karneni Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28
BAB IV PENUTUP 34

RSUD CAMPURDARAT
DR KARNENI

Pelayanan Responsif dengan Hati

-BAB I-
PENDAHULUAN

RENSTRA 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat sebagai salah satu SKPD, diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat, evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat .

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2024;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Campurdarat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat

3.3. Program dan Kegiatan RSUD Campurdarat

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

RSUD CAMPURDARAT
DR KARNENI

Pelayanan Responsif dengan Hati

-BAB II-
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tri Wulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat pada triwulan I tahun berjalan dan pencapaian kinerja Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat tahun-tahun sebelumnya, serta laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Hasil pelaksanaan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat sudah memenuhi target. Untuk lebih jelasnya, realisasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi RenjaPerangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%					100%		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	0	0	0	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi RenjaPerangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		20,00%					20,00%		
1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah	1 unit	0	1 unit	0	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi RenjaPerangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penduduk Minimal 1:1000								
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang di sediakan	20	0	43 unit	42 unit	0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prosentase maskin yang datang berobat dan dilayani di RSUD Campurdarat	1 Dokumen	0Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0			
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	0	0	0	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi RenjaPerangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	20 orang	0	0			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medik;
2. Penyelenggaraan Pelayahan Penunjang Medik dan Non Medik;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan Pelayanan non medik

Analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat mengacu pada indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat
Kabupaten Tulungagung

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
I	**Pelayanan Gawat Darurat**									
A	**Instalasi Gawat Darurat**									
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	-	Satu tim	Satu tim	Satu tim	
4	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	-	24 Jam	24 Jam	24 Jam	
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	-	5 menit	5 menit	5 menit	
6	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Kematian pasien< 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,002	0,002	0,002	-	0,002	0,002	0,002	
8	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	-	71%	70 %	70 %	
B	**ambulan / kereta jenazah**					-	-			
1	penyedia pelayanan ambulan / kereta jenazah	sopir ambulan terlatih	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan mobil ambulan / mobil jenazah	tersedia	100%	100%	100%	-	60%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
3	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	-	100%	24 jam	24 jam	
4	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	-	30 menit	30 menit	30 menit	
5	Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	-	30 menit	30 menit	30 menit	
C	**ruang bersalin**									
1	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		c. Bidan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b. Dokter Sp. Anak	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		c. Dokter Sp. Anastesi	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	-	20 %	20 %	20 %	
6	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	-	1 %	1 %	1 %	
		b. Pre-eklampsia ≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	-	30 %	30 %	30 %	
		c. Sepsis ≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	-	0,2 %	0,2 %	0,2 %	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
7	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
II	**Pelayanan Rawat jalan**									
A	**Instalasi Rawat Jalan**									
1)	**Poliklinik spesialis**									
2)	**Poli Umum**									
3)	***General Check Up* (GCU)**									
1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	-	60 menit	60 menit	60 menit	
4	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
5	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr. Sp.B, dr. Sp.U, dr. umum terlatih	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
8	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	-	90 %	90 %	90 %	
4)	**Poli Gigi**									

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik gigi	100 % Dokter gigi	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	-	60 menit	60 menit	60 menit	
4	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
5	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	-	90 %	90 %	90 %	
B	**Instalasi Penunjang Medik**									
1)	**Pelayanan Lab. Patologi Klinik**									
1	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Patologi Klinik	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	-	140 menit	140 menit	140 menit	
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
2)	**Pelayanan Radiologi**					-				
1	pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Radiologi	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan fasilitas radiologi	sesuai klas rumah sakit	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	-	3 jam	3 jam	3 jam	
4	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	-	2 %	2 %	2 %	
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
3)	**Pelayanan Farmasi**									
1	pemberi pelayanan farmasi	apoteker	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
2	ketersediaan formularium	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada	
3	waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	-	30 menit	30 menit	30 menit	
4	waktu tunggu pelayanan Racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	-	60 menit	60 menit	60 menit	
5	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
4)	**Pelayanan Gizi**									
1	pemberi pelayanan gizi	sesuai pola ketenagaan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	-	90 %	90 %	90 %	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	-	20 %	20 %	20 %	
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
5)	**Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)**									
1	tenaga penyedia pelayanan BDRS	sesuai standar BDRS	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	-	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
3	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	1. 100 % terpenuhi	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
6)	**Central Sterile Supply Departement (CSSD) Laundry**					-				
1	ketersediaan pelayanan Central Sterile Supply Departement (CSSD) Laundry rumah sakit	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-	tersedia	tersedia	tersedia	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
2	adanya fasilitasCentral Sterile Supply Departement (CSSD) Laundry rumah sakit	sesuai standar pelayanan loundry RS	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu penyediaan alat dan linen untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Tidak adanya kejadian alat dan linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
A	**instalasi rawat inap**					-				
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dr. Spesialis	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	ketersediaan pelayanan rawat inap	a) ruang perawatan kelas III	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b) ruang perawatan kelas II	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		c) ruang perawatan kelas I	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		d) ruang perawatan VIP	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		e) ruang perawatan VVIP	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		f) Ruang Nifas	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		g) Ruang perinatologi	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
8	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
9	Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
10	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
11	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	-	0.24 %	0.24 %	0.24 %	
12	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	5 %	5 %	5 %	
13	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	-	90 %	90 %	90 %	
B	**Instalasi Bedah sentral**					-	-	-	-	
1	ketersediaan tim bedah	sesuai dengan klas RS	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	sesuai dengan klas RS	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	-	2 hari	2 hari	2 hari	
4	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
7	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
8	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	-	6 %	6 %	6 %	
9	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	-	1 %	1 %	1 %	
10	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
C	**Pelayanan Intensif**									
1	Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan pelayanan intensif	a) *Intensive Care Unit* (ICU)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		b) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
		c) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	sesuai klas rumah sakit	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
4	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
7	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	-	0.24 %	0.24 %	0.24 %	
9	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	-	3 %	3 %	3 %	
10	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
D	**Pemulasaraan Jenazah**									
1	ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	tersedia	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan fasilitas kamar jenazah	ada	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	ketersediaan pemberi pelayanan kamar jenazah	ada	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	-	2 Jam	2 Jam	2 Jam	
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
IV	**Fasilitas Pendukung lainnya**		-	-		-	-	-	-	
A	**Pengelolaan Limbah**					-	-	-	-	
1	adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	adanya SK Direktur sesuai kelas (permenkes no 1204 tahun 2004)	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	ketersediaan fasilitas pengolahan limbah rumah sakit	sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
3	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	-	30 mg/	30 mg/	30 mg/	
		b. COD < 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	-	80 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	
		c. TSS < 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	-	30 mg/	30 mg/	30 mg/	
		d. PH 6-9	6-9	6-9	6-9	-	6-9	6-9	6-9	
B	**Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS)**									
1	adanya penanggung jawab IPSRS	sesuai pola ketenagaan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
3	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
C	**Rekam Medik**									
1	pemberi pelayanan rekam medik	sesuai standar tenaga rekam medik	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	-	10 menit	10 menit	10 menit	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	-	15 menit	15 menit	15 menit	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
4	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	80 %	80 %	80 %	
D	**Administrasi dan manajemen**									
1	kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	-	70 %	70 %	70 %	
2	adanya peraturan internal rumah sakit	ada	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	adanya rencana strategi bisnis rumah sakit	ada	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap (insentif) sesuai kesepakatan waktu	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	-	2 jam	2 jam	2 jam	
6	Ketepatan waktu pemberian imbalan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
8	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
9	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
10	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	-	60 %	60 %	60 %	
11	Cost recovery	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	-	40 %	40 %	40 %	

No.	Indikator	Target	Target Restra RSUD tahun ke			Realisasi Capaian		Proyeksi pada Tahun ke-		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
12	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
E	**Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)**									
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	75%	75%	75%	-	75%	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	60%	60%	60%	-	60%	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	75%	75%	75%	-	75%	75%	75%	
F	**Pelayanan GAKIN**									
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung

No.	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Restra RSUD tahun ke			Capaian sd Triwulan I	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2025	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*
1	Meningkatkan mutu pelayanan manajemen rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	75%	80%	79,11%	

Review terhadap Tabel T-C.31.
Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pelayanan BLUD					Peningkatan Pelayanan BLUD				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	34.600.000.000	Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		42.366.026.010,52
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			20%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah				
Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan	1 Unit	14.000.000.000	Belanja Barang, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pengadaan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor	Paket	12.032.450.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer		dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	147 Unit	1.895.819.300	Belanja Barang, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		1.895.819.300,00
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
					Daerah Kabupaten/Kota				
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000.000	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		2.500.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	50.000.000	Belanja Barang Pakai Habis	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Belanja Pengadaan Belanja Barang Pakai Habis		50.000.000,00
Jumlah				**53.045.819.300**	**Jumlah**				**58.844.295.310,52**

RSUD CAMPURDARAT
DR KARNENI

Pelayanan Responsif dengan Hati

-BAB III-
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan sistematika Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam menjabarkan kebijakan tersebut meliputi program:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Pengembangan Rumah Sakit
3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tulungagung
Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (Sebelum)				Catatan penting	Rencana Kerja Tahun 2025 (Setelah)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1						*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
1	***02***	***01***				***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***								
1	*02*	*01*	*2*	*10*		Peningkatan Pelayanan BLUD								
1	*02*	*01*	*2*	*10*	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	Rp34.600.000.000	Pendapatan dari BLUD		1 Unit	*42.366.026.010,52*
1	***02***	***02***				***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat***								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (Sebelum)				Catatan penting	Rencana Kerja Tahun 2025 (Setelah)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*02*	*02*	*2*	*01*		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	*02*	*02*	*2*	*01*	*05*	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakityang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	*Rp*14.000.000.000	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanyya Bidang Kesehatan (DAU Spesifik)			1 Unit	12.032.450.000,00
1	*02*	*02*	*2*	*01*	*07*	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	-	-	-		-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (Sebelum)				Catatan penting	Rencana Kerja Tahun 2025 (Setelah)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Semua Kel/Desa						
1	*02*	*02*	*2*	*01*	*14*	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147 Unit	Rp1.895.819.300	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		147 Unit	1.895.819.300
1	*02*	*02*	*2*	*02*		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	*02*	*02*	*2*	*02*	*26*	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyaraka*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp2.500.000.000	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanyya Bidang Kesehatan (DAU Spesifik)		1 Dokumen	2.500.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (Sebelum)				Catatan penting	Rencana Kerja Tahun 2025 (Setelah)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*02*	*02*	*2*	*02*	*41*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	Rp50.000.000	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanyya Bidang Kesehatan (DAU Spesifik)		20 Orang	Rp50.000.000

RSUD CAMPURDARAT
DR KARNENI

Pelayanan Responsif dengan Hati

-BAB IV-
PENUTUP

2025

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan RSUD Campurdarat Tahun 2025 merupakan rencana kegiatan tahunan, yang disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan sehingga pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan dapat diukur. Oleh karenanya diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Direktur RSUD Campurdarat

dr. RIO [illegible]RDONA,MMRS

Penata Tingkat 1

NIP 19850623 201410 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025





Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2025. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator keluaran kegiatan (output) sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Harapan kami, Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam menyikapi kondisi wilayah permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam penanganan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, Juli 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANANG PRATISTIANTO,S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720316 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Landasan hukum 2
1.3. Maksud dan tujuan 5
1.4. Sistematika penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12
BAB IV PENUTUP 23
4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan 23
4.2. Rencana tindak lanjut 24

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 8

Tabel III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung 14

BAB I





Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, ada kemungkinan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3) Terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulungagung selanjutnya akan menjadi pedoman Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung sekaligus menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2. Landasan hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

30. Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;
41. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;

42. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni di Kabupaten Tulungagung;
43. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
44. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023;
45. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi dalam Perencanaan dan Penganggaran, mewujudkan efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten serta sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya didalam pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan benar-benar terarah, terukur, tepat sasaran serta terkendali sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah menetapkan program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, jumlah dana/biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, keluaran (output) yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut dan sumber pembiayaannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti akan lebih terkendali dan berjalan efektif dan efisien

1.4. Sistematika penulisan

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan baik dalam hal penyerapan/realisasi keuangan maupun realisasi keuangan program/kegiatan.

BAB III Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, berisi tentang program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja keluaran (output), lokasi dan pagu anggaran.

BAB IV Penutup, berisi catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II







Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1) Perlu diingat bahwa Tahun 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra 2024-2026, sehingga apabila hanya dilihat dari capaian kinerjanya beberapa program dan kegiatan seolah-olah belum optimal, tetapi sebenarnya semuanya masih sesuai dengan rencana. Disamping itu, terdapat target kinerja yang perlu dilakukan penyesuaian, sebab ternyata target di akhir periode Renstra sudah terlampaui di tahun 2024 ini, atau justru realisasi saat ini masih sangat jauh dari proyeksi di awal penyusunan dokumen Renstra.
2) Dari 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung di Tahun 2025, rata-rata capaian program sebesar 44,54 persen.
3) Sementara untuk level kegiatan, dari total 17 (tujuh belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tahun 2025, rata-rata capaian kinjer kegiatan sebesar 22,66 persen.

Untuk mengantisipasi program dan kegiatan yang realisasi kinerjanya masih dibawah target sampai dengan Triwulan I tahun 2025, maka akan dilakukan melalui penyesuaian target kinerja pada Renja Perubahan Tahun 2025 ataupun pengajuan usulan penambahan anggaran untuk beberapa program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten. Sementara untuk target kinerja yang sudah terlampaui juga akan dilakukan penyesuaian target. Secara rinci, Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung tercantum pada tabel 2.1.

Tabel II. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	SUB URUSAN AIR MINUM						
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah**	**28,20**	**23,17**	**27,90**	**23,17**	**83,05**
		Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	**13,92**	**7,45**	**12,30**	**7,45**	**60,57**
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga terlayani air minum dengan cakupan akses sambungan rumah (KK)	92.849	95.329	78.538	95.329	121,38
	SUB URUSAN AIR LIMBAH						
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domsetik aman**	**6,30**	**5,91**	**6,10**	**0,013**	**0,21**
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman (KK)	20.742	24.316	17.171	55	0,32
	SUB URUSAN DRAINASE						
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**	**74,70**	**74,49**	**74,60**	**74,76**	**100,21**
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terbangun (m)	1.500	985,2	500	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	SUB URUSAN PERUMAHAN						
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Peningkatan Hunian (persen)**	**0,14**	**0,29**	**0,5**	**0,18**	**36**
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata (unit rumah)	1500	20	2500	0	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (unit rumah)	45	5	8	0	0,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (orang)	25	25	25	0	0,00
	SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan rumah layak huni (persen)**	**0,28**	**0,18**	**0,09**	**0,0025**	**2,78**
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (laporan)	3	1	1	0	0,00
	SUB URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Luasan kawasan kumuh yang ditangani (persen)**	**55,72**	**82,69**	**81,38**	**1,76**	**2,17**
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas Pencegahan Kawasan Permukiman Menjadi Permukiman Kumuh (Ha)	74,35	90,43	24,52	2,88	11,75
	SUB URUSAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU dalam kondisi baik (persen)**	**72,95**	**73,02**	**72,73**	**73,02**	**100,4**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	12	2	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50,00**
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (dokumen)	12	4	4	2	25,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun (dokumen)	3	1	1	0	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (persen)	100	100	100	100	100,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa penunjang yang tersedia (dokumen)	3	1	1	0	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (persen)	100	100	100	100	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	SUB URUSAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi (persen)**	**100**	**100**	**100**	**31,88**	**31,88**
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah yang Difasilitasi (kasus)	6	1	2	0	0,00
	SUB URUSAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang difasilitasi (persen)**	**100**	**100**	**100**	**32,69**	**32,69**
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang disusun (dokumen)	3	1	1	0	0,00
	SUB URUSAN PENGGUNAAN TANAH						
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi (persen)**	**100**	**100**	**100**	**34,85**	**34,85**
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen)	3	1	1	0	0,00

BAB III





Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan hasil evaluasi dan analisis di Bab II, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung mengajukan 11 (sebelas) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
   1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
   1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
   1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas kegiatan:
   1) Administrasi keuangan Perangkat Daerah;
   2) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
   3) Administrasi umum Perangkat Daerah;
   4) Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah; dan
   5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
5. Program pengembangan perumahan, terdiri atas kegiatan:
   1) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota;
   2) Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota; dan
   3) Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
6. Program kawasan permukiman, terdiri atas kegiatan:
   1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
7. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, terdiri atas kegiatan:

1) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/ Kota

8. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) , terdiri atas kegiatan:
   1) Urusan penyelenggaraan PSU perumahan
9. Program penyelesaian sengketa tanah garapan, terdiri atas kegiatan:
   1) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota
10. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, terdiri atas kegiatan:
    1) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
11. Program penatagunaan tanah, terdiri atas kegiatan:
    1) Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota

Secara sistematis, keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 nampak pada tabel III.2. Sementara untuk rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 secara rinci nampak pada tabel III.3.

Tabel III. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	SUB URUSAN AIR MINUM									
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah**	**persen**	**27,90**	**23,43**			**2.721.720.000**	**2.864.986.000**	**(56.734.000)**
		Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	**persen**	**12,3**	**7,73**					
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tangga terlayani air minum dengan cakupan akses sambungan rumah**	**KK**	**78.538**	**96.679**			**2.721.720.000**	**2.664.986.000**	**(56.734.000)**
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	orang	50	64	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000	14.600.000	(35.400.000)
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	2	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	197.720.000	34.160.000	(163.560.000)
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	450.000.000	450.000.000	-
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/detik	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	100.000.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	100.000.000	-
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	350	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.824.000.000	1.966.226.000	142.226.000
	SUB URUSAN AIR LIMBAH									
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domsetik aman**	**persen**	**6,10**	**0,069**			**9.649.940.000**	**9.342.252.100**	**(307.687.900)**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman**	**KK**	**17.171**	**284**			**9.649.940.000**	**9.342.252.100**	**(307.687.900)**
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	200.000.000	185.000.000	(15.000.000)
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	desa	3	3	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	30.000.000	17.656.000	(12.344.000)
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	m^3/hari	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	200.000.000	200.000.000	-
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	850.000.000	850.000.000	-
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	683.430.000	536.444.600	(146.985.400)
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga	100	437	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.505.794.000	7.441.504.000	(64.290.000)



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	orang	25	50	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000	12.607.500	(37.392.500)
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen	1	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	130.716.000	99.040.000	(31.676.000)
	SUB URUSAN DRAINASE									
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**	**persen**	**74,60**	**17,65**			**1.100.000.000**	**1.249.100.000**	**149.100.000**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang drainase yang terbangun**	**m**	**500**	**350**			**1.100.000.000**	**1.249.100.000**	**149.100.000**
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	100	350	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	650.000.000	650.000.000	-
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	1000	1000	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	250.000.000	150.000.000
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	200.000.000	200.000.000	-
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000	49.100.000	(900.000)
1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	100.000.000	-



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	SUB URUSAN PERUMAHAN									
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Peningkatan Hunian**	**persen**	**0,5**	**0,23**			**550.000.000**	**481.346.000**	**(68.654.000)**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata**	**unit rumah**	**2500**	**250**			**50.000.000**	**50.000.000**	**-**
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000	50.000.000	-
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi**	**unit rumah**	**8**	**8**			**200.000.000**	**200.000.000**	**-**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	5	5	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	100.000.000	-
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	3	3	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000	100.000.000	-
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**orang**	**25**	**25**			**300.000.000**	**231.346.000**	**(68.654.000)**
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	300.000.000	231.346.000	(68.654.000)
	SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan rumah layak huni**	**persen**	**0,09**	**0,06**			**515.924.000**	**382.652.000**	**(133.272.000)**



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**laporan**	**1**	**1**			**515.924.000**	**382.652.000**	**(133.272.000)**
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	515.924.000	382.652.000	(133.272.000)
	SUB URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Luasan kawasan kumuh yang ditangani**	**persen**	**81,38**	**17,67**			**1.165.000.000**	**1.681.560.000**	**516.560.000**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Pencegahan Kawasan Permukiman Menjadi Permukiman Kumuh**	**Ha**	**24,52**	**30,60**			**1.165.000.000**	**1.681.560.000**	**516.560.000**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	57	**85**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.165.000.000	1.681.560.000	516.560.000
	SUB URUSAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU dalam kondisi baik**	**persen**	**72,73**	**73,23**			**200.000.000**	**199.890.000**	**(110.000)**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah PSU yang ditingkatkan kualitasnya**	**unit**	**1**	**1**			**200.000.000**	**199.890.000**	**(110.000)**



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	1	**1**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	200.000.000	199.890.000	(110.000)
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100**	**100**			**8.669.085.467**	**7.745.777.367**	**(923.308.100)**
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun**	**dokumen**	**4**	**4**			**6.997.692.767**	**6.258.192.767**	**(739.500.000)**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	49	**49**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.893.172.767	6.157.272.767	(735.900.000)
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	**1**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	104.520.000	100.920.000	(3.600.000)
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun**	**dokumen**	**1**	**1**			**27.350.000**	**6.100.000**	**(21.250.000)**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	**3**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	27.350.000	6.100.000	(21.250.000)
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP**	**persen**	**100**	**100**			**265.086.000**	**169.283.900**	**(95.802.100)**
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	**10**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	11.096.500	8.000.900	(3.095.600)
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	59	**59**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	111.197.000	51.466.000	(59.731.000)
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	33	**33**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	20.519.000	15.032.500	(5.486.500)



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	**5**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	24.170.000	9.996.000	(14.174.000)
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	**12**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	31.222.500	26.722.500	(4.500.000)
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	**12**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	66.881.000	58.066.000	(8.815.000)
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Jasa penunjang yang tersedia**	**dokumen**	**1**	**1**			**1.131.716.700**	**1.116.560.700**	**(15.156.000)**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	**1**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.404.000	1.248.000	(156.000)
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	**12**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	160.792.700	160.792.700	-
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	**12**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	54.400.000	39.400.000	(15.000.000)
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	**12**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	915.120.000	915.120.000	-
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**persen**	**100**	**100**			**247.240.000**	**195.640.000**	**(51.600.000)**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	**1**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	40.610.000	40.610.000	-
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	**29**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	147.230.000	113.630.000	(33.600.000)



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	22.320.000	22.320.000	-
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	29	29	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	37.080.000	19.080.000	(18.000.000)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	SUB URUSAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi**	**persen**	**100**	**100**			**25.000.000**	**25.000.000**	**-**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sengketa Tanah yang Difasilitasi**	**kasus**	**2**	**2**			**25.000.000**	**25.000.000**	**-**
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.000.000	25.000.000	-
	SUB URUSAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE									
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang difasilitasi**	**persen**	**100**	**100**			**25.000.000**	**20.645.000**	**(4.355.000)**



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang disusun**	**dokumen**	**1**	**1**			**25.000.000**	**20.645.000**	**(4.355.000)**
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.000.000	20.645.000	(4.355.000)
	SUB URUSAN PENGGUNAAN TANAH									
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi**	**persen**	**100**	**100**			**250.000.000**	**243.492.800**	**(6.507.200)**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang disusun**	**dokumen**	**1**	**1**			**250.000.000**	**243.492.800**	**(6.507.200)**
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	225.000.000	218.492.800	(6.507.200)
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.000.000	25.000.000	-
JUMLAH								**24.871.669.467**	**24.036.701.267**	**(834.968.200)**



BAB IV







Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang teknis dan seluruh pelaksana di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan, Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tulungagung, Juli 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANANG PRATISTIANTO,S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720316 199803 1 009

LAMPIRAN RENJA
HASIL ENTRY SIPD

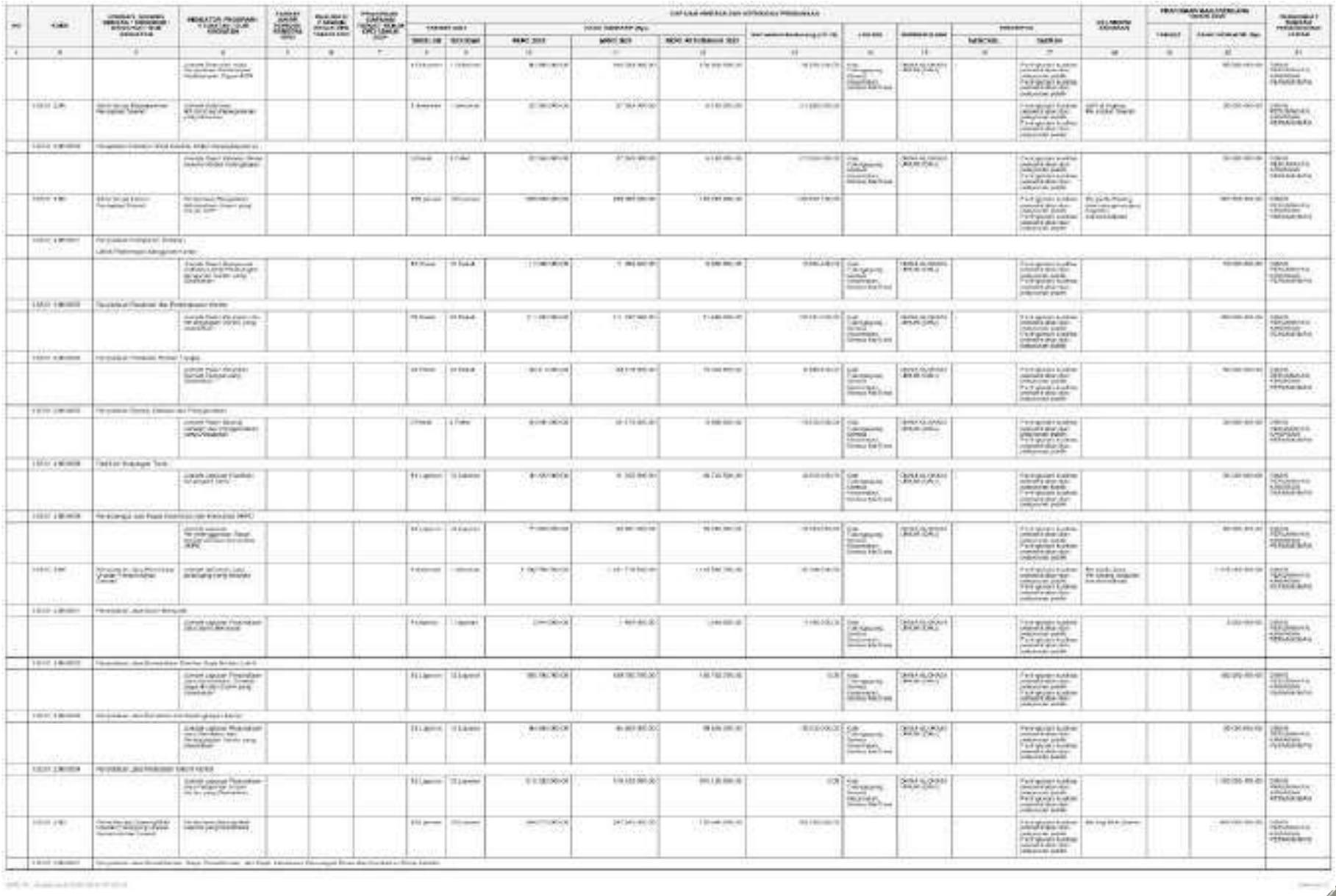


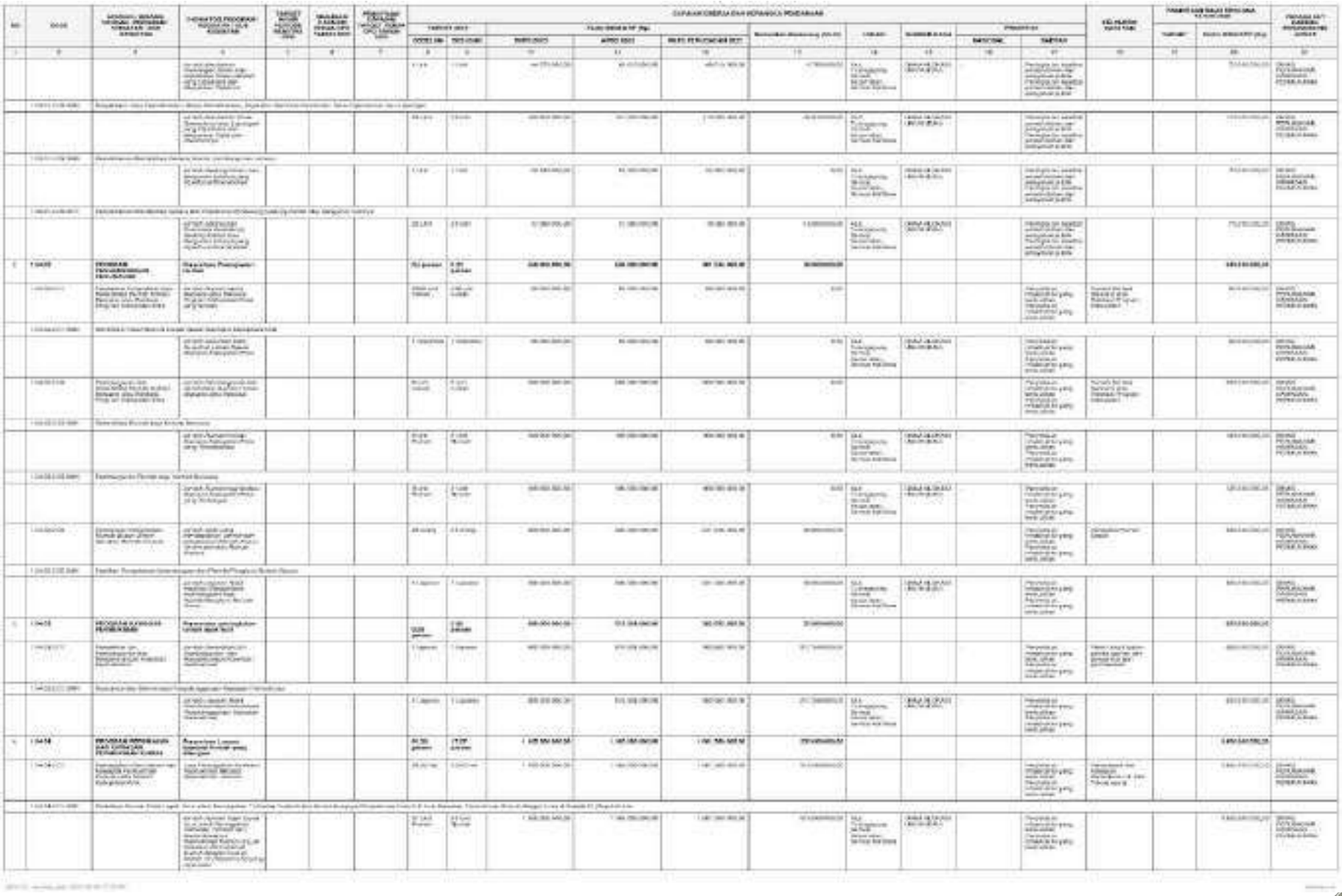


Disperkim
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025









RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jln. Mastrip No. 24 Tulungagung Telp. (0355) 333531

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan rasa aman dan tentram serta perlindungan pada masyarakat, dibutuhkan penanggulangan dan penanganan kebencanaan melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ,dan pelayanan penyelamatan , evakuasi korban. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung pada bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung.

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan. Dan dalam rangka persiapan menghadapai musim penghujan pada akhir Tahun, dimana curah hujan yang tinggi, dimungkinkan dapat terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, dan angin putting beliung, sehingga Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 perlu disusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Kebencanaan Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kebencanaan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Badan Pendukung Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, dan mengingat dimasa-masa mendatang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka rencana kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan seiring ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah di bidang Kebencanaan, telah menyusun program-program dengan kebijakan- kebijakan yang sesuai RPJMD, yakni Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk kesempurnaan, saran dan masukan sangat diperlukan dalam sempurnanya dokumen ini dan semoga bermanfaat. Aamiin.

Tulungagung, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ROBINSON P.NADEAK, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671016 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) Tahun 2025 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I 10
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 13
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 16

BAB IV PENUTUP 25
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 25
4.2 Rencana Tindak Lanjut 26

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025 11

2.2 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung 15

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenTulungagung 18

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2025 (Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran kurang tahun yang digunakan untuk tahun berjalan, karena adanya bencana yang terjadi.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Badan penanggulangan Bencana Daerah selama Tahun 2025 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;

26 Peraturan Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada BAB-BAB berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses

penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renja RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Perangkat Daerah, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar dokumen.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I (s.d Bulan Maret) Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (s.d Bulan Maret), dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I (s.d Bulan Maret) dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana, rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, pencapaian target Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I (s.d Maret)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
1.05.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**14,54%**	**14,54%**
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dok	12 dokumen	12 dok	3 dok	25%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	6,59 %	6,59 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerahyang tersedia	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen jasa penunjang yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dok	37,50 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	14,51 %	14,51 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I (s.d Maret)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan Penaggulangan dan penanganan bencana**	**96 %**	**100%**	**96 %**	**60,75 %**	**60,75 %**
1.05.03.2.01	Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Informasi rawan bencana kepada masyarakat daerah rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	100 %	100 %	15 %	15%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PersentasePelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana	80 %	100 %	80 %	68 %	68 %

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan adalah 37,64% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV, sehingga belum tercapai di triwulan I.
3. Terjadinya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program adalah sebagai penuntun tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil yang diajukan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan musrenbang kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja BPBD.

Penelaahan usulan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pokok pikir yang ditujukan kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah adalah pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : BPBD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dianggarkan melalui APBD Perubahan KabupatenTulungagung Tahun 2025.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026, terdapat program kegiatan yang dikategorikan ke dalam Program Prioritas Daerah yakni Program Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut disajikan perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapun rincian Rencana perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.15	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**							**6.853.649.758**	**6.517.779.058**	**334.870.700**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**5.760.650.758**	**5.146.762.058**	**613.888.700**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dok.**	**12**	**12**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**4.938.620.558**	**4.473.830.558**	**464.790.000**
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	29	28	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	**4.938.620.558**	**4.473.830.558**	**464.790.000**
1.05.01.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**Dok.**	**1**	**1**	**Kab. T.Agung**	**Kab. .Agung**	38.000.000	17.435.000	20.565.000
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	45	45	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	38.000.000	17.435.000	20.565.000
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**238.410.700**	**177210.000**	**61.200.700**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10	10	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	4.480.000	3.074.700	1.405.300
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah paket peralatan danperlengkapan kantor yang disediakan	paket	20	20	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	51.144.000	33.527.300	17.616.700
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	0	3	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	12.199.400	3.380.000	8.819.400
06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	3	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	16.987.000	11.883.700	5.103.300
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	14.205.300	9.130.000	5.075.300
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	9.500.000	7.550.000	1.950.000
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	129.895.000	75.1137.000	54.758.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**		**2**	**2**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**221.702.000**	**208.786.869**	**23.915.331**
2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	0	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	15.650.300	0	0
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**dokumen**	**12**	**12**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**221.702.200**	**208.786.869**	**12.915.331**
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	138.715.000	128.715.000	10.000
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	82.987.200	150.628.800	67.641.600
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**persen**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**308.267.000**	**232.470.000**	**75.797.000**
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	unit	28	28	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	220.850.000	220.850.000	-

09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5	5	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	50.220.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit			Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	37.197.000	11.620.000	25.577.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.15.02	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penaganan Penanggulangan bencana**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**1.091.999.000**	**1.371.017.000**	279.018.000
2.15.02.2.02	**Pelayanan Informasi rawan Bencana kabupaten / Kota**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisas, Komunikas, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten / Kota (per jenis bencana)**	**orang**	**490**	**490**	**Kab. T.Agung**	Kab. T.Agung	**208.124,000**	**230.000.000**	**21.876.000**
01.02	Sosialisasi , Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten / Kota (per jenis bencana)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisas, Komunikas, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten / Kota (per jenis bencana)	orang	4990	490	Kab. T.Agung	-	**208.124,000**	**230.000.000**	**21.876.000**
2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	249.783.000	244.555.000	5.228.000
2.02.01	Penyusunan rencana Penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dok	6	6	Kab. T.agung	-	81.805.000	80.000.000	1.805.000
2.02.02	Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan m itigasi bencana	orang	100	100	Kab. T.agung	-	90.138.000	90.138.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.03	**Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Prosentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**-**	**654.664.000**	**710.180.000**	**55.516.000**
2.03.3	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban yang berhasil di temukan, dicarian, ditolongan dan dievakuasi per jenis kejadian bencana .	orang	5	5	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	21.000.000	20.960.000	40.000
2.03.04	Penyediaan, Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan distribusi Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	300	300	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	195.200.000	296.756..000	101.556.000
2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	219.264.000	196.232.000	23.032.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana	%	80	80	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	198.628.000	382.514.000	183.886.000
2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana .	dokumen	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	20.008.000	13.157.100	6.850.900
2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	orang	20	20	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	16.484.000	12.547.700	3.936.300
2.04.0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten yang dilegalkan	kegiatan	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	162.136.000	356.809.200	194.673.200

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kebencanaan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Badan pendukung.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan Penyelenggara Pembangunan Kebencanaan di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ROBINSON P.NADEAK, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671016 199501 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.379.575.216,00**	**6.852.649.758,00**	**6.517.779.058,00**	**138.203.842,00**							**8.084.068.822,60**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.379.575.216,00**	**6.852.649.758,00**	**6.517.779.058,00**	**138.203.842,00**							**8.084.068.822,60**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.379.575.216,00**	**6.852.649.758,00**	**6.517.779.058,00**	**138.203.842,00**							**8.084.068.822,60**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.349.575.216,00**		**5.146.762.058,00**	**574.649.206,60**							**5.924.224.422,60**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				-	12 Dokumen	4.484.273.016,00	4.938.620.558,00	4.473.830.558,00	-10.442.458,00			-	--	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab		4.534.337.902,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																	upaten Tulungagung			
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.484.273.016,00	4.938.620.558,00	4.473.830.558,00	-10.442.458,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	--			4.534.337.902,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD*				-	12 dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	17.435.000,00	-20.565.000,00			-	--	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	1 Paket	38.000.000,00	38.000.000,00	17.435.000,00	-20.565.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	--			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan				30 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	--			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Pelatihan																
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Sesuai SOP*				-	100 persen	280.932.700,00	238.410.700,00	143.682.700,00	-137.250.000,00			-	- -	-		473.609.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	4.480.000,00	4.480.000,00	3.074.700,00	-1.405.300,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.928.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	4 Paket	51.144.000,00	51.144.000,00	33.527.300,00	-17.616.700,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			69.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	12.199.400,00	12.199.400,00	3.380.000,00	-8.819.400,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.420.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	16.987.000,00	16.987.000,00	11.883.700,00	-5.103.300,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.685.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	14.205.300,00	14.205.300,00	9.130.000,00	-5.075.300,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.665.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	7.550.000,00	-1.950.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	24 Laporan	172.417.000,00	129.895.000,00	75.137.000,00	- 97.280.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			341.158.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia*				-	0 unit	15.650.300,00	15.650.300,00	0,00	- 15.650.300,00			-	- -	-		27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	15.650.300,00	15.650.300,00	0,00	- 15.650.300,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Yang Tersedia*				-	12 dokumen	221.702.200,00	221.702.200,00	279.343.800,00	57.641.600,00			-	- -	-		218.855.120,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138.715.000,00	138.715.000,00	128.715.000,00	- 10.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.731.120,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.987.200,00	82.987.200,00	150.628.800,00	67.641.600,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			146.124.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*				-	100 persen	309.017.000,00	308.267.000,00	232.470.000,00	-76.547.000,00			-	- -	-		559.922.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	221.600.000,00	220.850.000,00	220.850.000,00	-750.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			243.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.002.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh				5 Unit	0 Unit	50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	-50.220.000,00	Kab. Tulungagung,	DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.242.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

			abilitasi										Boyolangu, Beji	(DAU)						DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	16 Unit	37.197.000,00	37.197.000,00	11.620.000,00	-25.577.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.917.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase pelayanan penanggulangan dan penanganan bencana**				**96 %**	**96 %**	**1.030.000.000,00**	**1.091.999.000,00**	**1.371.017.000,00**	**1.129.844.400,00**							**2.159.844.400,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*prosentase pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat daerah rawan bencana*				undefined undefined	100 persen	135.000.000,00	208.124.000,00	230.000.000,00	95.000.000,00			-	-	Masyarakat yang terdampak akibat bencana		414.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan				400 Orang	410 Orang	135.000.000,00	208.124.000,00	230.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			414.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun																	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*prosentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				-	100 persen	215.000.000,00	249.783.000,00	244.555.000,00	29.555.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat yang ada di daerah rawan bencana Kabupaten Tulungagung		362.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		

	2.0015																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				31 Unit	29 Unit	30.000.000,00	77.840.000,00	74.417.000,00	44.417.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	_ _			92.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	

			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	81.805.000,00	80.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			143.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00	90.138.000,00	90.138.000,00	-9.862.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			126.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				-	100 persen	460.000.000,00	435.464.000,00	513.948.000,00	53.948.000,00			-	- -	-		931.104.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			144.267.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	21.000.000,00	20.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.720.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1200 Orang	1200 Orang	200.000.000,00	195.200.000,00	296.756.000,00	96.756.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			454.946.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	235.000.000,00	219.264.000,00	196.232.000,00	-38.768.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			271.170.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana*				-	84 persen	220.000.000,00	198.628.000,00	382.514.000,00	162.514.000,00			-	- -	-		452.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.008.000,00	13.157.100,00	-11.842.900,00	Kab. Tulungagung,	DANA ALO	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN

			Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana										Boyolangu, Beji	KASI UMUM (DAU)					BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	16.484.000,00	12.547.700,00	-7.452.300,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan			1 Kegiatan	2 Kegiatan	175.000.000,00	162.136.000,00	356.809.200,00	181.809.200,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			392.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun										Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)						
	J U M L A H								**6.379.575.216,00**	**6.852.649.758,00**	**6.517.779.058,00**	**138.203.842,00**							**8.084.068.822,60**	

2025

RENJA PERUBAHAN



RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. RA Kartini No. 7 Telp. 0355 – 323655,
E - Mail : satpolpp@tulungagung.go.id
Website : satpolpp@tulungagung.go.id, Whatsapp (*Hotline*)
081336580145
TULUNGAGUNG 66212

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan R.A. Kartini No. 7 Telp. (0355) 323655
TULUNGAGUNG Kode Pos 66212

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 000.7.2.4/2908/ 121 / 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Rencana kerja dimaksud, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011- 2031;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

KETIGA : Renja SKPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



SONY WELLI AHMADI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770721 199711 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Tahun 2025, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perubahan disusun sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagai instansi penegak Peraturan Daerah/Peraturan Bupati agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan adanya rencana kerja yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Tulungagung sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Aamiin.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SONY WELLI AHMADI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770721 199711 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 yang merupakan periode tahun pertama.

RKPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RKPD dimanfaatkan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tulungagung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025. Renja Satpol PP Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung ini adalah :

a) Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ialah antara lain :

a. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta penguatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
b. Mengarahkan program dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutny dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN N-1

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan target Renstra SKPD.Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasrkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi,misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2030 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standart pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa ;

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindak Lanjut
d. Pada bagian lembar terakhir divantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Tulungagung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja masih ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program

dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangkan aplikasi *e-government.*

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian s.d. Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Target Realisasi %
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**11.975.139.724,00**	**13.753.200.124,00**	**100**	**2.803.186.640,00**	**20,38**
		Persentase ketepatan waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban dan aset (%)			**100**		
		Nilai SAKIP (-)			**79**		
		Indeks Profesionalitas ASN PD (-)			**45**		
		Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan (-)			**80**		
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja (dokumen)	4.500.000,00	9.000.000,00	11	0,00	0
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2500000	6.000.000,00	11	0,00	0
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2000000	3.000.000,00	11	0,00	0
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)	11284092924	12.720.632.924,00	12	2.634.116.216,00	20,71
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11187832924	12.609.332.924,00	116	2.634.116.216,00	20,89
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	96260000	111.300.000,00	12	0,00	0
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)	50000000	20.000.000,00	12	0,00	0
0.00.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	20.000.000,00	50	0,00	0
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (Persen)	169.060.600,00	372.010.000,00	100	41.594.200,00	11,18
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.640.000,00	8.000.000,00	10	0,00	0
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	51.000.000,00	108.612.000,00	10	0,00	0
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.009.600,00	5.000.000,00	10	0,00	0
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14.453.000,00	18.630.000,00	10	7.091.200,00	38,06

0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	21.660.000,00	31.150.000,00	12	6.580.000,00	21,12
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	71.298.000,00	200.618.000,00	12	27.923.000,00	13,92
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang yang tersedia (dokumen)	208.966.200,00	471.967.200,00	80	93.033.084,00	19,71
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	50.500.000,00	72.500.000,00	12	8.567.004,00	11,82
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	25.000.000,00	10.000.000,00	1	0,00	0
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	133.466.200,00	389.467.200,00	12	84.466.080,00	21,69
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia (persen)	223.520.000,00	159.590.000,00	100	34.443.140,00	21,58
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ()	62.800.000,00	142.540.000,00	21	34.443.140,00	24,16
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10.720.000,00	17.050.000,00	10	0,00	0
1.05.01.2.01.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00		0	0,00	0
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jumlah patroli selama 1 tahun) (kegiatan)**	**3.090.000.000,00**	**3.327.750.000,00**	**1000**	**3.327.750.000,00**	11,91
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	1.625.000.000,00	1.851.800.000,00	75	337.210.000,00	18,21
		Jumlah kasus gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani (kasus)			750		
		rata rata jumlah linmas per desa (orang)			30		
		Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jumlah patroli selama 1 tahun) ()					
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	100.000.000,00	140.703.000,00	6	25.675.000,00	18,25
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	180.000.000,00	225.000.000,00	4	30.340.000,00	13,48

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	30.000.000,00	139.647.000,00	5	14.300.000,00	10,24
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	20.000.000,00	16.450.000,00	1	0,00	0
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	20.000.000,00	0,00	-	0,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	50.000.000,00	60.000.000,00	12	18.550.000,00	30,92
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	30.000.000,00	0,00	-	0,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.000.000.000,00	1.220.000.000,00	12	248.345.000,00	20,36
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	20.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	25.000.000,00	50.000.000,00	145	0,00	0
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah dokumen Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	80.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	70.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada (%)	1.375.000.000,00	1.420.000.000,00	100	59.110.000,00	4,16
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	0,00	-	0,00	0

1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	25.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	300.000.000,00	400.000.000,00	12	13.580.000,00	3,40
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	900.000.000,00	1.020.000.000,00	12	45.530.000,00	4,46
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan)	90.000.000,00	55.950.000,00	3	0,00	0
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Jumlah dokumen Pembentukan Sekretariat PPNS	10.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	20.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah laporan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	20.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jum lah laporan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	20.000.000,00	0,00	-	0,00	0
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		55.950.000,00	4	0,00	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan anggaran pada kegiatan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis, kajian, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, guna memastikan keselarasan arah pembangunan.

Penyesuaian anggaran dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan arah dan prioritas kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden, serta kebijakan sektoral lainnya. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian kegiatan telaahan agar hasil kajian tetap relevan dengan isu-isu strategis nasional dan daerah.

Perubahan anggaran juga dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan baru atau penambahan ruang lingkup analisis.
2. Mengakomodasi kegiatan koordinasi, konsultasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut hasil telaahan.
3. Menyesuaikan waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan jadwal dan agenda kebijakan nasional.
4. Mendukung optimalisasi capaian keluaran (output) kegiatan agar tetap sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, perubahan anggaran bersifat strategis dan adaptif untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung

Perubahan anggaran pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja, kebijakan nasional, serta perkembangan kondisi keuangan daerah tahun berjalan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali arah dan prioritas pelaksanaan program serta kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan anggaran ini meliputi:

1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara efektif dengan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas kegiatan.
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui optimalisasi kegiatan operasional Satpol PP yang efisien dan terukur.
3. Meningkatnya sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

4. Terjaganya kesiapsiagaan personel dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat meskipun terdapat perubahan atau pengurangan alokasi anggaran.
5. Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil sesuai arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, perubahan anggaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu mendukung tercapainya target kinerja perangkat daerah secara optimal dan tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/Urusan bidang Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/Kurang Pagu
				Target sebelum Perubahan	Target sesudah Perubahan	Lokasi sebelum Perubahan	Lokasi sesudah Perubahan	Pagu sebelum Perubahan	Pagu sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**17.080.950.124**	**17.184.223.524**	**103.273.400**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**%**	**100**	**100**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**13.753.200.124**	**13.734.056.924**	**-19.143.200**
1.05.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi**	**Dokumen**	**22**	**22**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**9.000.000**	**7.933.000,00**	**-1.067.000**
1.05.01. 2.01. 0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	11	11	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	6.000.000	5.203.000	-797.000
1.05.01.2.01. 0007	evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	11	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	3.000.000	2.730.000	-270.000
1.05.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi**	**Dokumen**	**12**	**12**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**12.720.632.924**	**12.720.632.924**	**-**
1.05.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	108	108	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	12.609.332.924	12.609.332.924	-
1.05.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	111.300.000	111.300.000	-
1.05.01.2.05	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**20.000.000**	**-**	**-20.000.000**

1.05.01.2.05.0002	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Laporan			Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	20.000.000	0	-20.000.000
1.05.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**100**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**372.010.000**	**317.663.800**	**-54.346.200**
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	8.000.000	5.628.000	-2.372.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	108.612.000	100.736.800	-7.875.200
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	5.000.000	5.000.000	-
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	18.630.000	18.630.000	-
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	31.150.000	31.150.000	-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	200.618.000	156.519.000	-44.099.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi**	**%**	**100**	**100**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**471.967.200**	**461.217.200**	**-10.750.000**
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	72.500.000	72.500.000	-
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	10.000.000	0	-10.000.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	389.467.200	388.717.200	-750.000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**159.590.000**	**226.610.000**	**67.020.000**

1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Paket	21	21	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	142.540.000	209.560.000	67.020.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	10	10	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	17.050.000	17.050.000	-
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**3.327.750.000**	**3.450.166.600**	**122.416.600**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**1.851.800.000**	**1.992.708.600**	**140.908.600**
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	140.703.000	100.075.000	-40.628.000
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	4	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	225.000.000	180.448.600	-44.551.400
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Dokumen	4	4	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	139.647.000	109.455.000	-30.192.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	1	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	16.450.000	10.650.000	-5.800.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	60.000.000	56.560.000	-3.440.000

1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	1.220.000.000	1.510.880.000	290.880.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	50.000.000	24.640.000	-25.360.000
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**					**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**1.420.000.000**	**1.405.750.000**	**-14.250.000**
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4	4	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	400.000.000	400.000.000	-
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	2	2	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	1.020.000.000	1.005.750.000	-14.250.000
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**					**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**Pemerintah Kabupaten Tulungagung**	**55.950.000**	**51.708.000**	**-4.242.000**
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	4	4	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	55.950.000	51.708.000	-4.242.000

BAB. IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun
2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025,
maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perhubungan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuhkejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah□kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1) Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan Penyelenggara Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



SONY WELLI AHMADI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19770721 199711 1 001



RENJA
(PERUBAHAN)

2025

DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 dapatdiselesaikan tanpa adanya halangan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2025 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan 2025 ini dikerjakan dengan fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ini terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan serta analisis kebutuhan anggaran untuk tahun yang akan datang. Tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaporan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Kauman.

Tulungagung, 8 Juli 2025
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan
Kabupaten Tulungagung

Drs. Hartono, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197302101993111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum.....2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18
BAB IV PENUTUP.....23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan s/d Tahun 2025 KabupatenTulungagung 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkan di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Antara Renja dengan RKPD merupakan entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan pula bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Oleh karena itu harus terdapat kesesuaian antara Renja dengan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 - 2026. Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulungagung selanjutnya akan menjadi pedoman Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung sekaligus menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah untuk :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah;
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menentuan kegiatan tahunan dan prioritas program yang akan dibiayai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;
3. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Memudahkan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur;
5. Penyusunan kegiatan tahunan yang akan dianggarkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda Kabupaten Tulungagung; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung melaksanakan dua program dan tujuh kegiatan. Evaluasi terhadap hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja pada program ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 persen berdasarkan hasil survey kepada seluruh ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp 5.851.474.630,00 terealisasi sebesar Rp 5.088.648.160,00 (86,96%). Faktor pendukung tercapaianya program ini adalah sudah mulai terealisasinya setiap anggaran yang diperuntukan pengadaan peralatan kantor sehingga kinerja setiap bidang dapat direalisasikan tepat waktu. Pada

Program Penunjang Urusan Pemerintahan ini terdiri dari lima kegiatan, salah satu kegiatan yang memiliki realisasi yang cukup rendah yaitu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada sub "Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" pada tahun 2024 akhir hanya terealisasikan 69,27% dikarenakan pada perhitungan awal penyediaan anggaran listrik didasarkan pada perpindahan Sebagian pegawai yang semula berada di MAKO berpindah ke kantor eks BKPSDM sehingga beban listrik diestimaiskan akan naik karna memiliki beban untuk dua kantor. Namun pada tahun 2024 akhir masih dalam tahap pemeliharaan, sehingga anggaran tidak bisa terserap sesuai dengan rencana dan perhitungan awal.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

   Indikator kinerja pada program ini ada dua yaitu Persentase penurunan jumlah kebakaran dan Persentase Penanganan Pemadaman dan Penyelamatan di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terlapor. Persentase penurunan jumlah kebakaran memiliki tarhet 6,061 persen dan realisasinya 6,45 telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan indikator Persentase Penanganan Pemadaman dan Penyelamatan di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terlapor memiliki target 90,6 dan realisasinya juga sudah memenuhi target yaitu 90,7 persen. Sedangkan alokasi anggaran yang teralisasi pada kedua indikator tersebut adalah sebesar Rp.2.475.000.000 terealisasi Rp. 2.454.724.205

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan cukup baik. Semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai bahkan terlampaui. Hal tersebut disebabkan faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung melalui pembagian tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan s/d Tahun 2025 KabupatenTulungagung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**

					pemerintah daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	3 Dokumen	25%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Indeks	42 Orang	42 Orang	42 Orang	100%
				Administrasi Umum PerangkatDaerah	Prosentase Penyediaan Administrating umum yang sesuai SOP	80 %	80 %	80 %	27%	25%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%

				Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	13%	13%
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran**	75%	75%	75%	75%	75%
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit

				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, serta beberapa isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, yang merupakan tantangan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagai salah satu daerah yang kompleks, Kabupaten Tulungagung memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu trantibum linmas, antara lain :

Bertambahnya Ruang Publik. Salah satu capaian penting dalam pemerintahan Bupati yang sekarang adalah pembangunan ruang- ruang publik. Ruang-ruang publik ini menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Tidak berimbangnya rasio penduduk Kabupaten Tulungagung dengan jumlah Anggota Damkar. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung dengan 19 (sembilan belas) Kecamatan berbanding dengan jumlah Anggota Damkar yang kurang dari 200 (dua ratus) orang tentu tidak seimbang sehingga jangkauan Damkar Kabupaten Tulungagung dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran menjadi tidak maksimal. Sesuai dengan Permendagri No 60 Tahun 2021 jumlah personel Damkar Kabupaten Tulungagung idealnya adalah sebanyak 351 sd 450 PNS.

Respon atas pengaduan masyarakat. Di masa komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran perda Perkada dan gangguan trantibumlinmas kemudian juga memantau respon dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli dan sarana prasarana pemadam kebakaran. Tidak adanya pos pos

yang strategis yang tersebar di penjuru kabupaten untuk penanganan kebakaran. Pos untuk penanganan kebakaran hanya ada di satu lokasi sehingga kurang bisa efektif menjangkau lokasi yang jauh. Selain sapras pemadam kebakaran, kendaraan patroli, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang semakin meningkat karena Kabupaten Tulungagung sebagai Sentra Industri dan Kawasan Wisata serta akibat urbanisasi, maka perlu adanya peningkatan pelayanan khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya. Tantangannya adalah sebagai berikut :

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung akan menambah pos-pos keamanan trantibumlinmas dan pos-pos damkar di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 23 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tugas : perumusan kebijakan di Bidang Ketenteramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran, pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran,pelaksanaan administrasi dinas diBidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan kebakaran dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program adalah sebagai penuntun tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil yang diajukan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan musrenbang kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Praja. Untuk Tahun 2023 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan nihil.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dengan hasil evaluasi, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung mengajukan 2 (Dua) Program, 3 (tiga) kegiatan, dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

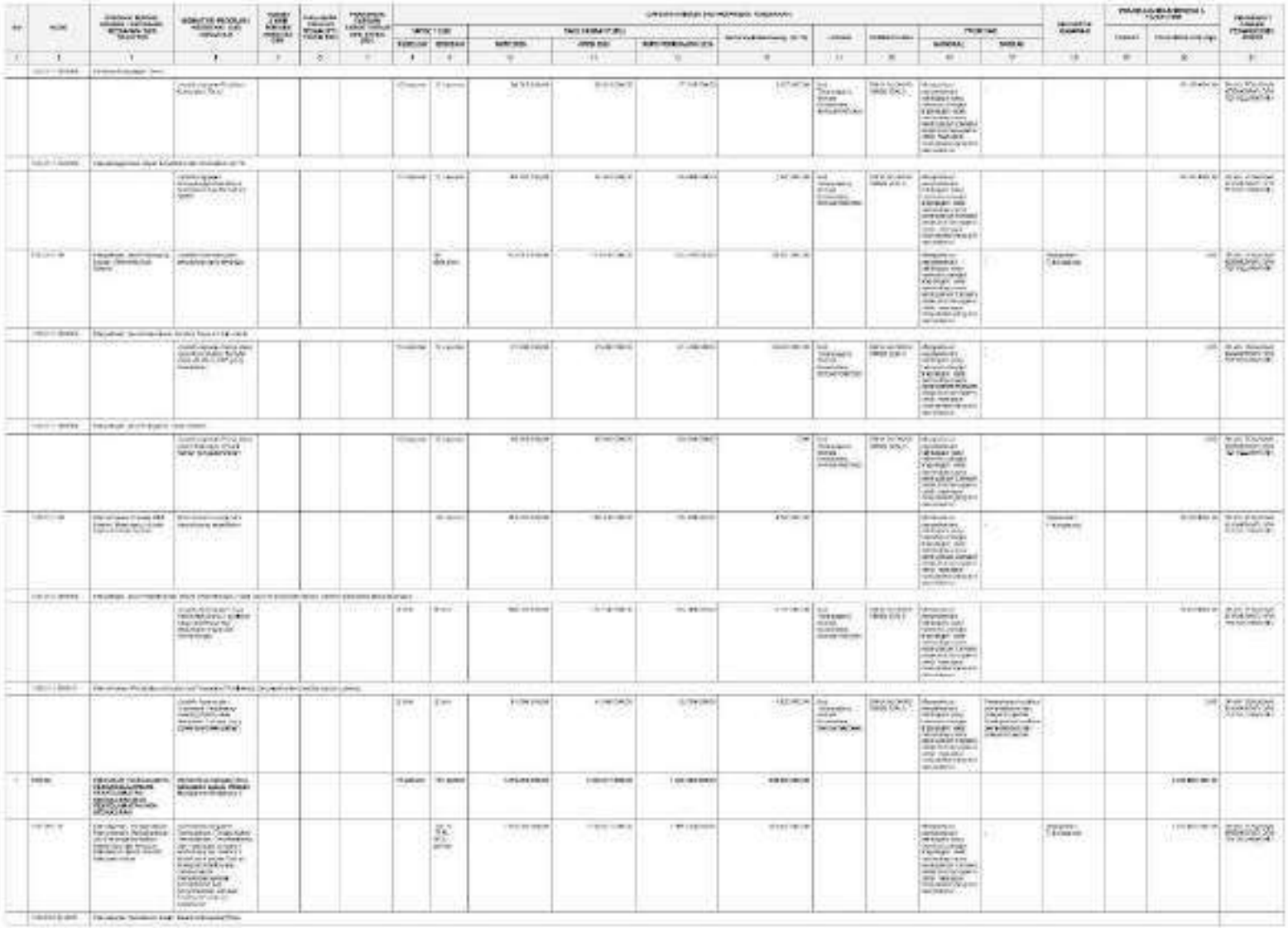
1. Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
   a. Kegiatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
      - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu

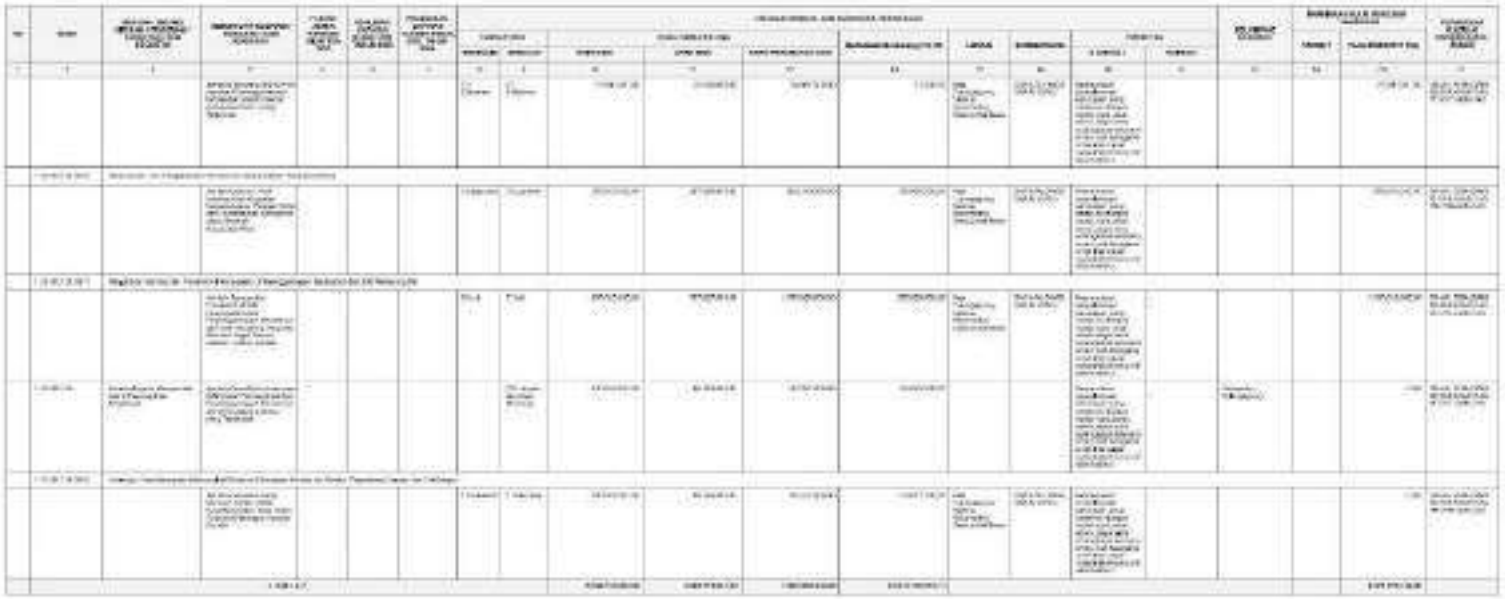
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN [illegible]





BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Tulungagung, 8 Juli 2025
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan
Kabupaten Tulungagung

Drs. Hartono, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197302101993111002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL
KAB TULUNGAGUNG

TAHUN
2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dikehadirat Allah SWT, atas limpahan taufik dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Pembangunan bidang sosial merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tulungagung, sebagai respon terhadap

Permasalahan-permasalahan sosial yang timbul dan terjadi di masyarakat Kabupaten Tulungagung seperti keterlantaran, kecacatan/disabilitas, ketunaan dan kerentanan sosial serta kejadian bencana baik alam maupun sosial yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan dibidang sosial.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, meliputi rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggaran, yang disertai rencana target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sehingga dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang sosial.

Saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung terutama ditahun mendatang tetap kami harapkan, semoga hal ini dapat bermanfaat terutama bagi stakeholder/pemangku kepentingan.

Tulungagung, 8 juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

WAHIYD MASRUR S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730712 199302 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....4

1.2 LandasanHukum.....5

1.3 Maksud danTujuan.....7

1.4 Sistematika Penulisan.....8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025

sd Tribulan ke I.....10

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana kerja dan Pendanaan.....27

BAB IV : PENUTUP.....37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang merefleksikan adanya perkembangan isu-isu perencanaan pembangunan daerah yang terjadi secara faktual maupun aktual.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan,sasaran,Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalamRencanaKerja PemerintahDaerah.
2. Renja merupakan acuan PD ntuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2024.
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung,

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Peyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kab./Kota ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bansos, Pemberdayaan, Kesejahteraan Sosial
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Tahun Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Kabupaten Tulungagung;
32. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025,

1.3 .Maksud danTujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai bentuk penjabaran Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung .

Tujuan yang juga hendak dicapai dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
2. Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;

3. Sebagai pedoman dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

1.4. Sisttimatika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung disusun disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 Penyusunan perubahan rencana program/kegiatan Tahun 2025 memperhatikan rencana capaian kinerja Tahun 2025, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, salah satu tugasnya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir Triwulan I:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA DINAS SOSIAL. PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025 TRIWULAN I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
				K	K	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
1	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian KInerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)***	**100**	**100**	**100**	**4,236,249,500.00**	**71.4**	**805,834,606.00**	**71.4**	**19.0**
	0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja (dokumen)*	6	8	6	3,200,000.00	1	-	16.67	**-**
	0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	6	6	6	3,200,000.00	1	-	16.67	**-**
	0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)*	1	1	11	3,954,794,500.00	0	635,510,663.00	-	**16.1**
	0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	4	4	24	3,842,494,500.00	18	635,110,663.00	75.00	**16.5**

	0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	22	24	4	111,300,000.00	1	-	25.00	**-**
	0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	1	1	1	1,000,000.00	0	400,000.00	-	**40.0**
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (dokumen)*	1	1	1	22,400,000.00	0		-	**-**
	0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	100	600	2	22,400,000.00	1	9,690,000.00	50.00	**43.3**
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (Persen)*	100	600	100	226,529,000.00	25	108,885,800.00	25.00	**48.1**
	0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	1	1	6,000,000.00	1	1,952,500.00	100	**32.5**
	0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	1	1	59,318,000.00	1	14,281,000.00	100	**24.1**
	0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	25	25	25	25,000,000.00	2	7,720,300.00	8.00	**30.9**
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	5	5	5	13,584,000.00	2	4,152,000.00	40.00	**30.6**
	0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12	12	12	6,800,000.00	3	-	25.00	**-**
	0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan*	12	12	12	146,827,000.00	3	80,780,000.00	25.00	**55.0**

			Konsultasi SKPD (Laporan)								
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)*	1	1	1	147,545,000.00	0	-	-	**-**
	0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	1	1	1	147,545,000.00	0	-	-	**-**
	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (dokumen)*	100	100	1	181,077,600.00	0	50,635,105.00	-	**28.0**
	0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	12	12	12	69,780,000.00	3	24,122,326.00	25.00	**34.6**
	0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	12	12	12	17,900,000.00	3	1,110,000.00	25.00	**6.2**
	0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	100	100	12	111,297,600.00	3	26,512,779.00	25.00	**23.8**
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara (Persen)*	100	100	100	130,710,000.00	0	10,803,038.00	-	**8.3**
	0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	1	1	1	40,110,000.00	0	5,699,938.00	-	**14.2**

	0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	4	4	4	40,600,000.00	0	5,103,100.00	-	**12.6**
	0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	1	1	1	50,000,000.00	0	-	-	**-**
2	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang Aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Persen)***	**100**	**100**	**100**	**47,500,000.00**	**25**	**45,835,000.00**	**25.00**	**96.5**
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dibina (Persen)*	100	100	100	47,500,000.00	25	45,835,000.00	25.00	96.5
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	19	18	19	207,121,000.00	17	45,835,000.00	89.47	22.1
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)*	30	30	30	118,000,000.00	0	-	**-**	**-**
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan*	1	2	1	47,500,000.00	0	-	**-**	**-**

			Kabupaten/Kota (Sertifikat)								
3	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (Persen)***	**100**	**100**	**100**	**523,793,000.00**	**29.5**	**84,263,100.00**	**29.50**	**16.1**
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial memperoleh bantuan (Orang)*	600	600	650	459,982,000.00	127	57,969,300.00	19.54	12.6
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	60	60	70	50,000,000.00	10	9,410,000.00	14.29	18.8
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	261	261	391	254,720,000.00	0	9,864,000.00	-	3.9

	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	26	26	100	92,360,000.00	0	9,600,000.00	-	10.4
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	30	30	30	40,000,000.00	4	9,964,000.00	13.33	24.9
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	200	200	200	150,000,000.00	5	19,131,300.00	2.50	12.8
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (Orang)*	**110**	**110**	120	63,811,000.00		26,293,800.00	-	41.2
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	110	110	50	21,800,000.00	0	4,640,000.00	-	21.3
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	100	100	100	42,011,000.00	2	21,653,800.00	2.00	51.5
4	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial (Persen)***	100	100	**100**	**14,087,519,000.00**	**1.35**	**149,701,400.00**	**1.35**	**1.1**

	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang diverifikasi dan divalidasi (Persen)*	100	100	100	14,087,519,000.00	25	149,701,400.00	**25.00**	1.1
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)*	81175	81175	81200	142,119,000.00	143	47,678,400.00	**0.18**	33.5
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)*	14245	14245	100000	13,945,400,000.00	163	102,023,000.00	**0.16**	0.7
5	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana yang ditangani (Persen)***	100	100	**100**	**100,000,000.00**	**5**	**18,863,800.00**	**105**	**18.9**
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (Persen)*	100	100	100	100,000,000.00	5	9,813,800.00	105	9.8
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	200	200	350	100,000,000.00	19	9,813,800.00		9.8
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana yang terlibat dalam penanganan bencana (Persen)*	100	100	100	42,192,000.00	23	9,050,000.00	123	21.4
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	43	43	43	42,192,000.00	10	9,050,000.00		21.4

			(Orang)								
6	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (Persen)***	**100**	**100**	**100**	**20,000,000.00**	**25**	**2,179,800.00**	**125**	**10.9**
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara (TMP)*	1	1	1	20,000,000.00	1	2,179,800.00	100	**1.9**
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)*	560	560	570	20,000,000.00	144	2,179,800.00		**10.9**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini terdiri dari 2 (dua) program

2 (dua) program urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang urusan dan 6 (enam) kegiatan urusan perencanaan. Selanjutnya dari kegiatan-kegiatan tersebut dirinci ke dalam 38 sub kegiatan yang terbagi dalam 19 sub kegiatan penunjang urusan dan 19 sub kegiatan urusan perencanaan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan disertai target

kinerja dan pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

DINAS SOSIAL KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
						DINAS SOSIAL				17.968.270.333,00	19.988.379.100,00	19,572,986,700	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.968.270.333,00	19.988.379.100,00	19,572,986,700	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.968.270.333,00	19.988.379.100,00	19,572,986,700	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - Rata Tingkat Capaian KInerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.244.927.533,00	4.715.156.100,00	4.282.157.300	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	6 dokumen	6 dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	520.000	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	520.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	3.517.909.933,00	3.954.794.500,00	3.706.410.500	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.405.609.933,00	3.842.494.500,00	3.594.694.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	111.300.000,00	111.300.000,00	111.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	416.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	22.400.000,00	22.400.000,00	11.400.000,00	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	22.400.000,00	22.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	324.070.000,00	257.529.000,00	. 231.310.100	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	4.205.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.318.000,00	59.318.000,00	51.748.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	19.254.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	13.584.000,00	13.584.000,00	9.304.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	4.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	213.368.000,00	146.827.000,00	142.197.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	63.580.000,00	147.545.000,00	93.360.000,00	
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	63.580.000,00	147.545.000,00	93.360.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	176.617.600,00	198.977.600,00	198.977.600,00	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	47.420.000,00	69.780.000,00	91.780.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.900.000,00	17.900.000,00	8.480.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	111.297.600,00	111.297.600,00	111.297.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	137.150.000,00	130.710.000,00	130.710.000,00	

	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.870.000,00	40.110.000,00	40.110.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	43.280.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	100 Persen	405.000.000,00	372.621.000,00	307.837.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	100 Persen	100 Persen	405.000.000,00	372.621.000,00	307.837.000	
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	19 Orang	225.000.000,00	207.121.000,00	188.257.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	30 Lembaga	130.000.000,00	118.000.000,00	87.440.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat	50.000.000,00	47.500.000,00	32.140.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 Persen	100 Persen	725.000.000,00	587.080.000,00	650.58.400	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial memperoleh bantuan	650 Orang	650 Orang	600.000.000,00	587.080.000,00	598.867.100	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	79.460.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang							
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	322 Orang	260.000.000,00	254.720.000,00	199.640.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	100 Orang	100.000.000,00	92.360.000,00	80,180,000.00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	40 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	104,212,900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	140.374.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	120 Orang	120 Orang	125.000.000,00	63.811.000,00	63.811.000,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	21.800.000,00	21.765.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang							

							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30 Orang	100.000.000,00	42.011.000,00	29.906.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial	100 Persen	100 Persen	12.398.342.800,00	14.087.519.000,00	14.080.357.600	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang diverifikasi dan divalidasi	100 Persen	100 Persen	12.398.342.800,00	14.087.519.000,00	14.080.357.600	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	81200 Orang	81200 Orang	150.000.000,00	142.119.000,00	187.447.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100000 Keluarga	100000 Keluarga	12.248.342.800,00	13.945.400.000,00	13.892.910.200	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	142.192.000,00	129.817.000,00	

	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	99.977.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.977.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi							
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang terlibat dalam penanganan bencana	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	42.192.000,00	29.840.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana							
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0 Kampung	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							

							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	44 Orang	75.000.000,00	42.192.000,00	29.840.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	19.168.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	1 TMP	1 TMP	20.000.000,00	20.000.000,00	19.168.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	570 Makam	570 Makam	20.000.000,00	20.000.000,00	19.168.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini merupakan acuan kerja bagi seluruh bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Sosial serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam rangka Menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025**.**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan Perubahan Rencana Kerja Program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan di Dinas Sosial. Renja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung disusun sebagai bahan penetapan kebijakan dan penganggaran didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, sekaligus merupakan acuan/pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sehingga lebih terkoordinasi, terintegrasi dan terkontrol didalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD.

Saran dan kritik yang bersifat membangun kami harapkan demi perbaikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial kedepan.

Tulungagung 8 Jul 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

WAHIYD MASRUR S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730712 199302 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Disusun oleh:

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2025 ini merupakan bentuk penyesuaian perubahan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam 1 tahun berjalan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2025 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Tulungagung. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap perubahan rencana kerja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tulungagung, 8 Juli 2025
Mengetahui,
KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
TULUNGAGUNG

AGUS SANTOSO, S.Sos
NIP. 19650816 198703 1013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG 19
BAB IV PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir Triwulan I 10

Tabel 3. 1 Rencana Kerja dan pendanaan pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.....20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki kewajiban menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang merefleksikan adanya perkembangan isu-isu ketenagakerjaan yang terjadi secara faktual maupun aktual. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Perubahan Reancana Kerja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaan, dan pelaksanaan pembangunan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas

hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan,

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Penyusunan,perubahan rencana program/kegiatan Tahun 2025 memperhatikan rencana capaian kinerja Tahun 2025, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dengan demikian, salah satu tugasnya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir Triwulan I:

Tabel 2. 1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir Triwulan I

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
				UPT BALAI LATIHAN KERJA						
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	**07**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
2	**7**	**3**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi**	**87 Persen**	**79,79 Persen**	**87 Persen**	**0 Persen**	**0 Persen**
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	100 Persen	92,79 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						

2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**07**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
2	**07**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12,12 Persen**	**12,12 Persen**
2	07	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi dan Laporan Kinerja	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen
2	07	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen
2	07	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminstrasi Kepegawaian PD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen
2	07	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	22,84 Persen	22,84 Persen

2	07	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Persen
2	07	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 Persen
2	07	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	24 Persen	12 Persen
2	**07**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi**	**87 Persen**	**79,79 Persen**	**87 Persen**	**0 Persen**	**0 Persen**
2	07	03	2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase peserta pelatihan yang Mengukuti Uji kompetensi	100 Persen	92,79 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen

2	07	03	2,01	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktifitas pada Tahun n	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	0 Lembaga	0 Persen
2	07	03	2,02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase LPKS yang mendapatkan Pembinaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Lembaga	0 Persen
2	07	03	2,02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS Yang Dibina	62 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	0 Lembaga	0 Persen
2	07	03	2,05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktifitas Peserta Pemagangan	32 Persen	31 Persen	32 Persen	0 Persen	0 Persen
2	07	03	2,05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen

2	**07**	**04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**86,5 Persen**	**85,42 Persen**	**86,5 Persen**	**82,40 Persen**	**95,26 Persen**
2	07	04	2,01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencari Kerja yang terlayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	07	04	2,01	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	145 Orang	144 Orang	150 Orang	0 Orang	0 Persen
2	07	04	2,03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Pekerjaan yang di informasikan	300 Lowongan	300 Lowongan	300 Lowongan	0 Lowongan	0 Persen
2	07	04	2,03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui JOB Fair/Bursa Kerja	350 Orang	350 Orang	350 Orang	0 Orang	0 Persen
2	07	04	2,04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang mendapatkan layanan pelindungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen

2	07	04	2,04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	298 Orang	200 Orang	300 Orang	0 Orang	0 Persen
2	**07**	**05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Undang - Undang Ketenagakerjaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2	07	05	2,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	80 Perusahaan	80 Perusahaan	80 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Persen
2	07	05	2,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan HI dan Terdaftar di WLKP Online	28 perusahaan	28 perusahaan	28 perusahaan	10 perusahaan	35,71 Persen
2	07	05	2,01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi sarana HI (PP/PKB Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen

					peserta Jamsostek serta Pengupahan					
2	07	05	2,02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen
2	07	05	2,02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	3 Perkara	7 Perkara	3 Perkara	1 Perkara	133,3 Persen
2	07	05	2,02	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.000 Orang	35.749 Orang	8.000 Orang	0 Orang	0 Persen
3				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						

3	32			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen
3	32	03		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kuota Transmigran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen
3	32	03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkrosnisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Persen
3	32	03	2,01	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	1 KK	10 KK	0 KK	0 Persen

Penjelasan hasil evaluasi terhadap capaian Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini memiliki indikator "Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Satuan Persen)" dengan target 100 Persen. Sampai dengan triwulan I realisasinya sebesar 12,12 persen.
   Program ini terdiri dari 7 Kegiatan.

2. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

   Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat 6 Kegiatan dengan Indikator Program Peserta Pelatihan yang memiliki Kompetensi sebesar 87 %.
   Salah satu Kegiatan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diampu oleh UPT BLK Kabupaten Tulungagung.

3. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

   Program Penempatan Tenaga Kerja terdapat 6 Kegiatan dengan Indikator Program Persentase Persentase penempatan tenaga kerja dengan target 86,5 %

4. **Program Hubungan Industrial**

   Program Hubungan Industrial terdapat 2 Kegiatan dengan Indikator Program Persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Undang – Undang Ketenagakerjaan mencapai 100 %

5. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

   Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdapat 3 Kegiatan dengan Indikator Program Persentase transmigran yang ditempatkan mencapai 100 %

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah serta menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini terdiri dari 5 (lima) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 3 (tiga) program urusan tenaga kerja dan 1 (satu) program urusan transmigrasi. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan disertai target kinerja dan pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Kerja dan pendanaan pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				UPT Balai Latihan Kerja									
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**07**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2	**07**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi**	**persen**	**87 persen**	**87 persen**					
2	**07**	**03**	**2.01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**1.084.000.000**	**1.084.000.000**	0
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan**	**Indikator Kinerja Program/**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**

				Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan		Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
2	07	03	2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	128 Orang	128 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.084.000.000	1.084.000.000	0
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**10.416.640.884**	**10.246.541.119**	-170.099.765
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									0
2	**07**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	

2	**07**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**6.130.216.884**	**5.902.962.119**	-227.254.765
2	**07**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**25.542.100**	**16.476.800**	-9.065.300
2	07	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.245.500	5.500.000	-4.745.500
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.014.000	1.524.000	-1.490.000

					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
2	07	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.573.000	1.073.000	-500.000
2	07	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000	1.400.000	-250.000

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.815.000	1.500.000	-315.000

					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2	07	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.722.500	2.179.800	-542.700
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.522.100	3.300.000	-1.222.100

2	**07**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**			**5.302.101.683**	**5.051.101.683**	-251.000.000
2	07	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.252.901.683	4.952.701.683	-300.200.000
2	07	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.200.000	98.400.000	49.200.000
2	**07**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**40000000**	**0**	-40.000.000
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50 Paket	0 Paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000	0	-40.000.000

2	07	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2 Orang	0 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0	0
2	**07**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**199.890.936**	**181.921.336**	-17.969.600
2	07	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5 Paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.475.215	9.475.215	0
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100 Paket	100 Paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.169.600	48.000.000	-7.169.600

2	07	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.630.117	16.630.117	0
2	07	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Paket	6 Paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.963.400	36.763.400	-9.200.000
2	07	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 Laporan	50 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.652.604	71.052.604	-1.600.000

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	**07**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**			**70.500.000**	**70.500.000**	0
2	07	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1 Unit	1 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.500.000	70.500.000	0

					Lainnya yang Disediakan								
2	**07**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia**	**Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**			**405.580.065**	**396.360.200**	-9.219.865
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.500.000	109.500.000	0

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.631.500	30.631.500	0

2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.448.565	256.228.700	-9.219.865
2	**07**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang terpelihara.**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**86.602.100**	**186.602.100**	100.000.000

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19 Unit	19 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.102.100	81.102.100	0
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan	5.500.000	5.500.000	0

									, Semua Kel/Desa	, Semua Kel/Desa				
2	07	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	100.000.000	100.000.000	
2	**07**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi**	**persen**	**87 persen**	**87 persen**			**184.164.000**	**185.000.000**	836.000	

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	**07**	**03**	**2.01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**94.028.000**	**100.000.000**	5.972.000

2	07	03	2.01	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	94.028.000	100.000.000	5.972.000
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang mendapatkan pembinaan	persen	100 persen	100 persen			**44.668.000**	**35.000.000**	-9.668.000
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	62 Lembaga	62 Lembaga	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	44.668.000	35.000.000	-9.668.000

2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktifitas peserta pemagangan	persen	32 persen	32 persen			**45.468.000**	**50.000.000**	4.532.000
2	07	03	2.05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	45.468.000	50.000.000	4.532.000

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	**07**	**04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja**	**persen**	**26 persen**	**26 persen**			**875.000.000**	**884.386.000**	9.386.000
2	**07**	**04**	**2.01**	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencari Kerja Yang dilayanai**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**600.000.000**	**709.386.000**	109.386.000
2	07	04	2.01	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	145 Orang	150 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung,	600.000.000	709.386.000	109.386.000

									Tulungagung, Semua Kel/Desa	Tulungagung, Semua Kel/Desa			
2	**07**	**04**	**2.03**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah lowongan pekerjaan yang diinformasikan**	**Lowongan**	**300 Lowongan**	**300 Lowongan**			**125.000.000**	**125.000.000**	0

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	04	2.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	350 Orang	350 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000	125.000.000	0
2	**07**	**04**	**2.04**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI yang mendapatkan layanan pelindungan**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**150.000.000**	**50.000.000**	-100.000.000

2	07	04	2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	298 Orang	298 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000	50.000.000	-100.000.000
2	**07**	**05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Undang - Undang Ketenagakerjaan**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**2.043.260.000**	**2.090.145.000**	46.885.000
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	**07**	**05**	**2.01**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan**	**Perusahaan**	**80 Perusahaan**	**80 Perusahaan**			**43.260.000**	**22.645.000**	-20.615.000

2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	28 Perusahaan	28 Perusahaan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.620.000	17.525.000	-7.095.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
2	07	05	2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.640.000	5.120.000	-13.520.000

2	**07**	**05**	**2.02**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**2.000.000.000**	**2.067.500.000**	67.500.000

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
2	07	05	2.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	3 Perkara	3 Perkara	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000	25.000.000	-25.000.000
2	07	05	2.02	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksanaanya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8000 Orang	8000 Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000.000	2.042.500.000	92.500.000

3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**32**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
3	**32**	**03**		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase calon transmigran yang siap ditempatkan**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**			**100.000.000**	**100.048.000**	48.000
3	**32**	**03**	**2.01**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kuota Transmigran yang Terpenuhi**	**persen**	**100 persen**	**100 persen**					
3	32	03	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000	50.000.000	0

					Daerah Kabupaten/ Kota									
Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**		**Lokasi**		**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**		**Tambah/ Kurang**
							Target Sebelum Perubahan	**Target Setelah Perubahan**	**Lokasi sebelum Perubahan**	**Lokasi Setelah Perubahan**	**Pagu Sebelum Perubahan**	**Pagu Setelah Perubahan**	
3	32	03	2.01	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000	50.048.000	48.000

BAB IV
PENUTU
P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini merupakan acuan kerja bagi seluruh bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dalam rangka Menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun 2025. Seluruh perubahan yang terjadi dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

Tahun

2025

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta ketentuan lain yang berlaku. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung tetap relevan, adaptif, serta sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan II Tahun 2025. Melalui dokumen ini diharapkan arah kebijakan, prioritas program, serta sasaran kegiatan dapat lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kerja sama dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga mitra, maupun masyarakat. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal, serta menjadi acuan dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat memberikan arah yang jelas bagi keberhasilan pembangunan, khususnya dalam urusan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

dr. KASIL ROKHMAD, MMRS.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 200212 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Daftar Isi

BAB I 1

P*ENDAHULUAN* 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. *Landasan Hukum* 1

1.3. *Maksud dan Tujuan* 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6

BAB III 20

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

Perubahan anggaran pada tahun 2025, karena terdapat kurangnya anggaran dan penyesuaian pada sub kegiatan sebagai berikut : 31

BAB IV 32

PENUTUP 32

Daftar Tabel

Tabel 3. Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 22

BAB I
P*ENDAHULUAN*

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan berpedoman pada Renstra dan Renja yang telah ditetapkan dan dengan menyesuaikan perkembangan di lapangan, maka disusunlan Renja Perubahan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.2. *Landasan Hukum*

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas KB, PP dan PA Tahun 2025 adalah:(copy dari renstra tapi tanpa perda RPJM dan ditambah

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
m. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
n. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
o. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.3. ***Maksud dan Tujuan***

Maksud dari penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi kerangka dasar Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik eksternal maupun internal.
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam menentukan prioritas – prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang bertujuan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menyusun Program Kegiatan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung untuk menentukan prioritas prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan Program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja, kedudukan Renja tahun rencana dalam periode dokumen RKPD, keterkaitan antara dokumen Renja dengan dokumen RKPD, Renstra

SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sasaran penyusunan dokumen Renja Dinas Keluarga Berencanan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah

untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Analisis capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I tahun berkenaan menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja DKBPPPA TW I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
							Target		Realisasi s/d Triwulan I		Tingkat Realisasi	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)***	100	6.708.859.974	84	5.568.394.745	100	6.708.859.974				
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan yang dibuat (dokumen)*	12	5.060.760.874	12	3.902.353.249	12	5.060.760.874	3	926.826.941	25	18.31
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	26	4.962.960.874	26	3.811.353.249	26	4.962.960.874	26	926.826.941	100	18.67
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	26	97.800.000	26	91.000.000	26	97.800.000	0	0	0	0
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat_Daerah (dokumen)*	1	1.760.000	1	40.502.500	1	1.760.000	0	0	0	0
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	1	0	1	36.025.000	1	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	1	0	1	1.000.000	1	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*	1	0	1	877.500	1	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	1	1.760.000	1	2.600.000	1	1.760.000	0	0	0	0

0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat_Daerah (Dokumen)*	12	354.907.800	12	616.479.226	12	354.907.800	3	102.513.000	25	28.88
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	50	2.392.000	0	0	50	2.392.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	235.319.400	1	364.673.700	1	235.319.400	0	85.100.00	0	36.166
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	1	21.046.200	1	13.576.800	1	21.046.200	0	0	0	0
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	1	21.759.200	1	26.977.500	1	21.759.200	0	7.175.000	0	32.97
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	1	74.391.000	1	211.251.226	1	74.391.000	0	10.238.000	0	13.76
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia (dokumen)*	12	1.134.028.400	12	731.463.523	12	1.134.028.400	3	221.888.928	25	19.56
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	1	295.100.000	1	102.131.949	1	295.100.000	0	52.305.126	0	17.72
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	58.650.000	1	27.135.000	1	58.650.000	0	23.260.000	0	39.65
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	780.278.400	1	602.196.574	1	780.278.400	0	146.323.797	0	18.75
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah (%)*	100	157.402.900	100	277.596.247	100	157.402.900	25	46.659.632	25	29.64
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	1	141.750.000	1	213.760.247	1	141.750.000		46,659.632		32.91

0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	1	15.652.900	1	63.836.000	1	15.652.900	0	0	0	0
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			246.476.000		239.671.400		246.476.000	0	0	0	0
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			206.476.000		199.904.600		206.476.000	0	15.179.200	0	7.35
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*	1	176.476.000	1	199.904.600	1	176.476.000	0	15.179.200	0	8.60
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	*Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)*	53	30.000.000	0	0	53	30.000.000	0	0	0	0
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000		39.766.800		40.000.000	0	960.000	0	2.4
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*	1	40.000.000	1	39.766.800	1	40.000.000	0	960.000	0	2.4
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase Pembinaan kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan (%)***	100	60.000.000	99	49.702.725	100	60.000.000	0	0	0	0

2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan kapasitas (lembaga)*	2	30.000.000	2	24.824.025	2	30.000.000	0	0	0	2.4
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*	1	30.000.000	1	24.824.025	1	30.000.000	0	0	0	0
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		24.878.700		30.000.000	0	0	0	0
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)*	1	30.000.000	1	24.878.700	1	30.000.000	0	0	0	0
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Perangkat_Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak (%)***	100	75.000.000	100	74.909.800	100	75.000.000	0	0	0	0
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang dimanfaatkan (%)*	100	75.000.000	100	74.909.800	100	75.000.000	0	0	0	0
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*	1	75.000.000	1	74.909.800	1	75.000.000	1	0	100	0
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Pemenuhan Hak Anak (%)***	100	251.183.000	100	254.054.300	100	251.183.000	0	11.249.600	0	4.47

2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Perangkat_Daerah, Dunia Usaha dan Media yang mempunyai komitmen terhadap PHA (%)*	100	40.000.000	100	29.564.300	100	40.000.000	0	0	0	0
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)*	6	40.000.000	6	29.564.300	6	40.000.000	0	0	0	0
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi (%)*	100	211.183.000	100	224.490.000	100	211.183.000	0	11.249.600	0	5.32
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*	30	211.183.000	30	224.490.000	30	211.183.000	0	11.249.600	0	5.32
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			75.000.000		99.449.900		75.000.000		7.710.000	0	10.28
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang memelukan perlindungan khusus (lembaga)*	4	75.000.000	4	99.449.900	4	75.000.000		7.710.000	0	10.28
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan)*	1	75.000.000	1	99.449.900	1	75.000.000		7.710.000		10.28
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Angka Kelahiran Total (TFR)***	2	863.000.000	2	517.107.280	2	863.000.000	0	0	0	0

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*jumlah kegiatan yang disinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (kegiatan)*	5	30.000.000	5	160.000	5	30.000.000		0	0	0
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)*	1	30.000.000	1	160.000	1	30.000.000	0	0	0	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk (dokumen)*	10	833.000.000	10	516.947.280	10	833.000.000	0	20.880.310	0	2.50
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)*	12	30.000.000	12	12.415.000	12	30.000.000	1	2.750.000	8.33	9.16
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)*	12	251.400.000	12	255.300.000	12	251.400.000	0	0	0	0
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*	12	551.600.000	12	249.232.280	12	551.600.000	3	18.130.310	25	3.28
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR) (-)***	64	6.100.611.300	64	6.186.493.726	64	6.100.611.300		9.167.900	0	0.15
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contracetive Prevelance Rate/mCPR) (%)	64		64		64		0	0	0	0
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah pelaksanaan advoksi Pengendalian Penduduk dan KB (kali)*	19	1.687.639.000	19	1.231.200.226	19	1.687.639.000		119.469.037	0	7.07
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)*	1	0	1	152.377.000	1	0	0	0	0	0

2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	*Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)*	4	30.000.000	4	4.517.500	4	30.000.000	0	0	0	0
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)*	12	589.000.000	12	460.301.226	12	589.000.000	2	53.706.537	16.66	9.11
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)*	4	380.000.000	4	207.450.000	4	380.000.000	1	65.762.500	25	17.30
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)*	4	125.000.000	4	63.537.500	4	125.000.000	1	0	25	0
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*	6	563.639.000	6	343.017.000	6	563.639.000	0	0	0	0

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan (orang)*	58	1.565.302.300	58	2.412.036.000	58	1.565.302.300	47		81.03	0
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*	271	813.000.000	271	813.000.000	271	813.000.000	0	0	0	0
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)*	1	752.302.300	1	1.599.036.000	1	752.302.300	0	0	0	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Faskes terpenuhi Alat dan Obat Kontrasepsi (%)*	100	2.366.870.000	100	1.946.201.500	100	2.366.870.000	0	139,900,400	0	5.91
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*	1	66.600.000	1	70.876.000	1	66.600.000	20	11,630,000	2000	17.46
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)*	4340	2.195.240.000	4340	1.782.643.000	4340	2.195.240.000	361	2,195,240,000	8.31	100
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*	1	46.800.000	1	54.715.000	1	46.800.000	1	9.167.900	100	19.58
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	*Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)*	250	58.230.000	250	37.967.500	250	58.230.000	20	3.020.000	8	5.18

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*rosentase mitra kerja yang memberikan dukungan terhadap Program KKBPK (%)*	100	480.800.000	100	597.056.000	100	480.800.000	0	0	0	0
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)*	12	100.000.000	12	152.401.000	12	100.000.000	0	0	0	0
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)*	40	380.800.000	40	444.655.000	40	380.800.000	0	0	0	0
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) (-)***	11,7	6.749.900.000	99	5.928.317.500	11,7	6.749.900.000	0	3.425.000	0	0.05
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina (kelompok)*	685	1.212.500.000	685	642.617.500	685	1.212.500.000	0	3.425.000	0	0.28
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan)*	6	76.800.000	6	104.975.000	6	76.800.000	0	0	0	0
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*	1	1.005.700.000	1	239.722.500	1	1.005.700.000	1	3.425.000	100	0.34

2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)*	25	130.000.000	25	297.920.000	25	130.000.000	0	0	0	0
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (organisasi)*	5	5.537.400.000	5	5.285.700.000	5	5.537.400.000	0	0	0	0
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)*	1	2.517.000.000	1	2.517.000.000	1	2.517.000.000	0	0	0	0
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)*	1	3.020.400.000	1	2.768.700.000	1	3.020.400.000	0	0	0	0
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)***	100	320.160.000	0	0	100	320.160.000		19.920.900	0	6.22
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat_Daerah (dokumen)*	1	6.000.000	0	0	1	6.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	1	6.000.000	0	0	1	6.000.000	0	0	0	0

0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat_Daerah (dokumen)*	12	237.620.000	0	0	12	237.620.000		19.920.900		8.38
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	973.800	0	0	1	973.800	0	0	0	0
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	74.158.500	0	0	1	74.158.500	0	9.976.000	0	13.4
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	1	0	0	0	1	0	0	2,496,000	0	
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	1	47.929.400	0	0	1	47.929.400	0	3,203,400	0	6.68
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	1	27.771.600	0	0	1	27.771.600	0	3,845,000	0	13.84
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	1	86.786.700	0	0	1	86.786.700	0	0	0	0
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*	100	42.940.000	0	0	100	42.940.000	0	0	0	0
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	38.940.000	0	0	1	38.940.000	0	400.000	0	1.02
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah (%)*	100	33.600.000	0	0	100	33.600.000	0	400.000	0	1.19
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	1	33.600.000	0	0	1	33.600.000	0		0	0

2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terlayani (%)***	100	180.756.500	90	98.966.500	100	180.756.500	0		0	0
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyedia layanan Rujukan Lanjutan (layanan)*	9	180.756.500	9	98.966.500	9	180.756.500	0	3.600.000	0	1.99
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)*	12	70.000.000	12	98.966.500	12	70.000.000	0	3.600.000	0	5.14
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)*	12	110.756.500	0	0	12	110.756.500	0	0	0	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Kasus Perlindungan Khusus Anak yang terlayani (%)***	100	70.000.000	93	130.781.000	100	70.000.000	0	**6,220,000**	0	8.88
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Aman bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (buah)*	1	70.000.000	1	130.781.000	1	70.000.000	0	6,060,000	0	8.65
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)*	12	70.000.000	12	130.781.000	12	70.000.000	0	5,110,000	0	7.3
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)*	12	231.854.600	0	0	12	231.854.600	0	950.000	0	0.40

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 21.778.924.174 dengan 10 program dan 26 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar 5.870.414.107 dengan capaian kinerja fisik sebesar 50% dan capaian kinerja keuangan sebesar 26,95%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung pada Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 1 Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	LOKASI		Kebutuhan Dana/Pagu Indikati				
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM (K)	SESUDAH (K)	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**22.150.850.274,00**	**22.333.824.174,00**	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**			**100**	**100**	**7.029.019.974,00**	**6.922.033.974,00**	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan yang dibuat*	*Dokumen*			12	12	5.060.760.874,00	5.245.640.874,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26	27	4.962.960.874,00	5.155.160.874,00	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26	26	97.800.000,00	90.480.000,00	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen*			1	1	7.760.000,00	1.120.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	1.760.000,00	1.120.000,00	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen*			12	12	592.527.800,00	300.545.100,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	50	2.392.000,00	1.674.400,00	

	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	235.319.400,00	165.197.500,00	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	21.046.200,00	7.442.300,00	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	21.759.200,00	18.274.200,00	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	74.391.000,00	19.147.300,00	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia*	*Dokumen*			12	12	1.176.968.400,00	1.166.338.400,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	295.100.000,00	295.100.000,00	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	58.650.000,00	67.640.000,00	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	780.278.400,00	780.278.400,00	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah*	*Persen*			100	100	191.002.900,00	208.389.600,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	141.750.000,00	164.140.000,00	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	15.652.900,00	10.649.600,00	
1,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengarustamaan Gender**	**Persen**			**-**	100	**246.476.000,00**	**205.965.700,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase perangkat daerah yang melaksanakan PUG*	*Persen*			-	100	206.476.000,00	185.789.900,00	

	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	176.476.000,00	168.849.000,00	
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	*Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG*	*Orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53	53	30.000.000,00	16.940.900,00	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan*	*Kelompok*			-	2	40.000.000,00	20.175.800,00	
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	40.000.000,00	20.175.800,00	
2,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terlayani**	**Persen**			**-**	100	**260.206.500,00**	**213.800.400,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penguatan Tim Layanan Perlindungan Perempuan*	*kali*			-	3	55.870.000,00	55.870.000,00	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6	55.870.000,00	55.870.000,00	
3,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Pembinaan kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**			100	100	**60.000.000,00**	**24.883.200,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan kapasitas*	*Lembaga*			2	2	30.000.000,00	12.441.600,00	
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	30.000.000,00	12.441.600,00	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga yang tersedia*	*layanan*			-	1	30.000.000,00	12.441.600,00	

	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*layanan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	30.000.000,00	12.441.600,00	
4,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak**	**Persen**			100	100	**75.000.000,00**	**61.307.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang dimanfaatkan*	*Persen*			100	100	75.000.000,00	61.307.000,00	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*Dokumen*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	75.000.000,00	61.307.000,00	
5,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak**	**Persen**			100	100	**251.183.000,00**	**171.731.500,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Media yang mempunyai komitmen terhadap PHA*	*Persen*			100	100	40.000.000,00	29.095.000,00	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha*	*Organisasi*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	6	40.000.000,00	29.095.000,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi*	*Persen*			100	100	211.183.000,00	142.636.500,00	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30	30	211.183.000,00	142.636.500,00	
6,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Perlindungan Khusus Anak yang terlayani**	**Persen**			**-**	100	**455.453.500,00**	**417.013.900,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Tim Layanan Perlindungan Anak yang mendapatkan penguatan kapasitas*	*Persen*			-	100	45.630.000,00	45.630.000,00	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA*	Orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100	45.630.000,00	45.630.000,00	

	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang memelukan perlindungan khusus*	*Lembaga*			4	4	120.440.000,00	97.700.300,00	
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK*	*Kegiatan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	75.000.000,00	46.260.300,00	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**13.773.511.300,00**	**14.317.088.500,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (TFR)**	**Angka**			**2 -**	**2 -**	**923.000.000,00**	**873.809.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*jumlah kegiatan yang disinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk*	*Kegiatan*			5	5	30.000.000,00	13.196.600,00	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	*Kegiatan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	30.000.000,00	13.196.600,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk*	*Dokumen*			10	10	893.000.000,00	860.612.400,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12	60.000.000,00	60.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	30.000.000,00	18.282.000,00	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	251.400.000,00	251.400.000,00	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	551.600.000,00	530.930.400,00	
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR)**	**Persen**			64	64	**6.100.611.300,00**	**6.721.724.900,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah pelaksanaan advoksi Pengendalian Penduduk dan KB*	*kali*			19	19	1.687.639.000,00	1.548.084.900,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	

	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	*Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	4	30.000.000,00	20.404.800,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	589.000.000,00	589.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	4	380.000.000,00	380.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	4	125.000.000,00	125.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	*Organisasi*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	6	563.639.000,00	433.680.100,00	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan*	*orang*			58	58	1.565.302.300,00	2.304.200.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	*orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271	271	813.000.000,00	813.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	*Organisasi*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	752.302.300,00	1.491.200.000,00	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Faskes terpenuhi Alat dan Obat Kontrasepsi*	*Persen*			100	100	2.366.870.000,00	2.388.640.000,00	

	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	66.600.000,00	66.600.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4340	4340	2.195.240.000,00	2.195.240.000,00	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	46.800.000,00	46.800.000,00	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	*Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria*	*orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250	250	58.230.000,00	80.000.000,00	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*rosentase mitra kerja yang memberikan dukungan terhadap Program KKBPK*	*persen*			100	100	480.800.000,00	480.800.000,00	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	100.000.000,00	100.000.000,00	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	*Kampung*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	40	380.800.000,00	380.800.000,00	
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Usia Kawin Pertama (UKP)**	**Persen**			11,7	11,7	**6.749.900.000,00**	**6.721.554.600,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina*	*Kelompok*			685	685	1.212.500.000,00	1.184.154.600,00	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*	*Dokumen*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	6	76.800.000,00	76.800.000,00	

	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	1.005.700.000,00	977.354.600,00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	25	130.000.000,00	130.000.000,00	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga*	*Organisasi*			5	5	5.537.400.000,00	5.537.400.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	2.517.000.000,00	2.517.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	3.020.400.000,00	3.020.400.000,00	
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**22.150.850.274,00**	**22.333.824.174,00**	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**			100	100	**7.029.019.974,00**	**6.922.033.974,00**	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen*			1	1	7.760.000,00	1.120.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0	6.000.000,00	0,00	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen*			12	12	592.527.800,00	300.545.100,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	973.800,00	670.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	74.158.500,00	28.592.500,00	

	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	47.929.400,00	5.569.500,00	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	27.771.600,00	16.968.400,00	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	86.786.700,00	37.009.000,00	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persen*			100	100	1.176.968.400,00	1.166.338.400,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	4.000.000,00	4.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	38.940.000,00	19.320.000,00	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah*	*Persen*			100	100	191.002.900,00	208.389.600,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1	33.600.000,00	33.600.000,00	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	0	0,00	0,00	
2,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terlayani**	**Persen**			100	100	**260.206.500,00**	**213.800.400,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyedia layanan Rujukan Lanjutan*	**Layanan**			9	9	180.756.500,00	134.350.400,00	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang*	**orang**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	12	12	70.000.000,00	43.689.000,00	

		Kabupaten/Kota	*Mendapatkan Layanan Pengaduan*		Semua Kel/Desa	Semua Kel/Desa					
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	**layanan**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	110.756.500,00	90.661.400,00	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang telah mengikuti penguatan kapasitas*	*Lembaga*			-	3	23.580.000,00	23.580.000,00	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	*orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15	23.580.000,00	23.580.000,00	
3,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Perlindungan Khusus Anak yang terlayani**	**Persen**			100	100	**455.453.500,00**	**417.013.900,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Aman bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus*	**Buah**			1	1	289.383.500,00	273.683.600,00	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan*	**Orang**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	12	70.000.000,00	41.829.000,00	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	**Layanan**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	2	219.383.500,00	231.854.600,00	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang memelukan perlindungan khusus*	*Lembaga*			-	4	120.440.000,00	97.700.300,00	
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*	*orang*	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16	45.440.000,00	51.440.000,00	
	J U M L A H								**22.150.850.274,00**	**22.333.824.174,00**	

Perubahan anggaran pada tahun 2025, karena terdapat kurangnya anggaran dan penyesuaian pada sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pada sub kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sebesar 362,700,000 untuk honor PPKBD (286 orang) masing-masing Rp 100.000 dan Sub PPKBD (1846 orang) masing-masing Rp 50.000 selama 3 bulan.
b. Pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat penambahan sebesar Rp. 192.200.000 untuk gaji CPNS 1 (satu) orang dan PPPK sebanyak 3 (tiga) orang

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung 2024 – 2026. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Akhirnya Kepada semua pihak kami harapkan masukannya demi lancarnya pelaksanaan kerja, dan kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

dr. KASIL ROKHMAD, MMRS.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 200212 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BADAN PANGAN NASIONAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN
RENJA
TAHUN 2025







Jln. Raya Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung

(0355) 326459

dketahananpanganta@gmail.com

@dkp_tulungagung

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2O25.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2O25 berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung 2024 - 2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 2 tahun berkenan. Dokumen ini juga telah disesuaikan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2O25.

Demikian semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi institusi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, maupun mitra kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

AGUS SISWANTORO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 198903 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB 2. EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU .. 8
BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25
BAB 4. PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 : Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 9

TABEL 2.2 : Evaluasi Hasil Pelaksanan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung..... 15

TABEL 3.1 : Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung..... 26

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan baru/kegiatan alternative penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegitan serta perubahan lokasi dan kelompk sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung mengingat bahwa:

a. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.
b. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi SIPD RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2025.
b. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tulungagung, sehingga Renja PD juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2024. Senada dengan Perubahan RKPD 2024 yang sesuai dengan Perda RPJMD, maka Perubahan Renja PD juga harus menyesuaikan Renstra PD. Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Perubahan Rencana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

I.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan disusun berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulunaggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-PD Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun berjalan;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan

kerangka anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja PD, Proses Penyususnan Perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menggambarkan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja PD yang disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja samapai dengan triwulan II dengan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja PD maupun terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungahung.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadapa target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung melakukan penyesuaian terhadap beberapa program dan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional, yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta percepatan pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut, dilakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan alokasi belanja dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas, menuju kegiatan yang mendukung pencapaian target nasional dan prioritas daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan integrasi data kependudukan. Refocusing ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau berulang dengan dampak rendah terhadap output pelayanan, disesuaikan atau ditiadakan, demi optimalisasi pencapaian kinerja yang lebih strategis.

Secara keseluruhan, kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2025 dilaksanakan secara terencana, proporsional, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program kerja Dinas Ketahanan Pangan tetap berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dengan alokasi Rp 6.383.916.051,00. Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
2.09	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	**6.383.916.051,00**	**1.336.561.628,00**	**20,94%**	**5.064.354.423,00**
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.588.916.051,00**	**1.186.490.068,00**	**21,23%**	**4.402.425.98300**
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**99.040.000,00**	**0,00**	**0%**	**99.040.000,00**
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.296.000,00	0,00	0,00%	15.296.000,00
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.744.000,00	0,00	0,00%	83.744.000,00
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.769.346.451,00**	**1.105.878.010,00**	**23,19%**	**3.663.468.441,00**
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.677.498.451,00	1.105.878.010,00	23,64%	3.571.620.441,00
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.600.000,00	0,00	0,00%	90.600.000,00
2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.248.000,00	0,00	0,00%	1.248.000,00
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**154.910.000,00**	**0,00**	**92,66%**	**154.910.000,00**
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.600.000,00	0,00	0,00%	26.600.000,00
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	128.310.000,00	0,00	0,00%	128.310.000,00
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**171.612.000,00**	**19.366.800,00**	**11,28%**	**152.245.200,00**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.854.000,00	1.909.900,00	39,35%	2.944.100,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.357.600,00	7.164.400,00	8,49%	77.193.200,00
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.503.300,00	1.997.500,00	17,36%	9.505.800,00
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.007.900,00	1.100.000,00	12,21%	7.907.900,00
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	7.167.000,00	0,00	0%	7.167.000,00
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.600.000,00	2.620.000,00	22,59%	8.980.000,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.788.200,00	4.575.000,00	12,78%	31.213.200,00
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.334.000,00	0,00	0%	7.334.000,00
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**26.000.000,00**
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.000.000,00	0,00	0%	26.000.000,00
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.057.600,00**	**46.306.258,00**	**19,21%**	**194.751.342,00**
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000,00	300.000,00	28,85%	740.000,00
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.800.000,00	20.894.629,00	15,05%	117.905.371,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.217.600,00	25.111.629,00	24,81%	76.105.971,00
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.950.000,00**	**14.939.000,00**	**11,77%**	**112.011.000,00**
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Dinas Jabatan	79.880.000,00	14.939.000,00	18,70%	64.941.000,00
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.890.000,00	0,00	0%	34.890.000,00
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.180.000,00	0,00	0,00%	12.180.000,00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**5.000.000,00**	**960.000,00**	**19,20%**	**4.040.000,00**
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**5.000.000,00**	**960.000,00**	**19,20%**	**4.040.000,00**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Iinfrastruktur Pendukung Kemandiriian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	5.000.000,00	960.000,00	19,20%	4.040.000,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**670.000.000,00**	82.434.460	12,30%	587.565.540,00
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**270.000.000,00**	69.606.960	25,78%	200.393.040,00
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.000.000,00	32.752.560	32,75%	67.247.440,00
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	125.000.000,00	22.716.400	18,17%	102.283.600,00
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.158.000	91,58%	842.000,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	960.000	19,20%	4.040.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	5.000.000,00	640.000	12,80%	4.360.000,00
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.000.000,00	2.740.000	27,40%	7.260.000,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.000.000,00	640.000	12,80%	4.360.000,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**205.000.000,00**	1.760.000	0,86%	203.240.000,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	960.000	0,48%	199.040.000,00
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	800.000	16,00%	4.200.000,00
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**195.000.000,00**	11.067.500	5,68%	183.932.500,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	40.000.000,00	-	0,00%	40.000.000,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000,00	10.427.500	6,95%	139.572.500,00
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5.000.000,00	640.000	12,80%	4.360.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**100.000.000,00**	63.086.500	63,09%	36.913.500,00
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**30.000.000,00**	10.464.500	34,88%	19.535.500,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.000.000,00	10.464.500	34,88%	19.535.500,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**70.000.000,00**	52.622.000	75,17%	17.378.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	49.282.000	89,60%	5.718.000,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	3.340.000	66,80%	1.660.000,00
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**20.000.000,00**	3.590.600	17,95%	16.409.400,00
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	3.590.600	17,95%	16.409.400,00
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	694.000	13,88%	4.306.000,00
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5.000.000,00	320.000	6,40%	4.680.000,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	1.616.600	32,33%	3.383.400,00
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5.000.000,00	960.000	19,20%	4.040.000,00

Sampai dengan triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Berdasarkan data realisasi anggaran, tingkat serapan keuangan telah mencapai 46,59%, sementara realisasi fisik kegiatan pada sebagian besar program menunjukkan hasil yang melampaui target dari target telah ditetapkan. Secara rinci, hasil evaluasi pelaksanaan program Adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah

   Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan II mencapai 45,26% dari target 100%, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan penunjang

yang masih berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

2. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

   Indikator : Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan

   Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan II mencapai 63,16%. Dari total 57 lumbung pangan yang telah termanfaatkan dengan baik ada 36 lumbung.

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Indikator : Persentase Peningkatan Cadangan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan

   Realisasi kinerja pada program ini dengan indikator Persentase Peningkatan Cadangan Pangan sampai dengan triwulan II mencapai 26,67% dari target 20%, sedangkan untuk skor pola pangan harapan belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap perhitungan oleh pihak ketiga.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   Indikator : Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)

   Realisasi kinerja pada program ini mencapai 2,95% dari target <5%. Capaian ini berdasarkan hasil analisis peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yaitu terdapat 8 desa yang ada di prioritas 1 sampai dengan 3.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Indikator : Persentase Pangan Segar Aman dari Bahan Kimia (%)

   Realisasi kinerja pada indikator program ini mencapai 19,5% dari target 62%, capaian program ini meliputi pelaksanaan pengujian sebanyak 20 sampel dengan hasil 16 sampel terindikasi aman.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai rencana, dengan capaian output yang sebagian besar telah memenuhi atau bahkan melampaui target. Hasil laporan evaluasi secara lebih rinci dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
					DINAS KETAHANAN PANGAN						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**99,92%**	**100%**	**47,06%**	**47,06%**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**30 Dokumen**	**25 Dokumen**	**12 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00%**
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	6 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**100,00%**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	33 orang	41 orang	41 orang	100%
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**3 Dokumen**	**75,00%**
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	1 Orang	33 Orang	0 Orang	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	75,00%
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1Paket	1 Paket	100,00%
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%
2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	50,00%
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	20 Laporan	20Laporan	8 Laporan	25,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**4 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**0 Unit**	**0,00%**
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00%
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**0%**	**0,00%**
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	20 Unit	20 Unit	10 Unit	50,00%
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	20 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**63,16%**	**63,16%**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur dan sarana pendukung yang tersedia**	**84 unit**	**74 unit**	**79 unit**	**79 unit**	**100,00%**
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 unit	6 unit	1 unit	1 unit	0,00%
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Cadangan Pangan**	**20%**	**20%**	**20%**	**0%**	**0,00%**
						Skor Pola Pangan Harapan	-93,70	94,53	94,55	0,00	0,00%
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Lembaga Pangan yang dikembangkan**	**68 lembaga**	**46 unit**	**46 unit**	**46 unit**	**100,00%**
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28 Keluarga	434 Keluarga	434 Keluarga	434 Keluarga	100,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	21 Laporan	24 Laporan	13 Laporan	2 Laporan	15,38%
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi pangan	47 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	100,00%
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	52 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	50,00%
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	-	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan Pangan Beras**	**52 ton**	**42 ton**	**43 ton**	**58,42 ton**	**135,86%**
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52 ton	13,5 ton	13,5 ton	13,5 ton	100,00%
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 ton	1 ton	2,5 ton	2,8 ton	1112%
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Angka Kecukupan Energi**	**96,30%**	**96,20%**	**96,20%**	**0,00%**	**00,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**< 5 %**	**< 5 %**	**< 5 %**	**2,95**	**169,49%**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Sesuai Ketentuan/ Standart**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00%**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00%**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Rawan Pangan, Balita Stunting, Balita Gizi Kurang, Balita Gakin dan Keluarga Kurang Beruntung yang Ditangani**	**5 Desa**	**5 Desa**	**5 Desa**	**25 Desa**	**500%**
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	00,00%
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Aman dari Bahan Kimia**	**057%**	**58%**	**62%**	**28,5%**	**89,60%**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk PSAT Aman dan Bermutu**	**45%**	**27%**	**36%**	**7%**	**19,44%**
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan ini mencakup penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan aktual, baik dari sisi kebutuhan layanan masyarakat, perubahan kebijakan, maupun tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja.

Selain itu, penyesuaian rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

Rencana kerja dan pendanaan yang telah disesuaikan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan. Berikut merupakan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja tahun 2025:

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
					DINAS KETAHANAN PANGAN							**6.383.916.051,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.383.916.051,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.383.916.051,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**			**5.588.916.051,00**	**6.087.354.623,00**	**1.326.403.684,00**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**Dokumen**	**30**	**12**			**99.040.000,00**	**3.744.000,00**	**(95.296.000,00)**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung,	15.296.000,00	1.872.000,00	(13.424.000,00)
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung,	83.744.000,00	1.872.000,00	(81.872.000,00)
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dokumen**	**5**	**5**			**4.769.346.451,00**	**5.531.444.523,00**	**762.098.072,00**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	37	41	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung	4.677.498.451,00	5.438.596.523,00	**762.098.072,00**
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	90.600.000,00	90.600.000,00	-
2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	4	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung,	1.248.000,00	1.248.000,00	-
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**-**	**4**			**154.810.000,00**	**124.220.000,00**	**(30.690.000,00)**
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	26.600.000,00	800.000,00	(25.800.000,00)
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	33	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	128.310.000,00	123.420.000,00	(4.890.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**%**	**100**	**100**			**171.612.000,00**	**90.500.500,00**	**(81.111.500,00)**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	4.854.000,00	2.473.000,00	(2.381.000,00)
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	84.357.600,00	33.251.600,00	(51.106.000,00)
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	11.503.300,00	8.019.000,00	(3.484.300,00)
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	9.007.900,00	8.610.000,00	(397.900,00)
2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	7.167.000,00	646.000,00	(6.521.000,00)
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	9	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	35.788.200,00	26.096.900,00	(9.691.300,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	7.334.000,00	1.404.000,00	(5.930.000,00)
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**Unit**	**3**	**2**			**26.000.000,00**	**5.200.000,00**	**(20.800.000,00)**
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	2	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	26.000.000,00	5.200.000,00	(20.800.000,00)
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia**	**Dokumen**	**1**	**1**			**241.057.600,00**	**240.745.600,00**	**(312.000,00)**
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	1.040.000,00	728.000,00	(312.000,00)
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	138.800.000,00	138.800.000,00	-
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	101.217.600,00	101.217.600,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**	**85**	**85**			**126.950.000,00**	**91.500.000,00**	**(35.450.000,00)**
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	20	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	46.870.000,00	40.610.000,00	6.260.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan**	**%**	**100**	**100**			**5.000.000,00**	**2.240.000,00**	**(2.760.000,00)**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan**	**Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia**	**Unit**	**79**	**79**			**5.000.000,00**	**2.240.000,00**	**(2.760.000,00)**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
					Daerah Kabupaten/Kota									
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Unit	7	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung	0,00	320.000,00	320.000,00
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	5.000.000,00	1.920.000,00	(3.080.000,00)
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Cadangan Pangan**	**%**	**20**	**20**			**670.000.000,00**	**1.049.950.400,00**	**484.944.250,00**
						Skor Pola Pangan Harapan	**skor**	**93,6**	**93,6**					
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Lembaga Pangan yang Dikembangkan**	**Lembaga**	**68**	**65**	**Kab. Tulungagung,**	**Kab. Tulungagung,**	**270.000.000,00**	**668.001.400,00**	**398.001.400,00**
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	5.000.000,00	480.000,00	(4.520.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	640.000,00	(4.360.000,00)
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Keluarga	169	434	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	92.201.400,00	(7.798.600,00)
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	9	13	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.00,00	326.120.000,00	201.120.000,00
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembangaan Distribusi Pangan	Unit	7	46	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, semua kel/Desa kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sambirobyong	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, semua kel/Desa kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sambirobyong	10.000.000,00	160.000.000,00	150.000.000,00
2	09	03	2.01	00012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan Tingkat produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	48	48	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	73.560.000,00	68.560.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	2	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	960.000,00	(4.04.000,00)
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	4	4	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.040.000,00	(960.000,00)
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan pangan beras**	**Ton**	**43**	**43**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**205.000.000,00**	**195.531.500,00**	**(9.468.500,00)**
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Ton	13,5	13,5	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	194.091.500,00	(5.908.500,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintahan Kab/Kota	Ton	30	2,5	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.440.000,00	(3.560.000,00)
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Angka Kecukupan Energi**	**%**	**96.20**	**96.20**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**195.000.000,00**	**186.417.500,00**	**(8.582.500,00)**
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	2	Kab. Tulungagung, Kauman, Kauman	Kab. Tulungagung, Kauman, Kauman	150.000.000,00	125.777.500,00	(24.222.500,00)
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per Tahun	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	640.000,00	(4.360.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**%**	**< 5**	**< 5**			**100.000.000,00**	**247.508.500,00**	**(48.141.150,00)**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah peta kerebtanan dan kerawanan pangan sesuai ketetntuan/standar**	**Dokumen**	**2**	**2**			**30.000.000,00**	**15.745.000,00**	**(14.255.000,00)**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan	Dokumen	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.745.000,00	(14.255.000,00)
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Rawan Pangan, Balita Stunting, Balita gizi kurang, Balita gakin dan keluarga Kurang Beruntung yang ditangani**	**Desa**	**5**	**5**			**70.000.000,00**	**231.763.000,00**	**161.763.500,00**
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Kedungcangkring Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem, Tulungagung, Gondang, Wonokromo,	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Kedungcangkring Kab. Tulungagung, Sendang, Sendang Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem Kab.	55.000.000,00	222.623.500,00	167.623.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
										Kab. Tulungagung, Kalidawir, Rejosar iKab. Tulungagung, Bandung, Soko	Tulungagung, Gondang, Wonokromo Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Pucanglaban Kab. Tulungagung, Kalidawir, RejosariKab. Tulungagung, Bandung, Soko Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Ngrejo			
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penaganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.660.000,00	(1.340.000,00)
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem	Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem	5.000.000,00	480.000,00	(4.520.000,00)
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi kabipaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.638.400,00	5.361.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Aman dari Bahan Kimia**	**%**	**62**	**62**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**20.000.000,00**	**47.928.000,00**	**27.928.000,00**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang mengedarkan produk PSAT aman dan bermutu**	**%**	**36**	**36**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**20.000.000,00**	**47.928.000,00**	**27.928.000,00**
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	32.928.000,00	27.928.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
									J U M L A H			**6.383.916.051,00**	**7.434.981.523,00**	71.096.561.090,54

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dimaksud agar dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan merupakan faktor penentu keberhasilan Renja ini. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan konstribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam memastikan pelaksanaan Renja Perubahan ini berjalan optimal, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD dalam rangka penyesuaian pendanaan dan prioritas kegiatan;
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program secara periodik agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;
- Menyusun rencana aksi bagi setiap program/kegiatan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun, diharapkan seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

AGUS SISWANTORO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 198903 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**6.383.916.051,00**	**8.327.594.823,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**							**8.727.305.635,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.383.916.051,00**	**8.327.594.823,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**							**8.727.305.635,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.383.916.051,00**	**8.327.594.823,00**	**7.434.981.523,00**	**1.051.065.472,00**							**8.727.305.635,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**5.588.916.051,00**	**6.053.082.823,00**	**6.087.354.623,00**	**1.326.403.684,00**							**6.915.319.735,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja*				30 Dokumen	12 Dokumen	99.040.000,00	92.000.000,00	3.744.000,00	-95.296.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		4.118.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	6 Dokumen	15.296.000,00	8.256.000,00	1.872.000,00	-13.424.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			2.059.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	6 Laporan	83.744.000,00	83.744.000,00	1.872.000,00	-81.872.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			2.059.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan*				5 Dokumen	5 Dokumen	4.769.346.451,00	5.271.044.523,00	5.531.444.523,00	762.098.072,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		6.084.588.975,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.677.498.451,00	5.179.196.523,00	5.439.596.523,00	762.098.072,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.983.556.175,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	90.600.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			99.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			1.372.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*				-	4 Dokumen	154.910.000,00	154.910.000,00	124.220.000,00	-30.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		136.642.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	26.600.000,00	26.600.000,00	800.000,00	-25.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	33 Orang	128.310.000,00	128.310.000,00	123.420.000,00	-4.890.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			135.762.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP*				100 %	100 %	171.612.000,00	161.920.700,00	90.500.500,00	-81.111.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		99.550.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.854.000,00	4.854.000,00	2.473.000,00	-2.381.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			2.720.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	84.357.600,00	84.357.600,00	33.251.600,00	-51.106.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			36.576.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	11.503.300,00	11.503.300,00	8.019.000,00	-3.484.300,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			8.820.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.007.900,00	9.007.900,00	8.610.000,00	-397.900,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			9.471.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	7.167.000,00	7.167.000,00	646.000,00	-6.521.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			710.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	9 Laporan	11.600.000,00	11.600.000,00	10.000.000,00	-1.600.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	35.788.200,00	26.096.900,00	26.096.900,00	-9.691.300,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			28.707.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.334.000,00	7.334.000,00	1.404.000,00	-5.930.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			1.544.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang yang diperoleh*				3 Unit	2 Unit	26.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-20.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		224.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	2 Unit	26.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-20.800.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.720.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			219.230.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	241.057.600,00	241.057.600,00	240.745.600,00	-312.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		264.820.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.040.000,00	1.040.000,00	728.000,00	-312.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			800.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	138.800.000,00	138.800.000,00	138.800.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			152.680.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	101.217.600,00	101.217.600,00	101.217.600,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			111.339.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				85 %	85 %	126.950.000,00	126.950.000,00	91.500.000,00	-35.450.000,00			-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		100.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	20 Unit	79.880.000,00	79.880.000,00	79.880.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			87.868.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.890.000,00	34.890.000,00	170.000,00	-34.720.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			187.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	17 Unit	12.180.000,00	12.180.000,00	11.450.000,00	-730.000,00	Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			12.595.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan**				**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**1.005.000.000,00**	**2.240.000,00**	**547.462.000,00**							**552.462.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Infrastruktur dan sarana pendukung yang tersedia*				79 Unit	79 Unit	5.000.000,00	1.005.000.000,00	2.240.000,00	-2.760.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Binaan DKP		552.462.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				7 Unit	1 Unit	0,00	1.000.000.000,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Kepuhrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.920.000,00	-3.080.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			2.112.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Kepuhrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**				**20 93.6 % Skor**	**20 93.6 % Skor**	**670.000.000,00**	**1.060.392.000,00**	**1.049.950.400,00**	**484.944.250,00**							**1.154.944.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Lembaga Pangan yang Dikembangkan*				68 Lembaga	65 Lembaga	270.000.000,00	538.080.000,00	668.001.400,00	398.001.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Binaan DKP		734.801.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	480.000,00	-4.520.000,00	Kab. Tulungagung, Bandung, Kesambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			528.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	640.000,00	-4.360.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			704.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				169 Keluarga	434 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	92.201.400,00	-7.798.600,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Serut Kab. Tulungagung, Boyolangu, Boyolangu Kab. Tulungagung, Kedungwaru, Ringinpitu Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Samar Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Wonorejo Kab. Tulungagung, Sendang, Nyawangan Kab. Tulungagung, Sendang, Nglurup Kab. Tulungagung, Sendang, Kedoyo Kab. Tulungagung, Sendang, Geger Kab. Tulungagung, Gondang, Notorejo Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sambirobyong Kab. Tulungagung, Ngunut, Sumberejo Kulon Kab. Tulungagung, Rejotangan, Tegalrejo Kab. Tulungagung, Besuki, Besole Kab. Tulungagung, Bandung, Sukoharjo Kab. Tulungagung, Bandung, Mergayu Kab. Tulungagung, Bandung, Ngunggahan Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Jenggalungharjo Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Kresikan Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Pakisrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			101.421.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				9 laporan	13 laporan	125.000.000,00	246.120.000,00	326.120.000,00	201.120.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			358.732.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				7 Unit	46 Unit	10.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Sumbergempol, Sambirobyong	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			176.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				48 Laporan	48 Laporan	5.000.000,00	3.560.000,00	73.560.000,00	68.560.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			80.916.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.400.000,00	960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			1.056.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.040.000,00	-960.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			9.944.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan beras*				-	43 Ton	205.000.000,00	199.240.000,00	195.531.500,00	-9.468.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Binaan DKP		215.084.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				13,5 Ton	13,5 Ton	200.000.000,00	194.240.000,00	194.091.500,00	-5.908.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			213.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				30 Ton	2,5 Ton	5.000.000,00	5.000.000,00	1.440.000,00	-3.560.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			1.584.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Angka Kecukupan Energi*				96.20 %	96.20 %	195.000.000,00	323.072.000,00	186.417.500,00	-8.582.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Binaan DKP		205.059.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			66.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	228.072.000,00	125.777.500,00	-24.222.500,00	Kab. Tulungagung, Kauman, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			138.355.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	640.000,00	-4.360.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			704.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**"d 5 %**	**"d 5 %**	**100.000.000,00**	**189.120.000,00**	**247.508.500,00**	**-48.141.150,00**							**51.858.850,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah peta kerentanan dan kerawanan pangan sesuai ketentuan/standar*				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	23.120.000,00	15.745.000,00	-14.255.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Desa Rawan Pangan		17.319.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	23.120.000,00	15.745.000,00	-14.255.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			17.319.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa Rawan Pangan, Balita Stunting, Balita gizi kurang, Balita gakin dan Keluarga Kurang Beruntung yang ditangani*				5 Desa	5 Desa	70.000.000,00	166.000.000,00	231.763.500,00	161.763.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Desa Rawan Pangan		34.539.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	151.000.000,00	222.623.500,00	167.623.500,00	Kab. Tulungagung, Pagerwojo, Kedungcangkring Kab. Tulungagung, Sendang, Sendang Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem Kab. Tulungagung, Gondang, Wonokromo Kab. Tulungagung, Pucanglaban, Pucanglaban Kab. Tulungagung, Kalidawir, Rejosari Kab. Tulungagung, Bandung, Soko Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Ngrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			24.485.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.660.000,00	-1.340.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			4.026.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	480.000,00	-4.520.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Sidem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			528.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Aman dari Bahan Kimia**				**62 %**	**62 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**47.928.000,00**	**32.720.800,00**							**52.720.800,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha yang mengedarkan produk PSAT aman dan bermutu*				36 %	36 %	20.000.000,00	20.000.000,00	47.928.000,00	27.928.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Binaan DKP		52.720.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	32.928.000,00	27.928.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			36.220.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H								**6.383.916.051,00**	**8.327.594.823,00**	**7.434.981.523,00**	**71.096.561.090,54**							**8.727.305.635,00**	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULUNGAGUNG







2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. R.A. Kartini 23 Tulungagung (0355) 321206 www.dukcapil.tulungagung.go.id dukcapilta@gmail.com

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi kependudukan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan rencana kinerja tahun anggaran 2025 serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai perangkat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, walaupun begitu kami tetap menerima masukan dan usulan positif, namun lebih bersifat membangun kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga tersusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NINA HARTIANI, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671031 199303 2 002

DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB IV PENUTUP..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan baru/kegiatan alternative penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegitan serta perubahan lokasi dan kelompk sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingat bahwa:

a. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.

b. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi SIPD RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2025.

b. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tulungagung, sehingga Renja PD juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2024. Senada dengan Perubahan RKPD 2024 yang sesuai dengan Perda RPJMD, maka Perubahan Renja PD juga harus menyesuaikan Renstra PD. Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

I.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiL disusun berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.
32. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi

dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selama tahun 2025.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal. Menjadi alat kendali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja. Sebagai indikator keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-PD Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun berjalan;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja PD, Proses Penyususnan Perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menggambarkan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja PD yang disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja samapai dengan triwulan I dengan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi

serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja PD maupun terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungahung.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadapa target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 10.770.905.762,00. Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
2.12.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10.770.905.762,00**	**2.646.519.615,00**	**24,57%**
2.12.2.12	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.234.489.162,00**	**2.598.612.615,00**	**25,39%**
2.12.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46.204.000,00**	**-**	**0,00%**
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.696.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.600.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	1.232.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.676.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.482.051.662,00**	**1.236.573.586,00**	**19,08%**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.391.219.662,00	1.236.573.586,00	19,35%
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	832.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**399.077.500,00**	**-**	**0,00%**
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.600.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	290.000.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.05.0011	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	86.477.500,00	-	0,00%
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.003.880.700,00**	**1.121.382.400,00**	**55,96%**
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.708.700,00	-	0,00%
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.605.055.300,00	1.100.914.000,00	68,59%
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.131.100,00	-	0,00%
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.330.000,00	1.952.400,00	5,23%
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.038.600,00	2.640.000,00	3,57%
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.125.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.492.000,00	15.876.000,00	7,73%
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**142.720.000,00**	**-**	**0,00%**
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.720.000,00	-	0,00%
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**970.545.600,00**	**222.671.301,00**	**22,94%**
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	403.668,00	9,17%
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.880.000,00	36.419.739,00	18,04%
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.265.600,00	185.847.894,00	24,32%
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**190.009.700,00**	**17.985.328,00**	**9,47%**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Dinas Jabatan	40.610.000,00	8.159.500,00	20,09%
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.700.000,00	5.773.128,00	7,63%
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.699.700,00	4.052.700,00	7,55%
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	0,00%
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	165.551.500,00	11.860.000,00	**7,16%**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**40.385.000,00**	**6.400.000,00**	**15,85%**
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	40.385.000,00	6.400.000,00	15,85%
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**50.000.000,00**	**-**	**0,00%**
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	50.000.000,00	-	0,00%
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**75.166.500,00**	**5.460.000,00**	**7,26%**
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	42.723.000,00	5.460.000,00	12,78%
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	32.443.500,00	-	0,00%
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	224.548.300,00	8.480.000,00	**3,78%**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**96.093.500,00**	**2.880.000,00**	**3,00%**
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	46.093.500,00	2.880.000,00	6,25%
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatn Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	50.000.000,00	-	0,00%
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**128.454.800,00**	**5.600.000,00**	**4,36%**
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	46.075.000,00	5.600.000,00	12,15%
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000,00	-	0,00%
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	32.379.800,00	-	0,00%
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	112.078.800,00	27.567.000,00	**24,60%**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**39.805.400,00**	**2.400.000,00**	**6,03%**
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	39.805.400,00	2.400.000,00	6,03%
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**27.635.000,00**	**6.400.000,00**	**23,16%**
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.635.000,00	6.400.000,00	23,16%
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**44.638.400,00**	**18.767.000,00**	**42,04%**
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.638.400,00	18.767.000,00	42,04%
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	34.238.000,00	-	**0,00%**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**34.238.000,00**	**-**	**0,00%**
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	34.238.000,00	-	0,00%

Sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Berdasarkan data realisasi anggaran, tingkat serapan keuangan telah mencapai 24,57%, sementara realisasi fisik kegiatan pada sebagian besar program menunjukkan hasil yang melampaui target dari target telah ditetapkan. Secara rinci, hasil evaluasi pelaksanaan program Adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah

   Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan I mencapai 24,60% dari target 100%, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan penunjang yang masih berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
2. Program Pendaftaran Penduduk

   Indikator : Prosentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

   Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan I mencapai 78,58% dari target 76,50%. Hal ini didukung oleh cakupan KIA sebanyak 59,09% dan cakupan KTP sebanyak 98,06%
3. Program Pencatatan Sipil

   Indikator : Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

   Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan I mencapai 99,54% dari target 66%. Capaian ini terdiri dari cakupan akta kelahiran anak sebesar 99,08% dan cakupan akta kematian berdasarkan kematian yang dilaporkan sebesar 100%
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Indikator : Prosentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK

   Realisasi kinerja pada program ini mencapai 100% dari target 100%. Capaian ini diperoleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, yang merupakan sistem nasional berbasis server pusat milik Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Melalui penggunaan SIAK Terpusat, data kependudukan yang dihasilkan langsung merupakan Data Kependudukan Bersih (DKB), tanpa memerlukan proses konsolidasi manual di tingkat daerah. Hal ini menjamin validitas dan keterbaruan data secara real-time, serta mengurangi potensi terjadinya data ganda atau data yang belum valid. Sehingga capaian untuk indicator ini Adalah 100%.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

   Indikator : Prosentase ketersediaan data profil kependudukan

   Realisasi kinerja pada indikator program ini mencapai 100% dari target 100% seiring dengan telah rilisnya DKP semester II Tahun 2024, sehingga ketersediaan data profil kependudukan telah tersedia semua atau mencapai 100%.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai rencana, dengan capaian output yang sebagian besar telah memenuhi atau bahkan melampaui target. Hasil laporan evaluasi secara lebih rinci dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**24,60%**	**24,60%**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**25,00%**
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00%
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33,33%
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**3 Dokumen**	**25,00%**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44/14	44/14	44/14	44/9 Orang/Bulan	64,29%
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**20,00%**
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	95 Orang	95 Orang	0 Orang	0,00%
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	290 Orang	290 Orang	290 Orang	0 Orang	0,00%
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	1 Paket	10,00%
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3 Paket	25,00%
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	10,00%
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	4 Laporan	12,50%
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**0 Unit**	**0,00%**
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang yang tersedia**	**95%**	**95%**	**95%**	**25%**	**25,00%**
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00%
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00%
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00%
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	20,00%
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	80,00%
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	9 Unit	45,00%
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**76,50%**	**76,50%**	**76,50%**	**78,57**	**102,71%**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	9 Dokumen	60,00%
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase ketersediaan blanko dan dokumen pendaftaran penduduk**	**97%**	**97%**	**97%**	**100%**	**103,09%**
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	270 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase Peningkatan Cakupan KTP-el**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**100,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**66%**	**66%**	**66%**	**99,54**	**150,82%**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**100,00%**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1 Layanan	50,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Prosentase Peningkatan Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**100,00%**
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00%
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Prosentase Ketersediaan Data yang Valid dan Update**	**99%**	**99%**	**99%**	**100%**	**101,01%**
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Cakupan Identitas kependudukan Digital (IKD)**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,20%**	**89,60%**
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Kehadiran Peserta Pelatihan Pengelolaan SIAK**	**84%**	**84%**	**84%**	**0%**	**0,00%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase kesediaan data profil kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**80,00%**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase Ketersediaan Buku Profil yang Valid**	**100%**	**100%**	**100%**	**80%**	**80,00%**
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan ini mencakup penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan aktual, baik dari sisi kebutuhan layanan masyarakat, perubahan kebijakan, maupun tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja.

Selain itu, penyesuaian rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2026, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

Rencana kerja dan pendanaan yang telah disesuaikan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut merupakan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja tahun 2025:

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**10.479.783.475,00**	**9.831.535.542,00**	**648.247.933,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.479.783.475,00**	**9.831.535.542,00**	**648.247.933,00**
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.479.783.475,00**	**9.831.535.542,00**	**648.247.933,00**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**-**	**100**			**9.854.783.475,00**	**9.355.855.742,00**	**498.927.733,00**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**Dokumen**	**4**	**4**			**73.256.000,00**	**46.204.000,00**	**27.052.000,00**
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua	2.448.000,00	2.496.000,00	(48.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
										Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa			
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	-	1.600.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.632.000,00	832.000,00	800.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.576.000,00	26.751.000,00	40.825.000,00
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dokumen**	**-**	**12**			**6.040.229.875,00**	**6.482.051.662,00**	**(441.821.787,00)**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50/14	44/14	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.941.237.875,00	5.990.919.662,00	(49.681.787,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.160.000,00	90.000.000,00	8.160.000,00
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.000,00	832.000,00	-
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**-**	**5**			**414.890.500,00**	**399.077.500,00**	**15.813.000,00**
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	22.600.000,00	77.400.000,00
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	2	95	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	14.000.000,00	52.500.000,00	(38.500.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
						dan Pelatihan				Semua Kel/Desa	Semua Kel/Desa			
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	290	290	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.477.500,00	6.125.000,00	80.352.500,00
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	190	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.413.000,00	-	214.413.000,00
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**%**	**-**	**100**			**1.959.975.500,00**	**2.003.880.700,00**	**(43.905.200,00)**
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.096.800,00	7.827.100,00	4.269.700,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.605.965.700,00	1.603.792.200,00	2.173.500,00
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	10	10	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung,	67.260.400,00	52.023.600,00	15.236.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
						Tangga yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.870.000,00	31.810.000,00	8.060.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.038.600,00	54.798.600,00	19.240.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	2.687.500,00	1.437.500,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	32	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.619.000,00	146.252.000,00	10.367.000,00
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**Unit**	**-**	**1**			**146.230.000,00**	**142.720.000,00**	**3.510.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.230.000,00	142.720.000,00	3.510.000,00
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang yang tersedia**	**%**	**-**	**95**			**1.016.645.600,00**	**970.545.600,00**	**46.100.000,00**
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.380.000,00	200.380.000,00	24.000.000,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	782.265.600,00	764.265.600,00	18.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**	**-**	**100**			**203.556.000,00**	**190.009.700,00**	**13.546.300,00**
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.870.000,00	40.610.000,00	6.260.000,00
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.880.000,00	42.100.000,00	37.780.000,00
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.806.000,00	49.133.480,00	7.672.520,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**-**	**76,5**			**200.000.000,00**	**106.714.000,00**	**93.286.000,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**Dokumen**	**1**	**1**			**50.000.000,00**	**40.385.000,00**	**9.615.000,00**
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	15	15	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	24.150.000,00	25.850.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
						Kependudukan				Semua Kel/Desa	Semua Kel/Desa			
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase ketersediaan blanko dan dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**-**	**97**			**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-**
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	270	270	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	34.692.000,00	15.308.000,00
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase Peningkatan Cakupan KTP-el**	**%**	**1**	**0,1**			**100.000.000,00**	**75.166.500,00**	**24.833.500,00**
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.158.000,00	14.842.000,00
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	12.714.000,00	37.286.000,00
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**%**	**66**	**66**			**250.000.000,00**	**220.319.500,00**	**29.680.500,00**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil**	**%**	**-**	**0,1**			**100.000.000,00**	**96.093.500,00**	**3.906.500,00**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	39.341.500,00	10.658.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	34.944.000,00	15.056.000,00
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Prosentase Peningkatan Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil**	**%**	**-**	**0,1**			**150.000.000,00**	**128.454.800,00**	**21.545.200,00**
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	37.365.000,00	12.635.000,00
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	94.980.000,00	(44.980.000,00)
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	13.689.000,00	36.311.000,00
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK**	**%**	**-**	**100**			**135.000.000,00**	**117.008.300,00**	**17.991.700,00**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Prosentase Ketersediaan Data yang Valid dan Update**	**%**	**-**	**99**			**50.000.000,00**	**39.805.400,00**	**10.194.600,00**
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.309.900,00	13.690.100,00
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Cakupan Identitas kependudukan Digital (IKD)**	**%**	**-**	**2,5**			**35.000.000,00**	**27.635.000,00**	**7.365.000,00**
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	36.060.000,00	(1.060.000,00)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Kehadiran Peserta Pelatihan Pengelolaan SIAK**	**%**	**-**	**84**			**50.000.000,00**	**44.638.400,00**	**5.361.600,00**
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.638.400,00	5.361.600,00
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase kesediaan data profil kependudukan**	**%**	**100**	**100**			**40.000.000,00**	**31.638.000,00**	**8.362.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Sesudah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase Ketersediaan Buku Profil yang Valid**	**Prosentase**	**100**	**100**			**40.000.000,00**	**34.238.000,00**	**5.762.000,00**
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	50	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	31.638.000,00	8.362.000,00
J U M L A H												**10.479.783.475,00**	**9.831.535.542,00**	648.247.933,00

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dimaksud agar dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan faktor penentu keberhasilan Renja ini. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan konstribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam memastikan pelaksanaan Renja Perubahan ini berjalan optimal, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD dalam rangka penyesuaian pendanaan dan prioritas kegiatan;
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program secara periodik agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;
- Menyusun rencana aksi bagi setiap program/kegiatan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah,

adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Tulungagung 8 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULUNGAGUNG



NINA HARTIANI, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671031 199303 2 002

PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, akhirnya dapat diselesaikan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Dengan adanya penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat membantu menggambarkan target kinerja pada instansi dan pada akhirnya seluruh kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik serta lancar sesuai dengan rumusan dalam kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja ini kami sajikan, semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan kebijakan pemerintah melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ISWAHJUDI, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681007 198809 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22
BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....10
Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025.....15
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.....23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan yang ada dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang telah disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung.

Penyusunan Perubahan Renja dilakukan untuk konsistensi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode perubahan dalam tahun berjalan, yang memuat program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Perubahan Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam Menyusun Perubahan Target capaian kinerja pada Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

1.2. Landasan Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

13 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;

23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

26 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

28 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

30 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

31 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

32 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

33 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
  a. Sebagai Panduan dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.
  b. Melakukan sinkronisasi terhadam program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan program prioritas pembangunan dan isu – isu strategis tahun 2025.
- Tujuan
  a. Perubahan Rencana Kerja 2025 menjadi acuan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi sesuai dengan Perubahan RKPD pada PAPBD TA 2025
  b. Perubahan Renja merupakan dokumen yang berisikan Program – program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PAPBD TA 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penulisan.

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas PMD Kabupaten Tulungagung.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan rencana pendanaan Perangkat Daerah.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini merupakan kalimat penutup dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Tulungagung sekaligus merupakan pernyataan penegasan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Tulungagung.

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Kebijakan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada sektor pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada peningkatan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa* dengan sasaran strategis *Meningkatnya Kemandirian Desa.* Adapun Kinerja Sasaran Strategis tersebut diukur dengan indikator *Persentase Desa Mandiri.* Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu desa telah mencapai kemandirian dalam berbagai aspek Pembangunan. Konsep desa mandiri sendiri merujuk pada kemampuan desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, memenuhi kebutuhan dasar warganya, serta memiliki tata Kelola yang baik dan partisipatif

Dalam perjalanannya penetapan kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung mengalami perubahan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung diminta untuk

mereview kembali pohon kinerja yang telah disusun sebelum penyusunan Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Implikasi setelah dilakukan review Pohon Kinerja tersebut adalah sebagian besar tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mengalami penyesuaian termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Berikut ini tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung setelah review ulang Pohon Kinerja oleh Menpan RB.

Tujuan *"Meningkatkan Kemandirian Masyarakat"* yang diukur dengan indikator *Indeks Desa Membangun (IDM)* dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis antara lain :

1. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Masyarakat Perdesaan dengan Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Perdesaan dengan Indikator Indeks Ketahanan Ekoonomi (IKE)
3. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Perdesaan dengan Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Dalam mencapai target kinerja tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Melaksanakan Pembangunan Partisipatif sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Memperkuat perekonomian desa berbasis produk unggulan desa dan kawasan pedesaan.
3. Penguatan koordinasi dan keterlibatan selruh stakeholder dalam rangka mendukung dan mengorganisir program dan kegiatan.
4. Mempercepat penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.

Yang didukung dengan adanya kebijakan antara lain Mendasarkan Pembangunan Desa pada aspek Partisipatif, Pembangun Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Kawasan, Sinergitas antar pelaku pembangunan sebagai kunci pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Desa serta Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang juga didukung dengan penerapan Sistem Informasi Desa (SID), Penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tulungagung Zero Stunting dan mewujudkan desa ramah anak menuju generasi cerdas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung melakukan penyesuaian terhadap beberapa program dan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional, yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta percepatan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut, dilakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan alokasi belanja dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas, menuju kegiatan yang mendukung pencapaian target nasional dan prioritas daerah, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Refocusing ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau berulang dengan dampak rendah terhadap output pemberdayaan masyarakat, disesuaikan atau ditiadakan, demi optimalisasi pencapaian kinerja yang lebih strategis.

Secara keseluruhan, kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2025 dilaksanakan secara terencana, proporsional, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tetap berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Kewenangan Urusan Wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2025 didukung dengan alokasi anggaran APBD TA 2025 sebesar Rp. 12.389.100.006,00. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.041.004.473,00 (24,55%). Sampai dengan Triwulan I pencapaian kinerja belum dapat terlihat secara utuh, sehingga yang dapat dilakukan evaluasi

adalah pencapaian kerja/output Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan, hal ini dikarenakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu proses yang saling terkait mulai dari tahapan penyiapan, pelaksanaan, realisasi bantuan, sampai dengan technical assistance, sehingga capaian kinerja dapat dilihat pada akhir proses pemberdayaan. Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
2.13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**12.389.100.006,00**	**3.041.004.473,00**	**24,55**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.278.648.106,00**	**1.532.599.681,00**	**21,06**
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.493.431.306,00**	**1.311.867.758,00**	**20,20**
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.353.631.306,00	1.311.867.758,00	20,65
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.800.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut/Kelengkapannya	26.500.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**294.858.400,00**	**142.775.000,00**	**48,42**
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.666.200,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.512.600,00	126.855.700,00	95,01
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.583.600,00	4.952.800,00	31,78
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	3.696.000,00	12,32
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.346.000,00	7.270.500,00	6,77
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**286.964.400,00**	**64.870.423,00**	**22,61**
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	41.824.545,00	23,50

2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.150.000,00	2.500.000,00	9,56
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.814.400,00	20.545.878,00	24,81
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.894.000,00**	**13.086.500,00**	**7,40**
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.654.000,00	10.731.500,00	17,99
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.240.000,00	2.355.000,00	4,19
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.000.000,00	0,00	0,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**69.860.500,00**	**27.803.000,00**	**39,80**
2.13.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**69.860.500,00**	**27.803.000,00**	**39,80**
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	69.860.500,00	27.803.000,00	39,80
2.13.03.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**106.900.000,00**	**14.544.000,00**	**13,61**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**106.900.000,00**	**14.544.000,00**	**13,61**
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	57.100.000,00	11.716.000,00	20,52
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6.800.000,00	1.600.000,00	23,53
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	43.000.000,00	1.228.000,00	2,86
2.13.04.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**3.270.998.400,00**	**948.322.292,00**	**28,99**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**3.270.998.400,00**	**948.322.292,00**	**28,99**
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	132.335.000,00	18.209.200,00	13,76
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.304.577.000,00	803.503.392,00	34,87
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	161.658.500,00	44.529.300,00	27,55
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	130.742.500,00		0,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	74.607.500,00		0,00
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	28.300.500,00	22.298.800,00	78,79
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45.328.500,00		0,00
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	232.623.000,00	32.923.100,00	14,15

2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	115.664.900,00	1.517.500,00	1,31
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	45.161.000,00	25.341.000,00	56,11
2.13.05.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.662.693.000,00**	**517.735.500,00**	**31,14**
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.662.693.000,00**	**517.735.500,00**	**31,14**
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	351.820.000,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	43.145.000,00	23.795.000,00	55,15
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	43.156.000,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	52.362.000,00	1.530.000,00	2,92
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	564.145.000,00	456.544.800,00	80,93
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	608.065.000,00	35.865.700,00	5,90

Capaian output sampai dengan Triwulan I untuk masing – masing program/kegiatan yang mendukung kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pagu Anggaran Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.278.648.106,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I

sebesar Rp. 1.532.599.681,00 (44,05%) yang dipergunakan untuk pelaksanaan 4 Kegiatan dengan 14 Sub Kegiatan. Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah *Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah.* Realisasi kinerja pada program ini sampai dengan triwulan I mencapai 21,06% dari target 100%, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan penunjang yang masih berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

2. Program Penataan Desa pada Tahun 2025

   Pagu anggaran untuk Program Penataan Desa adalah sebesar Rp. 69.860.500,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 27.803.000,00 (39,80%) yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Indikator Program Penataan Desa adalah *Indeks Ketahanan Lingkungan.* Realisasi kinerja dari indikator ini baru bisa dihitung pada Triwulan IV. Melalui program ini masih dilaksanakan tahapan fasilitasi desa dalam rangka penataan desa sehingga masih belum terlihat hasil kinerja secara keseluruhan.

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

   Pagu anggaran untuk Program Peningkatan Kerja Sama Desa Adalah Rp. 106.900.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 14.544.000,00 (13,61%) yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Indikator Program Peningkatan Kerja Sama Desa Adalah *Indeks Ketahanan Ekonomi.* Realisasi Kinerja dari indikator ini baru bisa dihitung pada Triwulan IV. Melalui program ini masih dilaksanakan tahapan fasilitasi Kerjasama antar desa dan pihak ketiga sehingga masih belum terlihat keseluruhan hasil kinerja.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Pagu anggaran untuk Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 3.270.998.400,00, dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 948.322.292,00 (28,99%). yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Indikator kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah *Persentase Desa yang menerapkan SID*. Sampai dengan Triwulan I ini capaian kinerja pada Program adalah 100%, karena saat ini seluruh Desa di Kabupaten Tulungagung telah menerapkan SID, terutama dalam

pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES versi yang terbaru.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

   Pagu anggaran untuk Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah sebesar Rp. 1.662.693.000,00, dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 517.735.500,00 (31,14%). yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Indikator kinerja pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah *Indeks Ketahanan Sosial*. Realisasi Kinerja dari indikator ini baru bisa dihitung pada Triwulan IV. Melalui program ini masih dilaksanakan tahapan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa sehingga masih belum terlihat secara keseluruhan hasil kinerja.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai rencana, dengan capaian output yang sebagian besar telah memenuhi atau bahkan melampaui target. Hasil laporan evaluasi secara lebih rinci dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan
dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan / Sub Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
										Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	**2**	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**2**	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40 %**
3	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100 %
4	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
5	**2**	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
6	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	53 Paket	-	-	-
7	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	43 Orang	-	-	-
8	**2**	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	100 %	100 %	100 %	20%	20%

9	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-
10	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
11	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-
12	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-
13	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
14	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
15	**2**	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
16	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
17	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
18	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
19	**2**	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	100 %	100 %	100 %	35%	35%
20	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	1 unit	5,26%
21	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 unit	33,33%
22	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1 unit	-	-
23	**2**	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Indeks Ketahanan Lingkungan**	**0,8276 indeks**	**0,8389 indeks**	**0,8629 indeks**	-	-

24	**2**	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan Penataan Desa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50%**	**50%**
25	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2 unit	50%
26	**2**	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Indeks Ketahanan Ekonomi**	**0,7670 indeks**	**0,7470 indeks**	**0,7538indeks**	-	-
27	**2**	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah BUMDes Bersama dan Kawasan Pedesaan yang difasilitasi pengembangan usahanya**	**16 lembaga**	**15 lembaga**	**14 lembaga**	**-**	**-**
28	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**-**	**-**
29	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**-**	**-**
30	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**-**	**-**
31	**2**	**13**	**03**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menerapkan SID**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
32	**2**	**13**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang tertib Administrasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**
33	2	13	03	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
34	2	13	03	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3480 Orang	3480 Orang	3480 Orang	3480 Orang	100%
35	2	13	03	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
36	2	13	03	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	n/a	n/a	1 Laporan	-	-
37	2	13	03	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

38	2	13	03	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
39	2	13	03	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	257 Orang	257 Orang	257 Orang	-	-
40	2	13	03	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	44 Desa	44 Desa	60 Desa	60 Desa	100%
41	2	13	03	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	n/a	n/a	1 Dokumen	-	-
42	2	13	03	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
43	**2**	**13**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Indeks Ketahanan Sosial**	**0,8795 indeks**	**0,8275 indeks**	**0,8575 indeks**	-	-
44	**2**	**13**	**04**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa yang difasilitasi peningkatan kelembagaannya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**
45	2	13	04	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	271 Lembaga	271 Lembaga	271 Lembaga	-	-
46	2	13	04	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
47	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
48	2	13	04	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-

49	2	13	04	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
50	2	13	04	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana evaluasi hasil Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Tulungagung faktor penghambatnya masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dan belum optimalnya kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa. Dan faktor pendorongnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang selaras. Berdasarkan identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja mulai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan penyelesaian meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan memperkuat kerjasama antar desa di Kabupaten Tulungagung.

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, sehingga berdampak pada penurunan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Berikut ini Adalah permasalahan pelaksanaan hasil renja tahun 2025, antara lain :

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan *outcome*, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Beberapa permasalahan diatas perlu didukung antara lain dengan sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, pengambilan kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian. Faktor strategis pada lingkungan organisasi yang dapat dikelola secara langsung oleh manajeman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi Pembangunan

berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada Masyarakat.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 - 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan ini mencakup penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan aktual, baik dari sisi kebutuhan layanan masyarakat, perubahan kebijakan, maupun tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja. Hal ini merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan ruang prioritas pada upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan yang telah disesuaikan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut merupakan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu SetelahPerubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.281.100.006,00**	**12.694.956.206,00**	**413.856.200,00**
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**12.281.100.006,00**	**12.694.956.206,00**	**413.856.200,00**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100%**	**100%**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**7.278.648.106,00**	**6.866.779.206,00**	**-411.868.900,00**
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.493.431.306,00	6.191.731.306,00	-301.700.000,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	44 orang/bulan	47 orang/bulan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.353.631.306,00	6.051.931.306,00	-301.700.000,00
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	26.500.000,00	0,00	-26.500.000,00
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	44 paket	0 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	26.500.000,00	0,00	-26.500.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	%	100%	100%	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	294.858.400,00	226.490.700,00	-68.367.700,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2.666.200,00	1.889.500,00	-776.700,00
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	133.512.600,00	133.512.600,00	0,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	15.583.600,00	4.952.800,00	-10.630.800,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	30.000.000,00	3.712.800,00	-26.287.200,00
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	5.750.000,00	3.750.000,00	-2.000.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	107.346.000,00	78.673.000,00	-28.673.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	286.964.400,00	281.964.400,00	-5.000.000,00

2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	178.000.000,00	173.000.000,00	-5.000.000,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	82.814.400,00	82.814.400,00	0,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100%	100%	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	176.894.000,00	166.592.800,00	-10.301.200,00
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 unit	19 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	59.654.000,00	68.071.000,00	8.417.000,00
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18 unit	3 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	56.240.000,00	48.513.200,00	-7.726.800,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	1 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	61.000.000,00	50.008.600,00	-10.991.400,00
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Indeks Ketahanan Lingkungan**	**Indeks**	**0,8629 indeks**	**0,8629 indeks**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**69.860.500,00**	**45.875.200,00**	**-23.985.300,00**
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Penataan Desa	%	100%	100%	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	69.860.500,00	45.875.200,00	-23.985.300,00
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	4 unit	4 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	69.860.500,00	45.875.200,00	-23.985.300,00
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Indeks Ketahanan Ekonomi**	**Indeks**	**0,7670 indeks**	**0,7538 indeks**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**106.900.000,00**	**90.710.000,00**	**-16.190.000,00**
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMDes Bersama dan Kawasan Pedesaan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	106.900.000,00	90.710.000,00	-16.190.000,00
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	57.100.000,00	60.178.000,00	3.078.000,00
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.800.000,00	4.120.000,00	-2.680.000,00
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	43.000.000,00	26.412.000,00	-16.588.000,00
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menerapkan SID**	**%**	**100%**	**100%**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**3.162.998.400,00**	**4.121.008.700,00**	**958.010.300,00**
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi	%	100%	100%	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	3.162.998.400,00	4.121.008.700,00	958.010.300,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	132.335.000,00	133.080.300,00	745.300,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	3480 orang	3480 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2.304.577.000,00	3.360.900.500,00	1.056.323.500,00
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	161.658.500,00	99.827.700,00	-61.830.800,00

2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	130.742.500,00	70.903.400,00	-59.839.100,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	74.607.500,00	48.760.200,00	-25.847.300,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	28.300.500,00	25.624.500,00	-2.676.000,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	257 orang	257 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	45.328.500,00	28.635.600,00	-16.692.900,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	66 Desa	66 Desa	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	232.623.000,00	212.461.600,00	-20.161.400,00
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.664.900,00	111.960.900,00	104.296.000,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	45.161.000,00	28.854.000,00	-16.307.000,00
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Indeks Ketahanan Sosial**	**Indeks**	**0,8975 indeks**	**0,8575 indeks**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**1.662.693.000,00**	**1.570.583.100,00**	**-92.109.900,00**
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang difasilitasi peningkatan kelembagaannya	%	100%	100%	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.662.693.000,00	1.570.583.100,00	-92.109.900,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	271 Lembaga	271 Lembaga	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	351.820.000,00	221.444.500,00	-130.375.500,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	43.145.000,00	33.095.000,00	-10.050.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	43.156.000,00	29.640.600,00	-13.515.400,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	52.362.000,00	6.600.000,00	-45.762.000,00
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	564.145.000,00	521.738.000,00	-42.407.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	608.065.000,00	758.065.000,00	150.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 – 2026. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ISWAHJUDI, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681007 198809 1 001



RENJA PERUBAHAN

2025

dishubta@gmail.com
Jl. Yos Sudarso No. 117 Tulungagung
dishub.tulungagung.go.id

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung pada sektor transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung.

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan. Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 perlu disusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan sektor perhubungan Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perhubungan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam rencana kerja ini masih banyak kekurangan, dan mengingat dimasa-masa mendatang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka rencana kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan seiring ucapan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah di bidang perhubungan, telah menyusun program-program dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai RPJMD, yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk kesempurnaan, saran dan masukan sangat diperlukan dalam sempurnanya dokumen ini dan semoga bermanfaat. Aamiin.

Tulungagung, 08 Agustus 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ISWAHJUDI, S.IP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681007 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **iv**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 10

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 16

BAB IV PENUTUP 25

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 25

4.2 Rencana Tindak Lanjut 26

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025 11

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 17

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2025 (Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan berpedoman pada :

a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, dimana Perangkat Daerah harus melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025; dan

b. Hasil verifikasi Perubahan Renja Tahun 2025.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan selama Tahun 2025 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 2 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;

16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
17. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya Tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk

pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana, rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, pencapaian target Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2.15.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**47,47 %**	**47,47%**
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	15 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	77 dokumen	77 dokumen	77 dokumen	36 dokumen	46,75
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	- dokumen	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	77,68 %	77,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	4 unit	- unit	- unit	- unit	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100 %	100 %	100 %	70 %	70
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	44 %	44
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi**	**90 %**	**88,81 %**	**90 %**	**60,18%**	**66,87**
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan laik fungsi	8 jenis	8 jenis	8 jenis	7 jenis	87,5
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang terkelola	1 lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	- dokumen	-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR	23000 kendaraan	20331 kendaraan	23000 kendaraan	9833 kendaraan	42,75
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah lokasi ruas jalan yang dilaksanakan MRLL	2 lokasi	- lokasi	2 lokasi	- lokasi	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	1 dokumen	- dokumen	- Dokumen	- dokumen	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terawasi	19 lokasi	19 lokasi	19 lokasi	10 lokasi	52,63
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan angkutan umum yang tersedia	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang ditetapkan	1 dokumen	- lokasi	- lokasi	- lokasi	-
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Trayek Perkotaan yang dilalui	1 dokumen	- jaringan	- jaringan	- jaringan	-
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Trayek Pedesaan yang dilalui	1 dokumen	- jaringan	- jaringan	- jaringan	-
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Trayek yang diterbitkan	1 dokumen	- dokumen	1 dokumen	- dokumen	-
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian penetapan tarif	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase angkutan sungai yang aman/ berkeselamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	-	-
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan	1 d okumen	1 dokumen	1 dokumen	- dokumen	-
2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian penetapan tarif angkutan penyeberangan	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Dinas Perhubungan yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, berikut disajikan perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapun rincian Rencana perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**36.599.526.862**	**52.979.052.112**	**16.379.525.250**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**14.960.203.862**	**14.918.525.112**	**(41.678.750)**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dokumen**	**77**	**77**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**10.988.305.112**	**10.533.205.112**	**(455.100.000)**
02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	89	89	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	10.856.185.112	10.401.085.112	(455.100.000)
02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	60	60	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	132.120.000	132,120,000	0
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**6**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**32.000.000**	**9.500.00**	**(22.500.000)**
05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	27.000.000	4.500.000	(22.500.000)
05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	25	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	5,000,000	5,000,000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
		Pelatihan								
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**552.242.650**	**988.163.900**	**435.921.250**
06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	30	32	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	148.831.000	200.140.000	51.309.000
06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	21	20	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	22.442.200	19.999.600	(2.442.600)
06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	10	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	281.007.300	690.363.300	409.356.000
06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	25	20	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	12.075.000	9.775.000	(2.300.000)
06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	42	30	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	87.887.150	67.886.000	(20.001.150)
2.15.02.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**2.828.754.000**	**2.828.754.000**	**0**
08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	406.250.400	406.250.400	0
08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	68.460.000	68.460.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
		peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								
08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	2.354.043.600	2.354.043.600	0
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**558.902.100**	**558.902.100**	**0**
09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	44	44	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	558.902.100	558.902.100	0
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi**	**%**	**90**	**90**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**21.584.323.000**	**38.005.567.000**	**16.421.244.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1**	**1**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	300.000.000	300.000.000	0
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan laik fungsi**	**jenis**	**8**	**8**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**16.700.425.000**	**32.818.268.000**	**16.117.843.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangaun	unit	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	100,000,000	100,000,000	0
02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten Kota yang tersedia	unit	7	7	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	15.807.850.000	30.987.850.000	15.180.000.000
02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	unit	9	9	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	100,000,000	100,000,000	0
02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	unit	5	5	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	692.575.000	1.630.418.000	937.843.000
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**Dokumen**	**1**	**1**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**1.557.270.000**	**1.595.275.000**	**38.005.000**
04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	3	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	200.000.000	231.700.000	31.700.000
04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	laporan	4	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	1.357.270.000	1.363.575.000	6.305.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR**	**Kendaraan**	**23000**	**21000**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**637.000.000**	**557.000.000**	**(80.000.000)**
05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	unit	3	3	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	40.000.000	40.000.000	0
05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	10.000.000	10.000.000	0
05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	unit	23000	21000	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	17.000.000	17.000.000	0
05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	400.000.000	120.000.000	(280.000.000)
05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	unit	11	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	170.000.000	370.000.000	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terawasi**	**Lokasi**	**19**	**19**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**248.153.000**	**283.249.000**	**35.096.000**
08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	laporan	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	49.550.000	99.550.000	50.000.000
08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	49.325.000	47.935.000	(1.390.000)
08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	60.539.000	49.725.000	(10.814.000)
08.0008	Peningkatan kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	80	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	40.764.000	40.764.000	0
08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	laporan	20	8	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	47.975.000	45.275.000	(2.700.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jaringan angkutan umum yang tersedia**	**lokasi**	**3**	**3**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**2.141.475.000**	**2.451.775.000**	**310.300.000**
09.0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	angkutan	31	45	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	2.141.475.000	2.451.775.000	310.300.000
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Angkutan sungai aman/ berkeselamatan**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**55.000.00**	**54.960.000**	**(40.000)**
2.15.03.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	**Jumlah ijin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ynang diterbitkan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**55.000.00**	**54.960.000**	**(40.000)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	30.000.000	29.960.000	(40.000)
03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	25.000.000	25.000.000	0

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perhubungan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Dinas Perhubungan. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuh

kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan Penyelenggara Pembangunan Perhubungan di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 08 Agustus 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ISWAHJUDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681007 198809 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**35.983.978.592,00**	**36.599.526.862,00**	**52.979.052.112,00**	**16.995.073.520,00**							**60.033.072.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.983.978.592,00**	**36.599.526.862,00**	**52.979.052.112,00**	**16.995.073.520,00**							**60.033.072.600,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**35.983.978.592,00**	**36.599.526.862,00**	**52.979.052.112,00**	**16.995.073.520,00**							**60.033.072.600,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.359.628.592,00**	**14.960.203.862,00**	**14.918.525.112,00**	**4.623.244.008,00**							**18.982.872.600,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan*				77 dokumen	77 dokumen	10.358.604.592,00	10.988.305.112,00	10.533.205.112,00	174.600.520,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		11.627.248.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	10.226.484.592,00	10.856.185.112,00	10.401.085.112,00	174.600.520,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			11.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 Dokumen	60 Dokumen	132.120.000,00	132.120.000,00	132.120.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			127.248.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				6 dokumen	6 dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	9.500.000,00	-22.500.000,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		439.905.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	1 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			289.905.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	1 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	581.367.900,00	552.242.650,00	988.163.900,00	406.796.000,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		1.737.919.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	32 Paket	148.831.000,00	148.831.000,00	200.140.000,00	51.309.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	20 Paket	22.442.200,00	22.442.200,00	19.999.600,00	-2.442.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			22.919.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	281.007.300,00	281.007.300,00	690.363.300,00	409.356.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			965.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	20 Laporan	12.075.000,00	12.075.000,00	9.775.000,00	-2.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	30 Laporan	117.012.400,00	87.887.150,00	67.886.000,00	-49.126.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			235.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang tersedia*				100 %	100 %	2.828.754.000,00	2.828.754.000,00	2.828.754.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		4.579.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	406.250.400,00	406.250.400,00	406.250.400,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			463.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.460.000,00	68.460.000,00	68.460.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			116.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.354.043.600,00	2.354.043.600,00	2.354.043.600,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	558.902.100,00	558.902.100,00	558.902.100,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		598.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	44 Unit	558.902.100,00	558.902.100,00	558.902.100,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			598.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi**				**90 %**	**90 %**	**21.569.350.000,00**	**21.584.323.000,00**	**38.005.567.000,00**	**19.343.350.000,00**							**40.912.700.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		410.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan laik fungsi*				8 jenis	8 jenis	17.016.600.000,00	16.700.425.000,00	32.818.268.000,00	15.801.668.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		32.130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	16.176.600.000,00	15.807.850.000,00	30.987.850.000,00	14.811.250.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			30.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	640.000.000,00	692.575.000,00	1.630.418.000,00	990.418.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir*				1 dokumen	1 dokumen	1.570.000.000,00	1.557.270.000,00	1.595.275.000,00	25.275.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		1.675.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	231.700.000,00	31.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1.370.000.000,00	1.357.270.000,00	1.363.575.000,00	-6.425.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR*				23000 kendaraan	21500 kendaraan	637.000.000,00	637.000.000,00	557.000.000,00	-80.000.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		1.008.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				23000 Unit	21500 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			18.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	120.000.000,00	-280.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	12 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	370.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah lokasi ruas jalan yang dilaksanakan MRLL*				2 lokasi	lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		1.715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi Andalalin yang diterbitkan*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				4 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terawasi*				19 lokasi	19 lokasi	250.000.000,00	248.153.000,00	283.249.000,00	33.249.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		784.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.550.000,00	99.550.000,00	49.550.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.325.000,00	47.935.000,00	-2.065.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	60.539.000,00	49.725.000,00	-275.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				80 Orang	4 Orang	50.000.000,00	40.764.000,00	40.764.000,00	-9.236.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				20 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	47.975.000,00	45.275.000,00	-4.725.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jaringan angkutan umum yang tersedia*				3 lokasi	3 lokasi	1.795.750.000,00	2.141.475.000,00	2.451.775.000,00	656.025.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	48 Unit	1.795.750.000,00	2.141.475.000,00	2.451.775.000,00	656.025.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			2.475.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang ditetapkan*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jaringan trayek perkotaan yang dilalui*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jaringan trayek pedesaan yang dilalui*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ijin trayek yang diterbitkan*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kajian penetapan tarif*				1 dokumen	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Angkutan Sungai yang Aman/Berkeselamatan**				**100 %**	**100 %**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.960.000,00**	**82.500.000,00**							**137.500.000,00**	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	*Jumlah ijin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan*				1 dokumen	1 dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	54.960.000,00	-40.000,00			-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat		137.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	29.960.000,00	-40.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas Penyediaan infrastruktur yang berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**35.983.978.592,00**	**36.599.526.862,00**	**52.979.052.112,00**	**16.995.073.520,00**							**60.033.072.600,00**	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

(0355)322190
diskominfo@tulungagung.go.id

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 8

Tabel I 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

Tabel II 16

BAB IV PENUTUP 20

Lampiran 22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Penyusunan Racangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja Sebagai dokumen dalam tahapan perencanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan dalam satu tahun. Rancangan ini telah melalui tahapan verifikasi di BAPPEDA dan diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Demikian semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi institusi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, maupun mitra kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, **8 Juli 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Drs. SUPARNI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199312 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung berkewajiban Menyusun perencanaan Pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencaanaan Pembangunan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Komunikasi dana Informatika.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat daerah berkewajiban Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 (Satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari rencana kerja Pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di kabupaten Tulungagung khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya , Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan PRAPBD OPD yang bersangkutan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA Perubahan OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor: 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika tahun 2025 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Adapun Tujuan disusunnya rancangan renja perubahan tahun 2025 adalah untuk :

1. Penyusunan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan,pergeseran atau pengurangan);
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan perangkat daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah;
4. Menujudkan perencanaan Pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan APBD masing – masing OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, Sistematika Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD..

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN N

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standard pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, pencapaian target Rencana Strategis Dinas komunikasi dan informatika Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas komunikasi dan informatika sampai dengan Triwulan II, hasil evaluasi Renja Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Berikut Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II (tahun 2025) :

Tabel I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra s/d Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Progrm dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun ke 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025				
							Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10=(8/6)
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang terpublikasi (persen)**			84	247.935.900,00	85	575.000.000,00	42	187.616.536,00	49,41%
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen informasi publik yang tersusun (dokumen)*			2	247.935.900,00	2	575.000.000,00	1	187.616.536,00	50,00%
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)*			0	-	1	275.000.000,00	1	175.687.269,00	100,00%
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis (Media)*			0	247.935.900,00	1	300.000.000,00	1	11.929.267,00	0,00%
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (persen)**			84	-	85	4.506.292.000,00	100	720.455.987,00	117,65%
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Nama Domain dan Sub Domain OPD yang dikelola Pemerintah Daerah (OPD)*			53	-	2	64.080.000,00	2	480.000,00	100,00%
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)*			0	-	1	64.080.000,00	0	480.000,00	0,00%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase Implementasi Pengelolaan E-Government (persen)*			84	-	85	4.442.212.000,00	40	719.975.987,00	47,06%

2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)*			0	-	2	72.300.000,00	0	2.914.500,00	0,00%
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen)*			0	-	1	400.000.000,00	0	0,00	0,00%
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)*			0	-	1	227.512.000,00	1	15.774.500,00	100,00%
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat)*			0	-	53	3.742.400.000,00	53	701.286.987,00	100,00%
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Pengelolaan dan Analisa Data Statistik Sektoral (persen)**			100	-	100	235.721.000,00	0	6.435.000,00	0,00%
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Data Statistik Sektoral yang dikelola (Data)*			250	-	50	235.721.000,00	0	6.435.000,00	0,00%
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)*			0	-	1	235.721.000,00	0	6.435.000,00	0,00%
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Informasi/Berita Pemerintah Daerah yang disandikan/ diamankan (persen)**			84	244.200.000,00	85	118.302.000,00	100	12.475.000,00	117,65%
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah informasi / berita yang disandikan / diamankan (Berita)*			500	244.200.000,00	50	118.302.000,00	0	12.475.000,00	0,00%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)*			53	244.200.000,00	50	118.302.000,00	50	12.475.000,00	100,00%
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Rata-rata tingkat capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah(persen)** **- Indeks Kepuasan Layanan**			- 100 - 0	5.716.748.720,00	- 100 - 82	6.572.132.847,00	- 50 - 0	2.771.610.303,00	- 50% - 0%

0.00.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja(Dokumen)*			8	3.950.000,00	8	3.928.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)*			2	2.150.000,00	2	2.140.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)*			6	1.800.000,00	6	1.788.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan(Dokumen)*			2	4.801.024.275,00	2	5.683.841.047,00	0	2.551.486.166,00	0,00%
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)*			41	4.691.344.275,00	41	5.571.951.047,00	41	2.551.486.166,00	100,00%
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)*			12	109.680.000,00	12	111.890.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD(Dokumen)*			4	33.750.000,00	12	41.500.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)*			1	26.250.000,00	1	26.500.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)*			3	7.500.000,00	3	15.000.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP(persen)*			82	305.896.015,00	83	278.279.093,00	40	3.087.000,00	48,19%
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)*			6	8.945.000,00	15	9.926.800,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)*			6	116.345.450,00	26	105.634.000,00	0	250.000,00	0,00%
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)*			4	10.010.000,00	6	13.951.293,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)*			6	19.510.000,00	12	25.550.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)*			6	151.085.565,00	12	123.217.000,00	6	2.837.000,00	50,00%

0.00.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Jumlah Barang milik daerah yang tersedia(Unit)*			4	17.000.000,00	5	21.390.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)*			1	17.000.000,00	1	21.390.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia(Dokumen)*			12	350.257.088,00	12	385.550.307,00	6	157.284.515,00	50,00%
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)*			12	191.900.122,00	12	221.700.000,00	6	95.970.761,00	50,00%
0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)*			12	19.800.000,00	12	25.740.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)*			12	138.556.966,00	12	138.110.307,00	6	61.313.754,00	50,00%
0.00.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara(persen)*			82	204.871.342,00	83	157.644.400,00	40	59.752.622,00	48,19%
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)*			15	120.827.342,00	15	50.454.400,00	15	37.237.622,00	100,00%
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			1	56.904.000,00	20	73.800.000,00	20	5.500.000,00	100,00%
0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)*			5	27.140.000,00	20	33.390.000,00	20	17.015.000,00	100,00%
JUMLAH						6.208.884.620,00		**12.007.447.847,00**		**3.698.592.826,00**	

0.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia(Dokumen)*	36	397.000.000,00		351.936.911,00	12	367.377.891,00	3	136.816.186,00	25,00%
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)*	36	5.000.000,00	0	0,00	12	0.00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibulankan(Laporan)*	36	195.000.000,00	12	184.726.972,00	12	186.662.784,00	3	78.838.260,00	28,00%
0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibulankan(Laporan)*	30	180.000.000,00	0	0,00	12	19.800.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibulankan(Laporan)*	36	14.000.000,00	12	167.209.939,00	10	160.915.107,00	2	58.485.926,00	30,00%
0.00.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara(persen)*	84	365.000.000,00	80	362.234.320,00	82	294.267.000,00	20	67.619.842,00	24,39%
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)*	45	115.000.000,00	15	118.057.900,00	15	133.347.600,00	5	50.069.842,00	33,33%
0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*	3	80.000.000,00	0	0,00	1	0.00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	15	90.000.000,00	0	0,00	1	58.800.000,00	0	4.380.000,00	0,00%
0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)*	3	15.000.000,00	0	0,00	1	0.00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)*	3	26.000.000,00	1	88.306.000,00	1	74.330.000,00	0	0,00	0,00%
0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	3	20.000.000,00	5	155.890.420,00	5	27.790.000,00	0	10.650.000,00	0,00%
0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)*	3	20.000.000,00	0	0,00	1	0.00	0	0,00	0,00%
JUMLAH				10.673.504.623,00		10.271.770.121,00		**11.693.935.399,00**		**3.682.780.698,00**	

Sesuai dengan tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2025 diatas, secara garis besar realisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masih bervariasi. Dari hasil target yang sudah direncanakan. Faktor yang menyebabkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka prioritas dan sasaran pembangunan , rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaanya masuk di triwulan III dan IV sehingga menyebabkan mempengaruhi pencapaian di triwulan II
3. Terjadinya efisiensi anggaran di tiap kegiatan ataupun sub kegiatan sehingga mempengaruhi untuk pagu dan target kegiatan yang sedang berjalan.

Dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diatas tentunya mengakibatkan implikasi pada rencana kerja yang sedang berjalan. Sehingga perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang tentunya harus berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian anggaran untuk pendanaan di tahun 2025 sebagai dasar diadakan perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 dimana dilanjutkan ke Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Diskominfo Kabupaten Tulungagung mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik, Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan, Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi publik dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat darah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program adalah sebagai penuntun tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun rincian Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran ke 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(10-9)*
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**100**			**6.572.132.847,00**	**6.248.755.056,00**	**(53.572.776)**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**Dokumen**	**8**	**2**			**3.928.000,00**	**1.380.000,00**	0
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2.140.000,00	840.000,00	(1,300,000)
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.788.000,00	540.000,00	(1,248,000)
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**2**			**5.683.841.047,00**	**5.448.741.047,00**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	41	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	5.571.951.047,00	5.336.851.047,00	(235,100,000)
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	111.890.000,00	111.890.000,00	0
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**Dokumen**	**12**	**12**			**41.500.000,00**	**10.500.000,00**	0
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	26.500.000,00	500.000,00	(26,000,000)
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	15.000.000,00	10.000.000,00	(5,000,000)
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP**	%	**83**	**83**			**278.279.093,00**	**194.244.302,00**	0
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	9.926.800,00	6.936.800,00	(2,990,000)
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	26	26	Kab.	Kab.	105.634.000,00	94.114.209,00	(11,519,791)

	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Tulungagung	Tulungagung			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	13.951.293,00	13.951.293,00	0
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.550.000,00	16.780.000,00	(8,770,000)
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	123.217.000,00	62.462.000,00	(60,755,000)
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang tersedia**	**Unit**	**5**	**5**			**21.390.000,00**	**10.695.000,00**	0
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	21.390.000,00	10.695.000,00	(10,695,000)
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia**	**Dokumen**	**12**	**12**			**385.550.307,00**	**425.550.307,00**	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	221.700.000,00	261.700.000,00	40,000,000
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.740.000,00	25.740.000,00	0
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	138.110.307,00	138.110.307,00	0
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara**	**%**	**83**	**83**			**157.644.400,00**	**157.644.400,00**	0
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.454.400,00	50.454.400,00	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	73.800.000,00	73.800.000,00	0
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	0,00	0,00	0
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	33.390.000,00	33.390.000,00	0

2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang terpublikasi**	%	**85**	**85**			**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	0
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen informasi publik yang tersusun**	**Dokumen**	**2**	**2**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**0**
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	275.000.000,00	275.000.000,00	0
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	300.000.000,00	300.000.000,00	0
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**	**%**	**85**	**85**			**4.506.292.000,00**	**4.575.343.000,00**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nama Domain dan Sub Domain OPD yang dikelola Pemerintah Daerah**	**OPD**	**2**	**2**			**64.080.000,00**	**62.140.000,00**	
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	64.080.000,00	62.140.000,00	(1,940,000)
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Implementasi Pengelolaan E-Government**	**%**	**85**	**85**			**4.442.212.000,00**	**4.513.203.000,00**	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	72.300.000,00	69.450.000,00	(2,850,000)
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	400.000.000,00	369.633.000,00	(30,367,000)
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	227.512.000,00	185.265.000,00	(42,247,000)
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	Perangkat Daerah	53	53	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	3.742.400.000,00	3.888.855.000,00	146,455,000

		Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Pengelolaan dan Analisa Data Statistik Sektoral**	%	**100**	**100**			**235.721.000,00**	**202.242.900,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Statistik Sektoral yang dikelola**	**Data**	**50**	**50**			**235.721.000,00**	**202.242.900,00**	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	235.721.000,00	202.242.900,00	(33,478,100)
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Informasi/Berita Pemerintah Daerah yang disandikan/ diamankan**	%	**85**	**85**			**118.302.000,00**	**59.900.000,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah informasi / berita yang disandikan / diamankan**	**Berita**	**50**	**50**			**118.302.000,00**	**59.900.000,00**	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	50	50	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	118.302.000,00	59.900.000,00	(58,402,000)

BAB IV
PENUTUP

Perkembangan teknologi telah berjalan sangat pesat hingga sekarang. Dulunya banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah oleh teknologi, kini dapat juga merasakan juga teknologi informasi yang beredar saat ini. Kini kita dapat menikmati teknologi informasi dimana saja yang kita mau. Saat ini teknologi informasi masih berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi- teknologi baru yang dapat membantu kita dalam hal pekerjaan kita dapat menikmati teknologi informasi dimana saja yang kita mau.

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Tulungagung utamanya Dinas komunikasi dan Informatika perlu mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi informasi. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan e government. Melalui e -government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat lebih maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, antara lain bahwa saat ini konsep ***smart city*** belum terwujud nyata di Kabupaten Tulungagung, bahwa Sumber Daya Aparatur khususnya tenaga IT pada Dinas Kominfo sangat terbatas, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal. Melalui Rancangan Rencana Kerja perubahan Dinas Kominfo tahun 2024 ini diharapkan bahwa tujuan Organisasi Perangkat Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Kominfo dapat terwujud. Guna mencapai tujuan tersebut maka sasaran kerja Dinas Kominfo adalah:

1) Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi Pembangunan Daerah
2) Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi
3) Meningkatnya keamanan sistem persandian
4) Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas komunikasi dan informatika mampu menjembatani perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Tulungagung, **8 Juli 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

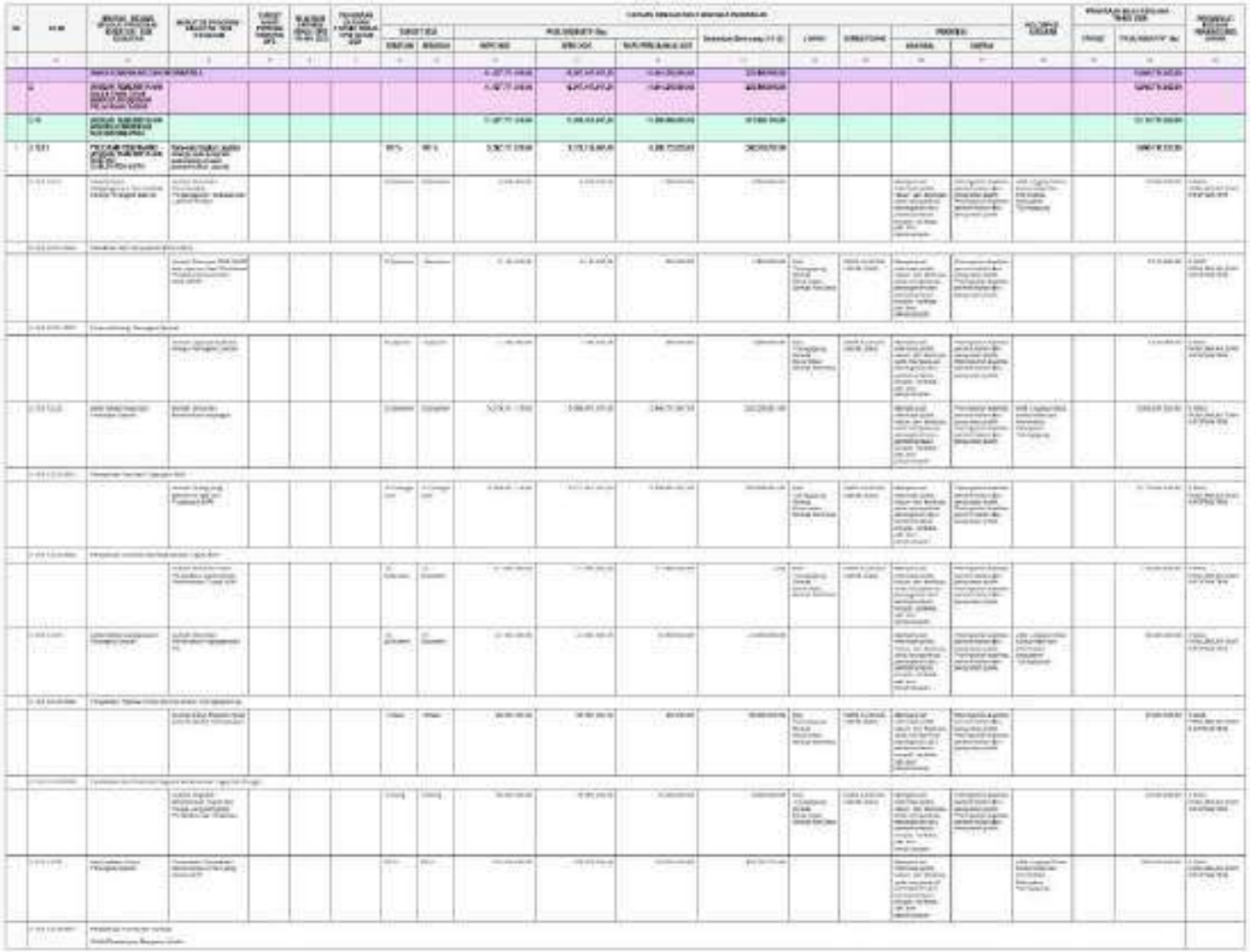


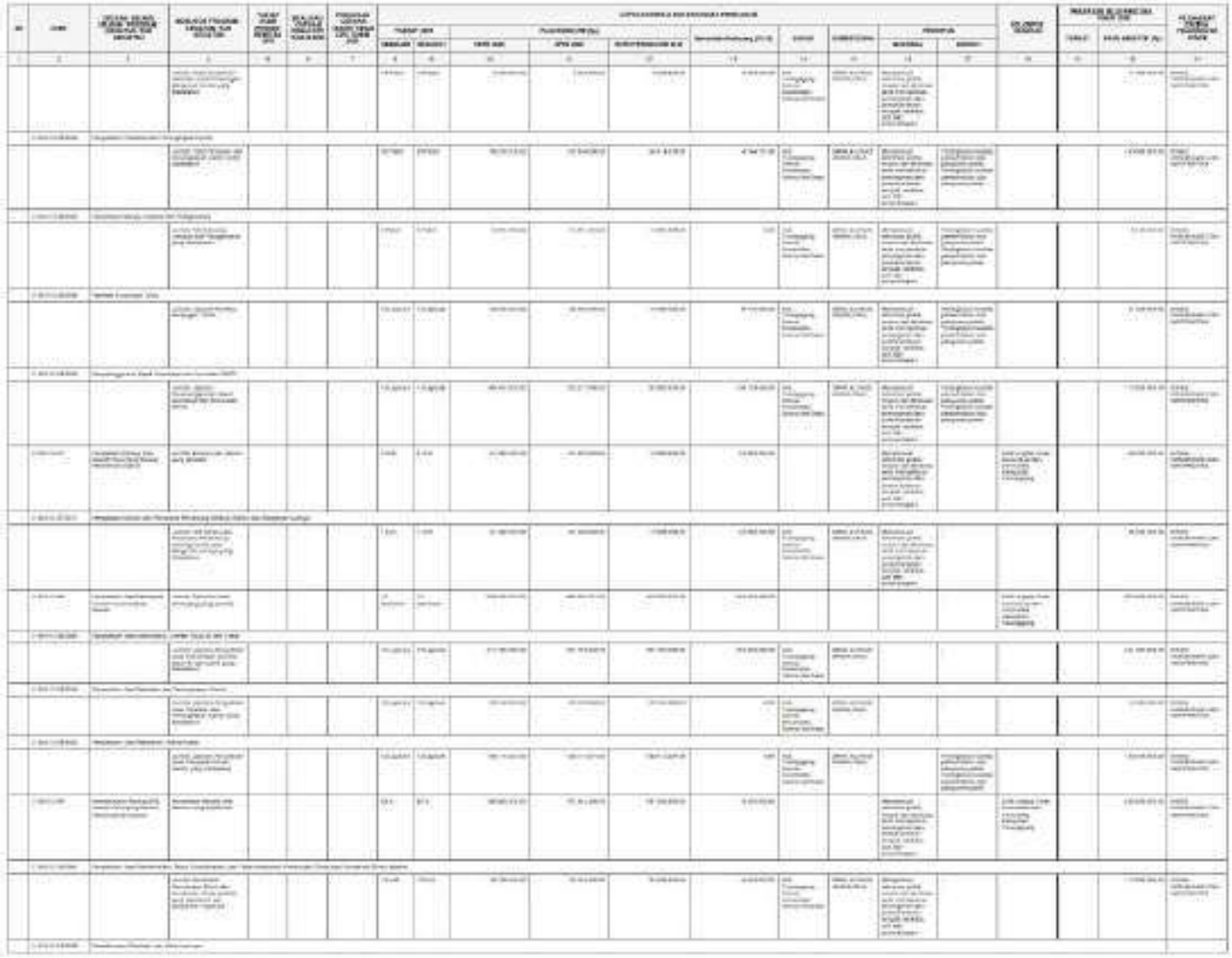
Drs. SUPADNI, M.M

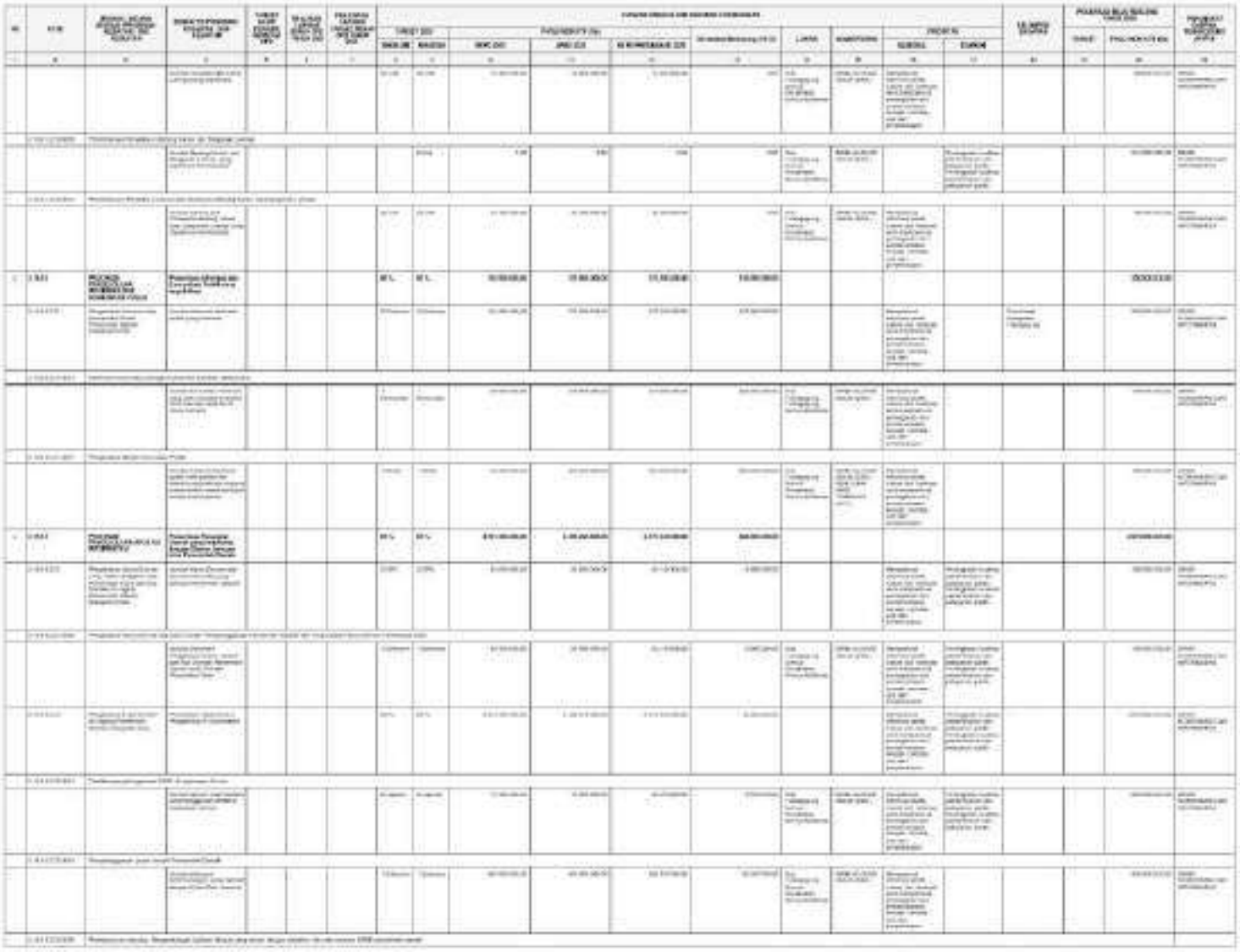
Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199312 1 002

LAMPIRAN









RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO 32 TELP. (0355) 321147

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada setiap tahunnya adalah merupakan tindak lanjut penjabaran maupun implementasi rencana strategis dengan maksud agar menjadi acuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung di masa depan untuk menjadi lebih baik.

Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan strategis yang berisikan program-program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang bernilai strategis bagi tercapainya visi, misi sehingga dapat memberikan arah pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Dalam Pelaksanaan Program Kerja yang telah direncanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tentunya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder untuk mendukung dan penyempurnaan program maupun kegiatan serta guna terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Besar harapan kami agar rencana kerja ini mendapatkan dukungan dari pihak yang berwenang dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Tulungagung, 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dr. SLAMET SUNARTO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630609 199602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistem Penulisan..... 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisi Kinerja Perangkat Daerah 16

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 25

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran..... 26

3.3 Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 51

BAB V. PENUTUP..... 52

DAFTAR TABEL

TABEL TC-29	:	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
TABEL TC-30	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
TABEL 2.3	:	Review Terhadap RKPD Tahun 2024
TABEL 3.1	:	Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah
TABEL 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
TABEL TC-33	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro s/d Tahun 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung ini merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA)-OPD dan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaannya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu unsur Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, yang mempunyai fungsi merumuskan dan pelaksaaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam menggerakan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan rakyat dalam rangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 untuk program dan kegiatan juga disesuaikan pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk hal tersebut diatas perlu adanya perbaikan dalam beberapa peningkatan program dan kegiatan antara lain pada program usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber daya produktif, kompetensi, dan produktifitas usahanya, melakukan pendampingan dan pelatihan pada anggota dan pengurus koperasi dan para pelaku usaha mikro dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung telah menetapkan program teknis yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun kedepan antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

8. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
27. Surat Keputusan Bupati Tulunguang Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Derah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terAwal periode Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat atau sumber pembiayaan APBN;
2. Merupakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sekarang dan memahami arah serta tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi;
4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun pada Tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

BAB 2
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Renja Tahun lalu, yaitu tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator kinerja dan target. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dilaksanakan secara terukur dan terarah, sedangkan indicator kinerja adalah langkah nyata untuk mencapai sasaran yang kegagalan maupun keberhasilan dapat terukur dengan adanya target kinerja. Adapun Evaluasi kinerja tahun 2024 dapat dijabarkan melalu indikator kinerja yang diukur dengan target capaian target sebagaimana pada tabel dibawah ini. Dari tabel ini dapat dievaluasi berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan:

Tabel 2. 1.
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO. PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025 TRIWULAN I

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**56,55**	**56,55**
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi (Dokumen)*	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**100%**	7 dokumen	5 Dokumen	**71,43%**
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	52 orang	47 orang	47 orang	47 orang	**100%**	47 orang	**100%**	**71,43%**
		2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 laporan	**50%**

		2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah (Dokumen)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	0	**0%**
		2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	52 orang	47 orang	47 orang	47 orang	**100%**	47 orang	47 orang	**100%**
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	85%	**85%**
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100%**
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100%**
		2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100%**
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100%**
		2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (Dokumen)*	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**100%**	4 dokumen	2 dokumen	**50%**

		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan	6 Laporan	**50%**
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)*	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	49,16%	**49,16%**
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100%**	1 unit	1 Unit	**100%**
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	**100%**	20 unit	10 Unit	**50%**
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	15 unit	-	-	-	**0%**	15 unit	7 unit	**46,67%**
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	1 unit	-	-	-	**-**	1 unit	0	**0%**
2		**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang yang disetujui***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Koperasi)*	5 unit	1 unit	5 unit	5 unit	**100%**	5 unit	5 unit	**100%**

		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	5 unit	1 unit	5 unit	5 unit	**100%**	5 unit	5 unit	**100%**
3	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Aktif (%)***	**68,62%**	**53,62%**	**58,62%**	68,62	107,85%	**63,62%**	**51,66%**	**81,20%**
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi (Koperasi)*	34 koperasi	34 koperasi	34 koperasi	34 koperasi	100%	34 koperasi	18 koperasi	**52,94%**
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit)*	34 koperasi	34 koperasi	34 koperasi	34 koperasi	100%	34 koperasi	18 koperasi	**52,94%**
4	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang meningkat kesehatannya (%)***	**1,03%**	**0,73%**	**0,93%**	**1,13%**	**122%**	**1,03**	**0,57%**	**55,33%**
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang dinilai sehat	36 unit usaha	30 unit usaha	33 unit usaha	33 unit usaha	100%	34 unit usaha	34 unit usaha	55%
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit)*	36 unit usaha	30 unit usaha	33 unit usaha	33 unit usaha	100%	34 unit usaha	34 unit usaha	100%

5	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat (%)***	**9,44%**	**7,44%**	8,44%	8,47%	100%	8,94%	8,98%	**100,45%**
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang mendapatkan diklat (orang)*	120 orang	100 orang	100 orang	123 orang	123%	115 orang	115 orang	100%
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)*	120 orang	100 orang	100 orang	123 orang	123%	115 orang	115 orang	100%
6	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)***	**18,35%**	**15,10%**	**16,64%**	**-11,34%**	**-68,15%**	**17,48%**	**-0,0189%**	**-0,11%**
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Usaha Koperasi yang dibina (%)*	13,87%	11,51%	12,58%	12,60%	100,16%	13,21%	13,22%	**100,08%**
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit)*	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	100%	80 unit usaha	80 unit usaha	100%
7	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)***	**2,26%**	**2,03%**	**2,12%**	**2,12%**	100,00%	**2,18%**	**2,03%**	**93,12%**
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Usaha)*	90 Unit Usaha	100 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100%	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100%

		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit)*	90 Unit Usaha	100 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100%	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100%
8	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas Usaha (%)***	**2,02%**	**1,81%**	**1,89%**	**1,89%**	100,00%	**1,95%**	**1,85%**	**94,87%**
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang berizin usaha (%)*	9,84%	9,01%	9,23%	9,37%	101,51%	9,51%	9,10%	**95,69%**
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit)*	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100%	20 unit usaha	15 unit usaha	**75%**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah / Berkurang Pagu ((Rp)
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	**%**	**100%**	**100%**			7.724.067.216	7.598.147.916	-125.919.300
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi (Dokumen)*	*dokumen*	7 dokumen	7 dokumen			6.647.859.216	6.669.967.216	22.108.000
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*dokumen*	47 orang	47 orang	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	6.573.119.216	6.598.619.216	25.500.000
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	65.440.000	69.315.000	3.875.000
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	*dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	2.000.000	1.033.000	-967.000

2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	1.800.000	0	-1.800.000
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	2.000.000	0	-2.000.000
2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	1.500.000	1.000.000	-500.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	2.000.000	0	-2.000.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah (Dokumen)*	*dokumen*	1 dokumen	1 dokumen			41.000.000	34.874.500	-6.125.500
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*Paket*	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	25.000.000	25.000.000	0
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*orang*	52 orang	47 orang	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	16.000.000	9.874.500	-6.125.500
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*	*%*	100%	100%	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	315.428.000	206.386.200	-109.041.800

2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	8.450.000	5.722.000	-2.728.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	80.227.000	63.388.600	-16.838.400
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	28.000.000	21.698.000	-6.302.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1 paket	1 paket	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	30.314.000	25.259.600	-5.054.400
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	16.825.000	11.475.000	-5.350.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	151.612.000	78.843.000	-72.769.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (Dokumen)*	*Dokumen*	4 dokumen	4 dokumen			424.720.000	402.820.000	-21.900.000
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	1.144.000	1.144.000	0

2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	111.480.000	111.480.000	0
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	38.040.000	23.140.000	-14.900.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*Laporan*	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	274.056.000	267.056.000	-7.000.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)*	*%*	100%	100%	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	295.060.000	284.100.000	-10.960.000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*Unit*	1 unit	1 unit	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	74.500.000	67.200.000	-7.300.000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*Unit*	16 unit	16 unit	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	10.800.000	10.800.000	0
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*Unit*	1 unit	1 unit	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	9.760.000	6.100.000	-3.660.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*Unit*	1 unit	1 unit	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	200.000.000	200.000.000	0

2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang yang disetujui***	***%***	**100%**	**100%**			5.000.000	3.532.100	-1.467.900
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Koperasi)*	*Koperasi*	5 unit	5 unit			5.000.000	3.532.100	-1.467.900
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	*Unit*	5 unit	5 unit	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	5.000.000	3.532.100	-1.467.900
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Aktif (%)***	***%***	**63,62%**	**63,62%**			27.270.000	27.270.000	0
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi (Koperasi)*	*Koperasi*	34 koperasi	34 koperasi			27.270.000	27.270.000	0
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit)*	*Koperasi*	34 koperasi	34 koperasi	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	27.270.000	27.270.000	0
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang meningkat kesehatannya (%)***	***%***	**1,03%**	**1,03**			75.389.800	55.013.800	-20.376.000

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang dinilai sehat	Unit Usaha	36 unit usaha	34 unit usaha			75.389.800	55.013.800	-20.376.000
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit)*	Unit Usaha	36 unit usaha	34 unit usaha	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	75.389.800	55.013.800	-20.376.000
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat (%)***	**%**	8,94%	8,94%			235.000.000	2.081.131.700	1.846.131.700
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang mendapatkan diklat (orang)*	*orang*	115 orang	115 orang			235.000.000	2.081.131.700	1.846.131.700
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)*	*orang*	100 orang	115 orang	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	235.000.000	2.081.131.700	1.846.131.700
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)***	**%**	**17,48%**	**17,48%**			55.000.000	88.243.300	33.243.300
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Usaha Koperasi yang dibina (%)*	**%**	13,21%	13,21%			55.000.000	88.243.300	33.243.300
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit)*	*Unit Usaha*	80 unit usaha	80 unit usaha	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	55.000.000	88.243.300	33.243.300

2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)***	***%***	**2,18%**	**2,18%**			30.000.000	30.000.000	0
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Usaha)*	*Usaha Mikro*	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha			30.000.000	30.000.000	0
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit)*	*Unit Usaha*	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	30.000.000	30.000.000	0
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas Usaha (%)***	***%***	**1,95%**	**1,95%**			265.208.500	378.944.600	113.736.100
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang berizin usaha (%)*	*%*	9,84%	9,51%			265.208.500	378.944.600	113.736.100
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit)*	*Unit Usaha*	20 unit usaha	20 unit usaha	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tulungagung, Semua Kel/Desa	265.208.500	378.944.600	113.736.100

BAB 4
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal – hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4.1 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan dan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

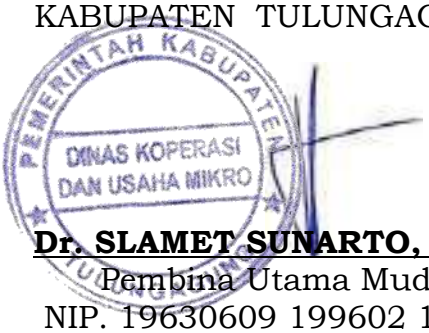
1. Sekretariat, Bidang – bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung secara Bersama – sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik – baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah.

Tulungagung, 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dr. SLAMET SUNARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630609 199602 1 001

RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan. Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 perlu disusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pelayanan perizinan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis. Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, dan mengingat dimasa-masa mendatang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka rencana kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan seiring ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah di bidang perizinan, telah menyusun program-program dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai RPJMD, yakni Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk kesempurnaan, saran dan masukan sangat diperlukan dalam sempurnanya dokumen ini dan semoga bermanfaat. Aamiin.

Tulungagung, 08 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL 1

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1 LATAR BELAKANG 2

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP 21

4.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan 21

4.2 Rencana Tindak Lanjut 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025 8

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 11

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2025 (Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, dimana Perangkat Daerah harus melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025; dan
b. Hasil verifikasi Perubahan Renja Tahun 2025. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
   - Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
   - Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
   - Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
   - Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
   - Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2025 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahin 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan BromoTengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembar daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri C);
39. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
40. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
41. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
d. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya Tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana, rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, pencapaian target Perubahan Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Triwulan I TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan							
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**						
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Rata – rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50 %**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14 Dokumen**	**10 Dokumen**	**12 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 %**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	0 %
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**3 Dokumen**	**25 %**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	25 %
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi dan Pelatihan Kepegawaian**	**30 Orang**	**30 Orang**	**30 Orang**	**0 orang**	**0 %**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 paket	50 paket	42 paket	0 paket	0 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	4 orang	1 orang	0 orang	0 %
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	44 orang	44 orang	0 orang	0 %
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**80 %**	100 %	80 %	25 %	31,25 %
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 paket	8 paket	16 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 paket	57 paket	44 paket	5 paket	11,3 %
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 paket	9 paket	25 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 paket	9 paket	7 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120 Unit**	**23 Unit**	**120 Unit**	**0 Unit**	**0 %**
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	14 Unit	2 Unit	0 unit	0 %
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	9 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen jasa penunjang yang tersedia**	**12** Laporan	**12** Laporan	**12** Laporan	**3** Laporan	**25%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**20 Unit**	**62 Unit**	**0 Unit**	**0 %**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	4 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	60 Unit	111 Unit	0 Unit	0 %
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi (Miliar)**	**850 Miliar**	**1.455 M**	**850 Miliar**	**243,982 M**	**28,7%**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 %**
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Investor**	**7 %**	**7.8 %**	**7 %**	**47,8 %**	**682,8 %**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**2 Dokumen**	1 Dokumen	**2 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 %**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverifikasi**	**92 %**	**100 %**	**92 %**	**100 %**	**100 %**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**600 Pemohon**	**626 Pemohon Perizinan**	**600 Pemohon**	**3.849 Pemohon Perizinan**	**641,5 %**
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	30 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor**	**50 %**	**100 %**	**50 %**	0 %	0 %
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**12 Kegiatan Usaha**	**12 Kegiatan Usaha**	**12 Kegiatan Usaha**	0 Kegiatan	0 %
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	5 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	**2 Kegiatan Usaha**	0 Kegiatan Usaha	0%
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	232 Pelaku Usaha	290 pelaku usaha	120 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	42 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	47,05 %
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinana dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**3 Dokumen**	**25 %**
2	18	06	2.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 - 2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, berikut disajikan perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapun rincian Rencana perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
Urusan	Bidang Urusan	Program	KEgaitan	Sub Kegiatan										
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.843.004.739**	**5.361.116.439**	**(481.888.300)**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Rata – rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**5.522.280.002**	**5.166.487.139**	**(355.792.863)**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**14**	**14**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**1.664.000**	**1.248.000**	**(416.000)**
2	*18*	*01*	*2.01*	*0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*8*	*6*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*832.000*	*624.000*	*(208.000)*
2	*18*	*01*	*2.01*	*0007*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*832.000*	*624.000*	*(208.000)*
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	***12***	***12***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***4.423.310.439***	***4.033.166.639***	***(390.143.800)***
2	*18*	*01*	*2.02*	*0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*orang/bulan*	*23*	*23*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*4.349.240.439*	*3.959.096.639*	*(390.143.800)*
2	*18*	*01*	*2.02*	*0002*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*	*1*	*1*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*74.070.000*	*74.070.000*	*0*
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi dan Pelatihan Kepegawaian**	**Orang**	***30***	***30***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***41.488.000***	***30.458.000***	***(11.030.000)***
2	*18*	*01*	*2.03*	*0002*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*paket*	*50*	*42*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*17.158.000*	*17.158.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.03*	*0009*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*orang*	*2*	*1*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*10.330.000*	*9.870.000*	*(460.000)*

				0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*orang*	*44*	*44*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*14.000.000*	*3.430.000*	*(10.570.000)*
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP**	**%**	***80***	***80***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***178.765.500***	**225.830.400**	***47.064.900***
2	*18*	*01*	*2.06*	*0001*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	*paket*	*100*	*16*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*7.166.000*	*7.166.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.06*	*0002*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*paket*	*100*	*44*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*50.000.000*	*69.672.200*	*19.672.200*
2	*18*	*01*	*2.06*	*0003*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*	*paket*	*100*	*25*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*15.000.000*	*15.000.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.06*	*0005*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*	*paket*	*100*	*7*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*41.439.300*	*74.007.000*	*32.567.700*
2	*18*	*01*	*2.06*	*0008*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*7.512.000*	*7.512.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.06*	*0009*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*57.648.200*	*52.473.200*	*(5.175.000)*
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**Unit**	**120**	***120***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***11.782.500***	***11.782.500***	***0***
2	*18*	*01*	*2.07*	*0005*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	*Unit*	*2*	*2*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*3.120.000*	*3.120.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.07*	*0010*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*Unit*	*1*	*1*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*8.662.500*	*8.662.500*	*0*
2	**18**	***01***	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia**	***Laporan***	**12**	***12***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***598.401.600***	***595.481.600***	***(1.880.000)***
2	*18*	*01*	*2.08*	*0001*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*1.560.000*	*1.040.000*	*(520.000)*
2	*18*	*01*	*2.08*	*0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*136.200.000*	*136.200.000*	*0*
2	*18*	*01*	*2.08*	*0003*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*230.400.000*	*228.000.000*	*2.400.000*
2	*18*	*01*	*2.08*	*0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	*Laporan*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*230.241.600*	*230.241.600*	*0*
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Unit**	**100**	**100**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**197.470.000**	**268.520.000**	**71.050.000**
2	*18*	*01*	*2.09*	*0001*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*5*	*4*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*113.110.000*	*139.410.000*	*26.300.000*
2	*18*	*01*	*2.09*	*0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	*19*	*19*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*

2	*18*	*01*	*2.08*	*0009*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*2*	*2*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*50.000.000*	*43.000.000*	*(7.000.000)*
2	*18*	*01*	*2.08*	*0010*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*36*	*111*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*24.360.000*	*76.110.000*	*51.750.000*
2	**18**	**02**	**2.01**		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi (Miliar)**	**Miliar**	**850**	**850**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**39.077.500**	**29.570.500**	**(9.507.000)**
2	**18**	**02**	**2.01**		***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota***	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	***Dokumen***	***1***	***1***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***39.077.500***	***29.570.500***	***(9.507.000)***
2	*18*	*02*	*2.01*	*0004*	*Penyusunan Peta Potensi Invstasi Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*1*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*30.077.500*	*29.570.500*	*(9.507.000)*
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Investor**	**%**	**7 %**	**7 %**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	***46.922.200***	***13.654.800***	**(33.267.400)**
2	**18**	**03**	**2.01**		***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Jumlah Dokumen Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	***Kegiatan***	***2***	***2***	**Tulungagung**	**Tulungagung**	***46.922.200***	***13.654.800***	***(33.267.400)***
2	*18*	*03*	*2.01*	*0002*	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)*	*Dokumen*	*1*	*1*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*46.922.200*	*13.654.800*	*(33.267.400)*
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverifikasi**	**Prosentase**	**92 %**	**92 %**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**111.327.500**	**52.114.000**	**(59.213.500)**
2	**18**	**04**	**2.01**		***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Pemohon Perizinan***	***600***	***600***	**Tulungagung**	**Tulungagung**	***111.327.500***	***52.114.000***	***(59.213.500)***
2	*18*	*04*	*2.01*	*0006*	*Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*Pelaku Usaha*	*50*	*150*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*83.317.500*	*30.100.000*	*(53.217.500)*
2	*18*	*04*	*2.01*	*0007*	*Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko*	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*Pelaku Usaha*	*600*	*20*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*28.010.000*	*22.014.000*	*(5.996.000)*

2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor**	**Prosentase**	**50 %**	**50 %**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**98.411.500**	**22.276.500**	**(76.135.000)**
2	**18**	***05***	***2.01***		***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Jumlah pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Kegiatan***	***12***	***120***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***98.411.500***	***48.269.100***	***(50.142.400)***
2	*18*	*05*	*2.01*	*0004*	*Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Kegiatan Usaha*	*5*	*2*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*21.766.500*	*7.836.500*	*(13.930.000)*
2	*18*	*05*	*2.01*	*0005*	*Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	*Pelaku Usaha*	*232*	*120*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*57.375.000*	*25.769.600*	*(31.605.400)*
2	*18*	*05*	*2.01*	*0006*	*Pengawasan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	*Kegiatan Usaha*	*20*	*17*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*19.270.000*	*14.663.000*	*(4.607.000)*
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi**	**Prosentase**	**100**	**100**	**Tulungagung**	**Tulungagung**	**94.384.000**	***51.020.900***	**(43.363.100)**
2	***18***	***06***	***2.01***		***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	**Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah**	**Dokumen**	***12***	***12***	***Tulungagung***	***Tulungagung***	***94.384.000***	***51.020.900***	**(43.363.100)**
2	*18*	*06*	*2.01*	*0002*	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	*Dokumen*	*12*	*12*	*Tulungagung*	*Tulungagung*	*94.384.000*	*51.020.900*	*(43.363.100)*
					TOTAL							**5.843.004.739**	**5.361.116.439**	**(481.888.300)**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan Penyelenggara Pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 08 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.052.648.811	5.452.882.039	5.166.487.139							5.371.355.260	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	-			14 Dokumen	14 Dokumen	1.664.000	1.664.000	1.664.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		1.555.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	6 Dokumen	832.000	832.000	624.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			655.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	832.000,00	832.000	624.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	-			12 Dokumen	12 Dokumen	3.973.697.211	4.423.310.439	4.423.310.439			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		4.224.223.860	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Org/bln	23 Org/bln	3.949.007.211	4.349.240.439	3.959.096.639	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			4.146.450.360	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	24.690.000	74.070.000	74.070.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			77.773.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			30 orang	30 orang	49.330.000	41.488.000	41.488.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		43.079.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	42 Paket	25.000.000	17.158.000	17.158.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			18.015.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	10.330.000	10.330.000	9.870.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			10.363.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	44 Orang	14.000.000	14.000.000	3.430.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			14.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	-			80 %	80 %	217.163.500	178.765.500	178.765.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		196.829.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	16 Paket	7.166.000	7.166.000	7.166.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			7.525.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	44 Paket	50.000.000	50.000.000	69.672.200	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			73.155.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	25 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			15.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	7 Paket	30.355.800	41.439.300	74.007.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			31.875.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	7.512.000	7.512.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			7.887.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.641.700	57.648.200	52.473.200	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			60.637.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			120 unit	120 unit	11.782.500	11.782.500	11.782.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		12.371.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.120.000	3.120.000	3.120.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			3.276.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.662.500	8.662.500	8.662.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			9.095.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	-			12 Laporan	12 Laporan	598.401.600	598.401.600	598.401.600			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		628.318.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.560.000	1.560.000	1.040.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			1.638.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.200.000	136.200.000	136.200.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			143.010.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.400.000	230.400.000	228.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			241.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.241.600	230.241.600	230.241.600	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			241.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 %	100 %	200.610.000	197.470.000	197.470.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		264.978.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	4 Unit	116.250.000,00	113.110.000,00	139.410.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			122.062.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	43.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			52.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	111 Unit	24.360.000	24.360.000	76.110.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			79.915.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi				850 M	850 M	40.000.000	39.077.500	29.570.500							41.031.300	

	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	39.077.500	39.077.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha		41.031.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	39.077.500	29.570.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			41.031.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				7 %	7 %	10.000.000	46.922.200	13.654.800							49.268.300	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	46.922.200	46.922.200			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		49.268.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	46.922.200	13.654.800	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			49.268.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

6	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverfikasi				92 %	92 %	40.000.000	111.327.500	52.114.000							123.910.500	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			600 Pemohon	600 Pemohon	40.000.000	111.327.500	111.327.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		123.910.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	20.000.000	83.317.500	30.100.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			94.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20.000.000	28.010.000	22.014.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			29.410.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor				50 %	50 %	411.245.000	98.411.500	48.269.100							65.308.150	

	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	411.245.000	98.411.500	98.411.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usha		65.308.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	2 Kegiatan Usaha.	10.000.000	21.766.500	7.836.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			22.854.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				232 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	220.686.000	57.375.000	25.769.600	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			27.058.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	180.559.000	19.270.000	14.663.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			15.396.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

8	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi				100 %	100 %	50.000.000	94.384.000	51.020.900							99.103.200	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan yang diolah	-			12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	94.384.000	94.384.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		99.103.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	94.384.000	51.020.900	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			99.103.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H												**5.603.893.811**	**5.843.004.739**	**5.361.116.439**						**5.749.976.710**	

PERUBAHAN
RENCANA KERJA 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG









SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, dan mengingat di waktu yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka rencana kerja ini masih diperlukan perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan seiring ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tulungagung telah menyusun program-program dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai RPD, yakni Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

ACHMAD MUGIYONO, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6
BAB III : RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 10
BAB IV : PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025 7
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung..... 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berpedoman pada:

a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, dimana Perangkat Daerah harus melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025; dan
b. Hasil verifikasi Perubahan Renja Tahun 2025

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024– 2026;
12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Renca Kerja Perangkat Daerah ini adalah untuk:

1. Menyesuaikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta perubahan lokasi dan kelompok sasasaran kegiatan;
2. Dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target

kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya Tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana, rencana tidak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, pencapaian target Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	31,67%	31,67%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	10 dokumen	10 dokumen	-	-	-
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian yang disusun	25 dokumen	24 dokumen	-	-	-
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	33.33%	33.33%
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	13 unit	8 unit	-	-	-
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen jasa Penunjang yang Tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan peralatan kantor	100%	100%	100%	50%	50%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100%	100%	100%	22,22%	22,22%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase kepemudaan yang aktif	70%	70%	70%	15%	21,5%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	65%	60%	100%	0 %	0 %
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	34%	75,60%	31%	-	-
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	75%	75%	75%	25%	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan	75%	75%	75%	25%	33,33%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yang dibina	85%	85%	85%	20%	23,52%
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina	75%	75%	75%	20%	26,67%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan	80%	80%	80%	20%	25%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase gugus pendidikan kepramukaan yang aktif	75%	100%	100%	100%	100%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	19 Organisasi	19 Organisasi	19 Organisasi	19 Organisasi	100%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, berikut disajikan perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Adapun rincian Rencana perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**4.076.306.087,00**	**4.778.411.062,00**	**-702.104.975,00**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**Dokumen**	**10**	***0***	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**96.794.000,00**	***0***	***-96.794.000,00***
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	26.100.000,00	0	-26.100.000,00
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	70.694.000,00	0	-70.694.000,00
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Dokumen**	**14**	**12**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**3.229.011.687,00**	**3.710.846.262,00**	**481.834.575,00**
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/bulan	25	28	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	3.542.926.262,00	3.560.006.262,00	481.834.575,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
		Gaji dan tunjangan ASN								
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	150.840.000,00	150.840.000,00	0
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian yang disusun**	**dokumen**	**25**	**0**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**31.500.000,00**	**0**	**-31.500.000,00**
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	0	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	31.500.000,00	0	-31.500.000,00
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase kecukupan administrasi umum**	**Pesentase**	**100**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**465.242.400,00**	**194.997.600,00**	**-270.244.800,00**
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	8.710.000,00	6.097.000,00	-2.613.000,00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	133.893.400,00	14.373.900,00	-119.519.500,00
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	25.440.000,00	25.203.400,00	-236.600,00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	4	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	31.248.000,00	21.873.600,00	-9.374.400,00
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	33.841.000,00	23.688.700,00	-10.152.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	232.110.000,00	103.761.000,00	-128.349.000,00
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**unit**	**8**	**0**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**12.480.000,00**	**0,00**	**-12.480.000,00**
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	*0*	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	12.480.000,00	0,00	-12.480.000,00
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen jasa Penunjang yang Tersedia**	**dokumen**	**12**	**12**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**151.398.000,00**	**319.527.200,00**	**168.129.200,00**
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	11.158.800,00	117.800.000,00	106.641.200,00
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	*3*	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	58.489.200,00	*45.300.000,00*	*-13.189.200,00*
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	81.750.000,00	156.427.200,00	74.677.200,00
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan peralatan kantor**	**Persentase**	**100**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**89.880.000,00**	**553.040.000,00**	**463.160.000,00**
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	3	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	81.380.000,00	53.040.000,00	-28.340.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	8.500.000,00	500.000.000,00	491.500.000,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**Persentase**	**-**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**870.000.000,00**	**439.508.000,00**	**430.492.000,00**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase kepemudaan yang aktif**	**Persentase**	**-**	**70**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**470.000.000,00**	**339.508.000,00**	**-130.492.000,00**
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	150.000.000,00	72.776.000,00	-77.224.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	orang	100	100	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	150.000.000,00	134.232.000,00	-15.768.000,00
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	orang	20	20	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	orang	100	100	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	120.000.000,00	107.500.000,00	-12.500.000,00
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**Persentase**	**-**	**100**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-300.000.000,00**
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	400.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet yang berprestasi**	**Persentase**	**-**	**31**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**7.940.000.000,00**	**8.630.053.500,00**	-690.053.500,00
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kwenangan daerah kabupaten/kota yang dikembangkan**	**Persentase**	**75**	**75**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**100.000.000,00**	**82.775.000,00**	**-17.225.000,00**
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000,00	82.775.000,00	-17.225.000,00
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan**	**Persentase**	**-**	**75**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	**450.000.000,00**	**346.462.500,00**	**-103.537.500,00**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Kegiatan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000,00	111.550.000,00	11.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
		Tingkat Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	orang	1	200	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	350.000.000,00	234.912.500,00	-115.087.500,00
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase cabang olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yang dibina**	**Persentase**	**-**	**85%**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	**4.500.000.000,00**	**5.545.000.000,0**	**1.045.000.000,00**
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	orang	1	200	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	4.500.000.000,00	5.545.000.000,00	1.045.000.000,00
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase organisasi olahraga yang dibina**	**Persentase**	**-**	**75**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**1.765.000.000,00**	**1.554.688.000,00**	**-210.312.000,00**
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	158	155	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.765.000.000,00	1.554.688.000,00	-210.312.000,00
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan**	**Persentase**	**-**	**80**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**1.125.000.000,00**	**1.101.128.000,00**	**-23.872.000,00**
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan	Laporan	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	250.000.000,00	184.200.000,00	-65.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
		Olahraga Rekreasi								
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	75.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	0	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	100.000.000,00	90.300.000,00	-9.700.000,00
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	0	5	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	700.000.000,00	757.628.000,00	57.628.000,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase gugus pendidikan kepramukaan yang aktif**	**Persentase**	**75**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**335.000.000,00**	**242.629.000,00**	**-92.371.000,00**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina**	**Organisasi**	**-**	**19**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**335.000.000,00**	**242.629.000,00**	**-92.371.000,00**
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	185.000.000,00	185.000.000,00	0
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang	Orang	150	0	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000,00	0	-50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
				Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Lokasi Sebelum Perbahan	Lokasi Setelah Perbahan	Pagu Sebelum Peruabahn	Pagu Sesudah Peruabahn	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
		Meningkat Kapasitasnya								
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	19	19	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50.000.000,00	27.629.000,00	-22.371.000,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ACHMAD MUGIYONO, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan petunjuk teknis pelaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung yang berisikan penjabaran Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) Tahun dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya, sebagai wujud ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berharap Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam Renja ini dapat berjalan dengan baik.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK ISMIATI, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700623 199703 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2025 (Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan tidak meninggalkan prinsip – prinsip dasar manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang diwarnai prinsip–prinsip transparan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di Tulungagung adalah Dinas Perpustakaan dan juga menerapkan perencanaan kegiatan dan evaluasi pemerintahan serta manajemen untuk menentukan kebijaksanaan pengambilan keputusan di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Berdasarkan Peraturab Menetri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagun Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan Perubahan RKPD Kabupeten Tulungagung Tahun 2025

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perpangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomot 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Pearturan Bupati Nomot 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, Dimana Perangkat Daerah harus melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025; dan
b. Hasil Verifikasi Perubahan Renja Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas peprustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun 2025 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung
28. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan jerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Dearah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
b. Sebagai dasar Penyusunan Rencana Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perngakat Daerah;
d. Mewujudkan perencanaan Pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencanan Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar subtansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterikatan anatara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Derah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan realisasi Renstra Perngakat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat

Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun yang bersangkautan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinreja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya Tujuan Perubahan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas Pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui factor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambi.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendaaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perbahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencan Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaianb kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung sapai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renaj Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi S/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
0	**00**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)***	**100%**	**100**	**100**	**30**	**30**
0	00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat_Daerah (Dokumen)*	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	3 dokumen	27
0	00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (Dokumen)*	28 dokumen	28 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0

0	00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)*	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	3 dokumen	30
0	00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*	100%	100	100	30	30
0	00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (Dokumen)*	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	25
0	00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)*	100%	100	100	30	30
2	**23**	**02**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standart Perpustakaan (persen)***	**29%**	**25**	**29**	**5**	**17**
					Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus (lokus)	**8 lokus**	**6 lokus**	**8 lokus**	**2 lokus**	**25**
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelola perpustakaan tingkat daerah yang sesuai standart nasional (Unit)*	24 unit	22 unit	24 unit	4 unit	16

2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lokus pembudayaan kegemaran Membaca dan Literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus (Lokasi)*	8 lokus	6 lokus	8 lokus	2 lokus	25

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi S/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
2	**23**	**03**		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan (%)***	**100%**	**0**	**100**	**100**	**1**
2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (eksemplar)*	2 eksemplar	0 eksemplar	2 eksemplar	2 eksemplar	100
2	**24**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Pesentase OPD yang tertib arsip (%)***	**16%**	**15**	**16**	**16**	**100**
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	**2300 berkas**	**2300 berkas**	**2300 berkas**	**500 berkas**	**28**

					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Berkas)	**675 berkas**	**675 berkas**	**675 berkas**	**100 berkas**	**14**
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	**3 laporan**	**3 laporan**	**3 laporan**	**3 laporan**	**100**
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)*	2300 berkas	1000 berkas	2300 berkas	500 berkas	28
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Berkas)*	675 berkas	438 berkas	675 berkas	79 berkas	18
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100

2	**24**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (bERKAS)***	**400 berkas**	**0 berkas**	**400 berkas**	**0 berkas**	**0**
					Persentase arsip yang terselamatkan (%)	**40%**	**0**	**40**	**0**	**0**
2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)*	400 berkas	0 berkas	400 berkas	0 berkas	0

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasab substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini Adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Program Adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleha instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, berikut disajikan Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapaun rincian Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini :

.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
23				**DINAS PEPRUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**							**7.515.008.269,00**	**7.240.296.069,00**	
23				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEPRUSTAKAN**							**7.306.218.269,00**	**6.962.040.069,00**	
23	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)***	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**5.983.702.269,00**	**5.589.524.069,00**	
23	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**11**	**11**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**13.226.800,00**	**13.226.800,00**	
23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume	7	7	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	5.500.000,00	5.500.000,00	
23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	7.726.800,00	7.726.800,00	
23	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**dokumen**	**28**	**28**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**4.929.142.469,00**	**4.929.142.469,00**	
23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	36	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	4.851.262.469,00	4.496.562.469,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	6	6	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	77.880.000,00	77.880.000,00	
23	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**dokumen**	**10**	**10**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**87.352.000,00**	**87.352.000,00**	
23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	37.352.000,00	37.352.000,00	
23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	13	13	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	50.000.000,00	50.000.000,00	
23	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**248.070.200,00**	**248.070.200,00**	
23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	18.000.000,00	18.000.000,00	
23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	109.154.600,00	104.046.400,00	
23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	0,00	0,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	18.157.600,00	18.157.600,00	
23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	44.190.000,00	69.190.000,00	
23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	100	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	58.568.000,00	58.568.000,00	
23	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia**	**dokumen**	**12**	**12**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**347.720.800,00**	**347.720.800,00**	
23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	222.100.000,00	222.100.000,00	
23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	125.620.800,00	125.620.800,00	
23	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**358.190.000,00**	**358.190.000,00**	
23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	18	18	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	93.970.000,00	127.220.000,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
23		2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	40.600.000,00	21.600.000,00	
23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	4	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	223.620.000,00	150.000.000,00	
23	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standart Perpustakaan**	**%**	**29**	**29**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**1.171.561.000,00**	**1.221.561.000,00**	
23	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelola perpustakaan tingkat daerah yang sesuai standart nasional**	**unit**	**24**	**24**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**472.545.000,00**	**472.545.000,00**	
23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	24	24	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	472.545.000,00	439.647.000,00	
23	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokus pembudayaan kegemaran Membaca dan Literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus**	**lokasi**	**8**	**8**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**699.016.000,00**	**699.016.000,00**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja			Lokasi			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan		Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
23 02 2.02 0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	lokus	8	8		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung				781.914.000,00	
02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**	**berkas**	**2300**	**2300**		**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**		**108.915.000,00**	**108.915.000,00**		
24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	berkas	2250	2250		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		108.915.000,00	173.819.000,00		
23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno Milik Kabupaten/Kota dilestarikan**	**% Daerah yang**	**100**	**100**		**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**		**150.955.000,00**	**150.955.000,00**		
24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	berkas	675	675		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		45.000.000,00	45.000.000,00		
23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Masyarakat Dikembangkan Dilestarikan dan Didayagunakan**	**Eksemplar**	**2**	**2**		**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**		**150.955.000,00**	**150.955.000,00**		
24 02 2.02 0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip dan	550	550		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		45.000.000,00	45.000.000,00		
23 03 2.01 0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat dilakukan pengembangan, pengolahan, dan pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar yang	2	2		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		150.955.000,00	150.955.000,00		
24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	3	3		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		34.875.000,00	34.875.000,00		
24 02 2.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	3	3		Kab. T.Agung	Kab. T.Agung		34.875.000,00	39.937.000,00		
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									**208.790.000,00**	**278.256.000,00**		
24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Pesentase OPD yang tertib arsip** **Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**	**%** **Berkas**	**16** **2300**	**16** **2300**		**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**		**188.790.000,00**	**258.256.000,00**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
24	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang terselamatkan Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan**	**% berkas**	**40 400**	**40 400**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0**
24	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan**	**berkas**	**400**	**400**	**Kab. T.Agung**	**Kab. T.Agung**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0**
24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	500	500	Kab. T.Agung	Kab. T.Agung	20.000.000,00	20.000.000,00	0

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, program dan kegiatan indicator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas Pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara professional sebagai Dinas teknis.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten terbuka, penuh kejujuran dan tanggungjawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten tulungagung secara Bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
    a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman padsa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaragan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Perubahan Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten tulungagung dan Penyelenggara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LILIK ISMIATI, S.E
Pembina Utma Muda
NIP. 19700623 199703 2 005

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TULUNGAGUG

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**6.024.502.005,00**	**7.515.008.269,00**	**7.240.296.069,00**	**1.215.794.064,00**							**8.911.430.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.024.502.005,00**	**7.515.008.269,00**	**7.240.296.069,00**	**1.215.794.064,00**							**8.911.430.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.784.502.005,00**	**7.306.218.269,00**	**6.962.040.069,00**	**1.177.538.064,00**							**8.445.680.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.434.502.005,00**	**5.983.702.269,00**	**5.589.524.069,00**	**2.213.677.995,00**							**7.648.180.000,00**	

	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	13.226.800,00	13.226.800,00	13.226.800,00	0,00			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		9.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.726.800,00	7.726.800,00	7.726.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.630.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				28 Dokumen	28 Dokumen	4.494.161.205,00	4.929.142.469,00	4.574.442.469,00	80.281.264,00			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.578.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.416.281.205,00	4.851.262.469,00	4.496.562.469,00	80.281.264,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.445.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	77.880.000,00	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	103.452.000,00	87.352.000,00	87.352.000,00	-16.100.000,00			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		132.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	53.452.000,00	37.352.000,00	37.352.000,00	-16.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP*				100 %	100 %	283.851.200,00	248.070.200,00	267.962.000,00	-15.889.200,00			-	-	-		587.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	109.154.600,00	109.154.600,00	104.046.400,00	-5.108.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.914.300,00	18.157.600,00	18.157.600,00	243.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	44.190.000,00	44.190.000,00	69.190.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	94.592.300,00	58.568.000,00	58.568.000,00	-36.024.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	347.720.800,00	347.720.800,00	347.720.800,00	0,00			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		665.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.100.000,00	222.100.000,00	222.100.000,00	0,00	Kab. Tulunggagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			314.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.620.800,00	125.620.800,00	125.620.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	192.090.000,00	358.190.000,00	298.820.000,00	106.730.000,00			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		675.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				18 Unit	18 Unit	101.490.000,00	93.970.000,00	127.220.000,00	25.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

			Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
	2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	40.600.000,00	40.600.000,00	21.600.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang pendidikan dan kesehatan Peningkatan pelayanan dasar berkualitas bidang pendidikan dan kesehatan			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	223.620.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standart Perpustakaan**				**29 persen**	**29 persen**	**300.000.000,00**	**1.171.561.000,00**	**1.221.561.000,00**	**277.500.000,00**							**577.500.000,00**	

	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelola perpustakaan tingkat daerah yang sesuai standart nasional*				24 Unit	24 Unit	200.000.000,00	472.545.000,00	439.647.000,00	239.647.000,00			-	- -	Perpustakaan di Kabupaten Tulungagung		302.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya				24 Perpustakaan	24 Perpustakaan	200.000.000,00	472.545.000,00	439.647.000,00	239.647.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			302.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lokus pembudayaan kegemaran Membaca dan Literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus*				8 Lokasi	8 Lokasi	100.000.000,00	699.016.000,00	781.914.000,00	681.914.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Tulungagung		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				8 Lokus	8 Lokus	100.000.000,00	699.016.000,00	781.914.000,00	681.914.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota yang dilestarikan**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**150.955.000,00**	**150.955.000,00**	**170.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*				2 eksemplar	2 eksemplar	50.000.000,00	150.955.000,00	150.955.000,00	100.955.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Tulungagung		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	50.000.000,00	150.955.000,00	150.955.000,00	100.955.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**240.000.000,00**	**208.790.000,00**	**278.256.000,00**	**38.256.000,00**							**465.750.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Pesentase OPD yang tertib arsip Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**				**16 2300 % Berkas**	**16 2300 % Berkas**	**220.000.000,00**	**188.790.000,00**	**258.256.000,00**	**223.750.000,00**							**443.750.000,00**	

	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				2300 Berkas	2300 Berkas	125.000.000,00	108.915.000,00	173.319.000,00	48.319.000,00			-	-	LEMBAGA KEARSIPAN		211.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2250 Berkas	2250 Berkas	125.000.000,00	108.915.000,00	173.319.000,00	48.319.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			211.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*				675 Berkas	675 Berkas	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	-	LEMBAGA KEARSIPAN		122.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				550 Arsip	550 Arsip	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			122.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota*				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	34.875.000,00	39.937.000,00	-10.063.000,00			-	- -	LKD dan OPD		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	34.875.000,00	39.937.000,00	-10.063.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				40 400 % bERKAS	40 400 % bERKAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				400 Berkas	400 Berkas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	LEMBAGA kEARSIPAN		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				500 Berkas	500 Berkas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								6.024.502.005,00	7.515.008.269,00	7.240.296.069,00	1.215.794.064,00							8.911.430.000,00	

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENJA

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

2025

KATA PENGANTAR

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah perubahan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RKPD 2025.

Sistematika dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 selain sebagai bahan acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, juga berperan sebagai alat kendali serta wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka menuju *good governance* yang diawali dari tersusunnya perencanaan yang matang serta akurat, sehingga ape yang sasaran dalam Rencana Strategis dapat tercapai dalam setiap tahunnya.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LUGU TRI HANDOKO, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198603 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II. EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2025 .. 7
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 16
BAB IV. PENUTUP 27
LAMPIRAN 28

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah tahapan akhir penyusunan dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menyusun Rancangan perubahan Renja menjadi Rancangan akhir perubahan Renja, perubahan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi sebelumnya yang berdampak pada perubahan perencanaan penganggaran sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok saseran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya usulan kegiatan dari masyarakat yang belum ditampung dalam RKPD Tahun 2025;

Penyusunan Rancangan akhir perubahan Renja perangkat daerah dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan perubahan pada Perangkat Daerah tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019.
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

13. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan perikanan serta strategi dan prioritas tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja (RKA) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sehingga terjadi kosistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam meyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana Tindak Lanjut
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui Dinas Perikanan di tahun anggaran 2025 telah melaksanakan Program/Kegiatan baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan, yang mana dari 4 program 13 kegiatan dengan 29 sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dimana hasil evaluasi, program dan kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 6 kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah yang mana sampai dengan Juni 2025 atau triwulan II tahun 2025 rata-rata realiasasi keuangan kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 42.97% . Terkait dengan kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum dapat dicapai karena pengukuran sasaran kinerja program dengan

indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, namun sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan beberapa tindakan riil dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja program diantaranya yaitu : pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk ASN baik peralatan maupun jasa yang dapat meningkatkan perbaikan budaya kerja dan pelayanan masyarakat oleh ASN Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

b. Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ada 3 (tiga) kegiatan diantaranya yaitu: Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan, Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Dari ketiga kegiatan tersebut rata-rata capaian kinerja keuangan sampai dengan Juni 2025 atau akhir triwulan II tahun 2025 sebesar 7,61%, kinerja keuangan tersebut dapat dikatakan rendah karena pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan, Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum dapat terealisasikan sampai dengan triwulan II karena terkait dengan pergeseran rekening pada belanja benih ikan untuk PUD dari rekening belanja bansos ke rekening belanja hibah, sehingga penyerapan akan maksimal setelah Perubahan Anggaran Kegiatan. Namun demikian sasaran Kinerja dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Produksi usaha Perikanan Tangkap dengan target tahun 2025 sebesar 6,5%, data realisasi sampai dengan

Triwulan II sebesar 5,22%, dengan kisaran capaian sebesar 80,3%, capaian kinerja pada program tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca dan tingginya gelombang laut menyebabkan produktivitas nelayan menurun. Disamping itu komoditas hasil tangkapan bernilai ekonomi rendah sehingga pada triwulan II nilai produksi tangkap laut mengalami penurunan. Pada Perairan Umum Daratan adanya bantuan alat tangkap yang dilaksanakan pada tahun 2024 memberikan dampak positif terhadap hasil produksi tangkap PUD. Sepanjang tahun 2025 jumlah pengajuan rekomendasi penetapan kuota penangkapan BBL hingga triwulan II sebanyak 106 orang, sedangkan untuk pengajuan SKA BBL sebanyak 76 orang, fasilitasi E-BKP, SIUP, PPKP sebanyak 24 orang, Validasi pengajuan KUSUKA sebnayak 75 orang dan sosialisasi telah dilaksanakan untuk 105 orang. Hal ini merupakan upaya peningkatan kinerja pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mana dengan adanya sosialisasi kenclayanan ini diharapkan mendorong peningkatan volume produksi tangkap terutama tangkap laut yang disertai dengan peningkatan harga hasil produksi.

c. Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ada 2 (Dua) kegiatan diantaranya yaitu: Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang mana rata-rata capaian kinerja keuangan sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari s.d Juni tahun 2025) sebesar 4,15%, capaian kinerja keuangan rendah karena sebagian besar aktivitas kegiatannya adalah bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan sehingga dalam penyerapan

anggaran diperlukan tahapan-tahapan juga proses penyusunan dokumen kontrak. Namun demikian secara sasaran Kinerja dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya dengan target tahun 2025 sebesar 8,8%, data realisasi sampai dengan Triwulan II yaitu 14,88% dan capaian sebesar 169%. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang lebih kondusif untuk mendukung kegiatan produksi budidaya yang mana pemanfaatan benih ikan yang berkualitas semakin meningkat sehingga produksi komoditas ikan hias dan konsumsi mengalami peningkatan. Kemudian hal ini berdampak pada peningkatan ketersediaan pakan ikan. Pada triwulan II tahun 2025 adanya kematian ikan mengalami penurunan karena manajemen kualitas air yang semakin baik, pembudidaya sudah mulai memahami pentingnya pengelolaan kualitas air sebagai media hidup budidaya ikan.

d. Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ada 2 (dua) kegiatan diantaranya yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, selanjutnya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. sampai dengan akhir Triwulan II (Bulan Januari s.d Juni Tahun 2025) capaian kinerja keuangan sebesar 16,07%, capaian kinerja keuangan dapat dikatakan baik karena dukungan perencanaan penyerapan anggaran yang baik sehingga dapat mendorong capaian kinerja yang maksimal yang mana berdasarkan sasaran Kinerja dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan target

tahun 2025 sebesar 6,25%, data realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 7,55%, hal ini disebabkan oleh ketersediaan bahan baku olahan ikan. Naiknya volume ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh efisiensi rantai pasok sehingga jumlah ikan yang tersedia untuk diolah mengalami peningkatan. Selain itu adanya perbaikan distribusi pengolahan dimana ikan dapat diproses dengan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan hasil akhir produk olahan ikan. Dari uraian terebut maka kinerja sasaran dari keseluruhan program baik program penunjang maupun program teknis hingga data sampai dengan Triwulan II memiliki capaian sebesar 120,8%.

e. Dengan demikian jika dicermati tercapainya kinerja sasaran bisa disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu yang pertama karena rendahnya target kinerja yang sudah ditentukan sehingga perlu di review ulang pada Renja tahun mendatang dan kondisi perekonomian disektor perikanan yang mulai meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap segala bentuk produk Perikanan, sehingga produk perikanan dapat terserap maksimal dan mengalami peningkatan. Namun demikian meskipun kinerja sasaran sudah tercapai secara optimal perlunya monitoring dan evaluasi produksi penerima bantuan sarpras maupun survey calon penerima bantuan agar tepat sasaran. dengan demikian kondisi ini diperlukan dana anggaran tambahan untuk semua kegiatan pada keseluruhan program teknis yang digunakan survey, pendataan, pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dan stimulant sarana dan prasarana produksi.

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian Renstra s.d triwulan II dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renja s/d Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun ke 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung						
3.25.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan layanan perangkat daerah (skala 80-100)	98,04	98,46	98,46	-	-
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penilaian dan Laporan Kinerja (dokumen)	9.00	9.00	9.00	3.00	33%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)	12.00	12.00	12.00	6.00	50%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah (dokumen)	4.00	4.00	12.00	6.00	50%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)	100.00	100.00	100.00	50	50%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia (%)	75.00	100.00	100.00	50	50%

3.25.01.2.09	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang tergalibrasi (%)	100.00	100.00	100.00	50	50%
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Produksi Usaha Perikanan Tangkap (Rp.)**					
		Rata – rata Persentase Peningkatan Produksi usaha Perikanan Tangkap	**6**	**82,36**	**6,6**	**5,22**	**80,3%**
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Tangkap PUD (ton)	21.43	22,48	22,07	27,26	123,5%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap Laut (Ton)	11.232,49	9.168,6	11.794,12	5.078	43%
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ikan yang dilelang (Ton)	577.96	395.41	577.96	102,47	18,56%
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Produksi Usaha Perikanan Budidaya**					
		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	**8**	**8,61**	**8,50**	**14,88**	**169%**
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (ton)	46.333,67	49.221	48.650,35	26.191,5	53,8%
		Jumlah Produksi Ikan Hias (ekor)	69.508.079	74.141.000	72.240.083	45.615.000	63%
		Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	104.606.046	110.341.425	109.936.349	67.883.550	61,8%
3.25.06	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**					
		Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	**8**	**6,02**	**6,25**	**7,35**	**120,8%**

3.25.06.2.02	Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)	31.253,12	38.226,27	32.815,77	20.540,3	62,5%
3.25.06.2.03	Pemberdayaan dan Pengembangan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Upaya Peningkatan Konsumsi	Pemenuhan Pengeluaran konsumsi untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan (%)	1,54	42,49	6	3,1	85%

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rancangan akhir Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 2025, disusun selain berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 juga didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II dalam rangka pemulihan ekonomi juga menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam pemenuhan pelayanan diperlukan tambahan dana anggaran sebesar Rp. 996.714.462 ,- seperti yang tertera pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Dinas Perikanan Kab. Tulungagung

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1			2	3		5	6	7	8	9	10	11
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.109.546.913	8.106.261.375	996.714.462
25	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)	%	100	100	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.044.546.913	6,208,059,175	3.677.298.073
25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	dokumen	9 dokumen	9 dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.172.000	4.545.000	-2.627.000
25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 juta	1 juta	-2 juta

25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	5,012,000	5,012,000	0
25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1,000,000	870,000	130,000
25	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**dokumen**	**14 dokumen**	**14 dokumen**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**4,816,579,313**	**5,186,537,575**	**369,958,262**
25	01	2.02	01	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org/ bulan)	orang/ bulan	31	31	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	4,713,262,313	5,031,200,575	317,938,262
25	01	2.02	02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	91,317,000	91,337,000	20,000
25	01	2.02	03	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Penggujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	dokumen	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	920,000	1,000	919,000

25	01	2.02	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	2 orang	2 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.080.000	0	-1.080.000
25	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya**	**dokumen**	**80 paket**	**80 paket**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**47.727.000**	**42.418.000**	**-5.309.000**
25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket/satuan	80	80	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	47.727.000	42.418.000	-5.309.000
25	01	2.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	11 orang	11 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	12.727.000	7.118.800	-5.608.200
25	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Keuangan**	**dokumen**	**14 dokumen**	**14 dokumen**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**267.017.100**	**171.913.800**	**-95.103.300**

25	01	2,08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	7 paket	7 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.121.900	5.200.000	-1.921.900
25	01	2,08	02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	6 paket	6 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	111.011.000	96.115.000	-14.895.000
25	01	2,08	05	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor dan Penggantinya	Jumlah paket barang peralatan dan perlengkapan yang disediakan	paket	6 paket	6 paket	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.502.000	5.180.000	-2.322.000
25	01	2,08	08	Pendidikan Kedinasan Terbuka	Jumlah laporan Pendidikan kedinasan terbuka	laporan	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.771.000	7.000.000	-3.771.000
25	01	2,08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	127.283.000	57.772.000	-69.511.000
25	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia**	**dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**668.056.500**	**656.654.800**	**-11.401.700**
25	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	291.126.930	288.378.000	-2.748.930

25	01	2.09	03	Pemeliharaan Hasil Pendataan dan Pengolahan Sensus	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	31.072.500	31.070.000	-2.500
25	01	2.09	01	Pemeliharaan Hasil Pelaksanaan Opini Kajian	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	322.056.990	322.070.000	13
25	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**persen**	**100%**	**100%**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**237.995.000**	**145.990.000**	**-92.005.000**
25	01	2.09	01	Pemeliharaan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18 Unit	18 Unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	217.015.000	128.020.000	-88.995.000
25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit/bangunan Gedung/bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	11 unit	11 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	20.000.000	17.970.000	-2.030.000

25	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap**	**%**	**-**	**6.5%**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**40.000.000**	**129.341.600**	**190.451.687**
25	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah sarana usaha Tangkap yang terjamin dan tersedia**	**unit**	**7 unit**	**7 unit**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**20.000.000**	**63.941.500**	**43.941.500**
25	03	2.01	02	Pemeliharaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang terpelihara	unit	10 unit	10 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	60.941.500	30.941.500
25	03	2.01	01	Pemeliharaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terpelihara dan tersedia	unit	7 unit	7 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	3.000.000	13.000.000
25	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah produksi perikanan tangkap Laut**	**ton**	**11794,12**	**11794,12**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**10.000.000**	**55.902.500**	**45.902.500**
25	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	orang	50 orang	50 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	45.902.500	35.902.500
25	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI**	**Jumlah Ikan yang dilelang (Ton)**	**ton**	**635,75**	**635.75**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**10.000.000**	**9.497.600**	**-502.400**

25	04	2.02	02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraa n Pendidikan dan pelatihan	Pelatiha n	50 pelatihan	2 Kelompok	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	88.871.000	78.871.000
25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih ikan		1 laporan 2 unit 35 unit	10460604 6 ekor 46334 Ton	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	885.000.000	1.488.672.600	603.672.600

				Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan Konsumsi			**68800079 ekor**						
24	01	2701	2	Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Ikan di dalam Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya peserta pelatihan dan pendampingan di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	orang	2 orang	2 orang	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	85,165,000	85,000,000	0
25	01	2701	09	Pengadaan Kelengkapan Sarana Pembudidayaan Ikan di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidaya ikan yang di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	unit	25 unit	25 unit	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	730,000,000	1,830,672,400	-1,100,672,400
26	01	2701	01	Penyusunan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan budidaya di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Melalui Penyelesaian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	50,000,000	84,000,000	-34,000,000
25	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)**	%	-	**6,25%**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**130.000.000**	**191.317.000**	**189.593.000**

25	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)**	ton	32.815,77	32.815,77	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	18.535.000	8.535.000
25	06	2.02	02	Pembinaan terhadap Penerapan pengolahan Perikanan Skala Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Usaha dan Mikro	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah melakukan pembinaan terhadap penerapan pengolahan perikanan berdasarkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan mikro	usaha	5 unit usaha	10 unit usaha	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	18.535.000	8.535.000
25	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bahan baku untuk industry pengolahan ikan**	**Ton**	undefined	44043 Ton	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	120.000.000	172.792.000	52.792.000
25	06	2.03	01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk pengolahan di Usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pemanfaatan Ketersediaan Ikan untuk Industri dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	Ton	38.120,5 Ton (38.120,5 Ton	38.120,5 Ton (38.120,5 Ton	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	110.000.000	161.592.000	51.592.000

				Daerah Kecamatan/Kota Total							
25	116	2.1.5	02	Pengembangan Fasilitasi Lagi Pelaku Usaha Dengan Skala Mikro dan Kecil di dalam Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam lingkup Daerah Kecamatan/Kota yang berkelanjut	UMKM	ah pelaku usaha	ah pelaku usaha	Kab Tulungagung	Kab Tulungagung	10,000,000	28,222,000	38,222,000
TOTAL											**7.100.546.913**	**8.106.261.375**	**006.714.462**

BAB IV.

PENUTUP

Salah satu sumber daya penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah ketersediaan anggaran. Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung difokuskan pada Pengendalian Inflasi, Penurunan angka kemiskinan, dan Penurunan angka Stunting, sebagai dukungan atas Program Pemerintah Pusat sehingga pendanaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dialokasikan pada bantuan sarana produksi baik tangkap, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta bantuan ikan olahan untuk balita penderita stunting di Kabupaten Tulungagung.

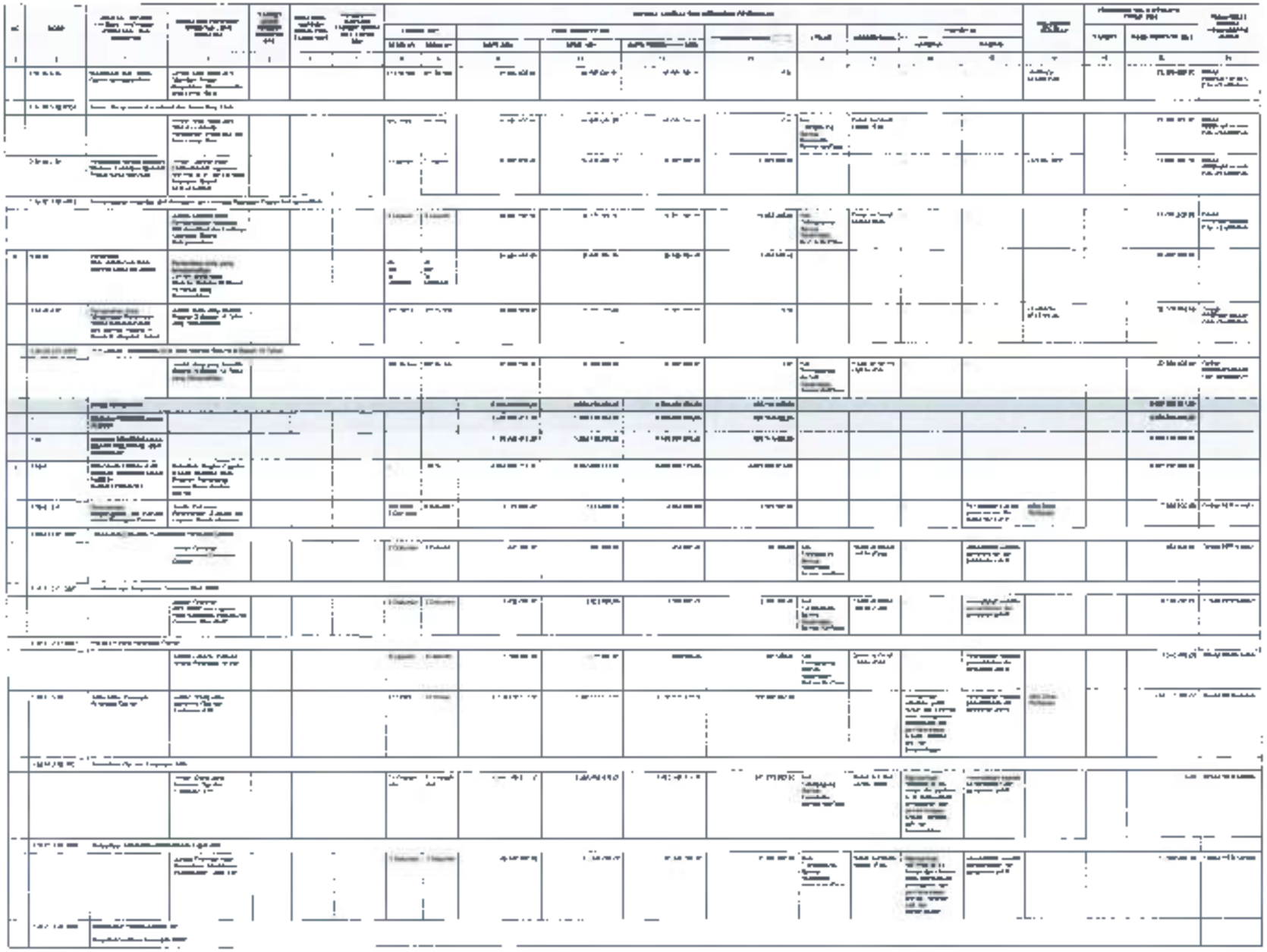
Dengan demikian rencana tindak lanjut yang perlu diambil adalah penyusunan kembali target kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan anggaran.

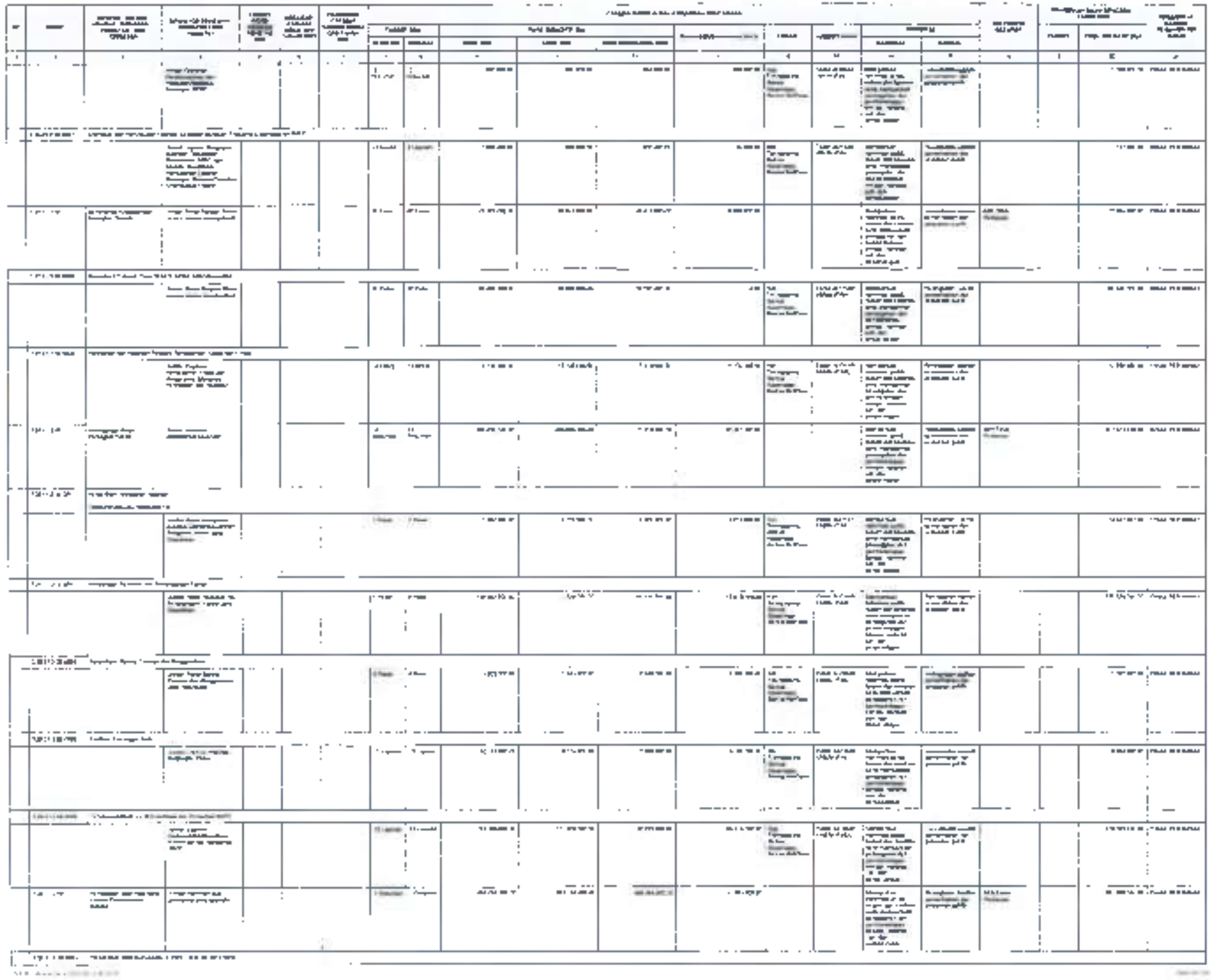
Tulungagung, 11 Agustus 2025

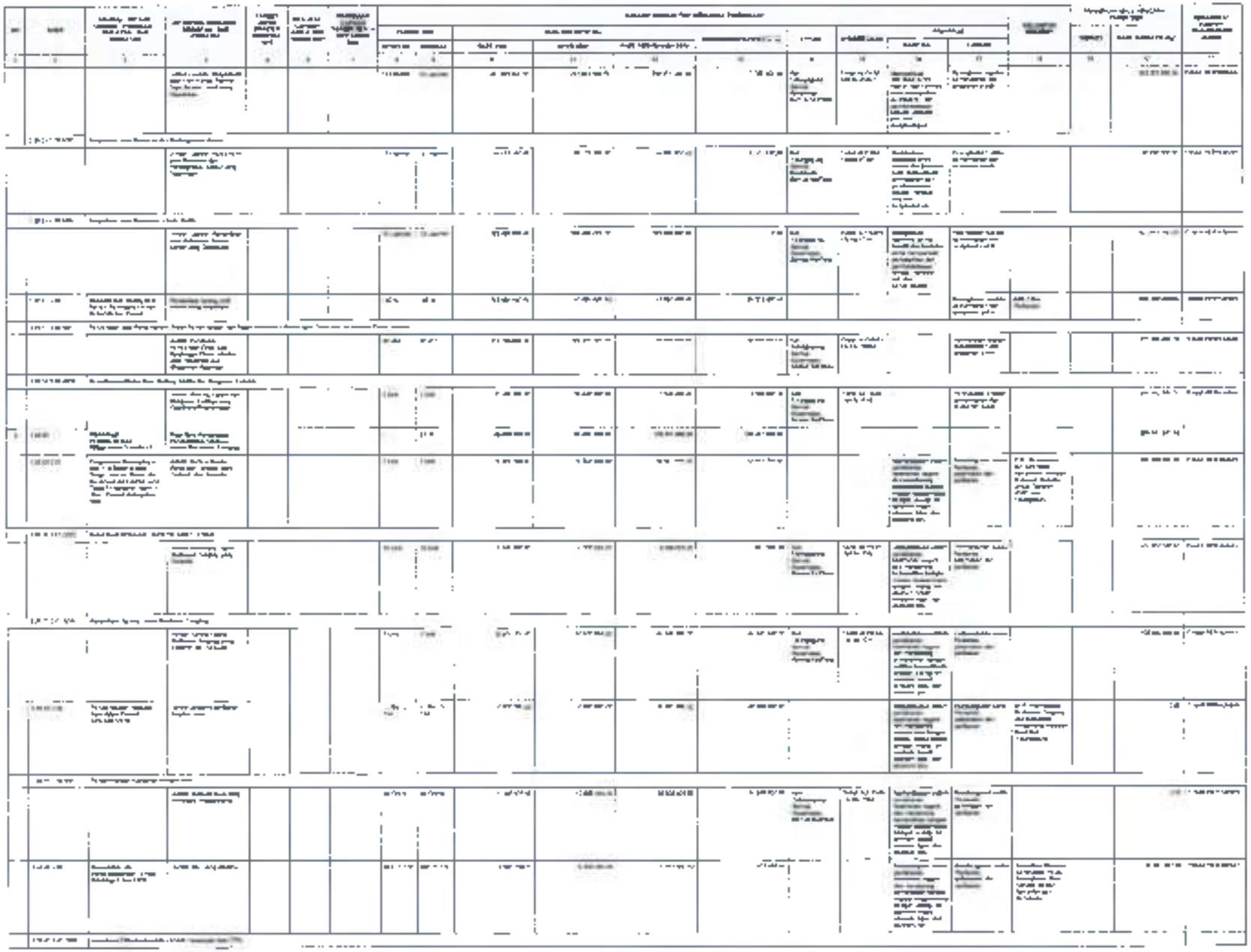
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LUGU TRI HANDOKO, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198603 1 006

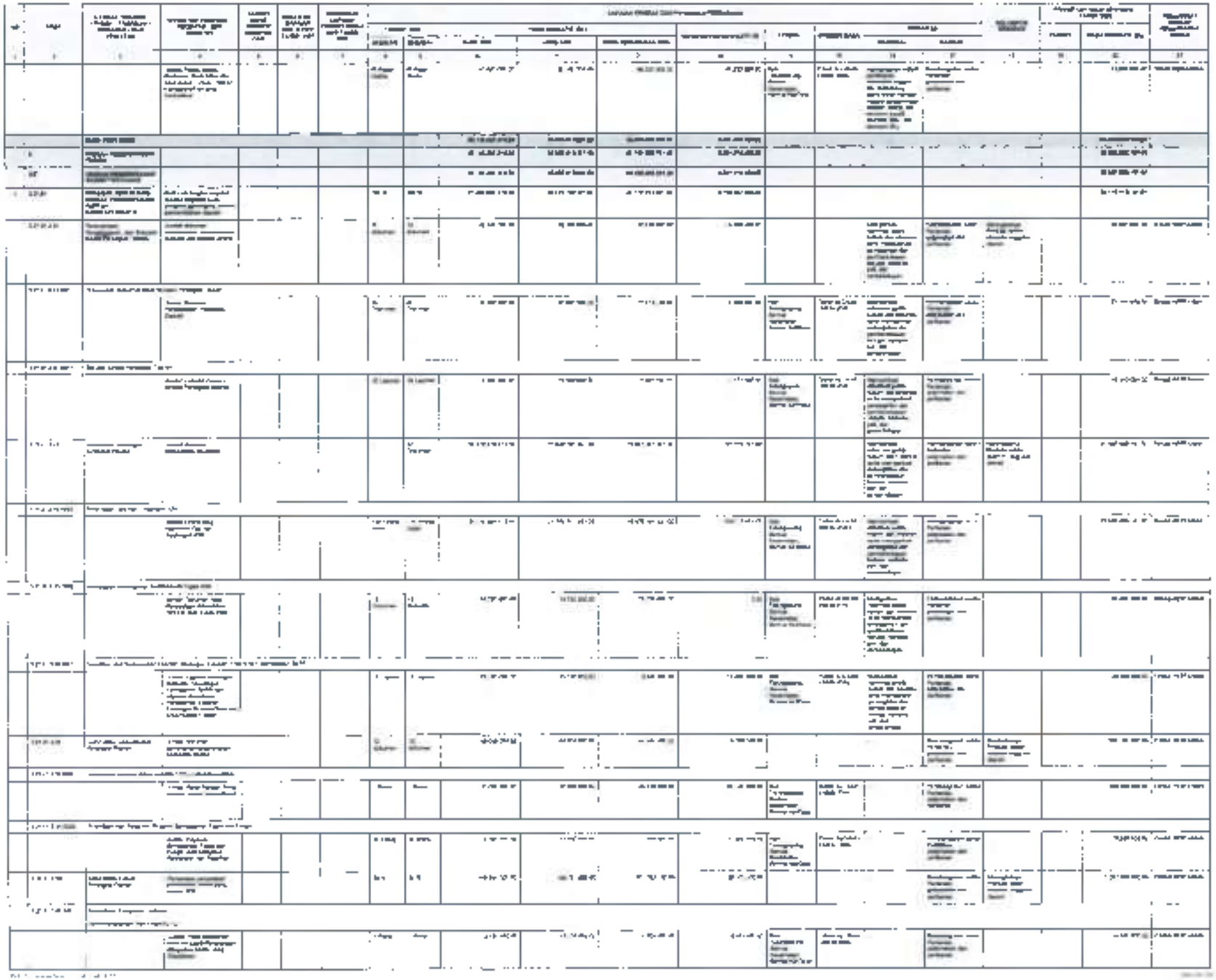
LAMPIRAN







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME, OUTPUT)	TARGET SETAH PERUBAHAN TAHUN INI	KELUARAN CAPAIAN KINERJA (OUTPUT) TAHUN INI	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET PERUBAHAN TAHUN BERJALAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERUBAHAN KINERJA	PERUBAHAN BELANJA TAHUN INI		PERUBAHAN KINERJA PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU BANGUN (Rp)			Bertambah/Berkurang (D-E)	LOKASI	SUMBER DANA	PERUBAHAN			TARGET	PAGU BANGUN (Rp)	
							NOMINAL/ORANG	NOMINAL/ORANG	SEBELUM PERUBAHAN 2025	APBD 2025	SESUDAH PERUBAHAN 2025				SEBELUM	SESUDAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan dalam rangka Pemantapanan Tegnal Pemberian dan [illegible]				5 Laporan	11 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Tanggapang, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
1.	1.20.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Data Data Pemerintah Perlengkapan Provinsi				-	0,00 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	
	1.20.04.2.02	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hasil Pemilihan bagi Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak	Jumlah Pemimpin Daerah dan Pertahan				50 Pasangan	0 Kabupaten/ Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian	Pusdatkan Kabupaten Tulungagung			[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.03 (000)	Pemenangan Pemilihan Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak																		
			Jumlah Calonan Usaha yang Memperoleh Rekomendasi Kemudahan Rasa Bhs Pengawasan, Teknologi dan Informasi, Jasa Pemenangannya Kualitas dan Pelatihan				60 Pasangan	60 Pasangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Tanggapang, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.04	Pemenangan Pemilihan Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak	Jumlah Produksi Bumi Alas Jumlah Produksi Alam Alas Jumlah Produksi Alam Kehutanan				2 Laporan 2 unit 30 unit	Kabupaten/ Kota/ KEGIATAN ini Kabupaten/ Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian	Pusdatkan Kabupaten Tulungagung			[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.05 (000)	Pemenangan Pemilihan Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak																		
			Jumlah Pelayanan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam 1 Tahun Kalender Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	Kab. Tulungagung, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.06 (000)	Pengelolaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Warga Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil dan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Tahun Kalender Kabupaten/Kota yang Telah Disahkan Pengelolaan Alat				1 Dokumen	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	Kab. Tulungagung, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.07 (000)	Pengelolaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Warga Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pemberdayaan dan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Tulungagung, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				2,285,140,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	0.02.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Data Data Pemerintah Perlengkapan Provinsi (Satu) Wakil Kepala				-	0,00 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	
	0.02.03.2.02	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hasil Pemilihan bagi Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak	Jumlah Provinsi Dalam dan Pertahan				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			-	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian	PUSC UNSUR dan Masyarakat Pengawas dan Pemilihan Kab. Tulungagung				52,480,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	0.20.04.2.04 (000)	Pemenangan terhadap Pengawas Pemerintah Provinsi dan Bernama Pada Usaha Pengawas dan Pemerintah Wakil Pemilihan usaha Usaha dan Hidup																		
			Jumlah Unit Usaha Pengawas dan Pemerintah Wakil Berkaitan yang mendapatkan Pemberian Rekomendasi Pemerintah Berdasarkan Hasil Usaha Pengawas dan Pemerintah Hasil Pemilihan usaha Usaha dan Hidup				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Tulungagung, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.03	Pemenangan dan Pengawasan Bahan Baku Industri Pengolahan dan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan baku yang industri pengolahan dan				sebelumnya sebelumnya	40 KK/ Ton	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian	PUSC UNSUR dan Masyarakat Pengawas dan Pemilihan Kab. Tulungagung			[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.03 (000)	Pemenangan Pemilihan Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak																		
			Jumlah Pemenangan Kabupaten/ Kota untuk Kerjasama dan Usaha Pengawas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Tulungagung, Bernak Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatnya sistem pelaporan kepatuhan regulasi dan monitoring kemandirian bangsa melalui evaluasi/media dengan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular	Pemenangannya sistem Pemenuh, pelaporan dan pertanian				[illegible]	DINAS PERHUBUNGAN
	1.20.04.2.01 (000)	Pemenangan Pemilihan Kepala Pengawas dan Pemerintah Wakil Wakil dan Tidak																		



Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

PERUBAHAN
RENCANA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen Renja sebelumnya, sebagai tindak lanjut atas dinamika perkembangan kebijakan, perubahan prioritas pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada sektor peternakan serta kesehatan hewan secara lebih aktual dan responsif. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan ke depan. Akhir kata, semoga dokumen Perubahan Renja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 secara efektif, efisien, dan tepat sasaran menjadi lebih baik.

Tulungagung, Agustus 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ir. MULYANTO, S.Pt., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 198803 1010

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB.II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28
BAB V. PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 8
Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dan Pencapaian Renstra S/D Triwulan II Tahun 2025 11
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung 11
Tabel 2.4. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung..... 18
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung..... 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2025 telah berlangsung 2 (dua) triwulan. Selanjutnya program/kegiatan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025 adalah:

1. Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah**,** yang tercermin dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Penyesuaian alokasi anggaran**,** baik karena keterbatasan fiskal maupun adanya perubahan sumber pendanaan;
3. Masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan**,** yang dihimpun melalui forum Musrenbang, konsultasi publik, dan hasil evaluasi kegiatan;
4. Evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya**,** termasuk realisasi capaian pada triwulan berjalan, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi dan efisiensi pelaksanaan.

Dokumen Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui

penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulunaggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah ditetapkan sebelumnya,

guna menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan kondisi aktual, serta kebijakan yang berlaku pada tahun berjalan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini, diantaranya :

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dengan perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan triwulan berjalan yang menunjukkan perlunya perubahan.
3. Mengakomodasi perubahan alokasi anggaran dan sumber pembiayaan yang mempengaruhi capaian target kinerja.
4. Menyesuaikan target kinerja dan capaian indikator dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan. Sistematika Perubahan Renja PD tahun 2017 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja PD, Proses Penyususnan Perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menggambarkan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja PD yang disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja samapai dengan triwulan II dengan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja PD maupun terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung melakukan penyesuaian terhadap beberapa program dan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional, yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta percepatan pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut, dilakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan alokasi belanja dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas, menuju kegiatan yang mendukung pencapaian target nasional dan prioritas daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan integrasi data kependudukan. Refocusing ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau berulang dengan dampak rendah terhadap output pelayanan, disesuaikan atau ditiadakan, demi optimalisasi pencapaian kinerja yang lebih strategis.

Secara keseluruhan, kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2025 dilaksanakan secara terencana, proporsional, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung melaksanakan 7 program dan 18 kegiatan dengan alokasi dana sebelum refocussing sebesar Rp 15.744.233.930,00 dan setelah refocusing menjadi Rp 13.123.122.430,00. Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	**15,744,233,930.00**	**1,133,332,300.00**	**5.23**	**14,610,901,630.00**
03.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10,229,642,930.00**	**1,041,772,000.00**	**10.18**	**9,187,870,930.00**
03.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48,812,000.00**	**1,906,000.00**	**3.90**	**46,906,000.00**
03.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,770,000.00	600,000.00	12.58	4,170,000.00
03.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33,042,500.00	906,000.00	2.74	32,136,500.00
03.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,999,500.00	400,000.00	3.64	10,599,500.00
03.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8,313,778,130.00**	**805,160,769.00**	**9.68**	**7,508,617,361.00**
03.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,236,318,130.00	805,160,769.00	9.78	7,431,157,361.00
03.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77,460,000.00	0.00	0.00	77,460,000.00
03.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500,000.00**
03.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
03.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
03.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**334,328,000.00**	**49,409,700.00**	**14.78**	**284,918,300.00**
03.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,132,500.00	5,981,200.00	49.30	6,151,300.00
03.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,755,400.00	14,760,500.00	30.91	32,994,900.00
03.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,741,200.00	2,958,700.00	8.77	30,782,500.00
03.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,330,600.00	520,800.00	5.04	9,809,800.00
03.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49,843,000.00	0.00	0.00	49,843,000.00
03.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,875,000.00	1,100,000.00	6.93	14,775,000.00
03.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164,650,300.00	24,088,500.00	14.63	140,561,800.00
03.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,182,164,800.00**	**181,475,331.00**	**15.35**	**1,000,689,469.00**
03.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210,200,000.00	24,641,553.00	11.72	185,558,447.00
03.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,240,000.00	690,000.00	3.41	19,550,000.00
03.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951,724,800.00	156,143,778.00	16.41	795,581,022.00
03.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**333,060,000.00**	**3,820,200.00**	**1.15**	**329,239,800.00**
03.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113,060,000.00	3,820,200.00	3.38	109,239,800.00
03.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
03.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
03.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1,346,804,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,338,704,000.00**
03.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**6,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,160,000.00**
03.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6,160,000.00	0.00	0.00	6,160,000.00
03.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**68,700,000.00**	**3,840,000.00**	**5.59**	**64,860,000.00**
03.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	63,600,000.00	3,840,000.00	6.04	59,760,000.00
03.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan PakanTernak	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
03.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih /Bibit Ternak,dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**115,364,000.00**	**3,200,000.00**	**2.77**	**112,164,000.00**
03.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	115,364,000.00	3,200,000.00	2.77	112,164,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
03.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1,156,580,000.00**	**1,060,000.00**	**0.09**	**1,155,520,000.00**
03.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,156,580,000.00	1,060,000.00	0.09	1,155,520,000.00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**2,250,467,000.00**	**1,860,000.00**	**0.08**	**2,248,607,000.00**
03.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**328,000.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**
03.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
03.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**2,250,139,000.00**	**1,860,000.00**	**0.08**	**2,248,279,000.00**
03.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2,241,739,000.00	0.00	0.00	2,241,739,000.00
03.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	8,400,000.00	1,860,000.00	22.14	6,540,000.00
03.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1,899,620,000.00**	**78,616,700.00**	**4.14**	**1,821,003,300.00**
03.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**120,060,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,060,000.00**
03.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	9,360,000.00	0.00	0.00	9,360,000.00
03.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
03.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108,400,000.00	0.00	0.00	108,400,000.00
03.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,360,800,000.00**	**74,400,000.00**	**5.47**	**1,286,400,000.00**
03.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,360,800,000.00	74,400,000.00	5.47	1,286,400,000.00
03.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**414,360,000.00**	**4,216,700.00**	**1.02**	**410,143,300.00**
03.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	331,800,000.00	1,500,000.00	0.45	330,300,000.00
03.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8,200,000.00	2,116,700.00	25.81	6,083,300.00
03.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	74,360,000.00	600,000.00	0.81	73,760,000.00
03.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**4,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,400,000.00**
03.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
03.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**6,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800,000.00**
03.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota**	**6,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800,000.00**
03.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
03.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**4,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,680,000.00**
03.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,680,000.00**
03.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
03.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**6,220,000.00**	**2,983,600.00**	**47.97**	**3,236,400.00**
03.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**6,220,000.00**	**2,983,600.00**	**47.97**	**3,236,400.00**
03.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	6,220,000.00	2,983,600.00	47.97	3,236,400.00

Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan yaitu Rp. 1,133,332,300,00 dengan total pagu Rp. 15,744,233,930,00. Capaian Realisasi Keuangan telah mencapai 5,23%, dengan capaian fisik 0,23%. Pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Beberapa kegiatan strategis bahkan telah melampaui target, terutama kegiatan yang bersifat non-fisik. Namun, masih terdapat kegiatan fisik khususnya pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang realisasinya sedikit terlambat akibat keterlambatan dalam proses pengadaan serta kendala teknis di lapangan. Namun demikian, terus dilakukan upaya peningkatan serapan anggaran yaitu dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan, mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi fisik dan keuangan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berikut ini disajikan tabel evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang menggambarkan capaian kinerja masing-masing program/kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta progres pelaksanaannya hingga pertengahan tahun anggaran.

Tabel 2.2.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
						Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*					
	URUSAN PEMERITAH PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
03.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah***	***Persen***	**100**	**100**	**100**	**34.72**	**34.72**
03.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja***	***Dokumen***	**10**	**10**	**10**	**4**	**40,00**
03.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	2	2	1	50,00
03.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	6	6	6	3	50,00
03.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	2	2	2	0	0,00
03.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi keuangan***	***Dokumen***	**12**	**12**	**12**	**3**	**25,00**
03.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang / Bulan*	60	60	59	60	101,69
03.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*Dokumen*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (dokumen)***	***Dokumen***	**3**	**3**	**1**	**0**	**0,00**
03.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*Paket*	0	3	2	0	0,00
03.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*Orang*	4	4	4	0	0,00
03.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (%)***	***Persen***	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**
03.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1	1	1	0,5	50,00
03.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	5	5	5	1,5	30,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
						Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*					
03.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	6	6	6	1	17,00
03.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	1	1	1	0.2	20,00
03.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*Paket*	6	6	6	0	0,00
03.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia***	***Dokumen***	**3**	**3**	**3**	**1**	**33,33**
03.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	***Persen***	**100**	**100**	**100**	**11.54**	**11,54**
03.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	22	22	22	3	13,64
03.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	2	2	2	0	0,00
03.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	0	0	2	0	0,00
03.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Populasi Ternak***	***Persen***	**0,50**	**2,51**	**2,69**	**0,00**	**0,00**
03.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	***Persentase pemanfaatan sarana peternakan***	***Persen***	**75,00**	**75,40**	**75**	**46,68**	**62,24**
03.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak/pakan yang memenuhi standart***	***Persen***	**80,00**	**85,00**	**82,00**	**80,00**	**97,56**
03.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan /Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak***	***Persen***	**85,00**	**100,00**	**90,00**	**100,00**	**111,11**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
						Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*					
03.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	***Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak***	***Persen***	**0,50**	**6,17**	**0,50**	**0,00**	**0,00**
03.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Ekor*	1.000	580	300	0	0,00
03.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan***	***Persen***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
03.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	***Persentase prasarana peternakan yang dikembangkan***	***Persen***	**70,00**	**78,00**	**70,00**	**50,00**	**71,43**
03.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	***Persentase prasarana peternakan yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara***	***Persen***	**75,00**	**70,67**	**70,00**	**0,00**	**0,00**
03.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	8	8	8	0	0,00
03.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	*Unit*	4	4	4	0	0,00
03.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Kondisi Kesehatan Hewan*** ***Persentase Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persen*** ***Persen***	**85,00** **82,50**	**85,44** **84,00**	**85,00** **84,00**	**96,00** **84,00**	**112,94** **100,00**
03.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase menurunnya wilayah terancam wabah***	***Persen***	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
03.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	*Jumlah kader zoonosis*	*Orang*	12	12	12	0	0
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani***	***Persen***	**80,00**	**84,00**	**84,00**	**85,00**	**102,68**
03.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	***Persentase unit usaha produk hewan yg memenuhi standart teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persen***	**80,00**	**82,62**	**82,50**	**83,00**	**100,60**
03.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Dokumen*	12	12	12	3	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan Keluaran kegiatan Tahun 2025		
						Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*					
03.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	*Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan*	*Produk*	12	12	12	3	25,00
03.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	***Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan (Kesrawan)***	***Persen***	**70%**	**73,25**	**73,00**	**73,00**	**100,82**
03.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	*Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan*	*Unit*	12	12	12	3	25,00
03.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase penanganan dan pengendalian akibat bencana***	***Persen***	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**
03.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	***Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian***	***Laporan***	**12**	**12**	**12**	**3**	**25,00**
03.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	*Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Fasilitasi Perizinan Usaha Peternakan***	***Persen***	**70,00**	**100,00**	**70,00**	**100,00**	**142,86**
03.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pembinaan dan pengawasan usaha peternakan yang berijin***	***Persen***	**70,00**	**75,00**	**75,00**	**25,00**	**33,33**
03.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	*Laporan*	12	12	12	3	25,00
03.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak***	***Persen***	**1,00**	**3,20**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
03.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	***Persentase usaha peternakan yang berwawasan agribisnis***	***Persen***	**10,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**
03.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	4	5	4	0	0,00

Evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yaitu:

1. Beberapa program kegiatan menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program yang dilakukan secara optimal dan intensif, serta didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak terkait. Selain itu, meskipun terjadi *refocusing* anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara optimal sehingga tidak mengganggu pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
2. Beberapa program kegiatan tidak tercapai target kinerjanya, dalam hal ini adalah program kegiatan yang berpengaruh terhadap kebijakan *refocusing* anggaran (terutama kegiatan fisik) sehingga adanya keterbatasan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan ini menghambat ketercapaian program kegiatan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Pelayanan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan dalam Tabel. 2 sebagai berikut :

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Peningkatan Populasi ternak	2,50%	2,69%	2,93%	2,51%	-	Data (%) tersedia pada akhir tahun
2	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	70,00%	74,00%	76,00%	70,36%	76,56%	Realisasi s/d triwulan II telah memenuhi target
3	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak	2,00%	3,00%	4,00%	2,40%	-	Data (%) tersedia pada akhir tahun

***) data sampai dengan bulan Juni 2025**

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari survey lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu bahwa masih diperlukan bantuan berupa ternak guna meningkatkan populasi ternak pada umumnya dan ekonomi masyarakat peternak pada khususnya. Berdasarkan hasil penelaahan dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana 2.4 berikut :

TABELL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

POKOK PIKIRAN

No		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Anggota Dewan	Permasalahan Pembangunan	Uraian Usulan	Lembaga Penerima	Volume	Alamat	Pagu Verifikasi	Status Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bantuan Ternak Kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUHARMINTO, SH	Masih perlunya bantuan ternak kambing pada Kelompok Taruna Tani BAROKAH, Desa Ngantru	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Taruna Tani BAROKAH	10 Ekor	Desa Ngantru, KECAMATAN NGANTRU	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
2	Bantuan Ternak Kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUHARMINTO, SH	Masih perlunya bantuan ternak kambing pada Kelompok Taruna Tani MANUNGGAL, Desa Srikaton	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Taruna Tani MANUNGGAL	10 Ekor	Desa Srikaton, KECAMATAN NGANTRU	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
3	Bantuan Ternak Kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUHARMINTO, SH	Kurangnya pemberdayaan potensi Masyarakat Desa tentang ternak Kambing pada Kelompok Taruna Tani BERKAH MAKMUR, Desa Mojoagung	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Taruna Tani BERKAH MAKMUR	10 Ekor	Desa Mojoagung, KECAMATAN NGANTRU	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Anggota Dewan	Permasalahan Pembangunan	Uraian Usulan	Lembaga Penerima	Volume	Alamat	Pagu Verifikasi	Status Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Bantuan Ternak Kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUHARMINTO, SH	Bantuan ternak kambing Pada Kelompok Taruna Tani PERKASA Desa Batokan	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Taruna Tani PERKASA	10 Ekor	Desa Batokan, KECAMATAN NGANTRU	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
5	Bantuan Ternak Kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUHARMINTO, SH	Perlunya bantuan ternak kambing untuk kelompok ternak AL BERKAH Desa Bendosari	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Ternak AL BERKAH	10 Ekor	Desa Bendosari, KECAMATAN NGANTRU	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
6	Bantuan ternak kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	MARSONO, S.Sos	Kelompok Peternak Kambing BEN BAROKAH Desa Bendungan, memerlukan bantuan ternak kambing	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Peternak Kambing BEN BAROKAH	10 Ekor	Desa Bendungan, KECAMATAN GONDANG	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
7	Bantuan ternak kambing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Hj. SUSILOWATI, SE	Kelompok MEKARSARI Desa Tanggulturus, memerlukan bantuan ternak kambing	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok MEKARSARI	10 Ekor	Desa Tanggulturus KECAMATAN BESUKI	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Anggota Dewan	Permasalahan Pembangunan	Uraian Usulan	Lembaga Penerima	Volume	Alamat	Pagu Verifikasi	Status Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	H. SISWANTORO	masih perlunya bantuan ternak kambing pada kelompok tani sido mulyo desa tanggung	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Tani Sido Mulyo	10 Ekor	Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
9	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	FUAD ASHARI, S.T	Perlunya Hibah Kambing pada perkumpulan BERKAH RIZQI MULYO RT 03 RW 1O Desa Sumberagung	Bantuan Ternak Kambing	Perkumpulan Berkah Rizqi Mulyo	10 Ekor	Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
10	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	FUAD ASHARI, S.T	Perlunya Hibah pada kelompok Ternak Nuansa Adem Ayem Desa Tegalrejo	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Ternak Nuansa Adem Ayem	10 Ekor	Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
11	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	FUAD ASHARI, S.T	PERLUNYA HIBAH KAMBING PADA SOKO FARM	Bantuan Ternak Kambing	Soko Farm	10 Ekor	Desa Karangsari, Kecamatan Rejotangan	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Anggota Dewan	Permasalahan Pembangunan	Uraian Usulan	Lembaga Penerima	Volume	Alamat	Pagu Verifikasi	Status Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUTOMO	Permohonan Bantuan Kelompok Ternak Kambing Sido Makmur Desa Mojoagung	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Ternak Kambing Sido Makmur	10 Ekor	Desa Mojoagung, Kecamatan Ngantru	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
13	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	SUTOMO	Permohonan Bantuan Kelompok Ternak Kambing Karya Agung 1 Desa Mojoagung	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Ternak Kambing Karya Agung 1	10 Ekor	Desa Mojoagung, Kecamatan Ngantru	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
14	Bantuan ternak kambing (P)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Drs. H. ASMUNGI, M.Si..	Kurangnya Bibit Kambing Kelompok Ternak Pokmas Al Amin	Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Ternak Pokmas Al Amin	10 Ekor	Desa Suruhan, Kecamatan Bandung	50.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan Pertanian sub urusan Peternakan. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelaraskan program kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan maupun pergeseran rekening belanja.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan aktual baik dari perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat peternak maupun tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dalam rangka mencapai sasaran kinerja, memiliki program kegiatan yang mendukung kinerja pembangunan peternaakan antara lain :

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Indikator: Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Indikator: Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan (%)
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Indikator: - Persentase Kondisi Kesehatan Hewan (%)
   - Persentase Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner
4) Program Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian
   Indikator: Persentase Penanganan dan Pengendalian Akibat Bencana (%)
5) Program Perizinan Usaha Pertanian
   Indikator : Persentase Fasilitasi Perizian Usaha Peternakan (%)
6) Program Penyuluhan Pertanian
   Indikator : Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak (%)

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
	URUSAN PEMERITAH PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							**15.744.233.930**	**13.521.522.430**	**(2.621.111.500)**
03.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah***	***Persen***	**100**	**100**			**10.229.642.930**	**9.890.269.430**	**(2.222.711.500)**
03.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja***	***Dokumen***	**10**	**10**			**48.812.000**	**27.992.000**	**(20.820.000)**
03.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	4.770.000	1.970.000	(2.800.000)
03.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	6	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	33.042.500	16.522.500	(16.520.000)
03.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.999.500	9.499.500	(1.500.000)
03.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi keuangan***	***Dokumen***	**12**	**12**			**8.313.778.130**	**8.137.178.130**	**(176.600.000)**
03.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang / Bulan*	59	59	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	8.236.318.130	8.059.718.130	(176.600.000)
03.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*Dokumen*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	77.460.000	77.460.000	0
03.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (dokumen)***	***Dokumen***	**1**	**1**			**17.500.000**	**10.000.000**	**(7.500.000)**
03.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*Paket*	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	7.500.000	0,00	(7.500.000)
03.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*Orang*	4	4	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.000.000	10.000.000	0
03.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (%)***	***Persen***	**100**	**100**			**334.328.000**	**321.954.500**	**(12.373.500)**
03.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*Paket*	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	12.132.500	12.132.500	0
03.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	5	5	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	47.755.400	51.103.000	3.347.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
03.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	6	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	33.741.200	30.621.200	(3.120.000)
03.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	1	1	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10.330.600	10.324.000	(6.600)
03.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*Paket*	6	6	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	49.843.000	49.843.000	0
03.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	15.875.000	11.637.500	(4.237.500)
03.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	164.650.300	156.293.300	(8.357.000)
03.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia***	***Dokumen***	**3**	**3**			**1.182.164.800**	**1.176.704.800**	**(5.460.000)**
03.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	210.200.000	210.200.000	0
03.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	20.240.000	14.780.000	(5.460.000)
03.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	951.724.800	951.724.800	0
03.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	***Persen***	**100**	**100**			**333.060.000**	**216.440.000**	**(116.620.000)**
03.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	22	22	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	113.060.000	86.440.000	(26.620.000)
03.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	200.000.000	130.000.000	(70.000.000)
03.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	2	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	20.000.000	0	(20.000.000)
03.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Populasi Ternak***	***Persen***	**2,69**	**2,69**			**1.346.804.000**	**822.905.000**	**(523.899.000)**
03.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	***Persentase pemanfaatan sarana peternakan***	***Persen***	**75**	**75**			**6.160.000**	**6.160.000**	**0**
03.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.160.000	6.160.000	0
03.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak/pakan yang memenuhi standart***	***Persen***	**82**	**82**			**68.700.000**	**68.700.000**	**0**
03.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	63.600.000	63.600.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
03.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	5.100.000	5.100.000	0
03.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak***	***Persen***	**90**	**90**			**115.364.000**	**315.364.000,00**	**200.000.000**
03.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	*Laporan*	12	12	UPT Budidaya Ternak, Lahan HMT UPT Budidaya Ternak, Kab. Tulungagung	UPT Budidaya Ternak, Lahan HMT UPT Budidaya Ternak, Kab. Tulungagung	115.364.000	315.364.000	200.000.000
03.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	***Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak***	***Persen***	**0,50**	**0,50**			**1.156.580.000**	**782.681.000**	**(373.899.000)**
03.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Ekor*	300	300	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.156.580.000	782.681.000	(373.899.000)
03.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan***	***Persen***	**100**	**100**			**2.250.467.000**	**16.028.000**	**(2.234.439.000)**
03.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	***Persentase prasarana peternakan yang dikembangkan***	***Persen***	**70**	**70**			**328.000**	**328.000**	0
03.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	328.000	328.000	0
03.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	***Persentase prasarana peternakan yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara***	***Persen***	**70**	**70**			**2.250.139.000**	**15.700.000**	**(2.234.439.000)**
03.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	8	8	UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.241.739.000	7.300.000	(2.234.439.000)
03.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	*Unit*	4	4	RPH Ketanon, RPH Ngunut, RPH Bandung, RPH Kedungwaru	RPH Ketanon, RPH Ngunut, RPH Bandung, RPH Kedungwaru	8.400.000	8.400.000	0
03.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Kondisi Kesehatan Hewan*** ***Persentase Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persen*** ***Persen***	**85** **84**	**85** **84**			**1.899.620.000**	**2.424.620.000**	**525.000.000**
03.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase menurunnya wilayah terancam wabah***	***Persen***	**2**	**2**			**120.060.000**	**345.060.000**	**225.000.000**
03.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*	*Laporan*	12	12	7 Puskeswan DPKH	7 Puskeswan DPKH	9.360.000	9.360.000	0
03.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	*Jumlah kader zoonosis*	*Orang*	12	12	Puskeswan Kedungwaru, Ngunut, Kalidawir, Campurdarat, Besuki	Puskeswan Kedungwaru, Ngunut, Kalidawir, Campurdarat, Besuki	2.300.000	77.300.000	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
03.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota (Laporan)*	*Laporan*	12	12	Kec.Pagerwojo	Kec.Pagerwojo	258.400.000	258.400.000	250.000.000
03.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani***	***Persen***	**84**	**84**			**1.360.800.000**	**1.360.800.000**	**0**
03.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	*Laporan*	12	12	7 Puskeswan DPKH	7 Puskeswan DPKH	1.360.800.000	1.360.800.000	0
03.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	***Persentase unit usaha produk hewan yg memenuhi standart teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persen***	**82,5**	**82,5**			**414.360.000**	**714.360.000**	**300.000.000**
03.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	331.800.000	631.800.000	300.000.000
03.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Dokumen*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	8.200.000	8.200.000	0
03.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	*Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan*	*Produk*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	74.360.000	74.360.000	0
03.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	***Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan (Kesrawan)***	***Persen***	**73**	**73**			**4.400.000**	**4.400.000**	**0**
03.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	*Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan*	*Unit*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	4.400.000	4.400.000	0
03.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase penanganan dan pengendalian akibat bencana***	***Persen***	**80**	**80**			**6.800.000**	**6.800.000**	**0**
03.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	***Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian***	***Laporan***	**12**	**12**			6.800.000	**6.800.000**	**0**
03.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	*Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*	*Laporan*	12	12	Kec. Tanggungunung dan Kec. Campurdarat	Kec. Tanggungunung dan Kec. Campurdarat	6.800.000	6.800.000	0
03.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Fasilitasi Perizinan Usaha Peternakan***	*Persen*	**70**	**70**			**4.680.000**	**4.680.000**	**0**
03.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pembinaan dan pengawasan usaha peternakan yang berijin***	***Persen***	**75**	**75**			**4.680.000**	**4.680.000**	**0**
03.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	*Laporan*	12	12	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	4.680.000	4.680.000	0
03.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak***	***Persen***	**1**	**1**			**6.220.000**	**6.220.000**	**0**
03.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	***Persentase usaha peternakan yang berwawasan agribisnis***	***Persen***	**13**	**13**			**6.220.000**	**6.220.000**	**0**
03.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	4	4	Kec. Pakel dan Kec. Sumbergempol	Kec. Pakel dan Kec. Sumbergempol	6.220.000	6.220.000	0

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dimaksud agar dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan faktor penentu keberhasilan Renja ini. Perubahan Renja 2025 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan konstribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun, diharapkan seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Tulungagung, Agustus 2025
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ir. MULYANTO, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 198803 1 010

Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RENCARA KERJA PERUBAHAN DISPERINDAG

2025



DISPERINDAG TULUNGAGUNG
Jl. Ki Mangunsarkoro No.04 Beji Boyolangu
Telp./faks : 0355-321161
Email : indagta@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 04 Kode Pos 66233 Telp./Fax. (0355) 321161
Tulungagung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3/1040.1/27.01/2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;

b. Rencana Kerja dimaksud, sesuai pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagunng Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagunng Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024– 2026;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung .

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 28 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa suatu aral yang melintang.

Dengan selesainya dokumen Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik tenaga, pikiran, dan data - data yang diperlukan.

Dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan maupun kelemahannya, oleh karena itu kepada semua pihak, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya.

Mudah – mudahan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat guna meningkatkan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada khususnya dan Kabupaten Tulungagung pada umumnya.

Tulungagung, 26 Juli 2025
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I : PENDAHULUAN .....

1.1.Latar Belakang.....

1.2. Landasan Hukum .....

1.3. Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan guna mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, RENSTRA, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Perencanaan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah perencanaan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Kewenangan otonomi daerah ini berupa kebijakan teknis yang dituangkan dalam satuan – satuan kerja. Satuan-satuan kerja ini merupakan bentuk nyata dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Mengingat akan pentingnya rencana kerja maka dalam proses penyusunannya, mendasarkan pada fungsi utama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan maupun pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan. Sehingga dengan demikian keberadaan sebuah institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas melalui kebijakan-kebijakan teknis yang diambil.

Dengan demikian rencana kerja mutlak diperlukan sebagai petunjuk teknis dari perencanaan strategis. Kemudahan pelaksanaan karena memiliki rentang masa efektif yang lebih pendek dan faktor-faktor evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang lebih terbatas, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih obyektif dan akurat.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 yang telah

ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri C);

13 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;

14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024– 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);

15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;

16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;

17 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan RPD Pemerintah Kabupaten Tulungagung .

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung selama semester I tahun 2025.

Penyerapan anggaran kegiatan masih banyak yang 43,31%, dan masih didominasi oleh penyerapan belanja gaji dan pengeluaran rutin lainnya seperti pembayaran honor jasa kerja, listrik, air, internet dan telepon.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah);
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan IKM untuk pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan seluruh jajaran terkait yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPD guna merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan urusan industri dan perdagangan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tahun 2024–2026, maka upaya yang ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa dengan jalan mengembangkan potensi daerah dan peningkatan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan dan membangun sarana perdagangan dan sistem distribusi yang baik.
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan pelaku industri melalui :
    a. peningkatan penguasaan pengembangan dan penerapan IPTEK
    b. peningkatan desain, mutu produk IKM, teknik pemasaran khususnya yang berorientasi ekspor.
    c. peningkatan penguasaan teknologi informasi dalam hal pemasaran
4. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya, guna menjaga stabilitas harga.
5. Meningkatkan pengawasan distribusi barang (kualitas tertib niaga) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perijinan terlebih melalui Online Single Submission (OSS) maupun pelaporan data industri melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
7. Menyediakan data industri dan perdagangan yang *up to date*.

Dalam pencapaian target program renstra sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja seluruh jajaran aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Apabila terdapat usulan kegiatan yang memerlukan penjadwalan dan perubahan penganggaran maka akan dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025		
					Target	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase tertib perijinan dan Pendaftaran Perusahaan**	3%	3%	3%	0%	0
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Prosentase validasi data**	100%	100%	100%	50%	50
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar dengan kondisi baik	84,38%	83,87 %	83,87 %	83,87 %	99,39
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar direvitalisasi	3 Pasar	3 Pasar	11 Pasar	0 Pasar	0
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar direvitalisasi	4 Pasar	20 Pasar	11 Pasar	0 pasar	0
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah fasilitasi	4 kali	5 unit	10 unit	unit	0
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase pengelola sarana perdagangan yang terbina	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	0
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembinaan	**4 kali**	**4 kali**	**4 kali**	**0 kali**	0
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase harga komoditi barang pokok yang terjaga stabilitas harganya	75%	74,57%	75%	74,10%	50
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	jumlah laporan penyedia barang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025		
								Target	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
				Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50
				Pelaksanaan perasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah bulan pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pelaku ekspor	5 %	5 %	5 %	0 %	0
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	3 kali	8kali	1 kali	0 kali	0
				Pameran dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang			1 kali	1 kali	100
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	20 Produk	10 Produk	0 Produk	0
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Prosentse peningkatan metrologi legal**	3,50%	4%	4,00%	4,00%	-55,9
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera/ ditera ulang	5000 unit	5427unit	5000unit	2392 unit	47,84
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	5000 unit	5427 unit	5000unit	2392 unit	47,84
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	375 orang	19 orang	20 orang	10 orang	50
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	**3%**	**3%**	**3%**	**0%**	0
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Jumlah gelaran Promosi yang diikuti	5 kali	6 kali	3 kali	0 kali	0

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025		
								Target	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
				Produk Dalam Negeri						
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah gelaran Promosi yang diikuti	5 kali	5 kali	3 kali	0 kali	0
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**92,56%**	**100%**	**42,84%**	42,84
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pemenuhan pelaksanaan tugas ASN	9 bulan	6 bulan	4 bulan	0 bulan	0
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 dokumen	0
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	160 buah	160 buah	0	0	0
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4 Orang	0	0	0
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	23,32 %	41,07 %
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	3 paket	0 paket	0
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	1 paket	0 paket	0
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	1 paket	0 paket	0
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 paket	2 paket	2 paket	0 paket	0

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025		
								Target	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
					Disediakan					
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	66,15%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemenuhan jasa penunjang urusan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan peralatan kantor	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**20 %**	20
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM yang terbina	4%	4%	4%	0%	0
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Prosentase pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**	20%	20%	20%	0%	0
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengawasan perizinan IUI	100%	100%	100%	50%	50

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025		
								Target	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
				KABUPATEN/KOTA						
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen informasi Industri**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Prosentase peningkatan data**	**0,30%**	**0,79%**	**0,30%**	**0%**	0
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen informasi industri**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
3	**30**	**02**			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase tertib perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	3	3			*10.000.000*	2.267.000,00	-7.733.000,00
3	30	02	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	*Prosentase validasi data*	%	100	100	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*10.000.000*	2.267.000,00	-7.733.000,00
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*10.000.000*	2.267.000,00	-7.733.000,00
3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Prosentase pasar dengan kondisi baik	%	84,375	84,375			70.000.000,00	1.075.110.000,00	7.330.000.000,00
3	30	03	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	*Jumlah pasar direvitalisasi*	*pasar*	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	1.075.110.000,00	7.330.000.000,00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	11	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	53.326.600,00	43.326.600,00
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
										Semua Kelurahan				
3	30	03	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	*Persentase pengelola sarana perdagangan yang terbina*	*Dokumen*	*100%*	*100%*	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Dokumen*	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00
3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	prosentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	%	72,73	72,73			125.000.000,00	50.489.600,00	425.000.000,00
3	30	04	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	*Jumlah laporan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten*	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	5.170.000,00	-19.830.000,00
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	5.170.000,00	-19.830.000,00
3	30	04	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	jumlah laporan penyedia barang	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	32.934.600,00	-42.065.400,00
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	11.320.000,00	-13.680.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
					Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				Semua Kelurahan				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	21.614.600	-28.385.400,00
3	30	04	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan pupuk dan pestisida	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000	12.385.000	-12.615.000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000	12.385.000	-12.615.000
3	30	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase peningkatan pelaku ekspor	%	5	5			75.000.000	25.291.000	-49.709.000,00
3	30	05	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang*	kali	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	100.000.000	90.000.000,00
3	30	05	01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	2	2	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	20.452.000,00	-29.548.000,00
3	30	05	2.01	01	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	10	10	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	4.839.000,00	-20.161.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
										Semua Kelurahan				
3	30	06			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Prosentase peningkatan metrologi legal	%	**4,00**	**4,00**			20.000.000,00	236.003.800,00	780.000.000,00
3	30	06	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah UTTP yang ditera / ditera ulang	*unit*	5000	5000	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	236.003.800,00	216.003.800,00
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	*unit*	5000	5000	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	202.384.000,00	192.384.000,00
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	20	20	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	33.619.800,00	23.619.800,00
3	30	07			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	%	3	3			*10.000.000,00*	219.800.000,00	590.000.000,00
3	30	07	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	*Jumlah pameran pameran yang diikuti*	*kali*	*3*	*3*	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*10.000.000,00*	219.800.000,00	209.800.000,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	2	4	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*10.000.000,00*	219.800.000,00	209.800.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
										Kelurahan				
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.248.957.091,00	19.854.165.618,00	-394.791.473,00
3	31	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100			18.530.957.091,00	17.941.542.918,00	2.667.626.909,00
3	31	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.346.313.891,00	13.136.632.818,00	-209.681.073,00
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan	131	129	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.309.993.891,00	13.062.832.818,00	-247.161.073,00
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.320.000,00	73.800.000,00	37.480.000,00
3	31	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.800.000,00	16.640.000,00	-1.160.000,00
3	31	01	2.03	04	Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.800.000,00	16.640.000,00	-1.160.000,00
3	31	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan,	179.650.000,00	16.465.000,00	-163.185.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
						Kepegawaian yang disusun				semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kelurahan			
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	160	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00
3	31	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.050.000,00	16.465.000,00	-33.585.000,00
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	3	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
3	31	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	%	100	100	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.123.525.000,00	882.846.900,00	-240.678.100,00
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.035.200,00	12.150.700,00	-17.884.500,00
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.817.600,00	152.987.000,00	-57.830.600,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.847.700,00	11.879.700,00	-19.968.000,00
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	538.328.000,00	538.328.000,00	0,00
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.762.500,00	65.762.500,00	8.000.000,00
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254.734.000,00	101.739.000,00	-152.995.000,00
3	31	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah dokumen jaa penunjang yang tersedia	bulan	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.554.963.200,00	3.540.463.200,00	-14.500.000,00
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	12	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316.000.000,00	301.500.000,00	-14.500.000,00
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	laporan	1	1	Kab. Tulungagung, semua	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.238.963.200,00	3.238.963.200,00	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
						Disediakan				Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	31	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase pemeliharaan peralatan kantor	**%**	**80**	80	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308.705.000,00	348.495.000,00	39.790.000,00
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakkendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	60	62	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.525.000,00	177.375.000,00	20.850.000,00
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	74	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.990.000,00	46.140.000,00	-26.850.000,00
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.190.000,00	124.980.000,00	45.790.000,00
3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase peningkatan IKM yang terbina	%	4,2	4,2			1.688.000.000,00	1.898.382.700,00	312.000.000,00
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Presentase peningkatan IKM yang terbina**	%	4,2	4,2	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.688.000.000,00	1.898.382.700,00	210.382.700,00
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	631.000.000,00	979.212.500,00	348.212.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
						Pembangunan Sumber Daya Industri				Semua Kelurahan				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.057.000.000,00	919.170.200,00	-137.829.800,00
3	31	03			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengawasan perizinan IUI	%	75	75			20.000.000,00	9.510.000,00	50.000.000,00
3	31	03	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen Informasi industri	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	9.510.000,00	-10.490.000,00
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	5.440.000,00	-4.560.000,00
3	31	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	4.070.000,00	-5.930.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target CapaianKinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
					perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS								
3	31	04			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Prosentase peningkatan data	%	0,3	0,3	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	4.730.000,00	190.000.000,00
3	31	04	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen informasi industri	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	4.730.000,00	-5.270.000,00
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	4.730.000,00	-5.270.000,00

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja Perubahan dibuat guna mencapai target kinerja program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh tim, individu, dan institusi organisasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain itu, RENJA ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas dengan disiplin.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tulungagung dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024–2026. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output dari RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan sasaran yang telah ditentukan. RENJA ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024, yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif.

Dengan adanya RENJA Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 26 Juli 2025
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008







Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulungagung

PERUBAHAN
RENJA
2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

Lampiran

Keputusan Bupati Tulungagung
Nomor: 100.3.3.2/256/20.01.03/2025

Tentang

Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari proses perencanaan yang adaptif dan akuntabel.

Dokumen ini hadir sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta dinamika kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang semakin menekankan prinsip efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, perencanaan tahun 2025 dirancang untuk lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat serta sasaran pembangunan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini melalui pemikiran, data, maupun kolaborasi lintas fungsi. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kerja yang selaras dengan semangat efisiensi, integrasi kebijakan, dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap segala upaya ini mendapat ridha dan bimbingan Allah SWT, serta membawa kemajuan yang berarti bagi Kabupaten Tulungagung dan seluruh masyarakatnya.

Tulungagung, 08 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197009061991011001

Daftar Isi

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 10
BAB II 13
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 13
BAB III 31
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31
BAB IV 52
PENUTUP 52

BAB I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan tahunan perangkat daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis pemerintah daerah. Rencana Kerja (Renja) hadir sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat operasional, menjembatani rencana jangka menengah dengan kebutuhan dan kondisi aktual yang berkembang dari tahun ke tahun.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Renja sering kali harus menyesuaikan diri terhadap berbagai dinamika yang muncul di tengah tahun anggaran. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional, penyesuaian alokasi anggaran, hingga kebutuhan mendesak di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan dokumen perubahan Renja sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan tersebut.

Tahun 2025 ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung menyusun Perubahan Renja sebagai wujud komitmen dalam menjaga kelangsungan program prioritas, sekaligus menjawab tantangan aktual, terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang efisien dan berdampak nyata. Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama, mengingat keterbatasan fiskal yang harus diimbangi dengan ketepatan sasaran program dan optimalisasi capaian kinerja.

Lebih jauh, efisiensi anggaran juga merupakan bagian dari arus kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara hemat, transparan, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah dituntut untuk merespons arah kebijakan tersebut melalui pemilahan program yang benar-

benar prioritas dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perubahan Renja ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dapat tetap berjalan efektif meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Dokumen ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), dan menjadi alat kendali dalam memastikan kesinambungan pembangunan yang lebih fokus, efisien, dan adaptif. Dengan pendekatan yang menyeimbangkan fleksibilitas dan akuntabilitas, Perubahan Renja Tahun 2025 diharapkan mampu memperkuat peran Sekretariat Daerah sebagai penggerak utama koordinasi, fasilitasi, dan layanan administrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
w. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
x. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
y. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk menyediakan landasan operasional yang dapat dijadikan pegangan oleh seluruh unsur penyelenggara di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disesuaikan pada tahun anggaran berjalan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan perubahan kebutuhan, kondisi lapangan, serta dinamika kebijakan yang berkembang, sehingga tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara adaptif dan relevan.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini antara lain:

1. Melakukan peninjauan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan hingga pertengahan tahun 2025, guna mengidentifikasi capaian, hambatan, serta potensi perbaikan yang diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan di sisa tahun anggaran;
2. Menyusun referensi operasional yang mutakhir bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan prioritas, mengendalikan pelaksanaan, dan mengarahkan kegiatan selama Semester II Tahun 2025 agar lebih fokus, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan;
3. Memberikan panduan yang sistematis untuk mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan lintas Bagian, sehingga mampu memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekratariat Daerah hingga Triwulan I dan Capaian Renstra Sekratariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekratariat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekratariat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi rencana kerja setelah dilakukan perubahan, serta anggaran pendanaan setelah dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP, berisi catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Penilaian atas pelaksanaan kegiatan merupakan langkah strategis dalam memastikan ketercapaian tujuan organisasi. Melalui evaluasi terhadap kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi capaian, dapat ditentukan tingkat keberhasilan dari setiap program dan kegiatan. Data capaian indikator yang dihasilkan menjadi cerminan kinerja yang nyata, sekaligus alat ukur efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi bahan refleksi, namun juga acuan penting dalam menyusun strategi perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan ke depan.

Proses evaluasi juga berfungsi untuk memetakan hambatan serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Informasi ini menjadi dasar dalam mengambil kebijakan adaptif, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan program yang berdampak langsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah. Dengan pendekatan ini, evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen pembelajaran organisasi.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait penguatan efisiensi anggaran, maka hasil evaluasi turut menjadi pijakan dalam memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata. Setiap program/kegiatan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan kebutuhan serta diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang lebih hemat namun tetap berkualitas dalam hasil.

Dengan begitu, kemampuan Sekretariat Daerah untuk beradaptasi dan merespon perubahan menjadi aspek krusial. Setiap perubahan kebijakan, kondisi sosial ekonomi, maupun dinamika lokal harus diantisipasi dengan perencanaan yang responsif dan

pelaksanaan yang efisien. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 hingga Triwulan I, beserta capaian terhadap sasaran dalam Renstra, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I (Tahun 2025)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra**	**96,5 %**	112,6 **%**	96,33 %	**35** %	36%
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase penyampaian LPPD tepat waktu dan kerja sama daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	113 **%**	100 %	44 %	44%
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase penyampaian LPPD tepat waktu dan kerja sama daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	433 **%**	100 %	33 %	33%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	18 Dokumen	26 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33%
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan**	**92,6 %**	100 **%**	91,64 %	27,7 %	30%
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	18 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	17%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
						Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)					
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan atau diundangkan**	**90 %**	116 %	100 %	15 %	15%
						Persentase Produk Hukum Daerah yang disebarkan	**100 %**	25 %	90 %	23,14 %	26%
						Persentase Perkara Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani	**100 %**	100 %	100 %	25,71 %	26%
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1050 Dokumen	400 Dokumen	350 Dokumen	81 Dokumen	23%
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	60 Kasus	48 Kasus	20 Kasus	3 Kasus	15%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	210 dokumen	63 dokumen	70 dokumen	18 dokumen	26%
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan**	**91,3 %**	123,87 %	90,33 %	18,44 %	20,41%
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pemantauan, Perumusan dan Evaluasi**	**86 %**	94 %	85 %	16,12 %	19%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
						pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	39 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	2 dokumen	15%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	48 laporan	15 laporan	16 laporan	3 laporan	19%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		86 **%**	92 **%**	85 %	0 %	0%
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	30 Koordinasi	9 Koordinasi	10 Koordinasi	0 Koordinasi	0%
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan yang dilaksanakan**	**96 %**	100 **%**	95 %	0 %	0%
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	24 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	0 Laporan	0%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	0 Laporan	0%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**92 %**	188 **%**	90 %	59,22 %	65,8%
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	390 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	9 Dokumen	19,5%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	444 orang	300 orang	148 orang	110 orang	74%
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**121,54 %**	100 %	%	%
						Persentase fasilitasi penataan organisasi	**100 %**	**140,4 %**	100 %	21 %	21%
						Persentase tercapainya pelayanan bidang administrasi umum	**100 %**	**100 %**	100 %	25 %	25%
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	133 **%**	100 %	30 %	30%
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	600 Laporan	284 Laporan	200 Laporan	60 Laporan	30%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	600 Laporan	261 Laporan	200 Laporan	60 Laporan	30%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	600 Laporan	250 Laporan	200 Laporan	60 Laporan	30%
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu**	**100 %**	114 **%**	100 %	57,14 %	57%
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu**	**100 %**	156 **%**	100 %	85,86 %	86%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 orang/bulan	4 orang/bulan	183 orang/bulan	177 orang/bulan	97%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	732 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33%
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	70 **%**	100 **%**	0 **%**	**0%**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30 paket	7 paket	10 paket	0 paket	**0%**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum**	**100 %**	110 **%**	100 **%**	0 **%**	**0%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
						Perangkat Daerah yang dilaksanakan					
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6 paket	2 paket	2 paket	0 paket	**0%**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33 paket	11 paket	11 paket	0 paket	**0%**
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6 paket	1 paket	2 paket	0 paket	**0%**
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6 paket	5 paket	2 paket	1 paket	**50%**
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3 laporan	4 laporan	1 laporan	0 laporan	**0%**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	963 laporan	351 laporan	321 laporan	81 laporan	**25%**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	0 %	100 %	0 %	**0%**
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		6 unit	0 unit	2 unit	0 unit	**0%**
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum**	**100 %**	127 **%**	100 %	24,32 %	**24%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
						Perangkat Daerah yang dilaksanakan					
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	**0%**
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 laporan	13 laporan	12 laporan	3 laporan	**25%**
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	21 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	**25%**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	**25%**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	28 **%**	100 **%**	6 **%**	**6%**
4	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	363 unit	59 unit	12 unit	3 unit	**25%**
4	01	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6 unit	7 unit	75 unit	8 unit	**11%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	01	2.09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	36 unit	9 unit	200 unit	0 unit	**0%**
4	01	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	225 unit	39 unit	121 unit	13 unit	**11%**
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	600 unit	0 unit	2 unit	0 unit	**0%**
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6 unit	2 unit	2 unit	1 unit	**50%**
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	67 **%**	100 **%**	66,66 **%**	**67%**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	**100%**
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2 orang/bulan	0 orang/bulan	2 orang/bulan	0 orang/bulan	**0%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	**100%**
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	66 %	100 %	31,8 %	**32%**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	57 paket	20 paket	19 paket	8 paket	**42%**
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	36 paket	0 paket	12 paket	3 paket	**25%**
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	39 paket	9 paket	13 paket	3 paket	**23%**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase fasilitasi peningkatan skor PMPRB PD dan PEMDA**	**100 %**	140 **%**	**100 %**	**50 %**	**50%**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	96 dokumen	52 dokumen	32 dokumen	18 dokumen	56%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	327 Laporan	108 Laporan	109 Laporan	42 Laporan	39%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	9 Dokumen	42 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67%

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan akselerasi capaian agar target tahunan dapat terpenuhi.

Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, capaian fasilitasi kebijakan pemerintahan dan kesra telah mencapai 36% dari target tahunan sebesar 96,33%, menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik pada awal tahun. Kegiatan penyampaian LPPD dan fasilitasi kerja sama daerah juga telah mencapai 44% dari target tahunan, mencerminkan ketepatan waktu dalam pelaporan dan dukungan terhadap kolaborasi antar daerah.

Sementara itu, pada sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, realisasi sebesar 33% dari target tahunan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berada pada jalur yang tepat. Namun, beberapa kegiatan lain seperti Penataan Administrasi Pemerintahan dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil belum menunjukkan realisasi, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan.

Dalam Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah, seperti Fasilitasi Bantuan Hukum yang baru mencapai 15% dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar 23%. Namun demikian, Pendokumentasian Produk Hukum telah mencapai 26% yang menunjukkan pelaksanaan cukup optimal di awal tahun.

Program Perekonomian dan Pembangunan juga telah menunjukkan capaian yang variatif. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mencatat capaian yang sangat tinggi, dengan realisasi hingga 59,22% dari target tahunan. Namun, kegiatan yang berkaitan dengan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

serta Pelaksanaan Administrasi Pembangunan belum menunjukkan realisasi. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan pada perangkat daerah teknis yang menjadi objek pemantauan masih dalam tahap perencanaan, sehingga belum dapat dilaksanakan pemantauannya.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, beberapa kegiatan menunjukkan kinerja awal yang baik. Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan telah mencapai 30%, sementara Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 50%. Capaian konsisten juga terlihat pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang selalu sesuai dengan target, mencerminkan ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian program strategis Sekretariat Daerah hingga Triwulan I Tahun 2025 berada dalam tren yang cukup menggembirakan. Namun demikian, capaian yang masih rendah pada beberapa kegiatan disebabkan oleh sifat pelaksanaan kegiatan di awal tahun yang umumnya masih dalam tahap perencanaan, administrasi, dan proses persiapan. Kegiatan yang bersifat pengawasan, evaluasi, serta monitoring belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sebagian besar proyek atau kegiatan fisik maupun non-fisik baru saja dimulai. Oleh karena itu, perlu strategi percepatan pelaksanaan pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara maksimal.

BAB III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan pendekatan strategis dan terukur, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dinamika isu-isu prioritas. Setiap program dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan secara optimal serta memastikan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Dalam rangka efisiensi belanja daerah, seluruh kegiatan difokuskan pada capaian yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan penajaman prioritas, maka penyesuaian program dalam Perubahan Renja 2025 tetap berfokus pada tiga rumpun Program yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

   Fokus utama program ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Hal ini mencakup penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan perencanaan dan keuangan khususnya di lingkup Sekretariat Daerah yang lebih terintegrasi. Selain itu, program ini mendukung pemenuhan kebutuhan Kepala Daerah dan aktivitas pimpinan secara tepat waktu dan responsif. Seluruh pelaksanaan diarahkan untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan secara profesional, tertib, dan hemat anggaran.

   Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Visi Bupati Tulungagung yaitu *"Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa"*, khususnya melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan

responsif, serta mendukung misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi."

2. *Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*

   Program ini diarahkan pada penguatan aspek hukum dan perumusan kebijakan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ruang lingkupnya mencakup peningkatan mutu reformasi di bidang hukum, perbaikan kualitas kebijakan daerah, serta fasilitasi terhadap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, program ini juga mencakup penyusunan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Seluruh upaya diarahkan untuk membangun tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berkontribusi nyata pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

   Program ini secara langsung menunjang pelaksanaan Misi Bupati dalam hal *"Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif"* serta *"Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban"*, melalui kebijakan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

3. *Program Perekonomian dan Pembangunan*

   Program ini berfokus pada penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa secara efisien dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja daerah. Selain itu, program ini juga mendukung stabilitas ekonomi daerah dengan mendorong koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kinerja ekonomi lokal. Aspek penting lainnya adalah pengawasan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, guna memastikan bahwa seluruh target kinerja berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Melalui fungsi koordinatifnya, Sekretariat Daerah mendukung Misi Bupati dalam *"Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa"* serta *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inklusif"*, terutama dalam memperkuat sistem pengadaan dan efektivitas pengawasan pembangunan daerah.

Lebih dari itu, program ini juga mendukung isu pembangunan prioritas nasional, terutama dalam hal pengendalian inflasi di daerah melalui peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga kebijakan pengendalian harga dan stabilitas pasokan dapat dilaksanakan secara lebih responsif dan tepat sasaran.

Perencanaan dan pendanaan program-program ini mengacu pada Perubahan RKPD 2025 dan hasil evaluasi Renja hingga Triwulan I. Penyesuaian target dan pagu kegiatan dilakukan untuk menjawab perkembangan pelaksanaan tugas serta dinamika kebijakan nasional dan daerah, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja.

Setiap usulan kegiatan diajukan melalui mekanisme pendanaan indikatif, ditelaah oleh Bappeda, dan disempurnakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lebih definitif. Seluruh tahapan diarahkan untuk menghasilkan program yang adaptif, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan maksimal dalam kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung pada sisa Tahun Anggaran 2025 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**73.462.214.607**	**87.127.775.176**	**13.665.560.569**
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	%	%	**96,33%**	**97,50%**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**20.238.500.000**	**23.630.711.100**	**2.003.340.000**
4	**1**	**2**	**2.01**	1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase penyampaian LPPD tepat waktu dan Persentase kerja sama daerah yang terfasilitasi**	**Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang diselesaikan**	**%**	**Dokumen**	**100%**	14 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**1.586.000.000**	**1.800.336.500**	**214.336.500**
4	1	2	**2.01**	2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	4 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	856.000.000	1.184.587.500	328.587.500
4	1	2	**2.01**	3	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	330.000.000	279.749.000	-50.251.000
4	1	2	**2.01**	1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	400.000.000	336.000.000	-64.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase penyampaian LPPD tepat waktu dan Persentase kerja sama daerah yang terfasilitasi**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah diselesaikan tepat waktu**	**%**	**Dokumen**	**100%**	12 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**90.000.000**	**34.000.000**	**-56.000.000**
4	1	2	**2.04**		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	12 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	90.000.000	34.000.000	-56.000.000
4	**1**	**2**	**2.02**	1	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Diselesaikan**	**Jumlah dokumen Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Diselesaikan**	**%**	**Dokumen**	**91,64%**	13 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**17.947.500.000**	**21.227.508.000**	**3.280.008.000**
4	1	2	**2.02**	2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	5 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	16.547.500.000	18.295.653.000	1.748.153.000
4	1	2	**2.02**	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	3 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.025.000.000	1.408.518.000	383.518.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pengendalian Penduduk dan KB									
4	1	2	**2.02**		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	5 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	375.000.000	1.523.337.000	1.148.337.000
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani**	**Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana**	**%**	**Kali**	**100%**	**440**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**615.000.000**	**568.866.600**	**-46.133.400**
						Persentase Produk Hukum Daerah yang disebarkan		%		100%				-		
						Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan atau diundangkan		%		90%				-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	2	**2.03**	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	200.000.000	216.633.500	16.633.500
4	1	2	**2.03**	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Kasus	20 Kasus	20 Kasus	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	340.000.000	264.313.100	**-75.686.900**
4	1	2	**2.03**	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	75.000.000	87.920.000	12.920.000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	%	%	**90,33**	**95**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**2.200.000.000**	**2.199.312.000**	**688.000**
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pemantauan, Perumusan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Jumlah dukumen kebijakan ekonomi yang diawasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana**	**%**	**Dokumen**	**85%**	3 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**350.000.000**	**391.838.800**	**41.838.800**
4	1	3	**2.01**	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen	13 Dokumen	2 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	100.000.000	118.922.200	18.922.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	3	**2.01**	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	Dokumen	16 Laporan	12 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	200.000.000	195.970.600	-4.029.400
4	1	3	**2.01**	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	50.000.000	76.946.000	26.946.000
4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pemantauan, Perumusan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Jumlah dokumen pemantauan kebijakan SDA yang dihasilkan**	**%**	**Dokumen**	**85%**	3 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**300.000.000**	**430.380.600**	**130.380.600**
4	1	3	**2.04**	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	250.000.000	420.037.500	170.037.500
4	1	3	**2.04**	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	1 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	50.000.000	10.343.100	-39.656.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
						Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian									
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan yang dilaksanakan**	**Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**%**	**Dokumen**	**95%**	22 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**550.000.000**	**620.000.000**	**70.000.000**
4	1	3	**2.02**	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		2 Dokumen	2 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	400.000.000	440.000.000	40.000.000
4	1	3	**2.02**	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		9 Laporan	8 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	75.000.000	100.000.000	25.000.000
4	1	3	**2.02**	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Laporan		20 Laporan	12 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	75.000.000	80.000.000	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
						Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan									
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**	**%**	**%**	**91%**	95 %	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**1.000.000.000**	**757.092.600**	**-242.907.400**
4	1	3	**2.03**	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		46 Dokumen	2000 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	550.000.000	445.000.000	**-105.000.000**
4	1	3	**2.03**	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		12 Dokumen	80 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	250.000.000	162.139.000	**-87.861.000**
4	1	3	**2.03**	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		148 Orang	450 Peserta	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	200.000.000	149.953.600	**-50.046.400**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	**IKM Perangkat Daerah**	**indeks**	**indeks**	**85,5 indeks**	**85,5 indeks**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**51.023.714.607**	**61.297.752.076**	**10.274.037.469**
						Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi		**%**		**100%**		**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**			
						Persentase Tercapainya Pelayanan Bidang		**%**		**100%**		**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
						Administrasi Umum										
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah laporan kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapatkan layanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi**	**%**	**Laporan**	**100%**	**600**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**2.585.000.000**	**4.695.738.800**	**2.110.738.800**
4	1	1	**2.14**	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Laporan	200 Laporan	200 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.665.000.000	2.340.000.000	675.000.000
4	1	1	**2.14**	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Laporan	200 Laporan	200 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	455.000.000	711.416.100	256.416.100
4	1	1	**2.14**	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	200 Laporan	200 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	465.000.000	1.644.322.700	1.179.322.700
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang telah disusun tepat waktu**	**%**	**Dokumen**	**100%**	18 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**425.000.000**	**442.094.400**	**17.094.400**
4	1	1	**2.01**	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	4 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	150.000.000	275.243.600	125.243.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.01**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	2 Laporan	6 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	150.000.000	119.535.600	-30.464.400
4	1	1	**2.01**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2 Laporan	8 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	125.000.000	47.315.200	**-77.684.800**
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang telah disusun tepat waktu**	**%**	**Dokumen**	**100%**	133 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**28.232.333.707**	**28.425.350.319**	**193.016.612**
4	1	1	**2.02**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	183 Orang/bulan	183 Orang/bulan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	27.982.333.707	28.302.723.519	320.389.812
4	1	1	**2.02**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	84 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	150.000.000	111.005.100	-38.994.900
4	1	1	**2.02**	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	12 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	50.000.000	4.368.000	**-45.632.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.02**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	Laporan	3 Laporan	25 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	50.000.000	7.253.700	**-42.746.300**
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen pengadaan atribut kelengkapan pakaian pegawai**	**%**	**Dokumen**	**100%**	1 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**420.026.000**	**392.786.000**	**-27.240.000**
4	1	1	**2.05**	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	10 Paket	10 paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	420.026.000	392.786.000	-27.240.000
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**339 dokumen**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**4.115.339.407**	**3.788.428.557**	**-326.910.850**
4	1	1	**2.06**	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	70.331.400	46.594.600	**-23.736.800**
4	1	1	**2.06**	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	Paket	11 Paket	11 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	812.145.700	555.561.750	**-256.583.950**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
						Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
4	1	1	**2.06**	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	52.559.900	510.859.900	458.300.000
4	1	1	**2.06**	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	203.191.207	189.325.107	-13.866.100
4	1	1	**2.06**	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	85.424.200	87.413.200	1.989.000
4	1	1	**2.06**	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	321 Laporan	321 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	2.891.687.000	2.398.674.000	-493.013.000
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**2 dokumen**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**123.240.000**	**19.500.000**	**-103.740.000**
4	1	1	**2.07**	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2 Unit	2 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	123.240.000	19.500.000	-103.740.000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**37**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**4.569.779.400**	**5.174.399.400**	**604.620.000**
4	1	1	**2.08**	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.020.000	1.020.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.08**	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.529.989.200	1.527.289.200	-2.700.000
4	1	1	**2.08**	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	562.010.000	780.730.000	218.720.000
4	1	1	**2.08**	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	2.476.760.200	2.865.360.200	388.600.000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**412**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**3.087.094.900**	**4.844.140.300**	**1.757.045.400**
4	1	1	**2.09**	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	12 Unit	12 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	714.450.000	717.970.000	3.520.000
4	1	1	**2.09**	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	75 Unit	75 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.745.525.600	1.570.725.000	-174.800.600
4	1	1	**2.09**	9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	200 Unit	200 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	4.000.000	2.400.000	-1.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.09**	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	121 Unit	121 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	73.070.000	116.125.000	43.055.000
4	1	1		9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	49.420.000	1.946.450.000	1.897.030.000
4	1	1		#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	500.629.300	490.470.300	-10.159.000
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**6 dokumen**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**1.930.901.193**	**2.682.805.000**	**751.903.807**
4	1	1	**2.11**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1.029.310.000	1.503.950.000	474.640.000
4	1	1	**2.11**	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	Orang	2 Orang	2 Orang	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	14.399.000	14.399.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.11**	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	887.192.193	1.164.456.000	277.263.807
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah dokumen penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah**	**%**	**Dokumen**	**100%**	**44 dokumen**	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**4.635.000.000**	**10.090.948.900**	**5.455.948.900**
4	1	1	**2.12**	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Paket	19 Paket	19 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	3.078.105.000	6.983.262.400	3.905.157.400
4	1	1	**2.12**	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Paket	12 Paket	12 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	780.000.000	1.577.241.500	797.241.500
4	1	1	**2.12**	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	Paket	13 Paket	13 Paket	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	776.895.000	1.530.445.000	753.550.000
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase fasilitasi peningkatan skor PMPRB PD dan PEMDA**	**Jumlah dokumen penataan organisasi, kelembagaan, dan peningkatan kinerja**	**%**	**Dokumen**	**100%**	159 dokumen	**Kabupaten Tulungagung**	**Kabupaten Tulungagung**	**900.000.000**	**741.560.400**	**-158.439.600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Satuan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ (Kurang) Pagu
						Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Sebelum	Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11
4	1	1	**2.13**	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Dokumen	32 Dokumen	34 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	250.000.000	199.432.500	-50.567.500
4	1	1	**2.13**	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Laporan	109 Laporan	122 laporan	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	300.000.000	209.512.500	-90.487.500
4	1	1	**2.13**	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	350.000.000	332.615.400	-17.384.600

Selama Semester I Tahun Anggaran 2025, terjadi beberapa kali penyesuaian alokasi anggaran pada seluruh program di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pemerintah Pusat terkait efisiensi dan penajaman belanja daerah, dalam rangka menjaga stabilitas fiskal serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program prioritas. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan sebagai bentuk akselerasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai belum memenuhi target periodik, baik bulanan maupun triwulanan. Oleh karena itu, pada level Sub Kegiatan, terdapat variasi berupa pengurangan maupun penambahan alokasi anggaran.

Jika dibandingkan antara pagu anggaran murni dengan pagu perubahan anggaran kegiatan (PAK), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengalami penyesuaian dari semula sebesar Rp. 20.238.500.000,- menjadi Rp. 23.630.711.100,- atau meningkat sebesar Rp. 3.392.211.100,-. Penambahan ini diarahkan untuk optimalisasi kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan umum serta pelayanan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga pencapaian target kinerja.
2. Program Pembangunan dan Perekonomian, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- disesuaikan menjadi Rp. 2.199.312.000,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 688.000,-. Penyesuaian dilakukan melalui evaluasi terhadap kegiatan non-prioritas serta efisiensi pada belanja operasional.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mendukung tugas-tugas administratif dan koordinatif perangkat daerah, mengalami kenaikan dari Rp. 51.023.714.607,- menjadi Rp. 61.297.752.076,- atau meningkat sebesar Rp. 10.274.037.469,-. Penambahan ini dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, namun tetap berprinsip pada efisiensi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran mengalami kenaikan dari pagu murni 2025 Rp. 73.462.214.607,- menjadi Rp. 87.127.775.176,- pada pagu PAK, atau meningkat sebesar Rp. 13.665.560.569,-. Dengan demikian, meskipun terdapat efisiensi dalam beberapa pos belanja, secara total terjadi penambahan anggaran yang ditujukan untuk penguatan program prioritas daerah.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah, sekaligus tetap mengupayakan efisiensi pada belanja yang kurang strategis.

Selain aspek anggaran, penyesuaian juga dilakukan pada indikator Kegiatan dan beberapa pada target-targetnya dalam dokumen Perubahan Renja 2025. Perubahan indikator ini diselaraskan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Indikator-indikator baru tersebut merupakan hasil evaluasi atas indikator sebelumnya yang dinilai kurang akurat dalam mengukur kinerja riil, serta merupakan bentuk penyempurnaan yang disepakati bersama oleh seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penyusunan indikator kegiatan yang baru ini juga melibatkan masukan dari pakar perencanaan pembangunan yang berasal dari institusi perguruan tinggi. Para narasumber tersebut memberikan rekomendasi agar indikator dirumuskan secara lebih terukur, relevan, dan kontributif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan demikian, perubahan indikator ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

BAB IV
Penutup

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memegang peranan penting sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Dokumen ini disusun untuk menjamin keselarasan arah pembangunan daerah dengan dinamika kebijakan serta perkembangan kondisi aktual. Diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak agar pelaksanaan Perubahan Renja ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan capaian yang optimal.

Untuk memastikan keterlaksanaan secara konsisten dan akuntabel, maka kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 perlu ditegaskan dan dijadikan pedoman bersama oleh seluruh komponen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Bagian lingkup Sekretariat Daerah wajib berkomitmen mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah agar menjaga sinergitas kerja melalui komunikasi yang efektif, koordinasi intensif, dan kerja sama lintas Bagian demi tercapainya hasil kerja yang terukur dan selaras.
3. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja serta efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, sekaligus menjadi dasar perbaikan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pembangunan, baik nasional maupun daerah, perlu segera dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan program/kegiatan.

Dengan hadirnya Perubahan Renja ini, diharapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih terstruktur, terukur, dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret tindak lanjut pelaksanaan Perubahan Renja ini, beberapa hal berikut perlu diperhatikan dan dilaksanakan:

1. Setiap Bagian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara rutin dan terstruktur, yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan.
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus didorong melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, serta konsolidasi teknis dengan perangkat daerah lain yang lebih maju.
3. Teknologi informasi akan dioptimalkan sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan program/kegiatan agar tercipta proses yang efisien, transparan, dan berbasis data.

Akhirnya, komitmen bersama dan semangat kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dokumen ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 08 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197009061991011001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN TATA PEMERINTAH							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**96,33 %**	**96,33 %**	**20.238.500.000,00**	**20.219.863.800,00**	**23.630.711.100,00**	**2.003.340.000,00**							**22.241.840.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase penyampaian LPPD tepat waktu*				100 %	100 %	1.586.000.000,00	1.509.000.000,00	1.800.336.500,00	214.336.500,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah		1.659.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	4 Dokumen	856.000.000,00	849.000.000,00	1.184.587.500,00	328.587.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			933.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	5 Dokumen	330.000.000,00	286.000.000,00	279.749.000,00	-50.251.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			314.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	374.000.000,00	336.000.000,00	-64.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			411.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase kerja sama daerah yang terfasilitasi*				100 %	100 %	90.000.000,00	60.000.000,00	34.000.000,00	-56.000.000,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	60.000.000,00	34.000.000,00	-56.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**96,33 %**	**96,33 %**	**20.238.500.000,00**	**20.219.863.800,00**	**23.630.711.100,00**	**2.003.340.000,00**							**22.241.840.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Diselesaikan*				91,64 %	91,64 %	17.947.500.000,00	18.116.326.500,00	21.227.508.000,00	3.280.008.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Tulungagung		19.927.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	5 Dokumen	16.547.500.000,00	16.598.694.000,00	18.295.653.000,00	1.748.153.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.258.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			6 Dokumen	3 Dokumen	1.025.000.000,00	1.015.757.500,00	1.408.518.000,00	383.518.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.117.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	5 Dokumen	375.000.000,00	501.875.000,00	1.523.337.000,00	1.148.337.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			552.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**96,33 %**	**96,33 %**	**20.238.500.000,00**	**20.219.863.800,00**	**23.630.711.100,00**	**2.003.340.000,00**							**22.241.840.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani Persentase Produk Hukum Daerah yang disebarkan Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan atau diundangkan*				100 % 90 %	100 % 90 %	615.000.000,00	534.537.300,00	568.866.600,00	-46.133.400,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung		587.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				350 Dokumen	350 Dokumen	200.000.000,00	176.600.000,00	216.633.500,00	16.633.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Kasus	20 Kasus	340.000.000,00	282.937.300,00	264.313.100,00	-75.686.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			311.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				70 Dokumen	70 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	87.920.000,00	12.920.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**90,33 %**	**90,33 %**	**2.200.000.000,00**	**2.153.379.100,00**	**2.199.312.000,00**	**138.350.000,00**							**2.338.350.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Pemantauan, Perumusan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam*				85 %	85 %	350.000.000,00	297.841.000,00	391.838.800,00	41.838.800,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Tulungagung		327.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				13 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	88.343.000,00	118.922.200,00	18.922.200,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	165.828.000,00	195.970.600,00	-4.029.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			182.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	43.670.000,00	76.946.000,00	26.946.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Pemantauan, Perumusan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam*				85 %	85 %	300.000.000,00	452.571.400,00	430.380.600,00	130.380.600,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Tulungagung		467.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	433.232.400,00	420.037.500,00	170.037.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			357.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	19.339.000,00	10.343.100,00	-39.656.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**90,33 %**	**90,33 %**	**2.200.000.000,00**	**2.153.379.100,00**	**2.199.312.000,00**	**138.350.000,00**							**2.338.350.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan yang dilaksanakan*				95 %	95 %	550.000.000,00	517.970.100,00	620.000.000,00	70.000.000,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung		569.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	386.705.500,00	440.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			425.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				9 Laporan	8 Laporan	75.000.000,00	62.750.600,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				20 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	68.514.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**							**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tercapainya Pelayanan Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**100 85,5 % indeks**	**100 85,5 % indeks**	**51.023.714.607,00**	**52.161.486.064,00**	**61.297.752.076,00**	**8.205.962.431,00**							**59.229.677.038,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	420.026.000,00	411.730.000,00	392.786.000,00	-27.240.000,00			-	-	Kelancaran kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah		452.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	420.026.000,00	411.730.000,00	392.786.000,00	-27.240.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			452.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.115.339.407,00	3.642.137.907,00	3.788.428.557,00	-326.910.850,00			-	-	Kelancaran kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah		4.013.225.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.331.400,00	70.331.400,00	46.594.600,00	-23.736.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.255.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	812.145.700,00	1.110.858.900,00	555.561.750,00	-256.583.950,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.221.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.559.900,00	55.055.500,00	510.859.900,00	458.300.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	203.191.207,00	205.045.907,00	189.325.107,00	-13.866.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	85.424.200,00	87.306.200,00	87.413.200,00	1.989.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				321 Laporan	321 Laporan	2.891.687.000,00	2.113.540.000,00	2.398.674.000,00	-493.013.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.324.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	123.240.000,00	141.752.000,00	19.500.000,00	-103.740.000,00			-	-	Kelancaran kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah		155.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	123.240.000,00	141.752.000,00	19.500.000,00	-103.740.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.569.779.400,00	4.574.879.400,00	5.174.399.400,00	604.620.000,00			-	-	Kelancaran kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah		4.678.326.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.122.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.529.989.200,00	1.529.989.200,00	1.527.289.200,00	-2.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.328.954.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	562.010.000,00	567.110.000,00	780.730.000,00	218.720.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			623.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.476.760.200,00	2.476.760.200,00	2.865.360.200,00	388.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.724.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	3.087.094.900,00	2.843.050.400,00	4.844.140.300,00	1.757.045.400,00			-	-	Kelancaran kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah		3.628.195.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	714.450.000,00	657.970.000,00	717.970.000,00	3.520.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			723.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	1.745.525.600,00	1.564.067.000,00	1.570.725.000,00	-174.800.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.720.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				121 Unit	121 Unit	73.070.000,00	71.730.000,00	116.125.000,00	43.055.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49.420.000,00	49.420.000,00	1.946.450.000,00	1.897.030.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		504.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.629.300,00	495.863.400,00	490.470.300,00	-10.159.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		545.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	1.930.901.193,00	2.405.541.193,00	2.682.805.000,00	751.903.807,00			-	-	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.945.687.698,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.029.310.000,00	1.503.950.000,00	1.503.950.000,00	474.640.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.953.937.698,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	14.399.000,00	14.399.000,00	14.399.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		15.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	887.192.193,00	887.192.193,00	1.164.456.000,00	277.263.807,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		975.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.635.000.000,00	4.459.166.500,00	10.090.948.900,00	5.455.948.900,00			-	-	Sekretariat Daerah	4.905.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	3.078.105.000,00	2.978.652.000,00	6.983.262.400,00	3.905.157.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		3.276.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	780.000.000,00	703.619.500,00	1.577.241.500,00	797.241.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		773.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	776.895.000,00	776.895.000,00	1.530.445.000,00	753.550.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		854.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tercapainya Pelayanan Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**100 85,5 % indeks**	**100 85,5 % indeks**	**51.023.714.607,00**	**52.161.486.064,00**	**61.297.752.076,00**	**8.205.962.431,00**						**59.229.677.038,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase fasilitasi implementasi RB general dan tematik*				100 %	100 %	900.000.000,00	775.646.000,00	741.560.400,00	-158.439.600,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah	853.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				32 Dokumen	34 Dokumen	250.000.000,00	207.190.000,00	199.432.500,00	-50.567.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		227.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				109 Laporan	122 Laporan	300.000.000,00	256.722.000,00	209.512.500,00	-90.487.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		282.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	311.734.000,00	332.615.400,00	-17.384.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		342.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tercapainya Pelayanan Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**85,5 100 indeks %**	**100 85,5 % indeks**	**51.023.714.607,00**	**52.161.486.064,00**	**61.297.752.076,00**	**8.205.962.431,00**						**59.229.677.038,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*				100 %	100 %	2.585.000.000,00	2.502.647.000,00	4.695.738.800,00	2.110.738.800,00			-	- -	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.843.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				200 Laporan	200 Laporan	1.665.000.000,00	1.623.281.000,00	2.340.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.831.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				200 Laporan	200 Laporan	455.000.000,00	434.289.000,00	711.416.100,00	256.416.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				200 Laporan	200 Laporan	465.000.000,00	445.077.000,00	1.644.322.700,00	1.179.322.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			511.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAAN BARANG/JASA							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**90,33 %**	**90,33 %**	**2.200.000.000,00**	**2.153.379.100,00**	**2.199.312.000,00**	**138.350.000,00**						**2.338.350.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa*				91 %	91 %	1.000.000.000,00	884.996.600,00	757.092.600,00	-242.907.400,00			-	- -	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung		973.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				46 Dokumen	2000 Dokumen	550.000.000,00	512.856.000,00	445.000.000,00	-105.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			564.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	80 Dokumen	250.000.000,00	203.955.100,00	162.139.000,00	-87.861.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			224.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				148 Orang	450 Orang	200.000.000,00	168.185.500,00	149.953.600,00	-50.046.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**13.665.560.569,00**						**83.809.867.038,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**85,5 100 indeks %**	**100 85,5 % indeks**	**51.023.714.607,00**	**52.161.486.064,00**	**61.297.752.076,00**	**8.205.962.431,00**						**59.229.677.038,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	425.000.000,00	409.994.700,00	442.094.400,00	17.094.400,00			-	- -	Sekretariat Daerah		1.255.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	140.948.500,00	275.243.600,00	125.243.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			155.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	119.535.600,00	-30.464.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	119.046.200,00	47.315.200,00	-77.684.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	28.232.333.707,00	29.994.940.964,00	28.425.350.319,00	193.016.612,00			-	- -	Sekretariat Daerah		33.498.621.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				183 Orang/ bulan	183 Orang/ bulan	27.982.333.707,00	29.801.454.964,00	28.302.723.519,00	320.389.812,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.691.211.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	134.011.000,00	111.005.100,00	-38.994.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			147.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	28.950.000,00	4.368.000,00	-45.632.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	30.525.000,00	7.253.700,00	-42.746.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	JUMLAH								**73.462.214.607,00**	**74.534.728.964,00**	**87.127.775.176,00**	**74.314.663.499,09**							**83.809.867.038,00**	

Disusun oleh:
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
bagianperkusetda@gmail.com
2025

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG

Disusun Oleh:
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. R.A KARTINI 17 Telp. (0355) 321145
TULUNGAGUNG (66212)

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

DAFTAR ISI

PERBUB **2**
DAFTAR ISI **5**
DAFTAR TABEL **6**
BAB I PENDAHULUAN **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.3.1. Maksud 10
1.3.2. Tujuan 10
1.4 Sistematika Penyusunan **10**
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **12**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan II 12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **21**
3.1 Program dan Kegiatan 21
3.1.1 Program-program 21
3.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan 22
BAB IV PENUTUP **26**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 12

Lampiran 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun. Untuk menuju proses penyusunan RKPD Daerah maka sebelumnya disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan tahunan. Di dalam Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah tertuang dalam RPD 2024-2026. Perubahan Renja merupakan implementasi dan perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sebagaimana yang ditetapkan dan disusun pada tahun sebelumnya. Perubahan Renja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pengukuran keberhasilan Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD dalam tahun berjalan akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh Sekretariat DPRD serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daera (LKJiP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
w. Peraturan Bupati Tulungagung no. 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Tulungagun Tahun 2024 - 2026
x. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
y. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung ini adalah penjabaran tentang maksud dari penyusunan dokumen rencana kerja, sedangkan tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai sebagai tujuan dari penyusunan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2025.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025;
2. Sebagai pengarah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas aparatur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat kontrol / kendali dalam pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan overlap;
4. Sebagai jaminan obyektif dan sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja hasil pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar bekanag, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat
Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

Memuat catatan paling penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Hasil yang diperoleh adalah sebagian besar realisasi kinerja program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Akan tetapi masih ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, realisasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s.d. Triwulan I (Bulan Maret)	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
Urusan Pemerintahan Umum							
Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung							
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***	100	200	Rp. 42.612.895.928	Rp. 9.510.475.782	0,04
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja (Dokumen)	14	28	Rp. 275.001.000	Rp. 109.871.000	0,57
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	12	Rp. 275.001.000	Rp. 109.871.000	0,56
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	0	Rp. 213.664.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (Dokumen)	26	52	Rp. 6.506.091.575	Rp. 1.349.134.276	0,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	50	Rp. 6.206.176.575	Rp. 1.346.584.276	0

4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	Rp. 295.875.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	13	6	Rp. 2.600.000	Rp. 2.550.000	0,99
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	5	5	Rp. 374.472.000	Rp. 263.607.000	0,7
4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Paket)	1	100	Rp. 0	Rp. 0	0
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	Rp. 47.994.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44	0	Rp. 11.876.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44	39	Rp. 314.602.000	Rp. 86.020.000	0,84
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (%)	100	100	Rp. 1.009.771.900	Rp. 280.794.350	0,48
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	Rp. 26.210.000	Rp. 5.993.000	0,4

4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	2	Rp. 320.582.900	Rp. 77.827.350	0,32
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	Rp. 59.648.000	Rp. 14.264.000	0,53
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	Rp. 181.688.000	Rp. 20.415.000	0,2
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	160	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	60	Rp. 183.810.000	Rp. 72.435.000	0,77
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	8	Rp. 232.633.000	Rp. 89.860.000	0,67
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang yang diperoleh (unit)	5	5	Rp. 8.040.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia (Dokumen)	36	72	Rp. 1.044.801.600	Rp. 157.973.558	0,09
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	8	Rp. 306.600.000	Rp. 62.051.568	0,03

4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	14	Rp. 300.960.000	Rp. 36.567.230	0,27
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	10	Rp. 437.241.800	Rp. 59.354.760	0
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)	100	200	Rp.771.726.000	Rp. 170.932.411	0,39
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	6	Rp. 230.710.000	Rp. 26.930.218	0,24
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	21	Rp. 353.200.000	Rp. 61.548.193	0,31
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	60	4	Rp. 29.000.000	Rp. 8.125.000	0,64
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	Rp. 158.816.000	Rp. 74.329.000	0,72
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD (Dokumen)	14	28	Rp. 31.877.407.453	Rp. 7.155.283.687	0,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	100	Rp. 31.644.671.453	Rp. 7.140.283.687	0

4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	10	Rp. 227.500.000	Rp. 15.000.000	0,09
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	50	0	Rp. 5.236.000	Rp. 0	0
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD (%)	100	100	Rp. 745.584.400	Rp. 200.466.500	0,27
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	2	Rp. 66.303.400	Rp. 8.621.000	0,35
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	6	12	Rp. 21.080.000	Rp. 1.360.000	0,16
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	96	80	Rp. 381.337.000	Rp. 139.410.000	0,27
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1	2	Rp. 276.864.000	Rp. 51.075.500	0,24
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			162	Rp. 30.551.730.600	Rp. 10.186.295.650	0,57
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah rekomendasi Perda (Dokumen)	12	12	Rp. 2.997.068.700	Rp. 1.357.468.150	0,47
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	3	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	12	11	Rp. 1.879.087.000	Rp. 825.475.600	0,48
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	1	0	Rp. 20.400.000	Rp. 0	0

4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	20	16	Rp. 1.077.476.700	Rp. 531.992.550	0,51
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0	Rp. 8.625.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Perda Persetujuan APBD (Perda)	3	6	Rp. 938.737.500	Rp. 326.651.500	0,34
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	2	Rp. 410.955.000	Rp. 326.651.500	0,79
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	0	Rp. 16.980.500	Rp. 0	0
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	0	Rp. 73.339.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	0	Rp. 403.192.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	0	Rp. 34.271.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintah (kali)	96	116	Rp. 253.164.000	Rp. 30.085.000	0,28
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	24	8	Rp. 49.352.000	Rp. 8.245.000	0,17
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	7	Rp. 49.370.000	Rp. 6.290.000	0,17

4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	24	6	Rp. 50.330.000	Rp. 7.540.000	0,15
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	24	7	Rp. 56.534.000	Rp. 8.010.000	0,19
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	12	0	Rp. 7.070.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	Rp. 40.508.000	Rp. 0	0,97
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (kali)	23	6	Rp.3.070.403.000	Rp. 531.043.200	0,29
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	22	23	Rp.1.807.662.000	Rp. 343.276.100	0,33
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	3	6	Rp. 108.604.800	Rp. 9.046.170	0
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	6	Rp. 253.411.200	Rp. 63.107.730	0
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	12	11	Rp. 234.280.000	Rp. 66.393.200	0,47
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2	0	Rp. 9.775.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	6900	6000	Rp. 656.670..000	Rp. 49.220.000	0,29
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terserap (aspirasi)	750		Rp. 1.308.687.700	Rp. 15.127.700	0,41

4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	Rp. 89.477.400	Rp. 0	0,50
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	150	51	Rp. 1.219.210.300	Rp. 15.127.700	0,40
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase aduan yang ditangani badan kehormatan (%)	100	120	Rp. 230.427.800	Rp. 29.260.000	0,12
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	Rp. 55.501.000	Rp. 0	0
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	3	2	Rp. 44.243.000	Rp. 29.260.000	0,67
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi (kali)	96	118	Rp. 21.753.241.900	Rp. 7.896.660.100	0,64
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	66	45	Rp. 18.129.982.900	Rp. 6.336.429.350	0,62
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	120	0	Rp. 0	Rp. 0	0
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	5	5	Rp. 524.206.500	Rp. 196.360.500	0,40
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	24	19	Rp. 3.099.052.500	Rp. 1.363.870.250	0,80

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Program dan Kegiatan

3.1.1 Program-Program.

Program yang telah direncanakan merupakan program prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). dan hal itu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja serta pagu yang dianggarkan. Untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk semua program prioritas tersebut. penentuan kegiatan pada saat itu didasarkan atas dasar strategi dan kebijakan jangka menengah OPD sebagaiman tercantum dalam rencana strategis. Kegiatan – kegiatan tersebut mencerminkan pada tugas pokok dan fungsi pengguna layanan yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja yang disertai dengan anggaran yang besarnya sesuai regulaasi pemerintah daerah.

Setiap program prioritas mempunyai indikator keluaran yang merupakan indikator kinerja setiap program yang berisi outcome program. outcome adalah hasil yang diperoleh para penerima layanan yang mencerminkan berfungsinya output dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Sedangkan penerima manfaat dari layanan disebut kelompok sasaran. Ini merupakan ikon penting dalam lingkaran birokrasi pemerintahan daerah, utamanya dalam unsur yang menangani pelayanan kepada masyarakat (DPRD). Oleh karena itu kegiatan yang dipilih setiap program harus menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan pokok dan dan fungsinya.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Renja adalah 2 program dan 16 kegiatan yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD

3.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada perubahan renja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel terlampir. (Lampiran).

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Sekretariat DPRD Tulungagung

LAMPIRAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/ Berlaku rang (10-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*11=10-9*
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					Tulungagung	Tulungagung	Rp. 72.128.559.670	Rp. 88.774.022.528	Rp. 16.645.471.658
	SEKRETARIAT DPRD					Tulungagung	Tulungagung	Rp. 72.128.559.670	Rp. 88.774.022.528	Rp. 16.645.471.658
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	100	100	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 42.095.767.470	Rp. 44.083.753.928	Rp. 4.209.576.745
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	Dokumen	14	14	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 256.878.600	Rp. 275.001.000	Rp. 18.122.400
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 252.743.600	Rp. 275.001.000	Rp. 22.257.400
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	0	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 4.135.000	Rp. 0	Rp. -4.135.000
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	26	26	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 5.994.007.817	Rp. 6.962.691.575	Rp. 968.683.758
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	45	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 5.624.954.817	Rp. 6.512.776.575	Rp. 887.821.758
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 309.375.000	Rp. 445.875.000	Rp. 136.500.000
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	13	13	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 31.608.000	Rp. 2.600.000	Rp. -29.008.000
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 0	Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen	5	5	Tulungagung	Tulungagung	RP. **474.848.000**	Rp. 374.472.000	Rp. -100.376.000
4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	100	0	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 37.500.000	Rp. 47.994.000	Rp. 10.494.000
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	45	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 132.960.000	Rp. 11.876.000	Rp. -121.084.000
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	45	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 304.388.000	Rp. 314.602.000	Rp. 10.214.000
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	%	100	100	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **1.069.151.200**	Rp. 1.130.571.900	Rp. 61.420.700
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 15.687.000	Rp. 26.210.000	Rp. 10.523.000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 280.307.900	Rp. 420.582.900	Rp. 140.275.000
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 66.205.300	Rp. 59.648.000	Rp. -6.557.300
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 170.768.000	Rp. 181.688.000	Rp. 10.920.000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	160	160	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 52.000.000	Rp. 5.200.000	Rp. -46.800.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	48	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 193.500.000	Rp. 204.610.000	Rp. 11.110.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 290.683.000	Rp. 232.633.000	Rp. -58.050.000
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang yang diperoleh	Unit	5	5	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **69.180.000**	Rp. 8.040.000	Rp. -61.140.000

4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	4	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 14.560.000	Rp. 3.640.000	Rp. -10.920.000
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 54.620.000	Rp. 4.400.000	Rp. -50.220.000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang tersedia	Dokumen	36	36	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **1.083.821.600**	Rp. 1.069.801.600	Rp. -14.020.000
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 306.600.000	Rp. 306.600.000	Rp. 0
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 339.980.000	Rp. 325.960.000	Rp. -14.020.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 437.241.600	Rp. 437.241.600	Rp. 0
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **651.638.000**	Rp. 983.826.000	Rp. 332.188.000
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 242.550.000	Rp. 258.210.000	Rp. 15.660.000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 293.660.000	Rp. 537.800.000	Rp. 244.140.000
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	60	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 34.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. -5.000.000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (	Unit	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 81.428.000	Rp. 158.816.000	Rp. 77.388.000
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD	Dokumen	14	14	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **31.965.239.453**	Rp. 32.401.407.453	Rp. 436.168.000
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	50	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 31.644.671.453	Rp. 31.644.671.453	Rp. 0
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	5	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 252.500.000	Rp. 644.500.000	Rp. 392.000.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 88.068.000	Rp. 112.236.000	Rp. 44.168.000
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD	%	100	100	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **531.002.800**	Rp. 877.942.400	Rp. 346.939.600
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 45.407.800	Rp. 71.326.400	Rp. 25.918.600
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	6	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 15.620.000	Rp. 21.080.000	Rp. 5.460.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	96	96	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 214.904.000	Rp. 508.872.000	Rp. 293.788.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 255.071.000	Rp. 276.864.000	Rp. 21.793.000
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			81	81	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **30.032.783.200**	Rp. 44.690.268.600	Rp. 3.003.278.320
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah rekomendasi Perda	Dokumen	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **3.822.855.100**	Rp. 5.477.979.800	Rp. 1.655.124.700
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	3	3	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 11.500.000	Rp. 792.778.000	Rp. 781.278.000
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 1.720.366.500	Rp. 2.925.862.300	Rp. 1.205.495.800
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 433.876.000	Rp. 20.400.000	Rp. -413.476.000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	20	20	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 1.256.907.600	Rp. 1.730.314.500	Rp. 473.406.900
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 400.205.000	Rp. 8.625.000	Rp. -391.580.000
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Perda Persetujuan APBD	Perda	3	3	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **621.324.500**	Rp. 1.204.848.500	Rp. 583.524.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 501.531.000	Rp. 410.955.000	Rp. -90.576.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 16.980.500	Rp. 16.980.500	Rp. 0
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 34.271.000	Rp. 339.450.000	Rp. 305.179.000

4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 34.271.000	Rp. 403.192.000	Rp. 388.921.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 34.271.000	Rp. 34.271.000	Rp. 0
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintah	kali	96	96	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **464.984.000**	Rp. 253.164.000	Rp. -211.820.000
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24	24	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 107.952.000	Rp. 49.352.000	Rp. -58.600.000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 50.310.000	Rp. 49.370.000	Rp. -940.000
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24	24	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 100.620.000	Rp. 50.330.000	Rp. -50.290.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24	24	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 115.284.000	Rp. 56.534.000	Rp. -58.750.000
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 50.310.000	Rp. 7.070.000	Rp. -43.240.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 40.508.000	Rp. 40.508.000	Rp. 0
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	kali	23	23	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **3.106.123.000**	Rp. 3.070.403.000	Rp. -35.720.000
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	22	22	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 1.807.662.000	Rp. 1.807.662.000	Rp. 0
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	3	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 108.604.800	Rp. 108.604.800	Rp. 0
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 253.411.200	Rp. 253.411.200	Rp. 0
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 95.000.000	Rp. 234.280.000	Rp. 139.280.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 9.775.000	Rp. 9.775.000	Rp. 0
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	6900	6900	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 831.670.000	Rp. 656.670.000	Rp. -175.000.000
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terserap	aspirasi	-	750	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **1.417.393.700**	Rp. 2.647.275.700	Rp. 1.229.882.000
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2	2	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 47.291.400	Rp. 168.578.400	Rp. 121.287.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	150	150	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 1.370.102.300	Rp. 2.478.697.300	Rp. 1.108.595.000
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase aduan yang ditangani badan kehormatan	%	100	100	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **405.880.800**	Rp. 230.427.800	Rp. -175.453.000
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 188.747.000	Rp. 55.501.000	Rp. -133.246.000
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	3	3	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 217.133.800	Rp. 174.926.800	Rp. -42.207.000
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi	kali	96	96	Tulungagung	Tulungagung	Rp. **20.194.222.100**	Rp. 31.806.169.800	Rp. 11.611.947.700
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	66	66	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 17.030.094.600	Rp. 25.681.280.300	Rp. 8.651.185.700
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	120	0	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 37.440.000	Rp. 0	Rp. -37.440.000
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	5	5	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 437.443.500	Rp. 1.012.073.200	Rp. 574.629.700
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	24	24	Tulungagung	Tulungagung	Rp. 2.689.244.000	Rp. 5.112.816.300	Rp. 2.423.572.300

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik dari aspek kebijakan nasional maupun kondisi faktual di daerah. Penyusunan perubahan Renja ini tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungangung 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan isu strategis aktual.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung stabilitas politik, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan ketahanan sosial dan ideologi di tengah masyarakat. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi

Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Segenap aparatur dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, para Pemangku Kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Realisasi program kegiatan hendaknya dengan tetap memperhatikan hasil koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta petunjuk dari Bupati Tulungagung.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan Sekretariat DPRD yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TULUNGAGUNG



SUDARMAJI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710110 199101 1 002

BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA) 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulungagung





SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Perubahan Renja Bappeda Tulungagung Tahun 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Bappeda Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif dan berorientasi kinerja untuk mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Tulungagung. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan kami mengharapkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk periode 2025 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tulungagung, 08 Juli 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. JOHANES BAGUS KUNCORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690503 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA 25
BAB IV PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung s.d Triwulan I Tahun 2024 8

Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Tulungagung 27

BAB I
PENDAHULUAN

PERUBAHAN RENJA 2025 BAPPEDA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Dokumen Perubahan Renja PD tersebut merupakan bentuk penjabaran dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Selain itu, dokumen perubahan Renja juga digunakan untuk mengakomodasi adanya perkembangan isu-isu perencanaan pembangunan daerah, baik yang bersifat faktual, maupun aktual. Khusus untuk Perubahan Renja Tahun 2025 ini, juga digunakan untuk merespon fase transisi dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2024-2026 dengan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

Secara regulasi, Perubahan Renja diatur pada Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Perubahan renja Bappeda Tahun 2025 ini dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancanagan; (3) Rancangan Akhir; (4) Penetapan Perubahan Renja.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tulungagung.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 17);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kabupaten Tulungagung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Bappeda Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

PERUBAHAN RENJA 2025 BAPPEDA

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Penyusunan perubahan rencana program/kegiatan Tahun 2025 memperhatikan rencana capaian kinerja Tahun 2025, pencapaian target Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Bappeda Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, salah satu tugasnya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan capaian Renstra Bappeda Kabupaten Tulungagung sampai dengan akhir Triwulan I:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung
s.d Triwulan I Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
5				**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**01**			**Perencanaan**				**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
5	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)**	**100**	**0**	**100**	**13.547.247.221**	**0**	**2.618.244.122**	**0**	**19,32**
5	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja (Dokumen)	21	2	7	1.086.201.600	2	304.376.500	28,57	28,02
5	1	1	2.01 .001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	0	2	953.311.300	0	296.452.500	0	31,09
5	1	1	2.01 .006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	144	13	72	132.890.300	13	7.924.000	10,08	5,96

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
					Kinerja SKPD (Laporan)								
5	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (Dokumen)	186	16	62	10.011.747.021	16	2.054.803.179	25,80	20,52
5	1	1	2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	63	63	9.605.263.821	63	2.050.237.431	100	21,34
5	1	1	2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	36	3	12	406.483.200	3	4.565.748	25	1,12
5	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	30	3	10	199.523.000	3	432.600	30	0,21
5	1	1	2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	6	1	2	136.000.000	1	0	50	0
5	1	1	2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	9	0	3	63.523.000	0	432.600	0	0,68
5	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (Persen)	100	25	100	1.019.865.800	25	154.387.115	25	15,13

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
5	1	1	2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	3	0	1	32.408.400	0	0	0	0
5	1	1	2.06002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	3	9	1	237.518.500	9	49.446.790	900	20,81
5	1	1	2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	3	0	1	70.993.500	0	3.075.000	0	4,33
5	1	1	2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3	1	1	59.807.500	1	629.400	100	1,05
5	1	1	2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	72	15	24	619.137.900	15	101.235.925	62,5	16,35
5	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diperoleh (Unit)	75	0	25	190.489.800	0	0	0	0
5	1	1	2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Paket)	30	0	10	52.000.000	0	0	0	0
5	1	1	2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	45	0	15	138.489.800	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
					bangunan lainnya yang disediakan (Unit)								
5	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (dokumen)	3	0	1	579.200.000	0	69.834.757	0	12,05
5	1	1	2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	36	3	12	333.200.000	3	69.834.757	25	20,95
5	1	1	2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	36	0	12	246.000.000	0	0	0	0
5	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (Persen)	100	16	100	460.220.000	16	33.977.371	16	7,38
5	1	1	2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	175	5	54	185.120.000	5	25.622.371	9,25	13,84
5	1	1	2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (Unit)	120	9	40	53.750.000	9	6.660.000	22,5	12,39
5	1	1	2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	0	1	200.000.000	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
5	1	1	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	78		26	21.350.000	6	1.695.000		7,93
5	**01**	**02**		**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD**	**90**	**99**	**92**	**1.163.081.500**	**99**	**151.424.700**	**107,6**	**13,01**
					Persentase Ketercapaian Program RPD	**90**	**0**	**92**		**0**		**0**	
5	01	02	2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan waktu aktivitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi (Persen)	100	100	100	926.481.500	100	143.957.200	100	15,54
5	1	2	2.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	4	2	2	40.874.000	2	17.582.000	100	43,01
5	1	2	2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	1	1	34.124.500	1	16.560.000	100	48,52
5	1	2	2.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	4	1	2	365.000.000	1	49.712.200	50	13,62
5	1	2	2.01.006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	813	586	271	7.570.000	586	7.500.000	216,23	99,07
5	1	2	2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	0	4	478.913.000	0	52.603.000	0	10,98

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
				Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)								
5	01	02	2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah (Persen)	100	0	100	50.000.000	0	0	0	0
5	1	2	2.02.003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	3	0	2	50.000.000	0	0	0	0
5	01	02	2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Persen)	90	20	90	186.600.000	20	7.467.500	22,22	4,001
5	1	2	2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	33	2	10	186.600.000	2	7.467.500	20	4,001
5	**01**	**03**		**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD (Persen)**	**96,67**	**0**	**94,83**	**3.514.810.500**	**0**		**0**	
5	01	03	2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan	100	0	100	1.134.000.000	0		0	25,15

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
					Pembangunan Manusia (Persen)								
5	1	3	2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	186	0	58	385.000.000	0	232.038.400	0	60,27
5	1	3	2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	36	3	12	149.000.000	3	487.500	25	0,33
5	1	3	2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42	0	14	200.000.000	0	17.793.100	0	8,89
5	1	3	2.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	36	3	12	400.000.000	3	34.901.100	25	8,72
5	01	03	2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup	95	0	92,5	1.180.151.000	0	202.832.860	0	24,55

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
					Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)								
5	1	3	2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	0	14	181.594.000	0	9.664.360	0	53,22
5	1	3	2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	36	3	12	457.341.000	3	30.173.500	25	6,59
5	1	3	2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	24	0	8	209.096.500	0	2.560.000	0	1,22
5	1	3	2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	36	3	12	332.119.500	3	160.435.000	25	48,30
5	01	03	2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang	95	0	92	1.200.659.500	0	201.102.000	0	16,75

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
								Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	
					Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)								
5	1	3	2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	18	0	6	440.537.300	0	120.561.000	0	27,36
5	1	3	2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	36	3	12	167.404.100	3	4.406.500	25	2,63
5	1	3	2.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12	0	6	138.396.000	0	26.872.500	0	19,42
5	01	03	2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	36	3	12	454.322.100	3	49.262.000	25	10,84

Penjelasan hasil evaluasi terhadap capaian Renja Bappeda hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki indikator "Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)" yang merupakan perbandingan kinerja antara jumlah kegiatan rutin yang target kinerjanya tercapai dibagi jumlah seluruh kegiatan rutin lalu dikali 100%. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen dimana sampai dengan triwulan I realisasinya masih 0 persen sebab belum ada kegiatan pada program penunjang yang capaiannya ≥100 persen. Sementara itu dari kinerja keuangan sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dari pagu APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp 13.547.247.221 telah terealisasi Rp 2.618.244.122 (12,32%). Program ini terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas sub kegiatan). Adapun evaluasi kegiatan dalam program ini sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I tercapai 2 dokumen dari target 7 dokumen (capaian 28,57%). Adapun dokumen tersebut antara lain: 1) Dokumen DPA APBD Murni Bappeda; 2) LKJIP Bappeda Tahun 2024. Sementara itu realisasi anggarannya sebesar Rp 304.376.500 (28.02%). Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada kegiatan ini capaiannya masih 0% sebab Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 belum ditetapkan. Sementara itu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah cukup baik yaitu 10,08%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I dari target 62 dokumen telah terealisasi 16 dokumen (capaian 20,52%). Secara umum tidak ada kendala dalam pencapaian kinerja target sub

kegiatan maupun kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah namun dari segi realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN realisasi anggarannya masih dibawah 1,12% yang mana yang sudah terealisasi baru jasa kerja untuk triwulan I, sementara pencarian Jasa Tenaga Ahli akan dilaksanakan Bulan April kemudian pencairan honor Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) direncanakan Bulan Juli.

c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I dari target 10 dokumen telah terealisasi 1 dokumen (capaian 10%), 9 dokumen lainnya sudah dalam *on the track* dan diperkirakan dapat tercapai di akhir tahun. Sedangkan capaian realisasi anggaran sampai Triwulan I adalah Rp 432.600 (capaian 1,21%). Hal tersebut dikarenakan pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pengadaan direncanakan mulai triwulan II namun pada tahapan pergeseran APBD anggaran sub ini dilakukan efisiensi sehingga pagunya menjadi Rp 0,-. Sementara itu pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasinya masih 1,21% sebab belum ada pegawai yang dibiayai mengikuti pendidikan dan pelatihan pada sub kegiatan ini. Direncanakan akan direalisasikan mulai triwulan II menunggu jadwal penyelenggara diklat.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 25%. Sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp 154.387.115 (15,13%). Pada kegiatan ini semua sub kegiatannya tingkat realisasi kinerjanya sudah tercapai bahkan melampaui kecuali sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang mana masih ada ada stok dari pengadaan tahun sebelumnya sehingga belum ada pengadaan di triwulan I.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0%. Kegiatan ini pada pergeseran APBD Murni 2025 merupakan salah satu kegiatan yang porsi anggarannya banyak yang diefisiensi dimana dari semula pada APBD murni sebesar Rp 190.489.800,- menjadi Rp 10.500.000,- sehingga pada perubahan Renja tahun 2025 ini perlu dilakukan penyesuaian target.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0%. Sementara itu capaian realisasi anggarannya sebesar Rp 69.834.757 (12,05%). Secara umum tidak ada kendala dalam implementasi kegiatan ini, target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan juga dapat dicapai dengan baik atau setidaknya masih *on the right track.* Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi kinerja dan anggarannya sampai triwulan I masih 0 sebab pelaksanaannya sudah dilakukan tapi cairnya Bulan April sehingga realisasinya masuk di triwulan II.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 16%, sedangkan anggarannya telah terealisasi sebesar Rp 33.977.371,- (7,38%). Pada kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan dimana 3 sub kegiatan sudah *on the track* capaian kinerja maupun keuangannya namun 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya capaian kinerja maupun anggarannya masih 0%, pelaksanaan kegiatan ini direncanakan mulai triwulan III.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

- Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD dimana sampai bulan Mei realisasi kinerjanya 99 (capaian 107,6%). Capaian ini masih

dapat berubah sebab di triwulan I penyusunan dokumen RKPD-Renja Perangkat Daerah masih tahap rancangan awal.

- Persentase Ketercapaian Program RPD realisasinya 0 (capaian 0%). Capaiannya masih nol sebab indikator program perangkat daerah bersifat *outcome* dan memiliki interval perhitungan semester atau tahunan sehingga capaian program sampai triwulan I belum banyak yang bisa dihitung maupun terealisasi.

Dari segi realisasi anggaran, dari pagu Rp 1.163.081.500 saat ini telah terealisasi sebesar Rp 151.424.700 (13,01%). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Adapun evaluasi kegiatan dalam program ini sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 100%, sementara realisasi anggarannya dari pagu anggaran Rp 926.481.500 telah terealisasi sebesar Rp 143.957.200 (15,54%). Sebagian besar sub kegiatan pada kegiatan ini telah tercapai bahkan melampaui target. Aktifitas yang sudah terlaksana pada kegiatan ini antara lain: Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 dan RPJMD 2025, Forum Lintas Perangkat Daerah membahas Rancangan Awal Renstra 2025-2029, dan Musrenbang RKPD 2026. Sementara itu, 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota realisasinya masih 0 sebab Dokumen RPJMD 2025-2029, Perubahan RKPD 2025, RKPD 2026 masih dalam tahap penyusunan (belum ditetapkan) dan Rancangan Awal RKPD 2027 masih belum mulai penyusunan.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja dan anggaran kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0% (capaian 0%). Hal ini dikarenakan beberapa aktifitas penting yang membutuhkan anggaran pada kegiatan ini yaitu Forum SDI masih proses berjalan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyusunan Profil Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota dimana sampai bulan Mei ini belum ada realisasi karena buku profil diperkirakan selesai disusun di akhir tahun.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 20% (capaian 22,22%). Hal ini dikarenakan beberapa dokumen Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan sebagian besar masih proses ataupun belum waktunya penyusunan di triwulan I. Sementara itu capaian realisasi anggaran dari total anggaran Rp 186.600.000 telah terealisasi sebesar Rp 7.467.500 (4.001%). Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dimana dari target yang ditetapkan sebanyak 10 dokumen telah terealisasi 2 dokumen (capaian 20 %).

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memiliki indikator Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD (Persen) dengan target 94,83%. Capaian kinerja indikator program ini, sampai triwulan I 2024 adalah 0%. Hal ini dikarenakan pengukuran indikatornya baru dapat dilakukan pada triwulan ke III pada saat RKPD dan KUA-PPAS tahun berkenan sudah ditetapkan. Adapun pagu program ini adalah sebesar Rp 3.514.810.500, dan telah terealisasi sebesar Rp 776.134.200 (22,08%). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Adapun evaluasi kegiatan dalam program ini sebagai berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0% dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan komposit dari indikator program, pengukuran indikatornya baru dapat dilakukan pada triwulan ke III pada saat RKPD dan KUA-PPAS tahun berkenan sudah ditetapkan. Sementara

itu capaian realisasi anggaran sampai Triwulan I dari sebesar Rp 285.220.000 (25,15%). Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan dimana 2 (dua) sub kegiatan terkait Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan capaian kinerjanya masih *on the track*. Sementara itu, dua sub kegiatan terkait koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana definisi indikator kinerjanya merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya (Renja dan P-Renja) realisasinya masih 0 sebab saat ini dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut masih proses penyusunan.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0% dari target yang ditetapkan 92,5%. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan komposit dari indikator program, pengukuran indikatornya baru dapat dilakukan pada triwulan ke III pada saat RKPD dan KUA-PPAS tahun berkenan sudah ditetapkan. Sementara itu capaian realisasi anggarannya sebesar Rp 289.812.100 (24,55%). Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan dimana 2 (dua) sub kegiatan terkait Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan capaian kinerjanya masih *on the track*. Sementara itu, dua sub kegiatan terkait koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana definisi indikator kinerjanya merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya (Renja dan P-Renja) realisasinya masih 0 sebab saat ini dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut masih proses penyusunan.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 0% dari target yang ditetapkan 92%. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan komposit dari indikator program, pengukuran indikatornya baru dapat dilakukan pada triwulan ke III pada saat RKPD dan KUA-PPAS tahun berkenan sudah ditetapkan. Sementara

itu capaian realisasi anggarannya adalah Rp 201.102.000 (16,75%). Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan dimana 2 (dua) sub kegiatan terkait Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan capaian kinerjanya masih *on the track*. Sementara itu, dua sub kegiatan terkait koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana definisi indikator kinerjanya merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya (Renja dan P-Renja) realisasinya masih 0 sebab saat ini dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut masih proses penyusunan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENJA 2025 BAPPEDA

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini mencakup hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maupun menunjang pencapaian kinerja terwujudnya tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perencanaan kebutuhan anggaran Bappeda Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2025 semula telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp 16.880.984.835. Selanjutnya, dalam proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2025, alokasi anggaran untuk Bappeda mengalami peningkatan menjadi Rp 18.225.139.221, menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan dan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, diminta untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi terhadap belanja yang bersifat nonprioritas dan kurang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pencapaian sasaran strategis daerah dan perangkat daerah.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bappeda Kabupaten Tulungagung melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.636.375.400 pada tahapan Pergeseran ke-4 APBD Tahun 2025. Efisiensi ini dilakukan dengan

pendekatan selektif dan strategis terhadap pos-pos belanja yang dinilai masih dapat ditunda atau disesuaikan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bappeda.Di sisi lain, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat sejumlah kebutuhan anggaran tambahan yang belum terakomodasi, khususnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas dan pemenuhan target kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, pada Perubahan Renja Tahun 2025, Bappeda mengajukan penyesuaian anggaran. Setelah melalui proses penelaahan kebutuhan, total anggaran Bappeda dalam dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ditetapkan menjadi Rp 16.275.627.321.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini terdiri dari 3 (tiga) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 2 (dua) program urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang urusan dan 6 (enam) kegiatan urusan perencanaan. Selanjutnya dari kegiatan-kegiatan tersebut dirinci ke dalam 38 sub kegiatan yang terbagi dalam 19 sub kegiatan penunjang urusan dan 19 sub kegiatan urusan perencanaan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan disertai target kinerja dan pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025
Bappeda Kabupaten Tulungagung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5				**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**01**			**Perencanaan**									
5	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**12.651.984.835**	**12.215.919.721**	**(436.065.114)**
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	Dokumen	7	9	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	869.168.800	949.108.300	79.939.500
5	01	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	707.158.200	881.066.300	173.908.100
5	01	01	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	72	72	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	162.010.600	68.042.000	(93.968.600)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kelurahan			
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	62	62	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.245.464.835	9.638.747.021	393.282.186
5	01	01	2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	63	63	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.871.381.635	9.232.263.821	360.882.186
5	01	01	2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	374.083.200	406.483.200	32.400.000
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.048.700	35.752.600	(81.296.100)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000	0,00	(40.000.000)
5	01	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.048.700	35.752.600	(41.296.100)
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	Persen	100	100	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.222.282.700	609.881.800	(612.400.900)
5	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.408.400	22.673.600	(9.734.800)
5	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.798.500	172.258.900	(116.539.600)
5	01	01	2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	70.993.500	49.678.500	(21.315.000)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kelurahan			
5	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.807.500	44.301.100	(15.506.400)
5	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	35	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	770.274.800	320.969.700	(449.305.100)
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diperoleh	Unit	25	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.599.800	10.500.000	(148.099.800)
5	01	01	2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	10	0	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000	0,00	(52.000.000)
5	01	01	2.07.00011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.599.800	10.500.000	(96.099.800)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	579.200.000	564.200.000	(15.000.000)
5	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333.200.000	318.200.000	(15.000.000)
5	01	01	2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246.000.000	246.000.000	0
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	100	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460.220.000	407.730.000	(52.490.000)
5	01	01	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	54	54	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.120.000	185.120.000	0
5	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	40	40	Kab. Tulungagung, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	53.750.000	37.360.000	(16.390.000)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kelurahan			
5	01	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000	170.000.000	(30.000.000)
5	01	01	2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	26	25	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.350.000	15.250.000	(6.100.000)
5	**01**	**02**		**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentarse Kesesuaian Program RKPD dengan RPD**	**Persen**	**92**	**99,31**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**1.000.000.000**	**1.243.613.000**	**573.700.000**
					Persentase Ketercapaian Program RPD	**Persen**	**92**	**92**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Aktivitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	Kab. Tulungagung, Semua Kecamata	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850.000.000	869.003.000	19.003.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
									n, Semua Kelurahan				
5	01	02	2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.874.000	17.647.000	(23.227.000)
5	01	02	2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.124.500	36.542.000	2.417.500
5	01	02	2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352.534.000	172.000.000	(180.534.000)
5	01	02	2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	271	271	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.570.000	7.570.000	0
5	01	02	2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	414.897.500	635.244.000	220.346.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentarse Ketersediaan Dokumen Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	100	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	34.910.000	(15.090.000)
5	01	02	2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	2	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	34.910.000	(15.090.000)
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentarse Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	90	90	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	339.700.000	239.700.000
5	01	02	2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	10	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	339.700.000	239.700.000
5	**01**	**03**		**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentarse keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD**	**Persen**	**94,83**	**99,82**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**3.229.000.000**	**2.816.094.600**	**1.433.975.000**
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentarse keselarasan Program	Persen	100	100	Kab. Tulungagung,	Kab. Tulungagung, Semua	985.000.000	1.033.108.300	48.108.300

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
				Pembangunan Manusia	KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kecamatan, Semua Kelurahan			
5	01	03	2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dokumen	58	58	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285.000.000	260.000.000	(25.000.000)
5	01	03	2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	297.200.000	197.200.000
5	01	03	2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	14	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000	207.000.000	7.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	01	03	2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000	268.908.300	(131.091.700)
5	01	03	2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentarse keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	92,5	100	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.330.000.000	826.939.000	(503.061.000)
5	01	03	2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	14	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.815.000	129.698.400	(82.116.600)
5	01	03	2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	517.500.000	296.068.100	(221.431.900)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
					pada Bidang Perekonomian								
5	01	03	2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	226.350.000	139.956.000	(86.394.000)
5	01	03	2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	374.335.000	261.216.500	(113.118.500)
5	01	03	2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	92	99	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	914.000.000	956.047.300	42.047.300
5	01	03	2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	339.000.000	299.784.300	(39.215.700)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	01	03	2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000	101.908.400	(98.091.600)
5	01	03	2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	272.997.300	122.997.300
5	01	03	2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	12	12	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.000.000	281.357.300	56.357.300
											16.880.984.835	**16.275.627.321**	**(605.357.514)**

BAB IV
PENUTUP

PERUBAHAN RENJA 2025 BAPPEDA

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Harapnannya, terwujud efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 ini merupakan acuan kerja bagi seluruh bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Perubahan Rencana Kerja Bappeda ini juga menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam rangka Menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk mendukung pencapaian target dan melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan dokumen penganggaran wajib berpedoman pada Perubahan Renja Tahun 2025;
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Rencana Kerja maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, hasil program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 ini secara berkala;

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun 2025. Seluruh perubahan yang terjadi dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir Tahun 2025.

Dengan perubahan Renja ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.

Tulungagung, 08 Juli 2025
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. JOHANES BAGUS KUNCORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690503 198903 1 005

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENJA 2025 BAPPEDA

Tabel A.1
Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
yang Mengalami Penyesuaian Target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Target P-Renja 2025	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 (Dokumen)	9 (Dokumen)	-
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 (Dokumen)	5 (Dokumen)	-
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 (Paket)	0 (Paket)	Efisiensi Anggaran
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 (Paket)	2 (Paket)	Efisiensi Anggaran
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 (Paket)	4 (Paket)	Disesuaikan berdasarkan realisasi sampai bulan Mei 2025
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 (Paket)	15 (Paket)	Disesuaikan berdasarkan realisasi sampai bulan Mei 2025
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 (Paket)	4 (Paket)	Disesuaikan berdasarkan realisasi sampai bulan Mei 2025
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 (Paket)	4 (Paket)	Disesuaikan berdasarkan realisasi sampai bulan Mei 2025
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 (Laporan)	35 (Laporan)	Disesuaikan berdasarkan realisasi sampai bulan Mei 2025
10.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 (Unit)	2 (Unit)	Efisiensi Anggaran
11.	Pengadaan Mebel	10 (Unit)	0 Unit)	Efisiensi Anggaran
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 (Unit)	2 (Unit)	Efisiensi Anggaran
13.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	92 (Persen)	99,31 (Persen)	Disesuaikan berdasarkan realisasi tahun 2024
14.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	94,83 (Persen)	99,82 (Persen)	Disesuaikan berdasarkan realisasi tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Target P-Renja 2025	Keterangan
15.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92,5 (Persen)	100 (Persen)	Disesuaikan berdasarkan realisasi tahun 2024
16.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92 (Persen)	99 (Persen)	Disesuaikan berdasarkan realisasi tahun 2024

Tabel A.2
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Tujuan 1)	Persentase Ketercapaian Sasaran RPD	Persen	Perbandingan jumlah sasaran RPD yang targetnya tercapai dengan jumlah seluruh sasaran RPD. Sasaran RPD dinyatakan targetnya tercapai jika: 1.Jika indikator sasaran hanya 1 maka sasaran dinyatakan tercapai apabila capaian indikator tersebut lebih besar atau sama dengan 100%. 2.Jika indikator sasaran lebih dari 1 maka sasaran dinyatakan tercapai apabila semua capaian indikator lebih besar atau sama dengan 100%.	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ yang\ tercapai\ dalam\ RPD}{Jumlah\ Seluruh\ Sasaran\ RPD} \times 100\ \%$
Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Tujuan 2)	Indeks Kepuasaan Layanan Kesekretariatan	Nilai Indeks	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari sekretariat perangkat daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat penerima layanan Perangkat Daerah (survei IKM). Metode pengukuran indeks berpedoman dengan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang SKM
Indikator Sasaran 2.1	Nilai Evaluasi SAKIP PD	Nilai	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari sekretariat perangkat daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat penerima layanan Perangkat Daerah (survei IKM). Metode pengukuran indeks berpedoman dengan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang SKM
Indikator Sasaran 2.2	Indeks Profesionalisme ASN PD	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (dari BKPSDM)

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
			jabatannya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara). Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan empat dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.	
Indikator Sasaran 2.3	Persentase Ketepatan Waktu Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset	Persen	Jumlah laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu (dalam 1 tahun) dibagi dengan jumlah total laporan keuangan dan aset yang disusun (dalam 1 tahun), lalu dikalikan 100%. Laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan dan aset yang disusun setiap bulan.	$\frac{Jumlah\ Laporan\ Keuangan\ dan\ Aset\ yang\ disusun\ tepat\ waktu\ (1\ tahun)}{Jumlah\ Laporan\ Keuangan\ dan\ Aset\ yang\ disusun\ (1\ tahun)} \times 100\ \%$
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Cukup jelas	Jumlah kegiatan rutin yang target kinerjanya tercapai dibagi jumlah seluruh kegiatan rutin lalu dikali 100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja tersebut antara lain : 1. Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja termasuk dokumen perubahannya) 2. Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja (LKJIP=1 dokumen) 3. Dokumen Penganggaran (DPA murni dan perubahan) = 2 dokumen 4. Dokumen laporan SKM (2 dokumen)	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen perencanaan PD yang dimaksud adalah Renja dan Renstra termasuk perubahannya.	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD antara lain : 1. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (12 laporan) 2. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Tribulanan= 4 laporan) 3. Laporan Capaian Kinerja RPJMD (Tribulanan=4 laporan) 4. Laporan Rekap Mutasi (persediaan) 12 laporan (per bulan) 5. Laporan Stok Opname (persediaan) 1 laporan (per tahun) 6. Laporan In Out (persediaan) 1 laporan (per tahun) 7. Laporan Rekap Mutasi Neraca (persediaan) 1 laporan (per tahun) 8. Laporan daftar pengadaan (persediaan) 12 laporan (per bulan) 9. Laporan daftar pengeluaran (persediaan) 12 laporan (per bulan) 10. Laporan pengadaan (aset) Tahun n 1 laporan (per tahun) 11. Laporan Rekapitulasi Penyusutan 1 laporan (Tahunan) 12. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) = 2 laporan	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
			13. Laporan pelaksanaan survei indeks kepuasan layanan kesekretariatan (1 laporan) 14. Evaluasi Internal Bappeda (Tribulanan=4 laporan), 15. Evaluasi Renja Bappeda (Tribulanan=4 laporan)	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	Dokumen administrasi keuangan tersebut antara lain: - SPJ BP, BPP Bidang dan Sekretariat (12 bulan x 5 bidang) - Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Audited (2 dokumen)	Cukup jelas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	cukup jelas (target di sub ini masih berupa estimasi, sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	Cukup jelas
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	Dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN antara lain dokumen Honorarium Jasa Kerja, PJPK, Jasa Kerja, Jasa Konsultansi (per bulan)	Cukup jelas
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen yang dihasilkan di sub kegiatan. Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dimaksud adalah (1) SKP; (**2) Karis/Karsu**, Karpeg; (3) Pangkat; (4) Gaji Berkala; (5) Anjab; (6) ABK; (7) Surat Ijin Cuti; **(8) SK Mutasi**; (9) SK Jabatan; (10) Penetapan Angka Kredit; (11) STPL Diklat/Bimtek; (12) Presensi Online; **(13) Taspen** *yang di bold tidak setiap tahun ada	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan, Korpri, Pakaian khusus hari-hari tertentu	Cukup jelas
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan maupun pelatihan baik formal maupun non formal (bimtek, kursus, workshop) yang dibiayai oleh sub kegiatan ini	Cukup jelas
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	Persen	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	Paket yang dimaksud adalah paket pembelian (1 kali belanja dengan berbagai macam item dan jenis komponen instalasi listrik dihitung 1 paket)	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Paket yang dimaksud adalah paket pembelian (1 kali belanja dengan berbagai macam item dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor dihitung 1 paket)	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	Paket yang dimaksud adalah paket pembelian (1 kali belanja dengan berbagai macam item dan jenis peralatan rumah tangga dihitung 1 paket)	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	Paket yang dimaksud adalah paket pembelian (1 kali belanja dengan berbagai macam item dan jenis barang cetakan dan penggandaan dihitung 1 paket)	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyelenggaraa	Jumlah laporan penyelenggaraan	Laporan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang diselengarakan ke	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		dalam dan Luar Daerah (target di sub ini masih berupa estimasi, sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang tersedia	Unit	Akumulasi jumlah barang yang dibeli pada sub kegiatan	Cukup jelas
Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	Cukup jelas (target di sub ini masih berupa estimasi, sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	Cukup jelas
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan misalnya untuk membeli AC, Laptop, (target di sub ini masih berupa estimasi, sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	Cukup jelas
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	Dokumen	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	Laporan	Digunakan untuk jasa sewa peralatan dan perlengkapan	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan		kantor (bunga, kendaraan dll) - semua jasa-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	Cukup jelas	jumlah barang yang terpelihara/ jumlah target barang yang dipelihara
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	Untuk pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer (target di sub ini masih berupa estimasi , sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	Cukup jelas
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Untuk pemeliharaan AC. (target di sub ini masih berupa estimasi , sesuaikan jumlah target dengan rincian belanja saat menyusun RKA)	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD	Persen	Penilaian kesesuaian antara program RKPD dengan RPD dilakukan dengan cara membandingkan jumlah program RKPD pada tahun berkenaan yang memiliki kesesuaian dengan program RPD pada tahun berkenaan. Kesesuaian antara RKPD dan RPD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan yang tercantum dalam RKPD tahun berkenaan mempunyai kesesuaian dengan nomenklatur program dalam RPD tahun berkenaan. Tahun berkenaan adalah tahun yang dievaluasi, sementara untuk program yang dievaluasi adalah seluruh program baik yang sesuai maupun tidak sesuai.	$\frac{Jumlah\ Program\ RKPD\ dengan\ RPD\ pada\ tahun\ berkenaan\ yang\ Memiliki\ kesesuaian\ dengan\ RPD\ Kesesuaian\ dengan\ RPD}{Jumlah\ \ Seluruh\ program\ dalam\ RPD\ pada\ tahun\ berkenaan} x\ 100\%$
	Persentase Ketercapaian Program RPD	Persen	Pengukuran ketercapaian program RPD dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja program di akhir tahun berkenaan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPD tahun berkenaan. Ketercapaian program RPD yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah program yang mencapai dan/atau melebihi target dalam RPD pada tahun berkenaan dengan jumlah seluruh program RPD pada tahun berkenaan. Tahun berkenaan	$\frac{Jumlah\ program\ RPD\ yang\ tercapai\ dan—atau\ melebihi\ target\ target\ pada\ tahun\ berkenaandalam\ RPD}{Jumlah\ Seluruh\ Program\ RPD\ pada\ tahun\ berkenaan} \times 100\ \%$

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
			adalah tahun yang dievaluasi, sementara untuk program yang dievaluasi adalah seluruh program baik yang sesuai maupun tidak sesuai.	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Aktivitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	Ketepatan waktu aktivitas perencanaan pembangunan daerah adalah ketepatan penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan	$\frac{Jumlah\ dokumen\ perencanaan\ pembangunan\ daerah\ yang\ disusun\ tepat\ waktu}{Jumlah\ \ dokumen\ perencanaan\ pembangunan\ daerah\ yang\ disusun} \times 100\ \%$
Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Cukup jelas	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Cukup jelas	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)			
Kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	Dokumen data dan informasi pemerintah daerah meliputi data SDI, bahan rapat koordinasi dan data-data lain yang diperlukan	$\frac{Jumlah\ dokumen\ data\ dan\ informasi\ pemerintah\ daerah\ yang\ tersusun}{Jumlah\ target\ dokumen\ data\ dan\ informasi\ pemerintah\ daerah\ yang\ disusun} \times 100\ \%$
Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	Cukup jelas	Cukup jelas
Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Persen	Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan meliputi laporan evaluasi hasil RKPD setiap triwulan, laporan evaluasi hasil RPD setiap tahun, laporan capaian indikator MCP KPK, serta laporan lainnya untuk mendukung Fasilitasi Dokumen Perencanaan	$\frac{Jumlah\ \ laporan\ dan\ evaluasi\ hasil\ pelaksanaan\ pembangunan\ yang\ tersusun}{Jumlah\ target\ dokumen\ laporan\ dan\ evaluasi\ hasil\ pelaksanaan\ pembangunan\ yang\ tersusun} \times 100\ \%$
Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	Cukup jelas	Cukup jelas
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD	Persen	Penilaian kesesuaian antara program KUA-PPAS dengan RKPD dilakukan dengan cara menghitung persentase dengan membandingkan jumlah program	$\frac{Jumlah\ Program\ KUA-PPAS\ dengan\ RKPD\ \ yang\ Memiliki\ Kesesuaian}{Jumlah\ \ Seluruh\ Program\ yang\ dievaluasi}$ x 100%

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Pembangunan Daerah			yang memiliki kesesuaian dengan jumlah seluruh program. Kesesuaian antara KUA-PPAS dan RKPD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Perubahan KUA-PPAS yang disusun pada tahun kinerja dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam Perubahan RKPD yang disusun pada tahun kinerja. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintah daerah. Sementara yang dimaksud program yang dievaluasi adalah jumlah program yang sesuai dan tidak sesuai.	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	Penilaian kesesuaian antara program KUA-PPAS dengan RKPD dilakukan dengan cara menghitung persentase dengan membandingkan jumlah program yang memiliki kesesuaian dengan jumlah seluruh program pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kesesuaian antara KUA-PPAS dan RKPD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Perubahan KUA-PPAS yang disusun pada tahun kinerja dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan	$\frac{Jumlah\ Program\ KUA-PPAS\ dengan\ RKPD\ \ lingkup\ koordinasi\ Bidang\ PPM\ yang\ Memiliki\ Kesesuaian}{Jumlah\ \ Seluruh\ Program\ yang\ di\ evaluasi\ \ di\ lingkup\ koordinasi\ Bidang\ PPM}$ x 100%

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
			pemerintahan dan perangkat daerah dalam Perubahan RKPD yang disusun pada tahun kinerja. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintah daerah. Sementara yang dimaksud program yang dievaluasi adalah jumlah program yang sesuai dan tidak sesuai.	
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	dokumen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Tulungagung, (Renja dan Renja Perubahan)	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	dokumen	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		dan Kearsipan (Renja dan Renja Perubahan)	
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev) lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev) lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Kegiatan Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	Penilaian kesesuaian antara program KUA-PPAS dengan RKPD dilakukan dengan cara menghitung persentase dengan membandingkan jumlah program yang memiliki kesesuaian dengan jumlah seluruh program pada lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Kesesuaian antara KUA-PPAS dan RKPD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Perubahan KUA-PPAS yang disusun pada tahun kinerja dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam Perubahan RKPD yang disusun pada tahun kinerja. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintah daerah. Sementara yang dimaksud program yang dievaluasi adalah jumlah program yang sesuai dan tidak sesuai.	$\frac{Jumlah\ Program\ KUA-PPAS\ dengan\ RKPD\ \ lingkup\ koordinasi\ Bidang\ Perekonomian\ dan\ SDA\ yang\ Memiliki\ Kesesuaian}{Jumlah\ \ Seluruh\ Program\ yang\ di\ evaluasi\ di\ lingkup\ koordinasi\ Bidang\ Perekonomian\ dan\ SDA} \times 100\%$
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Disbudpar, DPMPTSP, Bapenda, BPKAD, Disperindag, DinkopUM , BRIDA (Renja dan Renja Perubahan)	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev) lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD	Dokumen	Disperta, DPKH, DKP, Disperik (Asumsi : Renja dan Renja Perubahan)	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev)lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	Penilaian kesesuaian antara program KUA-PPAS dengan RKPD dilakukan dengan cara menghitung persentase dengan membandingkan jumlah program yang memiliki kesesuaian dengan jumlah seluruh program pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Kesesuaian antara KUA-PPAS dan RKPD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan	

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
			pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Perubahan KUA-PPAS yang disusun pada tahun kinerja dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam Perubahan RKPD yang disusun pada tahun kinerja. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintah daerah. Sementara yang dimaksud program yang dievaluasi adalah jumlah program yang sesuai dan tidak sesuai.	
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	DPU, Perkim, Dishub (Asumsi : Renja dan Renja P)	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev)lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	Dokumen	BPBD, DLH, DAMKAR (Asumsi : Renja dan Renja P)	Cukup jelas

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS MENGHITUNG
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil sinkronisasi dan koordinasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan (termasuk monev)lingkup sub bidang tersebut.	Cukup jelas

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**16.880.984.835,00**	**18.225.139.221,00**	**16.275.627.321,00**	**-605.357.514,00**							**21.714.372.146,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.880.984.835,00**	**18.225.139.221,00**	**16.275.627.321,00**	**-605.357.514,00**							**21.714.372.146,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**16.880.984.835,00**	**18.225.139.221,00**	**16.275.627.321,00**	**-605.357.514,00**							**21.714.372.146,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**12.651.984.835,00**	**13.547.247.221,00**	**12.215.919.721,00**	**2.825.712.311,00**							**15.477.697.146,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*				7 Dokumen	9 Dokumen	869.168.800,00	1.086.201.600,00	949.108.300,00	79.939.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		1.398.515.096,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen	707.158.200,00	953.311.300,00	881.066.300,00	173.908.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.200.697.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				72 Laporan	72 Laporan	162.010.600,00	132.890.300,00	68.042.000,00	-93.968.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			197.818.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				62 Dokumen	62 Dokumen	9.245.464.835,00	10.011.747.021,00	9.638.747.021,00	393.282.186,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		10.192.589.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	8.871.381.635,00	9.605.263.821,00	9.232.263.821,00	360.882.186,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			9.786.349.170,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	374.083.200,00	406.483.200,00	406.483.200,00	32.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			406.240.560,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	117.048.700,00	199.523.000,00	35.752.600,00	-81.296.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		268.846.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	40.000.000,00	136.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			171.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	2 Orang	77.048.700,00	63.523.000,00	35.752.600,00	-41.296.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			97.026.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP*				100 Persen	100 Persen	1.222.282.700,00	1.019.865.800,00	609.881.800,00	-612.400.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		1.787.508.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	32.408.400,00	32.408.400,00	22.673.600,00	-9.734.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			39.195.772,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15 Paket	288.798.500,00	237.518.500,00	172.258.900,00	-116.539.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			443.468.267,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	70.993.500,00	70.993.500,00	49.678.500,00	-21.315.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			88.357.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	59.807.500,00	59.807.500,00	44.301.100,00	-15.506.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			160.529.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	35 Laporan	770.274.800,00	619.137.900,00	320.969.700,00	-449.305.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			1.055.957.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*				25 Unit	2 Unit	158.599.800,00	190.489.800,00	10.500.000,00	-148.099.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		440.311.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			160.446.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	2 Unit	106.599.800,00	138.489.800,00	10.500.000,00	-96.099.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			279.865.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	579.200.000,00	579.200.000,00	564.200.000,00	-15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		758.498.736,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	333.200.000,00	333.200.000,00	318.200.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			450.553.736,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			307.945.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	460.220.000,00	460.220.000,00	407.730.000,00	-52.490.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Tulungagung		631.427.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	185.120.000,00	185.120.000,00	185.120.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			276.001.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	53.750.000,00	53.750.000,00	37.360.000,00	-16.390.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			78.771.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			39.495.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	25 Unit	21.350.000,00	21.350.000,00	15.250.000,00	-6.100.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			237.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Ketercapaian Program RPD Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD**				**92 Persen**	**92 99,31 Persen Persen**	**1.000.000.000,00**	**1.163.081.500,00**	**1.243.613.000,00**	**573.700.000,00**							**1.573.700.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentare Ketepatan Waktu Aktivitas Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	850.000.000,00	926.481.500,00	869.003.000,00	19.003.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung		1.173.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.874.000,00	40.874.000,00	17.647.000,00	-23.227.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			217.332.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.124.500,00	34.124.500,00	36.542.000,00	2.417.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			30.531.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	352.534.000,00	365.000.000,00	172.000.000,00	-180.534.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			343.702.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				271 Usulan	271 Usulan	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			6.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	4 Dokumen	414.897.500,00	478.913.000,00	635.244.000,00	220.346.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			575.643.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentarse Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	34.910.000,00	-15.090.000,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah se-Kabupaten Tulungagung		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				2 Buku	2 Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	34.910.000,00	-15.090.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentarse Ketersediaan Dokumen Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan*				90 Persen	90 Persen	100.000.000,00	186.600.000,00	339.700.000,00	239.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah se-Kabupaten Tulungagung		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	186.600.000,00	339.700.000,00	239.700.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD**				**94,83 Persen**	**99,82 Persen**	**3.229.000.000,00**	**3.514.810.500,00**	**2.816.094.600,00**	**1.433.975.000,00**							**4.662.975.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentarse Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 Persen	100 Persen	985.000.000,00	1.134.000.000,00	1.033.108.300,00	48.108.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung		1.651.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				58 Dokumen	58 Dokumen	285.000.000,00	385.000.000,00	260.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			482.790.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	149.000.000,00	297.200.000,00	197.200.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	207.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			533.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	268.908.300,00	-131.091.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			605.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentarse Keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				92,5 Persen	100 Persen	1.330.000.000,00	1.180.151.000,00	826.939.000,00	-503.061.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung		1.436.325.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	14 Dokumen	211.815.000,00	181.594.000,00	129.698.400,00	-82.116.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			261.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	517.500.000,00	457.341.000,00	296.068.100,00	-221.431.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			513.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	226.350.000,00	209.096.500,00	139.956.000,00	-86.394.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			251.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				12 Laporan	12 Laporan	374.335.000,00	332.119.500,00	261.216.500,00	-113.118.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			410.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentarse keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD Lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				92 Persen	99 Persen	914.000.000,00	1.200.659.500,00	956.047.300,00	42.047.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung		1.575.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	339.000.000,00	440.537.300,00	299.784.300,00	-39.215.700,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	167.404.100,00	101.908.400,00	-98.091.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			475.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	138.396.000,00	272.997.300,00	122.997.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	454.322.100,00	281.357.300,00	56.357.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**16.880.984.835,00**	**18.225.139.221,00**	**16.275.627.321,00**	**-605.357.514,00**							**21.714.372.146,00**	

PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jln. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

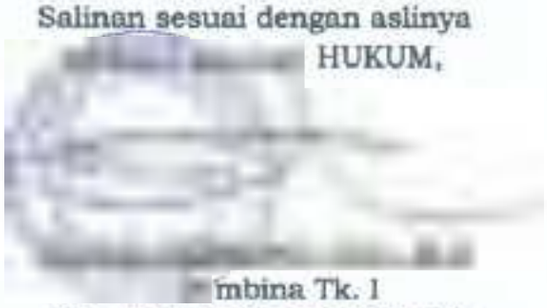
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
[redacted] HUKUM,



[redacted] mbina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja perangkat daerah yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja ini berpedoman pada rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung dan merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan harapan penyelenggaran pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama. Semoga Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Selain dari pada itu, kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu diharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun guna terciptanya peningkatan kinerja perangkat daerah sebagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja.

Tulungagung, 21 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



DWI HARY SUBAGYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19780113 199702 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

BAB IV PENUTUP 18

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun Berjalan)* 10

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tulungagung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan Kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal ini memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja dan perubahannya merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Di samping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan Renja perangkat daerah harus tercantum dalam Renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan kata lain perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Di samping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan, maka rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 mempunyai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
26. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025.

Adapun Tujuan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
b. Perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan, antara lain :
   - Adanya perubahan komposisi pada belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil kepada Desa;
   - Penyesuaian besaran alokasi gaji dan belanja pendidikan dan pelatihan;
   - Pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan perubahan bentuk kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (murni) melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan belanja langsung APBD dengan anggaran (setelah pergeseran) sejumlah Rp. 470.080.396.754,00 (Empat ratus tujuh puluh milyar delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Adapun realisasi belanja langsung tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 293.843.355.143,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Capaian kinerja keuangan sebesar 64.58%.

Perubahan Renja berisikan perubahan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2025. Adapun hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun Berjalan)'
Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
5	02	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		90%	85%	90%	41.00%	47.00%
			2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	18 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	37%
			2.02	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	17 dokumen	14 dokumen	19 dokumen	7 dokumen	36%
			2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	24 dokumen	22 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	50%
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100%	87%	100%	26.56%	26.00%
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang tersedia	100%	94%	9 unit	9 unit	100.00%
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	100%	68%	12 dokumen	6 dokumen	50%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	68%	100%	26%	48%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
5	02	02		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase dokumen Rancangan Perda APBD yang disampaikan tepat waktu**	100%	98%	100%	100.00%	100.00%
					Presentase Penyaluran/Penyaluran Belanja Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	98%	96%	89%	37.00%	41.57%
			2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah PD yang tepat waktu dalam peyampaian RKA dan DPA	51 PD	51 PD	53 PD	53 PD	100%
			2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	51 PD	51 PD	53 PD	53 PD	100%
			2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Akrual)	51 PD	51 PD	53 PD	53 PD	100%
			2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase kebutuhan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi	100%	96%	100%	66%	66%
			2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diimplementasikan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 paket	1 paket	100%
5	02	03		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Presentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian Daftar BMD dan sesuai SAP**	100%	92%	100%	100.00%	100.00%
					Presentase peningkatan aset tanah yang bersertifikat	20%	20%	20%	6.00%	40.00%
			2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD	51 PD	51 PD	98%	50	50%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung terwujudnya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kebijakan pada urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas yaitu Peningkatan Pegelolaan Keuangan dan Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sebagaimana terinci pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			Bertambah/Berkurang (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				100 %	100 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	[illegible]		[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	[illegible]	[illegible]																		

No.	Kode	Lokasi/ Wilayah Layanan/ Tingkatan/ Kondisi Air - SOP Eksisting	Aktivitas Pengolahan Air Limbah	Tuntutan Kondisi Keluaran Air Limbah	Peralatan Utama Pengolahan Air Limbah	Prasarana Utama Pengolahan Air Limbah	Capaian Kinerja dan Efisiensi Pengolahan										Dokumentasi Catatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tahun Anggaran		Perubahan atau Upaya Pengelolaan Lainnya
							Output/ Hasil		Fisik/ Kualitas Air			Berkaitan/ Memenuhi (Y/ N)	Unit Kerja	Sumber Daya	Peralatan			Anggaran	Realisasi	
							Satuan Unit	Satuan Ukuran	Inlet/ Influen	Outlet/ Effluen	Baku Mutu/ Persyaratan Lain				Kegiatan	Sarana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sebagai pemberi arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan sampai akhir Tahun 2025.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai *output* yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Dalam upaya menyelesaikan target Tahun Anggaran 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun.

Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja dengan sebaik-baiknya. Semoga Perubahan Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Tulungagung, 21 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DWI HARY SUBAGYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19780113 199702 1 001

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Perubahan Renja Bapenda Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun 2025 triwulan II dan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2025. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator keluaran kegiatan (output) sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kritik dan saran untuk kesempurnaan Renja ini sangat kami harapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LILIK ISMIATI, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199703 2 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022..... 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 9

BAB IV PENUTUP..... 15

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi rencana pembangunan tahun 2025 baik oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, ada kemungkinan program/kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3) Terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulungagung selanjutnya akan menjadi pedoman Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sekaligus menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

i. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

j. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

k. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;

l. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 entang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi dalam Perencanaan dan Penganggaran, mewujudkan efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten serta sebagai tolok ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya didalam pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan benar-benar terarah, terukur, tepat sasaran serta terkendali sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah menetapkan program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, jumlah dana/biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, keluaran (output) yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut dan sumber pembiayaannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti akan lebih terkendali dan berjalan efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan Tata Urut Penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan baik dalam hal penyerapan/realisasi keuangan maupun realisasi keuangan program/kegiatan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja keluaran (output), lokasi dan pagu anggaran.

BAB IV Penutup, berisi catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

a. Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tingkat kinerjanya berada dibawah 42,99%. Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi tingkat kinerjanya sama sekali belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada triwulan IV.
b. Sementara untuk level kegiatan, dari total 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2024, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi tingkat kinerja telah berada diatas 50%, sementara sebanyak 5 (lima) kegiatan realisasi tingkat kinerjanya berada dibawah 50% dan 1 (satu) kegiatan sama sekali belum dilaksanakan yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Secara terperinci evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah nampak pada tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
	Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Bidang Keuangan						
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	84	28	28	13	39,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	72	24	24	100	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36	12	12	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Sesuai SOP	100	100	100	100	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	12	4	4		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Yang Tersedia	36	12	12	100	100

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
							Target	Realisasi s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1			2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	95	95	95	94	98,94
II			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi PAD**	100	113,25	100	50,68	50,68
		8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	Rp. 1,790,233,943,073.33	Rp. 709,807,139,656,68	Rp. 789,221,066,391.69	Rp. 400.005.082.236,66	50,68

BAB III

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan hasil evaluasi dan analisis di Bab II, untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tidak mengajukan program maupun kegiatan baru. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2 (dua) Program dan 8 (tujuh) kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas kegiatan:
   1) Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Namun demikian, dari sisi pagu anggaran masing-masing kegiatan ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 baik berupa pengurangan maupun penambahan pagu anggaran. Rincian perubahan pada APBD Perubahan per Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
5.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH										
3.00.02 KEUANGAN										
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**Kab. Tulungagung**	**Kab. Tulungagung**	**14.883.349.508,00**	**18.299.403.975,00**	**3.416.054.467**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	Dokumen	28	28	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2.000.000,00	2.000.000,00	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	24	124	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	11.843.570.908,00	12.048.138.575,00	11.523.138.575
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	Luar Kab. Tulungagung	Luar Kab. Tulungagung	12,500,000,00	525.000.000,00	512.500.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Sesuai SOP	Persen	100	100	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.354.141.000,00	3.706.206.000,00	2.352.065.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	3	4	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	54.000.000,00	92.250.000,00	38.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambah / Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
	Pemerintah Daerah	Yang Tersedia								
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Yang Tersedia	Dokumen	12	2	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1.112.757.600,00	1.123.379.400,00	10.621.800
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Persen	95	95	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	504.380.000,00	802.430.000,00	298.050.000
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi PAD**	**Persen**	**100**	**100**	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	**6.900.000.000,00**	**11.176.000.000,00**	**4.276.000.000**
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	Rp	581,785,938,210.32	601,785,938,210.32	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6.900.000.000,00	11.176.000.000,00	4.276.000.000

BAB IV

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai.

Dalam upaya mencapai target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan sebagaimana tercantum telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2024.

Perubahan Renja ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 20255 sesuai dengan yang dicita-citakan. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tulungagung, 8 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK ISMIATI, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199703 2 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Sesuai tahun berjalan (Y-1)	LOKASI	GENDER EMAS	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	ARSIP 2024	SAMA PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**15.247.824.192,00**	**21.751.148.863,00**	**20.076.833.874,00**	**11.227.479.123,00**							**28.189.543.504,00**	
	4	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**15.247.824.192,00**	**21.751.148.863,00**	**20.076.833.874,00**	**11.227.479.123,00**							**28.189.543.504,00**	
	4.02	**BIDANG PAJAK**							**15.247.824.192,00**	**21.751.148.863,00**	**20.076.833.874,00**	**11.227.479.123,00**							**28.189.543.504,00**	
1	**4.02.01**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Pencapaian Urusan Pemerintahan Daerah				**100 %**	**100 %**	**12.247.824.192,00**	**16.751.148.863,00**	**16.076.833.874,00**	**9.271.833.512,00**							**19.322.104.204,00**	
	4.02.01.2.01	Pemantauan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pengelolaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja				29 Dokumen	29 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Keluarga di lingkup Kantor Perangkat Daerah		4.800.000,00	BAGIAN PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung Bahua Kecamatan Bahua Kel/Desa	DAPA TOMAS DI LINKUNGAN PEMDA KABUPATEN	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	BAGIAN PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung Bahua Kecamatan Bahua Kel/Desa	DAPA TRANSAKSI LINKUNGAN PEMDA KABUPATEN	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.200.000,00	BAGIAN PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				24 Dokumen	24 Dokumen	9.078.833.192,00	11.041.128.863,00	12.948.158.573,00	1.400.500.123,00			Meningkatnya Disiplin Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai di Dalam Pemkab/Kot Daerah		14.811.143.321,00	DALAM PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	10.417.433.192,00	13.751.119.863,00	11.958.078.874,00	1.400.500.123,00	Kab. Tulungagung Bahua Kecamatan Bahua Kel/Desa	DAPA TOMAS DI LINKUNGAN PEMDA KABUPATEN	Meningkatnya Disiplin Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.811.143.321,00	BAGIAN PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	110.100.000,00	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	Kab. Tulungagung Bahua Kecamatan Bahua Kel/Desa	DAPA TRANSAKSI LINKUNGAN PEMDA KABUPATEN	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.047.200,00	BAGIAN PENGADAPATAN DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Kerahasiaan SKPD																		

	2.02.01.2.03.0001	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	10.411.479.912,00	11.732.410.508,00	11.886.578.575,00	1.489.676.213,00	Kab. Tulungagung, Gemuk Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Public	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.418.723.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	12 Dokumen	140.150.000,00	140.150.000,00	140.150.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gemuk Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.647.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.03.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gemuk Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	323.000.000,00	312.000.000,00			Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Public	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Public	Pegawai di Bidang Pendapatan Daerah		127.000.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.09.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	2.000.000,00	116.000.000,00	101.000.000,00	Kab. Tulungagung, Gemuk Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Public	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			116.000.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.09.0003	Pemeliharaan Kesehatan dan Pendidikan Pegawai Berkesinambungan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Memperoleh Tugas dan Fungsi yang Menyebab Pemeliharaan dan Pendidikan				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	5.000.000,00	470.000.000,00	460.000.000,00	Kab. Tulungagung, Kantor Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Baik				100 %	100 %	500.000.000,00	1.004.141.000,00	3.700.000.000,00	3.071.679.000,00			Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Public	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Public	Belanja dan Pemakaian Perlengkapan Kantor		1.760.000.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.09.0001	Penyelenggaraan Komunikasi Intensif Internal/Eksternal dengan Seluruh Pemangku Kepentingan Terkait																			
			Jumlah Paket Kompetensi Inklusif Lintas Perangkat Daerah yang Terkait yang Disosialisasi				28 Paket	28 Paket	24.100.000,00	26.182.000,00	58.227.000,00	33.045.000,00	Kab. Tulungagung, Gemuk Kecamatan, Gemuk Kidul Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengerakkan Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Public	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Public			58.817.000,00	DAERAH PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SPM/SPPM OPD TAHUN 2023	PROBABILITA CAPAIAN TARGET RPJPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET. DAMPAK KEGAGALAN	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Selisih (Sebelum-Sesudah) (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	X.02.01.2.04.0002	Penjaminan Persalinan dan Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Pasien Persalinan dan Pelayanan Kesehatan yang Dijaminkan				40 Pasien	40 Pasien	137.094.000,00	460.000.000,00	1.200.100.000,00	1.200.094.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			857.000.000,00	DINAS PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.04.0004	Penyelidikan Pendidikan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Pelayanan Rumah Tangga yang Dilaksanakan				16 Paket	16 Paket	54.000.000,00	54.000.000,00	69.084.000,00	69.078.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			69.807.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.04.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan				24 Paket	24 Paket	172.000.000,00	399.100.000,00	1.498.000.000,00	1.327.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			816.017.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.05.0001	Fasilitasi Kerjasama Terpu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Terpu				12 Laporan	12 Laporan	47.520.000,00	10.077.000,00	10.077.000,00	-347.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.028.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.06.0002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	280.267.000,00	283.014.000,00	917.000.000,00	666.773.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			921.000.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	54.000.000,00	84.000.000,00	82.250.000,00	28.250.000,00			Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Gedung dan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah		930.000.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil																		
			Jumlah Paket Mobil yang Dialokasikan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	86.250.000,00	78.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			990.000.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH
	X.02.01.2.07.0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dialokasikan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DAK, ALOKASI UMUM	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN PENGAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.01.0002	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Pada Meja yang Disediakan				Buah	5 Unit	3.000.000,00	7.500.000,00	90.250.000,00	70.750.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TRANSMIGRASI UNTUK DINAS ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				740.000.000,00	DAUNA PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Pengadaan Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit	1 Unit	40.500.000,00	40.500.000,00	0.000.000,00	40.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER Lainnya-Dana ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				580.000.000,00	DAUNA PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Perumahan Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Perumahan Yang Terbentuk				12 Dokumen	12 Dokumen	1.375.207.200,00	1.112.707.680,00	1.123.275.450,00	45.276.200,00			Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pihak Ketiga Penyedia Jasa Konstr			1.281.933.000,00	DAUNA PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	0.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				8.000.000,00	RAKSSD PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				61 Laporan	12 Laporan	308.000.000,00	120.870.080,00	440.940.000,00	68.255.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				317.300.000,00	DAUNA PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pos yang Disediakan untuk Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	751.331.200,00	138.837.600,00	676.036.430,00	23.909.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				781.844.000,00	RAKSSD PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara				95 %	95 %	447.95.000,00	194.55.100,00	662.450.000,00	111.173.800,00			Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bungamas, Kondisikan Jan Aut. Aut Wasin di Bidan Pemerintah Daerah			978.500.000,00	DAUNA PENDAPATAN DAERAH
	6.02.01.2.05.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKSES PROGRAM MENTERI DRG	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MULAI DIREALISASIKAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (11-12)	LOKASI	KOMBER (Lokasi)	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KINERJA	KEUANGAN	RKPD 2024	APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024				KEDERAH	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Biaya/unit Pajaknya				3 Unit	1 Unit					Kab. Tulungagung, Kantor Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Pemeliharaan, atas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Biaya/unit Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit					Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
	1.02.01.2.08.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	140 Unit					Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
	1.02.01.2.08.0005	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit					Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
	1.02.01.2.08.0013	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Saluran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	40 Unit					Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
3	**3.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Realisasi PAD				**100 %**	**100 %**												
	3.03.03.3.01	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD				100 = 395.91 0.21.0.0 Rupiah	100 = 79.1 82.0 42.10.37 Rupiah							Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah Pengelola PAD			SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH
	4.03.03.2.01.0003	Pemeliharaan Pengelolaan Pasar Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pengelola Pengelolaan Pasar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen					Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH TERTENTU (DIKOLOKASI LUAR)	Mempercepat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELURH PENGUNAPAKAI DAERAH

2.	**2.02.01**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH**	**Penerbitan Notaris/PPAT**				**100 %**	**100 %**	**3.400.000.000,00**	**6.900.000.000,00**	**11.376.000.000,00**	**5.847.400.000,00**							**12.247.400.000,00**	
	2.02.01.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerbitan PAT				301.700,53 A 17,00 Rupiah	301.700,53 A 17,00 Rupiah	3.400.000.000,00	6.900.000.000,00	11.376.000.000,00	5.775.000.000,00			Meningkatkan Kualitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Petugas Daerah Pengguna PNPA		12.247.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0001	Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	700.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Meningkatkan Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Pengawasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Meningkatkan Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0003	Penyusunan dan Penyiapan bahan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyelarasan kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	229.800.000,00	446.300.000,00	84.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Meningkatkan Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			162.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0004	Pengelolaan Notaris dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	4 Unit	172.000.000,00	226.800.000,00	464.000.000,00	68.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Meningkatkan Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			460.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0005	Pemetaan dan Penetapan Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemetaan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	222.800.000,00	372.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mendukung Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			362.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0021	Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Dimutakhirkan NJOP nya				140 Objek Pajak	140 Objek Pajak	140.000.000,00	200.800.000,00	400.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mendukung Validitas Pelindungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			362.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	2.02.01.2.01.0022	Pendataan Wajib Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAKJI RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kerangka Regulasi/Kerangka Ekonomi (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KINERJA	SATUAN	2025	2026	2027				KABUPATEN	GAMPONG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah				221 Dokumen	221 Dokumen	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0.03	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	30.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0.10	Penelitian dan Verifikasi Data Perpajakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Perpajakan Pajak Daerah yang Telah DIANALisis Hasil Riset dan Verifikasi				10 Dokumen	10 Dokumen	140.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0.11	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000,00	1.130.054.000,00	1.253.094.000,00	1.001.094.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	74.000.000,00	78.400.000,00	79.400.000,00	0.400.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.05.2.01.0.13	Pengembalian, Pembatalkasan dan Pengurusan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengadilan dan Pengurusan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			631.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.05.2.01.0.14	Pemberesan dan Pengurusan Perlapidasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberesan dan Pengurusan Pengelolaan PERDA Daerah				12 Layanan	12 Layanan	3.576.000.000,00	1.000.643.000,00	4.404.201.000,00	1.001.201.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0.15	Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemerintah Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	300.004.000,00	947.105.000,00	527.105.000,00	Kab. Tulangpanjang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAAR (LOKAL) UMUM	Meniper Lad Statistics Pulhukl.ankam Dan Transfer mas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH								2.000.897.000.122,00	2.419.225.921.961,00	2.231.464.551.253,00	464.767.255.161,00							4.422.575.130.719,50	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RANKHIR) 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat

Penyusunan Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-PD.

Selanjutnya berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD. Kemudian setelah APBD ditetapkan, Kepala PD menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). DPA-PD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 15 Athun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2045;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Perubahan Renja PD) BKPSDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini adalah:

- untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BKPSDM Kabupaten Tulungagung;
- sebagai alat (tools) untuk monitoring dan evaluasi program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi BKPSDM Kabupaten Tulungagung;
- untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama satu tahun anggaran;
- untuk mendorong terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Tulungagung.

Tujuan dari disusunnya Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD) BKPSDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini adalah terjabarkannya tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikasi kebutuhan anggaran selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tulungagung yang penyusunannya mengacu kepada Renstra BKPSDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Perubahan Renja-PD) BKPSDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dapat dilihat realisasinya pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024 mengacu pada anggaran yang sudah disahkan serta realisasi perkiraan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025 dikaitkan dengan rencana strategis yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini **:**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											**BKPSDM**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5.03	KEPEGAWAIAN											
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	**%**	87,5	-	-	-		**85,5**			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	60	60	60	**100%**	60	60		
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	**100%**	100			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	1.827	**1.827**	**1827**	**1827**	**100%**	1827			
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	Dokumen	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	
5.03.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	**100%**	12	3	25	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	**%**	100	100	100	100	**100%**	**100**			
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	**100%**	2			
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	71	71	71	**100%**	71			
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	1	1	1	1	**100%**	**1**			
5.03.01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Skor	95,5	-	-	-		94			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	%	3	3	3	3	**100%**	3			
		Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik	%	99,5	99,5	99,5	99,5	**100%**	99,5			
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	12,29	12,29	12,29	12,29	**100%**	15,91			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	3	3	3	3	**100%**	1			
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK											
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN											
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	**Laporan**	1	1	1	1	**100%**	**1**			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian											
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN											
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rata-rata Persentase Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka										
		Persentase Kesesuaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan dengan Hasil Assesment										
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000	1000	1000	1000	**100%**	1000			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN											
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	180	180	180	66	**38%**	**100**			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Kepegawaian Jabatan Fungsional	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	**1**			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	**Orang**	**380**	380	380	380	**100%**	**380**			
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN											
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	**Orang**	**290**	290	290	290	**100%**	**290**			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Dimensi Disiplin										
		Persentase Rekomendasi Perbaikan Predikat Kinerja Pegawai < Baik (SKP Tahun Sebelumnya) yang ditindaklanjuti										
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur											
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN											
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	65	65	65	65	**100%**	65			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan			SKPD Penanggung Jawab
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW I Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	10	10	10	10	**100%**	**10**			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										
5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar											
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	1	1	1	1	**100%**	1			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	1	1	1	1	**100%**	1			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ASN Tahun 2025–2029

Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
1	Terpenuhinya perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan UU ASN	Pemenuhan kebutuhan regulasi turunan UU ASN	Akselerasi pemenuhan kerangka regulasi manajemen ASN, khususnya manajemen PPPK
2	Terwujudnya dan terbukanya ruang bagi daerah dalam manajemen ASN yang bersifat asimetris atau afirmasi	Penguatan kebijakan ASN dengan mengakomodasi kekhususan daerah	Reviu dan revisi regulasi yang masih berbasis UU kepegawaian yang lama
3	Terciptanya sistem percepatan dalam mekanisme manajemen ASN	Pengembangan kapasitas lembaga pengelola ASN antara pusat dan daerah	Menyediakan portofolio kebijakan terkait pelaksanaan manajemen ASN yang kontekstual dan terkait kekhususan daerah berdasarkan prinsip manajemen talenta
4	Terwujudnya sistem informasi ASN yang adaptif, responsif, integratif	Penguatan sistem informasi ASN yang terintegrasi	Mengembangkan sistem informasi ASN yang adaptif, responsif, integratif antar sektor dan antar kepentingan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra BKPSDM Tahun 2024–2026 yang dapat dijabarkan dalam Matriks Rencana Kinerja Tahunan BKPSDM Tahun 2025 seperti yang disajikan dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5	6
I	**Meningkatnya Profesionalitas ASN**			**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**	**Skor**	**85,67**
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN		**Indeks Sistem Merit**	**Skor**	**285**
		1	Meningkatnya Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	%	3
		2	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik	%	99,5
		3	Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	%	10

3.3 Program dan Kegiatan

Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran prioritas nasional pembangunan aparatur serta mengacu pada sasaran strategis Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, maka dapat disusun perencanaan kerja BKPSDM Tahun 2025 dengan fokus pembangunan pada peningkatan profesionalitas ASN, pelaksanaan sistem merit, peningkatan kualitas pelayanan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah;

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Rumusan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan dan 26 subkegiatan yang mengampu sasaran-sasaran strategis prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis situasi strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, maka dapat dirumuskan Program dan Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**11.830.617.813**					**10.587.950.713**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**11.830.617.813**					**10.587.950.713**
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**10.435.442.513**	**APBD**				**9.752.950.713**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Perangkat Daerah**		**%**	**85,5**	**8.792.285.213**			**%**	**86**	**8.556.950.713**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**12**	**8.113.142.213**			**Dokumen**	**12**	**8.099.102.213**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	60	8.041.862.213			Orang	60	8.041.862.213
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	71.280.000			Dokumen	12	57.240.000
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**Kab. Tulungagung**	**%**	**100**	**284.423.800**			**%**	**100**	**128.601.600**
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Unit	1827	49.433.600			Unit	1827	29.167.500

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	19.638.000			Paket	1	10.212.100
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	27.355.200			Paket	1	9.029.000
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	11.975.200			Laporan	12	11.109.000
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	176.021.800			Laporan	1	69.084.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**12**	**191.251.200**			**Dokumen**	**12**	**152.894.400**
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	134.143.200			Laporan	12	109.488.000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	57.108.000			Laporan	12	43.406.400
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kab. Tulungagung**	**%**	**100**	**203.468.000**			**%**	**100**	**176.352.500**
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	2	79.498.000			Unit	2	91.216.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	71	38.970.000			Unit	71	35.110.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	85.000.000			Unit	1	50.026.500
5.03.01	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN**		**Skor**	**94**	**1.643.157.300**			**Skor**	**94,5**	**1.196.000.000**
		Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		**%**	**3**				**%**	**3**	
		Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik		**%**	**99,5**				**%**	**99,5**	
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		**%**	**15,91**				**%**	**15**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengadaan ASN**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**1**	**503.557.200**			**Dokumen**	**1**	**421.000.000**
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberhentian ASN		**Dokumen**	**1**				**Dokumen**	**1**	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN		**Dokumen**	**1**				**Dokumen**	**1**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen	1	18.261.000			Dokumen	1	40.000.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN										
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Laporan	1	354.655.000			Laporan	1	250.000.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Dokumen	1	15.568.200			Dokumen	1	16.000.000
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Dokumen	1	115.073.000			Dokumen	1	115.000.000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Rata-rata Persentase Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka**	**Kab. Tulungagung**			**906.122.000**					**615.000.000**
		Persentase Kesesuaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan dengan Hasil Assesment									
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		Dokumen	1	25.360.000			Dokumen	1	30.000.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Dokumen	1000	35.000.000			Dokumen	1000	35.000.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN										

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Dokumen	180	845.762.000			Dokumen	180	550.000.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Kepegawaian Jabatan Fungsional**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**1**	**38.200.000**			**Dokumen**	**1**	**40.000.000**
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN										
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		Orang	380	23.200.000			Orang	380	25.000.000
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN										
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		Orang	290	15.000.000			Orang	290	15.000.000
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Dimensi Disiplin**	**Kab. Tulungagung**			**195.278.100**					**120.000.000**
		Persentase Rekomendasi Perbaikan Predikat Kinerja Pegawai < Baik (SKP Tahun Sebelumnya) yang ditindaklanjuti									
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen	1	50.033.500			Dokumen	1	40.000.000
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur										
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Dokumen	1	103.060.000			Dokumen	1	40.000.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN										

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja		Pagu Indikatif (RP)
1	2	4	3	5		6		7	10		11
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Orang	65	42.184.600			Orang	65	40.000.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.395.175.300**	**APBD**				**835.000.000**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional**		**%**	**10**	**1.395.175.300**			**%**	**10**	**835.000.000**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Dokumen Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Tulungagung**			**1.395.175.300**					**835.000.000**
5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar										
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Laporan	1	31.579.100			Laporan	1	35.000.000
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Dokumen	1	1.363.596.200			Dokumen	1	800.000.000

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Rankhir Perubahan Renja-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat dalam matriks seperti yang disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume Besaran		Kebutuhan Anggaran
1	2	4	3	5		6
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**11.830.617.813**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**11.830.617.813**
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**10.435.442.513**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Perangkat Daerah**		**%**	**85,5**	**8.792.285.213**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**12**	**8.113.142.213**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	60	8.041.862.213
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	71.280.000
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**Kab. Tulungagung**	**%**	**100**	**284.423.800**
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Unit	1.827	49.433.600
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	19.638.000
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	27.355.200
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	11.975.200
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	176.021.800

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume Besaran		Kebutuhan Anggaran
1	2	4	3	5		6
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**12**	**191.251.200**
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	134.143.200
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	57.108.000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kab. Tulungagung**	**%**	**100**	**203.468.000**
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	2	79.498.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	71	38.970.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	85.000.000
5.03.01	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN**		**Skor**	**94**	**1.643.157.300**
		Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		**%**	**3**	
		Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik		**%**	**99,5**	
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		**%**	**15,91**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengadaan ASN**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**1**	**503.557.200**
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberhentian ASN		**Dokumen**	**1**	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN		**Dokumen**	**1**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen	1	18.261.000
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Laporan	1	354.655.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume Besaran		Kebutuhan Anggaran
1	2	4	3	5		6
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Dokumen	1	15.568.200
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN					
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Dokumen	1	115.073.000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Rata-rata Persentase Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka**	**Kab. Tulungagung**			**906.122.000**
		Persentase Kesesuaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan dengan Hasil Assesment				
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		Dokumen	1	25.360.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Dokumen	1000	35.000.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Dokumen	180	845.762.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Kepegawaian Jabatan Fungsional**	**Kab. Tulungagung**	**Dokumen**	**1**	**38.200.000**
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		Orang	380	23.200.000
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN					
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		Orang	290	15.000.000
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Dimensi Disiplin**	**Kab. Tulungagung**			**195.278.100**
		Persentase Rekomendasi Perbaikan Predikat Kinerja Pegawai < Baik (SKP Tahun Sebelumnya) yang ditindaklanjuti				
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen	1	50.033.500
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Dokumen	1	103.060.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume Besaran		Kebutuhan Anggaran
1	2	4	3	5		6
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Orang	65	42.184.600
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.395.175.300**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional**		**%**	**10**	**1.395.175.300**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Dokumen Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Tulungagung**			**1.395.175.300**
5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar					
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Laporan	1	31.579.100
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Dokumen	1	1.363.596.200

BAB IV
PENUTUP

Kita menyadari bahwa perencanaan yang terarah dan terpadu harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah kita tetapkan bersama. Dengan rencana kerja tahunan ini, diharapkan kita akan tahu kemana arah yang akan kita tuju dan dengan apa kita akan mencapai tujuan itu.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD) tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali beberapa kegiatan yang bersifat mendesak dan teknis strategis dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional. Hal ini disebabkan oleh karena tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung pada dasarnya adalah unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian. Namun demikian, pelaksanaan dan keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan ini sangat mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, bahkan lebih luas lagi yaitu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Demikian rencana kerja ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan operasional bagi jajaran pimpinan dan staf dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN TULUNGAGUNG

SOEROTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197004021990031006

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

2025

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Badan Riset dan Inovasi Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan seiring ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung telah menyusun program-program dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, yakni Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini, menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk kesempurnaan, saran dan masukan sangat diperlukan dalam sempurnanya dokumen ini dan semoga bermanfaat. Aamiin.

Tulungagung, 26 Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dr. SLAMET SUNARTO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670609 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sitematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24
BAB IV PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2025.....6
Tabel 3. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 BRIDA Kabupaten Tulungagung 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah isu kepemerintahan yang baik (Good Governance), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta melibatkan seluruh stakeholder pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat merespon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik tersebut.

Perencanaan kerja tahunan yang merupakan turunan rencana strategis adalah bentuk evaluasi dan proyeksi kebutuhan perangkat daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Brida Kabupaten Tulungagung disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung yang setiap tahunnya disusun dan dimusyawarahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan Renja perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, serta perubahan kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu dalam penyusunan perubahan Renja perlu melibatkan seluruh komponen organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmpr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pemnanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja BRIDA Kabupaten Tulungagung adalah sebagai pedoman bagi seluruh jajaran BRIDA dalam mengakomodir adanya perubahan baik pengurangan, penambahan maupun pergeseran belanja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sedang berjalan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Tulungagung tahun 2025 adalah mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran dengan melakukan realokasi anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai perhitungan, sehingga tercapainya target kinerja dan perencanaan serta kebijakan lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja perangkat daerah, proses penyusunan perubahan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara perubahan Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P-RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan perubahan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa: a) catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b) kaidah-kaidah pelaksanaan; c) rencana tindak lanjut; serta d) mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BRIDA; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Perubahan Renja BRIDA Kabupaten Tulungagung tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, Perubahan Renstra BRIDA kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan perubahan Renja BRIDA Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025 berdasarkan realisasi program dan kegiatan mengacu pada APBD Kabupaten Tulungagung bisa dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**2.967.640.289**	**0**	**1.109.760.207**	**0**	**37,39 %**
5.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja (dokumen)**	**8**	**8**	**2**	**600.000**	2	300.000	**100%**	**50%**
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	300.000	2	150.000	100 %	50%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	30	8	30	300.000	16	150.000	53,3%	50%
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)**	**48**	**48**	**49**	**2.364.689.214**	**25**	**853.030.679**	**51,02%**	**36,07%**
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	30	46	11	2.274.929.214	22	831.715.679	200 %	36,56 %
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	12	89.760.000	6	21.315.000	50%	23,74 %

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)**	**6**	**6**	**10**	**20.800.000,**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atrtibut Kelengkapanya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	6	12	2	5.800.000	0	0	0	0
5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan (orang)	30	0	2	15.000.000	0	0	0	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (persen)**	**100**	**100**	**100**	**127.798.745**	**80**	**90.556.650**	**80%**	**70,85%**
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	4	5	1.903.600	0	0	0	0
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	5	10	12	72.837.500	61	61.826.000	508,3%	84,88 %
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	2	2	12	1.074.345	4	107.150	33,33%	9,9 %

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	5	12	3.164.800	6	1.886.000	50%	59,59%
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu (kegiatan)	10	-	0	0	0	0	0	0
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	20	15	12	48.368.500	6	26.737.500	50%	55,27%
5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)**	**15**	**67**	**70**	**122.474.600**	**72**	**116.292.700**	**10,8%**	**94,95 %**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	10	57	65	68.328.000	65	63.020.000	100%	92,23%
5.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan (unit)	25	10	5	54.146.600	7	53.272.700	140%	98,38%
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (dokumen)**	**24**	**24**	**12**	**270.377.730**	**6**	**45.296.678**	**50%**	**16,75%**
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	12	12	138.689.730	6	29.503.010	50%	21,27%
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralata dan perlengkapan	12	12	12	1.680.000	6	574.500	50%	34,19%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		kantor yang disediakan (laporan)								
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	130.008.000	**6**	**15.219.168**	**50**	**11,7%**
5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara (persen)**	**100**	**100**	**100**	**60.900.000**	**11**	**4.283.500**	**11%**	**7,03%**
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinanya (unit)	6	1	1	35.100.000	1	4.283.500	100%	12,20%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara (unit)	20	14	5	690.000	0	0	0	0
5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	10	1	1	25.110.000	0	0	0	0
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase publikasi hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. Persentase publikasi hasil penelitian bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan. Presentase**	**100**	**100**	**100**	**650.000.000**	**0**	**163.879.000**	**0**	**25,21%**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Inovasi Daerah Sesuai Kriteria (persen)								
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase publikasi dan diseminasi hasil kelitbangan (persen)**	**100**	**100**	**100**	**210.000.000**	**0**	58.834.000	**0**	**28%**
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatru Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi,pelaksanaan dan evaluasi peneliltian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi (laporan)	1	2	100	100.000.000	0	13.804.000	0	13,8%
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik (laporan)	1	1	1	10.000.000	0	0	0	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang diterbitkan (rekomendasi) 1	1	1	1	100.000.000	0	44.580.000	0	44,58%
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase publikasi dan diseminasi hasil kelitbangan (persen)**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pendidikan dan kebudayaan (dokumen)	1	-	0	0	0	0	0	0
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata (dokumen)	0	1	0	0	0	0	0	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat (dokumen)	0	1	0	0	0	0	0	0
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase publikasi dan diseminasi hasil kelitbangan (persen)**	**100**	100	**100**	**340.000.000**	**0**	**61.625.000**	**0**	**18,12%**
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1	80.000.000,	0	0	0	0
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan (dokumen)	-	1	0	0	0	0	0	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	0	0	0	0	0	0
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			1	100.000.000	0	7.283.600	0	7,2%
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			1	60.000.000	0	43.870.000	0	73,11%
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			1	100.000.000,	0	7.045.000	0	7%
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Nilai Indeks Inovasi Daerah (indeks)**	**63**	**59,14**	**50**	**100.000.000**	**0**	**43.870.000**	**0**	**43,87%**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (dokumen)	1	1	1	100.000.000	1	21.972.500	100%	21,97%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersfiat inovatif	1	1	1	25.000.000	0	3.475.500	0	13,9 %
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosisalisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan (laporan)	1	2	1	25.000.000	0	0	0	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025					
					Target		Realisasi s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual (laporan)	1	1	1	25.000.000	0	18.440.000	0	73,76%

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tulungagung, pada dasarnya kegiatan BRIDA Kabupaten Tulungagung adalah sebagai “Penunjang” bidang penelitian, pengembangan, pengkajian penerapan, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi BRIDA sebagai berikut:

1. Keselarasan hasil penelitian dan pengembangan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang belum maksimal. Usulan semua riset dari perangkat daerah belum terakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah hanya beberapa usulan yang dapat dilaksanakan.
2. Tingkat Pemahaman Perangkat Daerah terkait Permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dapat diberikan strategi dan solusi terbaik setelah dilakukannya kajian penelitian pengembangan sehingga perangkat daerah akan lebih efisien dan efektif terhadap kebijakan yang akan diambil ke depan. Selain itu juga perangkat daerah masih belum memprioritaskan permasalahan yang ada untuk segera ditangani.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan riset daerah, serta diseminasi dan publikasi hasil riset. BRIDA Kabupaten Tulungagung memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan riset di Kabupaten Tulungagung masih tergolong kurang optimal, karena kurangnya SDM sehingga tema kajian belum seluruhnya bisa dilaksanakan hanya beberapa tema prioritas yang dapat dilakukan. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi riset kelitbangan selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Namun publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional masih belum dilaksanakan.
4. Perangkat daerah untuk menghasilkan dan atau membuat inovasi baru melalui pelayanan masyarakat belum muncul secara menyeluruh. Sehingga masih ada beberapa perangkat daerah yang belum memperbarui inovasinya untuk pelayanan kepada Masyarakat.
5. Data inovasi yang didapat Brida belum sinkron dengan inovasi perangkat daerah yang ada sehingga dalam pelaporan inovasinya dalam ajang IGA kurang maksimal

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja BRIDA Kabupaten Tulungagung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja BRIDA Kabupaten Tulungagung maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas BRIDA dalam pemenuhan pelayanan BRIDA dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh BRIDA Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dalam menjabarkan kebijakan tersebut meliputi program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BRIDA pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan BRIDA pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Fasilitasi Pelaksanan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang badan Usaha Milik Desa
- Pengelolaan Data Kelitbangan Data dan Kelitbangan dan Peraturan
- Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penelitian Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 3. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 BRIDA Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10=(10-9)*
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**3.823.306.464,00**	**3.850.664.853,00**	**27.358.389,00**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Rata-rata Tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahaan daerah**	**Indeks**	**100 Persen**	**100 Persen**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**3.128.306.464,00**	**3.100.664.853,00**	**27.641.611,00**
5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi**	**Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi**	**Dokumen**	**8 Dokumen**	**7 Dokumen**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamat**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamat**	**13.662.000,00**	**600.000,00**	**-13.062.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
					Kinerja Perangkat Daerah	**dan laporan kinerja**				**an, Semua Kelurahan**	**an, Semua Kelurahan**			
5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			5.630.000,00	300.000,00	-5.330.000,00
5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laoran capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	8.032.000	300.000	-7.732.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dokumen**	**49 Dokumen**	**49 dokumen**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**2.364.689.214,00**	**2.497.713.778,00**	**133.024.564,00**
5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	11 orang/ bulan	12 orang/ bulan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.274.929.214,00	2.407.953.778	133.024.564
5	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.760.000,00	89.760.000,00	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						n tugas ASN								
5	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**28.800.000**	**20.800.000**	**-8.000.000**
5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2 paket	1 paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.800.000	5.800.000	-8.000.000
5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan	Orang	2 orang	2 orang	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	15.000.000	15.000.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						dan pelatihan				Kelurahan	Kelurahan			
5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**208.394.650**	**127.798.745**	**-80.595.905,00**
5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5 paket	3 paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.810.400	1.903.600	-1.906.800
5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12 paket	12 paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	90.904.000	72.837.500	-18.066.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
										Kelurahan	Kelurahan			
5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12 paket	2 paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.312.900	1.074.345	-3.238.555
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12 paket	3 paket	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.229.600	3.614.800	-3.614.800
5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Laporan	12 laporan	5 laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	102.137.750	48.368.500	-53.769.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						konsultasi SKPD				Kelurahan	Kelurahan			
5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang yang tersedia**	**Unit**	**70 Unit**	**70 unit**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**122.474.600**	**122.474.600**	**0**
5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	65 Unit	65 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.328.000	68.328.000	0
5	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Unit	5 Unit	5 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan,	54.146.600	54.146.600	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
					Lainnya	bangunan lainnya yang disediakan				Semua Keluraha n	Semua Keluraha n			
5	**0 5**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang yang tersedia**	**persen**	**100 persen**	**100 pesen**	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	**321.616.00 0**	**270.377.73 0,00**	**51.238.27 0,00**
5	0 5	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	189.928.00 0	122.689.73 0	- 67.238.27 0
5	0 5	0 1	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah laporan penyediaan jasa	kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat	Kab. Tulungag ung, Semua Kecamat	1.680.000	1.680.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
					Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				an, Semua Kelurahan	an, Semua Kelurahan			
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.008.00	146.008.000	16.000.000
5	**05**	**01**	**2.08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100 Persen**	**100 persen**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**68.670.000**	**60.900.000**	**-7.770.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.110.000	35.100.000	-5.010.000
5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainya	Unit	5 unit	1 unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.450.000	690.000	-2.760.000
5	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya yang	Unit	1 unit	1 unit	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	25.110.000	25.110.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						dipelihara / direhabilitasi				Kelurahan	Kelurahan			
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Inovasi daerah** **Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan**	**Indeks** **persen**	**60 Indeks** **100 Persen**	**62 Indeks** **100 persen**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**695.000.000**	**750.000.000**	**55.000.000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**0**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Fasiliasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang badan Usaha Milik Desa	Laporan	1 Laporan	1 Laporan			100.000.000	100.000.000	0
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola	laporan	1 laporan	1 laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	33.000.000	23.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						dengan Baik								
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pakaian Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	77.000.000	-23.000.000
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase publikasi dan diseminasi hasil kelitbangan**	**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua**	**Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua**	**385.000.000**	**340.000.000**	**-45.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
										Kelurahan	**Kelurahan**			
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	80.000.000	80.000.000	0
5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perhubungan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	110.000.000	100.000.000	-10.000.000
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	80.000.000	60.000.000	-20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						dan Kawasan Permukiman				Kelurahan	Kelurahan			
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000	100.000.000	-15.000.000
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Nilai Indeks Inovasi Daerah**	**Kegiatan**	**50 Indeks**	**59,64 Indeks**	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100.000.000**	**200.000.000**	**100.000.000**
5	05	02	2,04	0001	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua	25.000.000	25.000.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
						bidang teknologi dan inovasi				Kelurahan	Kelurahan			
5	05	02	2.04	00 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1 laporan	1 laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000	125.000.000	100.000.000
5	05	02	2.04	00 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil Kelitbangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000	25.000.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif		Tambah / Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
5	05	02	2.04	00 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	25.000.000	25.000.000	0
					Total							**3.823.306. 464,00**	**3.850.664. 853,00**	**287.421.5 74,00**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BRIDA Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja BRIDA Tahun 2025 ini hendaknya menjadi acuan kerja bagi seluruh bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja BRIDA.

Peningkatan kinerja BRIDA dapat ditempuh melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, pendanaan, ketatalaksanaan dan komitmen dari seluruh jajaran BRIDA. Peningkatan kinerja BRIDA merupakan upaya perwujudan dalam pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan BRIDA baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi dan muatan Perubahan Rencana Kerja dibatasi pada arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan, dengan harapan dapat menciptakan suasana yang mendukung peningkatan kinerja, utamanya dalam meningkatkan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian penerapan, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 26 Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dr. SUMIARSUNARTO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670609 199602 1 001

RENJA
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

INSPEKTORAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. Laksada Adi Sucipto Gg I Kenayan Telp. (0355) 321306
Email : inspektorat@tulungagung.go.id
Kode Pos 66212 Tulungagung

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu Asas Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Asas Akuntabilitas, guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar efisien dan efektif, maka diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan Triwulan II dan perkembangan perubahan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, dan perubahan kebijakan belanja daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menentukan arahan serta pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan dan skala prioritas program yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna. Disamping itu juga sebagai sarana tolok ukur pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 8
BAB IV PENUTUP 19

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s.d. Triwulan I (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s.d. Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s.d. Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						
6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program**	100	94,54	100	6,27	6,27 %
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	14 Dok	14 Dok	14 Dok	5 Dok	35,71 %
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	7 Dok	7 Dok	7 Dok	0 Dok	0 %
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 %
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	96 %	95%	96 %	0	0%
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang tersedia	4 Unit	0 Unit	4 Unit	0 Unit	0,00 %
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	38 Dok	93 %	38 Dok	6 dok	15,78%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s.d. Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s.d. Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	97 %	95 %	95 %	35 %	35 %
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu**	88 %	86 %	88 %	10,21 %	10,21%
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	143 Dok	143 Dok	143 Dok	8 Dok	5,5 %
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumaaqwaen Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	25 %
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu**	89 %	87 %	89 %	10,66 %	10,66 %
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6 Dok	4 Dok	6 Dok	1 Dok	16,66 %
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Pendampingan dan Asistensi	63 Dok	55 Dok	63 Dok	1 Dok	1,58 %

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung adalah Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tulungagung adalah :

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Program operasional yang pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan dan merupakan penjabaran secara rinci langkah – langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
        a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
        b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
        c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
        d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
        e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
        f) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
   d) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
   e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c) Sub Kegiatan enyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
   b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
      a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
      b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
      c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.
      d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan.
      e) Sub Kegiatan Pengawasan Desa.
      f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
      g) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
   2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
      a) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
   1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
      a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
      b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
   a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
   b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
   c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
   d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 3.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Inspektorat Kabupaten Tulungagung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**12.001.353.730,00**	**13.330.074.712,00**	**13.331.350.412,00**	**1.329.996.682,00**							**15.014.552.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.001.353.730,00**	**13.330.074.712,00**	**13.331.350.412,00**	**1.329.996.682,00**							**15.014.552.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12.001.353.730,00**	**13.330.074.712,00**	**13.331.350.412,00**	**1.329.996.682,00**							**15.014.552.000,00**	
1,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.401.353.730,00**	**12.065.656.712,00**	**11.520.748.012,00**	**1.383.198.270,00**							**11.784.552.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*				14 Dokumen	14 Dokumen	44.000.000,00	44.000.000,00	30.777.400,00	-13.222.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.112.000,00	-2.888.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.132.500,00	-1.867.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.132.500,00	-1.867.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.200.200,00	-1.799.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.200.200,00	-1.799.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				7 Dokumen	7 Dokumen	9.595.247.330,00	10.259.550.312,00	10.106.550.312,00	511.302.982,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		10.115.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	9.583.247.330,00	10.247.550.312,00	9.979.350.312,00	396.102.982,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			9.975.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	121.440.100,00	118.440.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.499.900,00	-1.500.100,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.260.000,00	-1.740.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	2.100.000,00	-30.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	-900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP*				96 %	96 %	412.546.800,00	691.556.900,00	622.455.100,00	209.908.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		948.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.452.600,00	-4.547.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	237.214.000,00	365.432.600,00	215.432.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			468.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.985.000,00	14.985.000,00	10.463.600,00	-4.521.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.813.800,00	35.328.900,00	17.530.300,00	-11.283.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	53.950.000,00	53.950.000,00	34.550.000,00	-19.400.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	149.798.000,00	335.079.000,00	184.026.000,00	34.228.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*				4 Unit	2 Unit	36.013.200,00	562.465.100,00	313.761.000,00	277.747.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.600.000,00	53.820.000,00	0,00	-15.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.413.200,00	508.645.100,00	313.761.000,00	293.347.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia*				38 Dokumen	38 Dokumen	133.306.400,00	217.306.400,00	224.806.400,00	91.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		163.552.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.300.000,00	81.300.000,00	88.800.000,00	7.500.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.806.400,00	120.806.400,00	120.806.400,00	84.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			38.552.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				96 %	96 %	147.240.000,00	257.778.000,00	220.297.800,00	73.057.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		315.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	97.310.000,00	125.308.000,00	106.157.800,00	8.847.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.690.000,00	106.330.000,00	91.000.000,00	60.310.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	16.240.000,00	23.140.000,00	23.140.000,00	6.900.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu**				**87 %**	**87 %**	**1.025.000.000,00**	**740.757.000,00**	**1.215.924.900,00**	**655.000.000,00**							**1.680.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				143 Dokumen	143 Dokumen	875.000.000,00	651.532.000,00	1.014.512.400,00	139.512.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		1.480.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	16 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	87.712.000,00	37.712.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	127.120.000,00	130.764.000,00	-69.236.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	100.657.000,00	25.657.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	86.801.000,00	36.801.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				72 Laporan	72 Laporan	250.000.000,00	158.900.000,00	293.010.000,00	43.010.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	176.155.000,00	126.155.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	140.512.000,00	139.413.400,00	-60.586.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	89.225.000,00	201.412.500,00	51.412.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	89.225.000,00	201.412.500,00	51.412.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

3,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu**				**88 %**	**88 %**	**575.000.000,00**	**523.661.000,00**	**594.677.500,00**	**975.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	298.661.000,00	471.602.500,00	121.602.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	189.707.000,00	39.707.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			375.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	200.000.000,00	148.661.000,00	281.895.500,00	81.895.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			375.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Dokumen Pendampingan dan Asistensi*				63 Dokumen	63 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	123.075.000,00	-101.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Inspektorat dan Instansi Terkait		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	28.255.000,00	-21.745.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	27.806.000,00	-22.194.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	40.198.000,00	-34.802.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	26.816.000,00	-23.184.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								**12.001.353.730,00**	**13.330.074.712,00**	**13.331.350.412,00**	**1.329.996.682,00**							**15.014.552.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan selama periode satu tahun yang dimulai pada 1 Januari 2025 sampai dengan Desember Tahun 2025, termasuk untuk mengakomodir adanya usulan program dan kegiatan baru yang belum masuk dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna peningkatan pencapaian kinerja pengelolaan kegiatan yang dapat terwujud apabila seluruh unsur dan potensi dapat digerakkan dan bersinergis serta adanya keseimbangan dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang didukung suasana kondusif.

Tulungagung, 08Juli 2025

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ESTY PURWANTIK, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197506282003122003

#BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENJA PERUBAHAN 2025



KECAMATAN BANDUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayah Alloh SWT telah tersusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya. Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bandung Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Bandung , 8 Juli 2025

CAMAT BANDUNG

CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19741123 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandung Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Tribulan I Tahun 2025.....9

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Bandung.....17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bandung 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....19

BAB IV PENUTUP.....2

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandung Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Tribulan I Tahun 2025	10
Tabel 3.2	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bandung	20

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BANDUNG
Jl. Panglima Jebderal Sudirman No.14 Tlp. (0355)531102
TULUNGAGUNG Kode Pos 66274

KEPUTUSAN
CAMAT BANDUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/36/17/2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
KANTOR KECAMATAN BANDUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

CAMAT BANDUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. Rencana kerja dimaksud, sesuai pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Nomor 4817)
   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
8. Tahun 2015 – 2019;
   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
13. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
15. Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
    Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabuapten tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ….. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021
17. Keputusan Camat Bandung Kabupaten Tulungagung Nomor 818/ /414/ 2018 tentang Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandungyang selanjutnya disebut Renja Perubahan Kantor Kecamatan Bandung merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Bandung.
KEDUA	:	Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.
KETIGA	:	Renja perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bandung disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bandung.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung

pada tanggal : 7 JULI 2025

CAMAT BANDUNG

CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19741123 199311 1 001

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 **1**. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bandung yang selanjutnya disebut (RENJA PERUBAHAN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Bandung, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2025 Kecamatan Bandung dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2025 Kecamatan Bandung memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Bandung secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RKOPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Kecamatan Bandung Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bandung Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bandung Tahun 2025

adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bandung Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan di sisa tahun anggaran perubahan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Bandung.

2. Tujuan

Tujuan penetapan Rencana Kerja Perubahan ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Bandung dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bandung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandung Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Tribulan I (sampai dengan bulan April) Tahun 2025, Analisis Kinerja Kecamatan Bandung, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bandung Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Bandung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standard pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bandung Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Tribulan satu tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian Tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bandung. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I (Tahun 2025) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Tahun 2025

Nama PD : Kecamatan Bandung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun ke n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun ke n (2025)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN	29 Orang/bulan	-	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokume wes lamn	-	12 Dokumen	3 Dokumen	0
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3 Laporan	-	3 Laporan	1 Laporan	0
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	-	75 Paket	75 Paket	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	-	1 Unit	1 Unit	12%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	56 Paket	-	56 Paket	56 Palet	28%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	13 Paket	-	13 Paket	13 Paket	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	300 Paket	-	300 Paket	300 Paket	16%
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	9 Laporan	-	9 Laporan	3 Laporan	14%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 Laporan	-	4 Laporan	1 Laporan	23%

				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	-	12 Laporan	3 Laporan	13%
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	3 Laporan	27%
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	3 Laporan	33%
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	9 Unit	-	9 Unit	9 unit	8,60%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu					
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga Kemasyarakat	-	2 Lembaga Kemasyarakat	2 Lembaga Kemasyarakat	97,71%
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	5 Laporan	1 Laporan	12,55%
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						
				Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi fertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	2 Laporan	1 Laporan	22,25%
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						
				Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	235 Orang	-	235 Orang	235 Orang	0%

			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	-	18 Dokumen	1 Dokumen	41,73%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bandung tahun anggaran 2025 Bulan Maret 2025 sebesar Rp.632.281.540,00,- atau 16,13 % dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 3.920.788,178,00,- Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Pagu : Rp. 3.376.272.978,00,- (APBD)

      Indikator : Jumlah dokumen administrasi keuangan

      Target Kinerja : 12 Dokumen

      Realisasi Kinerja : 3 Dokumen

      Realisasi keuangan : Rp. 534.380.557,00 ,- atau 15,83 %

      Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa/ gaji dan tunjangan, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan.

   b. Administrasi umum perangkat daerah

      Pagu : Rp. 164.654.000,- (APBD)

      Indikator : Persentase penyediaan administrasi umum

      Target Kinerja : 100%

      Realisasi Kinerja : 5%

      Realisasi keuangan : Rp. 21.795.500,00,- atau 13,24 %

      Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu : Rp. 93.431.200,- (APBD)

Indikator : Presentase jasa penunjang yang tersedia

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 20%

Realisasi keuangan : Rp. 22.100.833,00,- atau 23, 65 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 44.430.000,00,- (APBD)

Indikator : Jumlah Barang yang diperoleh

Target Kinerja : 12 unit

Realisasi Kinerja : 2 unit

Realisasi keuangan : Rp. 6.293.850,00,- atau 14,17 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Pagu : Rp. 10.000.000,00,- (APBD)
Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelayanan sesuai SOP
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0 %
Realisasi Keuangan : Rp. 0,- atau 0 %

Kegiatan ini belum dilaksanakan rencana dilaksanakan di triwulan kedua.

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pagu : Rp. 105.000.000,00,- (APBD)

Indikator : Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi

Target Kinerja : 18 Desa

Realisasi Kinerja : 34 %

Realisasi keuangan : Rp. 36.310.800,00 ,- atau 34,58 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pagu : Rp. 65.000.000,- (APBD)

Indikator : Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 0 %

Realisasi keuangan : Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan rencana dilaksanakan di Triwulan kedua berupa sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Pagu : Rp. 30.000.000,-

Indikator : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : -

Realisasi keuangan : Rp.,- atau %

Kegiatan rencana dilaksanakan di Triwulan kedua berupa fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu	:	Rp. 20.000.000,00
Indikator	:	Jumlah desa yang difasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	0 %
Realisasi keuangan	:	Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan rencana dilaksanakan di Triwulan kedua berupa fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Bandung

Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan perencanaan pada Renstra Kecamatan Bandung Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja Perubahan 2025 berdasarkan pada RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Kecamatan Bandung memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan sebanyak 2 (dua) target, pada Tahun 2025, Kecamatan Bandung menargetkan nilai 100% untuk dua indikator sasaran. Atas dasar tersebut, maka Kecamatan Bandung memproyeksikan realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 49,65% untuk kedua indikator sasaran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bandung Tahun 2025

Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya

manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya ikut andil dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas sehingga proses pelayanan menjadi semakin cepat dan mudah.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu pendukung berjalannya pelayanan dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Isu yang dihadapi oleh Kecamatan Bandung dalam memberikan pelayanan prima pada saat ini terfokus pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, serta sistem pengawasan perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta pemanfaatan teknologi informasi yang dinilai kurang.

2.4 Kendala yang dihadapi dan solusi yang akan dilakukan untuk mencapai target sampai akhir tahun periode renja

Kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam mencapai target sampai dengan triwulan I adalah karena kegiatan yang dilakukan masih mencapai 16,13 % maka pencapaian kinerja belum maksimal.

Solusi yang akan dilakukan untuk mencapai target sampai akhir periode renja adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Bandung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standard pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana kerja perubahan dan pendanaan Kecamatan Bandung Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 Kecamatan Bandung

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan/dana pagu		Tambah/Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target setelah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	10	10
7.01.0.00.0.00.01.00	**KECAMATAN BANDUNG**					**3.920.788.178**	**3.814.915.178**	**(105.873.000)**
7.01.01.2	**KECAMATAN**							
7.01.01	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Nilai	87	87	3.690.788.178	3.656.080.578	(34.707.600)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.376.272.978	3.376.272.978,00	0
	Adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Dokumen	40 dokumen	40 dokumen	12.000.000	12.000.000	0
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	%	100%	100%	164.654.000	131.166.400,00	(33.487.600)

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	%	100%	100%	93.431.200	93.431.200,00	0
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100%	100%	44.430.000	43.210.000,00	(1.310.000)
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Prosentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai dengan SOP	%	100%	100%	10.000.000	4.014.600,00	(5.985.400)
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Prosentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100%	100%	10.000.000	4.014.600,00	(5.985.400)
7.01.03	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	%	100%	100%	105.000.000	66.571.000,00	(38.429.000)
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	%	100%	100%	35.000.000	35.000.000,00	0
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	%	100%	100%	70.000.000	31.571.000,00	(38.429.000)
7.01.04	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	Presentase desa tertib peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	65.000.000	51.944.400,00	(13.055.600)

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase desa tertib peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	65.000.000	51.944.400,00	(13.055.600)
7.01.05	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Prosentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100%	100%	30.000.000	30.000.000	0
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Prosentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100%	100%	30.000.000	30.000.000	0
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase pemerintahan desayang tertib administrasi	%	100%	100%	20.000.000	6.304.600	(13.695.400)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	%	100%	100%	20.000.000	6.304.600	(13.695.400)

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 di lingkup Kecamatan Bandung yang ditargetkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam upaya mencapai target Tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/ kegiatan Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Kecamatan Bandung dapat mempedomani isi dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 8 Juli 2025
Mengetahui,
CAMAT BANDUNG

CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19741123 199311 1 0

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa



RENJA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA
KECAMATAN BESUKI
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan HidayahNya telah tersusun Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029 Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Besuki Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Besuki tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masihbanyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Besuki yang dapat kami sajikan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahuwata'ala, semoga Kecamatan Besuki mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja..

Besuki, 8 Juli 2025
Plt. CAMAT BESUKI

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BESUKI

CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741123 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB IV PENUTUP 21

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Besuki s/d Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung 8

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Besuki 16

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuki Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan target, sasaran, dan program kegiatan tahun berjalan dengan perkembangan kondisi aktual, baik karena adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah, dinamika sosial ekonomi masyarakat, maupun kondisi geografis dan lingkungan di wilayah Kecamatan Besuki. Perubahan ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja, serta masukan dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kecamatan.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2025–2029. Pada periode ini, Kecamatan Besuki dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

1. **Perubahan kebijakan pembangunan daerah** yang mengharuskan adanya penyesuaian prioritas program.
2. **Dinamika kebutuhan masyarakat** yang menuntut pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan merata.
3. **Faktor eksternal** seperti perkembangan ekonomi, inflasi daerah, dan potensi bencana alam yang dapat memengaruhi capaian target.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Kecamatan Besuki tetap sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung, selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan kerja bagi seluruh perangkat di lingkungan Kecamatan Besuki dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar penganggaran dan alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23 SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
26 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;

1.3. Maksud dan tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan terbaru, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Besuki tetap efektif, efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta perkembangan kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.

2. Mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja Kecamatan Besuki.
3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antara Renja Perubahan Kecamatan Besuki dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk lingkup Kecamatan Besuki.
5. Memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Besuki berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Tata urutan sistematika penulisan Renja Kecamatan Besuki disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu

pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Besuki Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan anggaran dalam APBD serta mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuki tahun 2025-2029, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Besuki menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing sub kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja yang mendekati target tahunan, namun terdapat pula kegiatan yang realisasinya masih rendah.

Dari sisi capaian kinerja, target kumulatif yang ditetapkan dalam Perubahan Renja sampai akhir tahun mengacu pada indikator-indikator Renstra SKPD. Sampai dengan Triwulan I, capaian kinerja rata-rata berada pada kisaran **30–50%** dari target tahunan, dengan beberapa kegiatan yang sudah melampaui separuh target, khususnya pada program penunjang urusan pemerintahan daerah seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I umumnya berkisar **30–40%** dari total pagu anggaran Perubahan Renja. Realisasi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran relatif sejalan dengan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan, meskipun masih terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya belum signifikan karena sifat pelaksanaannya yang akan terealisasi pada triwulan berikutnya.

Bila dibandingkan dengan target capaian Renstra Kecamatan Besuki, realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren positif namun masih memerlukan percepatan, terutama pada kegiatan yang strategis dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran Renstra. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pada bidang peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dengan demikian, untuk mencapai target tahunan dan target Renstra SKPD, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, III dan IV, melalui percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan ketercapaian indikator kinerja sesuai perencanaan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Besuki s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah :**Kecamatan Besuki** Lembar : .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)					
							Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**88**	**3,147,632,005.00**		**2,683,119,182.00**	**88**	**2,698,064,705.00**	**50**	**473,757,615.00**	**56.82**	**17.56**
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	7	1,600,000.00		4,660,000.00	7	1,440,000.00	**3**	360,000.00	**42.86**	**25.00**
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	800,000.00		2,450,000.00	1	720,000.00	**0**	360,000.00	**0.00**	**50.00**
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	800,000.00		2,210,000.00	1	720,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,828,899,905.00		2,009,778,298.00		2,485,599,905.00	**0**	448,021,953.00		**18.02**
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2,813,899,905.00		1,980,958,298.00	20	2,470,599,905.00	**20**	448,021,953.00		**18.13**
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	15,000,000.00		28,820,000.00	12	15,000,000.00	**6**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		15,410,000.00		12,600,000.00	**0**	-		**0.00**
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	-		15,410,000.00	2	12,600,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18,481,000.00		66,465,459.00		66,510,000.00	**0**	3,296,000.00		**4.96**
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1,365,300.00		4,095,000.00	5	6,750,000.00	**2**	-	**40.00**	**0.00**
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5,352,100.00		28,246,500.00	4	28,714,800.00	**2**	1,943,000.00	**50.00**	**6.77**
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	1,344,300.00		7,050,000.00	1	9,050,000.00	**0**	753,000.00	**0.00**	**8.32**
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	1,467,300.00		4,640,400.00	3	4,641,200.00	**1**	600,000.00	**33.33**	**12.93**

0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4,650,000.00		5,290,000.00	12	6,900,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	4,302,000.00		17,143,559.00	6	10,454,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		10,400,000.00	**0**	-		**0.00**
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	-			1	10,400,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
0.00.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-				-	**0**	-		
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,258,300.00		85,341,825.00		84,914,800.00	**0**	17,909,062.00		**21.09**
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	37,200,000.00		46,221,574.00	12	49,800,000.00	**6**	9,795,437.00	**50.00**	**19.67**
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	453,500.00		7,160,000.00	4	7,510,000.00	**1**	1,265,000.00	**25.00**	**16.84**
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	27,604,800.00		31,960,251.00	12	27,604,800.00	**6**	6,848,625.00	**50.00**	**24.81**
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28,747,000.00		34,870,100.00		36,600,000.00	**0**	4,170,600.00		**11.40**
0.00.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	19,100,000.00		34,870,100.00	6	36,600,000.00	**2**	4,170,600.00	**33.33**	**11.40**
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	9,420,000.00		-		-		-		
0.00.01.2.09.00110	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	227,000.00		-		-		-		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP (%)**	**100**	**5,000,000.00**		**5,000,000.00**	**100**	**10,000,000.00**	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	100	5,000,000.00		5,000,000.00	100	10,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	5,000,000.00		5,000,000.00	1	10,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)**	**100**	**84,919,800.00**		**89,650,000.00**	**100**	**105,000,000.00**	**50**	33,799,900.00	**50.00**	**32.19**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	10	84,919,800.00		89,650,000.00	10	105,000,000.00	**0**	33,799,900.00	**0.00**	**32.19**

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	60	34,919,800.00		34,770,000.00	10	35,000,000.00	**10**	31,599,900.00	**100.00**	**90.29**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	50,000,000.00		54,880,000.00	7	70,000,000.00	**3**	2,200,000.00	**42.86**	**3.14**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan (%)**	**100**	**65,000,000.00**		**310,860,500.00**	**100**	**-**	**0**	-	**0.00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (%)	100	65,000,000.00		310,860,500.00	100	-	**0**	-	**0.00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	55,000,000.00		310,860,500.00	12	65,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	10,000,000.00					**0**	-		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan (%)**	**100**	**34,726,000.00**		**39,203,000.00**	**100**	**30,000,000.00**	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)	10	34,726,000.00		39,203,000.00	10	30,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	200	34,726,000.00		39,203,000.00	50	30,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)**	**100**	**15,000,000.00**		**21,880,000.00**	**100**	**20,000,000.00**	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (desa)	10	15,000,000.00		21,880,000.00	10	20,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	15,000,000.00		21,880,000.00	1	20,000,000.00	**0**	-	**0.00**	**0.00**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Besuki tahun anggaran 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar Rp. 507.557.515,- atau 17,33 % dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 2.928.064.705,- Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 1.440.000

Indikator : Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah

Target Kinerja : 7 Dokumen

Realisasi Kinerja : 3 Dokumen

Realisasi keuangan : Rp. 360.000,- atau 25 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 2.485.599.905

Indikator : Jumlah dokumen administrasi keuangan

Target Kinerja : 12 Dokumen

Realisasi Kinerja : 3 Dokumen

Realisasi keuangan : Rp. 448.021.953 atau 18,89 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa/ gaji dan tunjangan, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 12.600.000

Indikator : Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 0 %

Realisasi keuangan : Rp. 0,- atau 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi umum perangkat daerah

Pagu : Rp. 66.510.000

Indikator : Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 5,17 %

Realisasi keuangan : Rp. 3.296.000,- atau 4.96 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu : Rp. 84.914.800

Indikator : Presentase jasa penunjang yang tersedia

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 21.36%

Realisasi keuangan : Rp. 17.909.062,- atau 21.09 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 36.600.000

Indikator : Jumlah Barang yang diperoleh

Target Kinerja : 6 unit

Realisasi Kinerja : 2 unit

Realisasi keuangan : Rp. 4.170.600,- atau 11,40 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Pagu : Rp. 10.000.000

Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelayanan sesuai SOP

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 0%

Realisasi Keuangan: Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pagu : Rp. 105.000.000

Indikator : Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi

Target Kinerja : 10 Desa

Realisasi Kinerja : 35,67 %

Realisasi keuangan: 33.799.900 atau 32.19 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pagu : Rp. 65.000.000

Indikator : Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : %

Realisasi keuangan: Rp. 0 atau 0

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Pagu : Rp. 30.000.000,-

Indikator : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : -

Realisasi keuangan : Rp.,- atau %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu : Rp. 20.000.000,-

Indikator : Jumlah desa yang difasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : %

Realisasi keuangan: Rp. ,- atau 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Besuki Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Besuki.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Selain itu, rencana kerja ini disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Besuki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai Triwulan I, beberapa target kinerja pada kegiatan prioritas mengalami penyesuaian untuk memastikan ketercapaian sasaran pada akhir tahun, terutama pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, program peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, program pelayanan administrasi pemerintahan, dan program pengadaan serta pemeliharaan sarana/prasarana penunjang. Penyesuaian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat strategis dan mendukung langsung pelayanan kepada masyarakat, serta menunda atau mengurangi kegiatan yang realisasinya dinilai kurang mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, Perubahan Renja Kecamatan Besuki Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen operasional yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Besuki, serta memperkuat kontribusi kecamatan terhadap target RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Adapun Rencana kerja perubahan dan pendanaan Kecamatan Besuki Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025

Kecamatan Besuki

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Taget Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**Indeks**	**87**	**87**			**2,928,064,705.00**	**3,155,930,055.00**	**227,865,350.00**
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	Dokumen	7	7			1,440,000.00	1,440,000.00	-
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	720,000.00	720,000.00	-
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	720,000.00	720,000.00	-
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,485,599,905.00	2,828,899,905.00	343,300,000.00
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	20	20	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	2,470,599,905.00	2,813,899,905.00	343,300,000.00

		Tunjangan ASN (Orang/bulan)								
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	15,000,000.00	15,000,000.00	-
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							12,600,000.00	7,200,000.00	-5,400,000.00
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	2	2	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	12,600,000.00	7,200,000.00	-5,400,000.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							66,510,000.00	40,099,900.00	-26,410,100.00
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	6,750,000.00	2,216,000.00	-4,534,000.00
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	28,714,800.00	20,853,600.00	-7,861,200.00
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	9,050,000.00	3,358,500.00	-5,691,500.00
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	4,641,200.00	4,641,200.00	-
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	6,900,000.00	3,845,600.00	-3,054,400.00
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	6	6	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	10,454,000.00	5,185,000.00	-5,269,000.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10,400,000.00	-	-10,400,000.00
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	10,400,000.00	-	-10,400,000.00

0.00.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	-	-	-
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							84,914,800.00	84,914,800.00	-
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	49,800,000.00	49,800,000.00	-
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	4	4	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	7,510,000.00	7,510,000.00	-
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	27,604,800.00	27,604,800.00	-
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,600,000.00	36,600,000.00	-
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	6	6	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	36,600,000.00	36,600,000.00	-
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	-	-	-
0.00.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	-	-	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**10,000,000.00**	**4,852,150.00**	**-5,147,850.00**

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	**Persen**	100	100			10,000,000.00	4,852,150.00	-5,147,850.00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	**Laporan**	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	10,000,000.00	4,852,150.00	-5,147,850.00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**105,000,000.00**	**60,481,200.00**	**-44,518,800.00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	**Kegiatan**	10	10			105,000,000.00	60,481,200.00	-44,518,800.00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	**Lembaga**	60	60	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	35,000,000.00	31,619,000.00	-3,381,000.00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	**Laporan**	7	7	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	70,000,000.00	28,862,200.00	-41,137,800.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**65,000,000.00**	**51,081,100.00**	**-13,918,900.00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (%)	**Persen**	100	100			65,000,000.00	51,081,100.00	-13,918,900.00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	**Laporan**	12	12	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	65,000,000.00	51,081,100.00	-13,918,900.00

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**-**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)	**Kegiatan**	10	10			30,000,000.00	30,000,000.00	-
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	**Orang**	50	50	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	30,000,000.00	30,000,000.00	-
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**20,000,000.00**	**10,361,000.00**	**-9,639,000.00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (desa)	**Desa**	10	10			20,000,000.00	10,361,000.00	-9,639,000.00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	**Dokumen**	1	1	KECAMATAN BESUKI	KECAMATAN BESUKI	20,000,000.00	10,361,000.00	-9,639,000.00

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Besuki Tahun 2025 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Besuki Tahun 2024 – 2026. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Besuki sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Besuki.

Perubahan Rencana Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Kasi, Kasubbag dan seluruh jajaran staf Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya seseuai tugas dan kewenangannya
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksananaan Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Besuki Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Besuki, 8 Juli 2025
Plt. CAMAT BESUKI

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BESUKI

CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741123 199311 1 001

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN BOYOLANGU



KECAMATAN BOYOLANGU
Jalan Raya Boyolangu No. 01
(0354) 322614
KODE POS 66271 BOYOLANGU

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memberikan pedoman tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta berbagai aspek lainnya terkait rencana pembangunan daerah. Ketentuan ini juga berlandaskan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ini memuat tujuan, sasaran, dan program kerja yang dirancang untuk menghadapi tahun anggaran 2026. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pemerintahan yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan tugas perangkat daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapannya, dokumen ini mampu menjadi pedoman yang efektif untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik di lingkup Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Kami percaya, melalui kerja sama yang baik dan upaya maksimal, program serta kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini dapat terlaksana sesuai rencana, membawa manfaat yang luas, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Boyolangu, 2 Juli 2025
CAMAT BOYOLANGU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BOYOLANGU

Drs.EKO KENNIS YULIANTO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691207 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ..

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Kajian Evaluasi Perubahan Renja Sampai dengan Triwulan I 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

BAB IV PENUTUP 16

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Evaluasi Terhadap Hasil Renca PD Periode Pelaksanaan Tahun 2025 Triwulan I	7
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Boyolangu KabupatenTulungagung	10
Tabel T-C.33	Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Boyolangu Kab. Tulungagung Tahun 2025	13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Boyolangu Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Boyolangu agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Boyolangu memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Boyolangu.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

   2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Boyolangu untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Boyolangu.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Boyolangu.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Boyolangu adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Boyolangu.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Boyolangu selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Boyolangu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

2.1. Kajian Review Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Boyolangu terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

2.1. Kajian Review Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Boyolangu Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Tabel T-C.29 Evaluasi Terhadap Hasil Renca PD Periode Pelaksanaan Tahun 2025
Triwulan I

Kode	Uraian / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 5 + 8 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Meleloff) (Nilai)***	**92**	**2.361.752.404,00**	**89**	**2.296.873.442,00**		**3.144.395.248,00**		**523.944.444,00**		-		-		-	**0**	**523.944.444,00**	**89**	**2.820.817.886,00**	**96,7351**		
		Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang	100		100		100		0								17		19		117		
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*	1	8.207.500,00	2	4.164.000,00	2	8.207.500,00	1	-		-		-		-	1	-	3	4.164.000,00	300	50,73	
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*			1	1.824.000,00	1	2.254.500,00	0	-							0	-	1	1.824.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan*			5	-	5	2.493.000,00	1	-							1	-	6	-			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			1	3.120.000,00	1	3.480.000,00	1	-							1	-	2	3.120.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan (Dokumen)*	2	2.178.777.704,00	1	2.012.525.685,00	1	2.880.420.341,00	1	505.486.749,00		-		-		-	1	505.486.749,00	2	2.522.012.433,00	100	32,67	
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*			24	2.012.525.685,00	24	2.880.420.341,00	24	505.486.749,00							24	505.486.749,00	48	2.522.012.433,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD (Dokumen)*	2	-	1	6.300.000,00	1	-	1	-	-	-		-		-	1	-	2	6.300.000,00	100	-	
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*			24	6.300.000,00	24	-	0	-							0	-	24	6.300.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang*	100	100.906.500,00	100	86.789.236,00	100	71.996.500,00	100	-	-	-		-		-	100	-	280	86.789.236,00	280	92,6	
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang*			1	1.945.000,00	1	3.080.000,00	1	-							1	-	2	1.945.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			1	56.089.000,00	1	40.582.500,00	1	-							1	-	2	56.089.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			4	4.704.000,00	4	9.511.000,00	4	-							4	-	8	4.704.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.06.0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Layanan)*			1	11.685.236,00	1	5.560.000,00	0	-							0	-	1	11.685.236,00			KECAMATAN BOYOLANGU

0.00.01.2.06.800 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*				1	21.645.800,00	1	12.522.000,00	1	-						1		-	2	21.645.800,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia (Unit)*	1	7.556.800,00	20	6.750.080,00	20	7.556.000,80	0	-	-	-	-	-	0	-	20	6.750.800,00	2000	89,33	
0.00.01.2.07.801 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*			20	6.750.080,00	20	7.556.000,80	20	-					20		40	6.750.800,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia*	12	120.774.700,00	12	115.938.456,00	12	123.774.780,00	3	14.457.696,80	-	-	-	-	3	14.457.696,80	15	129.396.152,00	125	108,97	
0.00.01.2.08.800 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang*			12	95.180.912,00	12	59.168.700,00	3	3.043.320,80					3	3.043.320,00	15	59.824.232,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.08.800 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Layanan)*			12	69.757.584,00	12	61.806.000,00	2	11.414.376,80					3	9.418.224,00	15	71.071.800,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)*	8	5.041.600,00	100	54.756.105,00	100	38.643.000,80	100	-	-	-	-	-	100	-	200	54.756.105,00	2500	1.086,43	
0.00.01.2.09.800 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan*			26	36.300.800,00	26	35.600.000,80	26	-					26		77	34.901.800,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.09.800 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			8	7.960.080,00	8	2.840.000,80	8	-					8		16	7.968.800,00			KECAMATAN BOYOLANGU
0.00.01.2.09.800 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			1	9.895.105,00	1	-	0	-					0	-	1	9.895.105,00			KECAMATAN BOYOLANGU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00000			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP (%)***	**100**	**10.000.000,00**	**100**	**5.000.000,00**	**100**	**10.000.000,00**	**100**	-	-	-	-	-	**100**	-	**200**	**5.000.000,00**	**200**		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN (%)*	32	10.000.000,00	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	-	-	-	-	-	100	-	200	5.000.000,00	317,2915	50,00	
7.01.02.2.04.800 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	*Jumlah Dokumen Izin Prinsip yang Dikeluarkan (Dokumen)*			1	-	1	-	1	-					1	-	2	-			KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.02.2.04.800 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kepercayaan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepercayaan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*			0	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	-					1	-	1	5.000.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				200,00000			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	***Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang***	**100**	**105.000.000,00**	**100**	**35.288.864,00**	**100**	**105.000.000,00**	**100**	**55.316.600,00**	-	-	-	-	**100**	**55.316.600,00**	**200**	**90.605.464,00**	**200**		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang*	17	105.000.000,00	5	25.288.864,00	5	105.000.000,80	5	55.316.600,00	-	-	-	-	5	105.316.600,80	10	90.605.464,00	58,82353	85,29	
7.01.03.2.01.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*			17	30.849.864,80		35.600.080,00		30.940.800,00					0	36.540.000,00	17	61.789.864,80			KECAMATAN BOYOLANGU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan			17		17								0		17				
7.01.03.2.01.800 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*			1	4.470.080,00	1	70.000.080,00		24.376.800,00					0	24.376.800,00	1	28.846.880,00			KECAMATAN BOYOLANGU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				120,41204			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan (%)***	**100**	**65.000.000,00**	**100**	**420.431.000,00**	**100**	**65.000.000,00**		-	-	-	-	-	**0**	-	**100**	**420.431.000,00**	**100**		
		Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan	100		100		100								0		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tramtib*	17	65.000.000,00	17	420.431.000,80	17	65.000.080,00	-	-	-	-	-	-	0	-	17	420.431.000,80	100	646,82	
7.01.04.2.01.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di*			1	420.431.000,80	1	65.000.080,00		-					0	-	1	420.431.000,80			KECAMATAN BOYOLANGU

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100**	**30.000.000,00**	**100**	**40.000.000,00**		**30.000.000,00**		-		-		-		-	**0**	-	**100**	**40.000.000,00**	**100**		
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dalam	100		100		100										0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kegiatan)*	12	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00		-		-		-		-	0	-	1	40.000.000,00	8.333.333	50,33	
7.01.05.2.01.9001	Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan*			75	40.000.000,00	75	30.000.000,00									0	-	75	40.000.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
Pelaksana Capaian Kinerja (%)																							
Prediksi Kinerja																							
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	***Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib***	**100**	**30.000.000,00**	**100**	**8.160.000,00**	**100**	**30.000.000,00**		**6.760.000,00**		-		-		-	**0**	**6.760.000,00**	**100**	**14.920.000,00**	**100**		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen yang dievaluasi (Unsur administrasi/Desa)*	0	30.000.000,00	11	8.160.000,00	11	30.000.000,00		6.760.000,00		-		-		-	0	6.760.000,00	0	14.920.000,00	100	49,73	
7.01.06.2.01.9001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset*			1	8.160.000,00	1	30.000.000,00		6.760.000,00							0	6.760.000,00	1	14.920.000,00			KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.06.2.01.9002	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Pembangunan Partisipatif*			0	-	1	-									0	-	0	-			KECAMATAN BOYOLANGU
Pelaksana Capaian Kinerja (%)																							
Prediksi Kinerja																							
ket penyebab kesenjangan kinerja																							
ket penghambat pencapaian kinerja																							
(tuliskan uraian yang diperlukan dalam rancangan perbaikan untuk)																							
(tuliskan uraian yang diperlukan dalam Perkin Perangkat Daerah Kabupaten untuk)																							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Kedudukan Kecamatan Boyolangu adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Boyolangu mempunyai Indikator Kinerja Utama yang juga sudah ditetapkan dalan Renstra kecamatan sebagaimana tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai rata – rata tertimbang x 25
2.	Meningkatnya Efektivitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Desa yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	$\frac{\text{Jumlah desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi}}{\text{seluruh desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi}} x\ 100$

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Boyolangu didasarkan pada capaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Boyolangu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Catatan Analisis
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	92,00	92,00	Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan I tahun Berjalan
2.	Persentase desa yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	100%	30 %	30 %	Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan I tahun Berjalan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat daerah, adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman ASN lingkup Kecamatan Boyolangu terhadap Budaya Kerja dan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat masih rendah.
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga nilai IKM dan IPP Kecamatan Boyolangu tidak dapat meningkat signifikan.
3. Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN Kecamatan Boyolangu sehingga pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik

2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasioanal, seperti SPM dan SDGs (Substainabel Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Boyolangu merupakan fungsi pendukung pencapaian keberhasilan dari visi misi Kabupaten Tulungagung yang akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Masih rendahnya kesadaran ASN terhadap prosedur dan tata laksana pelayanan publik dan organisasi.
2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi organisasi dan pelayanan public yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Komitmen Camat yang diperkuat dalam dokumen perjanjian kinerja dan maklumat pelayanan dalam peningkatan pelayanan publik.
2) Adanya dukungan lintas sector dan instansi vertical di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

1) Penerapan Sistem Informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik baik pelayanan perijinan, kesehatan, kependudukan dan lain-lain.
2) Guna meningkatkan pelayanan publik yang bersifatd inamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupaya kan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
3) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak terutama lintas sector pelayanan terkait.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boyolangu terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan Boyolangu untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel T-C.33 Perubahan Renja PD Kecamatan Boyolangu Tahun 2025

Tabel C.33

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BOYOLANGU							**3.201.752.404,00**	**3.384.395.248,00**	**2.960.574.048,00**	**-241.178.356,00**							**4.522.091.509,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.201.752.404,00**	**3.384.395.248,00**	**2.960.574.048,00**	**-241.178.356,00**							**4.522.091.509,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.201.752.404,00**	**3.384.395.248,00**	**2.960.574.048,00**	**-241.178.356,00**							**4.522.091.509,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerint Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan [deleted]**				**100 89 % Nilai**	**100 89 % Nilai**	**2.961.752.404,00**	**3.144.395.248,00**	**2.783.094.048,00**	**1.189.339.105,00**							**4.151.091.509,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	8.217.500,00	8.217.500,00	8.217.500,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.500,00	2.234.500,00	2.234.500,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.493.000,00	2.493.000,00	2.493.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.715.777.704,00	2.898.420.548,00	2.550.420.548,00	-165.357.156,00			-	- -	-		3.331.091.509,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.715.777.704,00	2.898.420.548,00	2.550.420.548,00	-165.357.156,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.331.091.509,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD*				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		17.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP*				100 %	100 %	104.986.500,00	71.386.500,00	45.096.500,00	-59.890.000,00			-	- -	-		94.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	2.371.000,00	-629.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.182.500,00	40.582.500,00	24.536.500,00	-49.646.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.611.000,00	9.611.000,00	8.309.000,00	-1.302.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.633.000,00	12.633.000,00	4.320.000,00	-8.313.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*				20 Unit	20 Unit	7.556.000,00	7.556.000,00	4.854.800,00	-2.701.200,00			-	- -	-		11.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	7.556.000,00	7.556.000,00	4.854.800,00	-2.701.200,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	120.174.700,00	120.174.700,00	120.174.700,00	0,00			-	- -	-		121.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.166.700,00	59.166.700,00	59.166.700,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.008.000,00	61.008.000,00	61.008.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.500.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	5.040.000,00	38.640.000,00	54.330.000,00	49.290.000,00			-	- -	-		554.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	36 Unit	2.200.000,00	35.800.000,00	35.800.000,00	33.600.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	18.530.000,00	15.690.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.980.000,00**	**36.000.000,00**							**46.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.980.000,00	-4.020.000,00			-	- -	-		46.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.980.000,00	-4.020.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berbasis Koperasi Usaha Mikro dan pemberdayaan masyarakat Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berbasis Koperasi Usaha Mikro dan pemberdayaan masyarakat			6.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**64.780.000,00**	**10.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	105.000.000,00	105.000.000,00	64.780.000,00	-40.220.000,00			-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat	-		115.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat			60.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	29.780.000,00	-40.220.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Desa TERTIB Peraturan Perundangan Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**10.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang Difasilitasi*				17 Desa	17 Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			-	- -	-		75.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum [deleted]**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75 Orang	75 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**11.720.000,00**	**60.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya*				17 Desa	17 Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	11.720.000,00	-18.280.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	11.720.000,00	-18.280.000,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Boyolangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BOYOLANGU
	J U M L A H								**3.201.752.404,00**	**3.384.395.248,00**	**2.960.574.048,00**	**-241.178.356,00**							**4.522.091.509,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 Kecamatan Boyolangu didalamnya mencakup Tujuan. Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik. Adanya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Boyolangu beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah. bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat. akurat. transparant dan adil.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 dapat tercapai dengan lebih baik.

Boyolangu. 2 Juli 2025
CAMAT BOYOLANGU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BOYOLANGU

Drs. EKO KENNIS YULIANTO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691207 199503 1 002



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

TAHUN 2025

mswordcoverpa

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN 2025)
KECAMATAN CAMPURDARAT
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan tepat waktu.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campurdarat yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Kecamatan Campurdarat adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan khususnya pada Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Campurdarat, 08 Juli 2025

Camat Campurdarat,



Tri Wantoro, S. Sos., M. Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720413 199201 1 002

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I 4
P E N D A H U L U A N 4
1.1.LATAR BELAKANG 4
1.2.LANDASAN HUKUM 5
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II 10
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 10
2.1.Evaluasi Renja Kecamatan Campurdarat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Campurdarat 19
BAB III 20
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20
BAB IV 27
PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel C-29. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renca PD Periode Pelaksanaan Tahun 2025 Triwulan II 11
Tabel 2. 1 Formulasi Penghitungan IKU PD 17
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 (Triwulan II) 18
Tabel C-33.Perubahan Renja PD Kecamatan 1 21

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1.LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Campurdarat yang selanjutnya disebut (RENJA PERUBAHAN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Campurdarat, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2025 Kecamatan Campurdarat dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan dayaguna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Campurdarat tahun 2025. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Campurdarat tahun 2026 adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Campurdarat Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program– program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip–prinsip **GOODGOVERMANT** .

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Campurdarat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Campurdarat.

Tujuan:

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Campurdarat tahun 2025 adalah

1. Menetapkan kebijakan, Perubahan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tulungagung guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Campurdarat.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Perubahan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Campurdarat Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Perubahan Renja Kecamatan Campurdarat dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025..

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelasksanaan Renja Kecamatan Campurdarat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Campurdarat terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindakklanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

2.1.Evaluasi Renja Kecamatan Campurdarat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Campurdarat Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Anggaran Kecamatan Campurdarat tahun 2025 sebesar Rp 2.824.304.010,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) ini sebesar Rp 673.318.691,00 dengan persentase capaian keuangan 23,05% dan rata-rata capaian kinerja sebesar **24,39%.** Sesuai dengan tabel berikut ini;

Tabel C-29. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renca PD Periode Pelaksanaan Tahun 2025 Triwulan I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (%)***		-		2.274.498.234,00		2.700.600.010,00		552.799.933,00		-		-		-	0	552.799.933,00	0	2.827.298.167,00	**0**		
		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)			94		100		25								25		119		0		
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (Dokumen)*			12	1.993.105.077,00	12	2.455.592.010,00	3	512.869.280,00		-		-		-	3	512.869.280,00	15	2.505.974.357,00	0	-	
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*			17	1.964.205.077,00	18	2.440.592.010,00	17	512.869.280,00							17	512.869.280,00	34	2.477.074.357,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*			12	28.900.000,00	12	15.000.000,00	3	-							3	-	15	28.900.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)*			0	-		-	0	-							0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT

0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*			2	17.690.000,00	1	11.500.000,00	0	-							0	-	2	17.690.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*			0	-	54	-	0	-							0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)*			100	69.403.100,00	100	80.620.000,00	13	10.533.500,00		-		-		-	13	10.533.500,00	113	79.936.600,00	0	-	
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*			10	939.000,00	9	1.221.500,00	0	-							0	-	10	939.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*			36	30.710.300,00	36	28.805.200,00	7	6.943.000,00							7	6.943.000,00	43	37.653.300,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*			14	2.619.000,00	12	3.090.000,00	6	1.429.500,00							6	1.429.500,00	20	4.048.500,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*			3	7.172.800,00	3	6.692.700,00	1	825.000,00							1	825.000,00	4	7.997.800,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*			12	7.276.000,00	12	9.526.600,00	3	1.336.000,00							3	1.336.000,00	15	8.612.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*			12	20.686.000,00	12	31.284.000,00	0	-							0	-	12	20.686.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT

0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang yang diperoleh (unit)*			5	6.900.000,00	4	-	0	-		-		-		-	0	-	5	6.900.000,00	0	-	
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*			2	6.900.000,00		-	0	-							0	-	2	6.900.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang tersedia (%)*			100	94.280.507,00	100	104.808.000,00	23	23.444.653,00		-		-		-	23	23.444.653,00	123	117.725.160,00	0	-	
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*			12	45.623.003,00	12	55.800.000,00	3	11.280.277,00							3	11.280.277,00	15	56.903.280,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*			0	-	12	-	0	-							0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*			12	48.657.504,00	12	49.008.000,00	3	12.164.376,00							3	12.164.376,00	15	60.821.880,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)*			100	93.119.550,00	100	48.080.000,00	14	5.952.500,00		-		-		-	14	5.952.500,00	114	99.072.050,00	0	-	
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*			6	35.074.550,00	6	39.350.000,00	1	5.527.500,00							1	5.527.500,00	7	40.602.050,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*			20	8.535.000,00	20	8.730.000,00	1	425.000,00							1	425.000,00	21	8.960.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			1	49.510.000,00		-	0	-							0	-	1	49.510.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
0.00.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*			0	-		-	0	-							0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah						

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP (%)***		-	**100**	**4.848.000,00**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	-		-	-		-	**0**	-	**100**	**4.848.000,00**	**0**		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN (%)*			100	4.848.000,00	100	10.000.000,00	0	-		-	-		-	0	-	100	4.848.000,00	0	-	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)*				-		-		-						0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan ()			0		16		0							0		0				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*			1	4.848.000,00	1	10.000.000,00	0	-						0	-	1	4.848.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah						
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)***		-	**100**	**88.113.700,00**	**100**	**100.000.000,00**	**35**	**33.552.000,00**		-	-		-	**35**	**33.552.000,00**	**135**	**121.665.700,00**	**0**		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang difasilitasi (Kegiatan)*			4	88.113.700,00	4	100.000.000,00	1	33.552.000,00		-	-		-	1	33.552.000,00	5	121.665.700,00	0	-	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*				33.623.500,00		35.000.000,00		33.552.000,00						0	33.552.000,00	0	67.175.500,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)			9		9		9							9		18				

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*			9	54.490.200,00	9	65.000.000,00	0	-						0	-	9	54.490.200,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah							
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase desa tertib peraturan perundangan (%)***		-	**100**	**293.521.600,00**	**100**	**60.000.000,00**	**0**	-		-		-		**0**	-	**100**	**293.521.600,00**	**0**		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasiliasi (Desa)*			9	293.521.600,00	9	60.000.000,00	0	-		-		-		0	-	9	293.521.600,00	0	-	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*			9	293.521.600,00	9	60.000.000,00	0	-						0	-	9	293.521.600,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)*			0	-	1	-	0	-						0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah							
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan (%)***		-	**100**	**36.652.000,00**	**100**	**30.000.000,00**	**0**	-		-		-		**0**	-	**100**	**36.652.000,00**	**0**		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan urusan Pemerinahan Umum yang Difasilitasi (Kegiatan)*			3	36.652.000,00	3	30.000.000,00	0	-		-		-		0	-	3	36.652.000,00	0	-	

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)*			250	29.662.500,00	250	30.000.000,00	0	-						0	-	250	29.662.500,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)*			9	6.989.500,00	9	-	0	-						0	-	9	6.989.500,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah								
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)***		-	**100**	**19.866.000,00**	**100**	**20.000.000,00**	**0**	-	-	-	-		**0**	-	**100**	**19.866.000,00**	**0**		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang di evaluasi kinerja administrasinya (desa)*			9	19.866.000,00	9	20.000.000,00	0	-	-	-	-		0	-	9	19.866.000,00	0	-	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)*			0	-	9	-	0	-						0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)*			9	19.866.000,00	9	20.000.000,00	0	-						0	-	9	19.866.000,00			KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)*			0	-	9	-	0	-						0	-	0	-			KECAMATAN CAMPURDARAT
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten berikutnya*) :																							

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung melaksanakan 6 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dari 19 Sub kegiatan, 9 sub kegiatan sudah mencapai target dan 10 sub kegiatan belum mencapai target.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Campurdarat terdiri dari 9 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Campurdarat lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Campurdarat mempunyai Indikator Kinerja Utama yang juga sudah ditetapkan dalan Renstra kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulasi Penghitungan IKU PD

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat = jumlah\ nilai\ rata - rata\ tertimbang\ X\ 25$
2	Meningkatnya Efektivitas Monitoring dan Evaluasi	Presentase Desa Yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	$\frac{jumlah\ desa\ yang\ menindaklanjuti\ rekomendasi\ hasil\ monitoring\ dan\ evaluasi}{seluruh\ desa\ yang\ dilakukan\ monitoring\ dan\ evaluasi} X\ 100$

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 (Triwulan I)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Catatan Analisis
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,79	92,61	98,74	Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan I tahun Berjalan
2.	Persentase desa yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	100%	55,5%	55,5%	Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan I tahun Berjalan

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Campurdarat

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Campurdarat bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Campurdarat untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peninkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan .
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan Campurdarat sebagai penjabaran visi misi kabupaten Tulungagung.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
    - Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
    - Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
    - Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Campurdarat terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan Campurdarat untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam :
Tabel T-C.33 Perubahan Renja PD Kecamatan Campurdarat Tahun 2025

TABEL C-33. PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CAMPURDARAT KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	KECAMATAN CAMPURDARAT							**2.591.083.932,00**	**2.920.600.010,00**	**2.815.690.510,00**	**224.606.578,00**							**3.201.061.575,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.591.083.932,00**	**2.920.600.010,00**	**2.815.690.510,00**	**224.606.578,00**							**3.201.061.575,00**	
7.01	**KECAMATAN**							**2.591.083.932,00**	**2.920.600.010,00**	**2.815.690.510,00**	**224.606.578,00**							**3.201.061.575,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**100 %**	**85 %**	**2.371.083.932,00**	**2.700.600.010,00**	**2.628.423.910,00**	**559.224.610,00**							**2.930.308.542,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.126.075.932,00	2.455.592.010,00	2.388.592.010,00	262.516.078,00			-	- -	ASN Kec Campurdarat Kab. Tulungagung		2.369.596.604,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.111.075.932,00	2.440.592.010,00	2.373.592.010,00	262.516.078,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.351.160.604,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.500.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.936.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD*				10 Dokumen	10 Dokumen	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00			-	- -	ASN Kec Campurdarat Kab. Tulungagung		30.715.080,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.770.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP*				100 %	100 %	77.280.000,00	80.620.000,00	77.473.900,00	193.900,00			-	- -	ASN Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		219.537.558,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				9 Paket	9 Paket	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.343.650,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	38 Paket	24.971.200,00	28.805.200,00	43.962.300,00	18.991.100,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			159.926.908,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.399.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.692.700,00	6.692.700,00	4.992.000,00	-1.700.700,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.170.150,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.526.600,00	9.526.600,00	6.894.100,00	-2.632.500,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.986.250,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31.778.000,00	31.284.000,00	17.314.000,00	-14.464.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.711.600,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang yang diperoleh*				4 unit	4 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	ASN Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		14.466.400,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Pengadaan Mebel																		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.466.400,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang tersedia*				100 %	100 %	104.808.000,00	104.808.000,00	104.808.000,00	0,00			-	- -	ASN Kec Campurdarat Kab. Tulungagung		124.022.800,00	KECAMATAN CAMPURDARAT

	7.01.01.2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.590.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.524.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.008.000,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.908.800,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	51.420.000,00	48.080.000,00	46.050.000,00	-5.370.000,00			-	-	ASN Kec Campurdarat Kabupaten Tulungagung		171.970.100,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				6 Unit	6 Unit	42.690.000,00	39.350.000,00	39.350.000,00	-3.340.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.887.500,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	8.730.000,00	8.730.000,00	6.700.000,00	-2.030.000,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.625.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.007.600,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
	7.01.01.2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.450.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.267.100,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	7.267.100,00	-2.732.900,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		10.500.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.267.100,00	-2.732.900,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Program dan Keglatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**61.878.400,00**	**-1.242.000,00**							**98.758.000,00**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang difasilitasi*				4 Kegiatan	5 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	61.878.400,00	-38.121.600,00			-	- -	Seluruh Desa Sekecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		98.758.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyaw arah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Campurdarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.258.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan				9 Laporan	9 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	26.878.400,00	-38.121.600,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.500.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase desa tertib peraturan perundangan**				**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**81.083.600,00**	**21.044.333,00**							**81.044.333,00**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasiliasi*				9 Desa	9 Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	81.083.600,00	21.083.600,00			Memperkuat penyelarasa n kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -	Linmas dan Masyarakat diw ilayah Kecamatan Campurdarat Kab. Tulungagung		81.044.333,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	81.083.600,00	21.083.600,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasa n kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -			73.179.333,00	KECAMATAN CAMPURDARAT

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -			7.865.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**28.680.400,00**	**9.492.750,00**							**39.492.750,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan urusan Pemerinahan Umum yang Difasilitasi*				3 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	28.680.400,00	-1.319.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -	Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		39.492.750,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Waw asan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				250 Orang	250 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	28.680.400,00	-1.319.600,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -			33.206.250,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				9 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	- -			6.286.500,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib**				**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.357.100,00**	**20.957.950,00**							**40.957.950,00**	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang di evaluasi kinerja administrasinya*				9 desa	9 desa	20.000.000,00	20.000.000,00	8.357.100,00	-11.642.900,00			-	-	Seluruh Desa Sekecamatan Campurdarat Kab. Tulungagung		40.957.950,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.06.2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan				9 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.820.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.06.2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset				9 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	8.357.100,00	-11.642.900,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.06.2.01 0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan				9 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Campurdarat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.137.950,00	KECAMATAN CAMPURDARAT
J U M L A H								**2.591.083.932,00**	**2.920.600.010,00**	**2.815.690.510,00**	**224.606.578,00**							**3.201.061.575,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Campurdarat, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Campurdarat Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2025. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Campurdarat wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Campurdarat ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Campurdarat Tahun 2025.

Campurdarat, 08 Juli 2025

CAMAT CAMPURDARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN CAMPURDARAT

TRI WANTORO, S. Sos, M. Si

Pembina TK I, IV/b

NIP. 197204131992011002

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

KECAMATAN GONDANG



0355322316

Jl. Brontoseno No.22 Gondang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memberikan pedoman tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta berbagai aspek lainnya terkait rencana pembangunan daerah. Ketentuan ini juga berlandaskan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini memuat tujuan, sasaran, dan program kerja yang dirancang untuk menghadapi tahun anggaran 2026. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pemerintahan yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan tugas perangkat daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapannya, dokumen ini mampu menjadi pedoman yang efektif untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik di lingkup Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kami percaya, melalui kerja sama yang baik dan upaya maksimal, program serta kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini dapat terlaksana sesuai rencana, membawa manfaat yang luas, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Gondang, 08 Juli 2025
CAMAT GONDANG

ENDRA KUSRIAWAN, SSTP. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197703291997111001

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **14**

BAB IV PENUTUP **20**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Gondang.....	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Gondang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Gondang agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Gondang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Gondang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah Tahun 2025.
24. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Gondang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Gondang.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gondang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Gondang adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Gondang.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Gondang selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Gondang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Gondang sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gondang sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Kecamatan Gondang mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Kecamatan Gondang dan/atau realisasi APBD Kecamatan Gondang

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Gondang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Kecamatan Gondang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondang Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondang tahun 2024-2026, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Gondang menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing program maupun kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja sesuai target pada Triwulan I, namun terdapat pula program maupun kegiatan yang belum terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan pada Triwulan III seperti pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dimana aktivitasnya berupa rangkaian Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dilaksanakan di bulan agustus 2025.

Cara perhitungan capaian target kinerja pada Program di Kecamatan Gondang ada yang secara komulatif dan non komulatif, untuk yang komulatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rata-Rata Tingkatan Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarajat Desa yang di fasilitasi,
3. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dengan indikator Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan, dan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi.

Komulatif disini berarti Perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun dilakukan dengan menjumlahkan atau mengakumulasi seluruh pencapaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Sedangkan cara perhitungan non komulatif terdapat pada :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP, dan

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase desa tertib peraturan perundang undangan.

Bila dibandingkan dengan target capaian Renstra Kecamatan Gondang, realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren positif namun masih memerlukan percepatan, terutama pada kegiatan yang strategis dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran Renstra. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pada bidang peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dengan demikian, untuk mencapai target tahunan dan target Renstra SKPD, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, III dan IV, melalui percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan ketercapaian indikator kinerja sesuai perencanaan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Gondang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi S/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	KECAMATAN GONDANG						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah*	**100%**	**100%**	**100%**	**29,17%**	**29,17%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah*	**3**	**3**	**3**	**1**	**33,33%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan* Perangkat Daerah PD	3	3	3	0	0%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	3	3	3	3	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3	3	3	1	33,33%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32	32	32	32	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	5	5	0	0%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	4	4	0	0	0
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30	30	0	0	0

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100%	100%	100%	60%	60%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instlasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	0	0	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	1	1	1	1	100%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	25	25	25	10	40%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75	75	75	0	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	2	2	2	0	0%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	10	10	0	0	0%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	9	9	0	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	3	25%

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	23,33%	23,33%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	10	10	2	20%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	2	2	1	50%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	0	0%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	0	0	0	0	0
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	10	10	10	0	0%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	33,33%	33,33%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	3	3	3	1	33,33%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	20	20	20	20	100%

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	1	1	0	0%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase desa tertib peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi	12	12	12	3	25%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasioanal indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12	12	12	3	25%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	0	0	0%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di fasilitasi	5	5	5	0	0%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50	50	50	0	0%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	50%	50%

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	20	20	20	20	20
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	20	0	0	0	0
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	20	20	20	0	0%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipasif	20	20	0	0	0

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Gondang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gondang.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Gondang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan Gondang untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Gondang

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Gondang

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Gondang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11=10-9)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**3.656.642.679,00**	**4.120.757.496,00**	**851.335.865,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,pengang garan , evaluasi perangkat daerah	Dokumen	3	3	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PD	Dokumen	3	3	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	Laporan	3	3	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	3	3	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	3.433.539.479,00	3.748.521.296,00	314.981.817,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bln	32	32	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	3.419.839.479,00	3.689.781.296,00	269.941.817,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	5	5	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	13.700.000,00	58.740.000,00	45.040.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen	**0**	**0**	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	65.100.000,00	102.693.000,00	37.593.000,00

		administrasi umum yang sesuai SOP								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instlasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	11.100.000,00	33.376.400,00	22.276.400,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Paket	1	1	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	9.000.000,00	9.798.600,00	798.600,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	25	25	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	75	75	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	20.000.000,00	9.518.000,00	-10.482.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Unit	2	2	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	6.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9	9	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	6.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	Dokumen	**12**	**12**	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	96.403.200,00	96.403.200,00	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	78.000.000,00	78.000.000,00	0

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	18.403.200,00	18.403.200,00	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100%	100%	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	52.600.000,00	156.740.000,00	104.140.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	10	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	39.600.000,00	37.200.000,00	-2.400.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	8.000.000,00	9.540.000,00	1.540.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	5.000.000,00	110.000.000,00	105.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**10.000.000,00**	**7.687.000,00**	**-2.313.000,00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Persen	100%	100%	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	10.000.000,00	7.687.000,00	-2.313.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	10	10	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	10.000.000,00	7.687.000,00	-2.313.000,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**120.000.000,00**	**88.362.400,00**	**-31.637.600,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	3	3	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	120.000.000,00	88.362.400,00	-31.637.600,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	20	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	50.000.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1	1	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	70.000.000,00	39.862.400,00	-30.137.600,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**65.000.000,00**	**48.766.500,00**	**-16.233.500,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi	Koordinasi	12	12	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	65.000.000,00	48.766.500,00	-16.233.500,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasioanal indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	65.000.000,00	48.766.500,00	-16.233.500,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Laporan	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**30.000.000,00**	**35.000.000,00**	**5.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di fasilitasi	Kegiatan	5	5	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	50	50	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Gondang**	**Kecamatan Gondang**	**20.000.000,00**	**17.538.000,00**	**-2.462.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	Desa	20	20	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	20.000.000,00	17.538.000,00	-2.462.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Dokumen	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	20	20	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	20.000.000,00	17.538.000,00	-2.462.000,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipasif	Dokumen	0	0	Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	0	0	0

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondang Tahun 2025 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2024 – 2026. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Gondang sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gondang.

Perubahan Rencana Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Kasi, Kasubbag dan seluruh jajaran staf Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya seseuai tugas dan kewenangannya

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksananaan Renja tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Gondang Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Gondang. 08 Juli 2025

CAMAT GONDANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN GONDANG

ENDRA KUSRIAWAN, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770329 199711 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GONDANG KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GONDANG							**3.901.642.679,00**	**4.441.584.496,00**	**4.318.111.396,00**	**416.468.717,00**							**5.385.978.544,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.901.642.679,00**	**4.441.584.496,00**	**4.318.111.396,00**	**416.468.717,00**							**5.385.978.544,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.901.642.679,00**	**4.441.584.496,00**	**4.318.111.396,00**	**416.468.717,00**							**5.385.978.544,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah**				**100% Persen**	**100% Persen**	**3.656.642.679,00**	**4.176.584.496,00**	**4.120.757.496,00**	**851.335.865,00**							**4.507.978.544,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.433.539.479,00	3.748.521.296,00	3.748.521.296,00	314.981.817,00			-	- -	-		3.879.248.544,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.419.839.479,00	3.689.781.296,00	3.689.781.296,00	269.941.817,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.818.868.544,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	13.700.000,00	58.740.000,00	58.740.000,00	45.040.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.380.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP*				100 %	100 %	65.100.000,00	131.460.000,00	102.693.000,00	37.593.000,00			-	- -	-		178.230.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.100.000,00	50.060.000,00	33.376.400,00	22.276.400,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	11.400.000,00	9.798.600,00	798.600,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.230.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.518.000,00	-10.482.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.000.000,00	20.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00			-	- -	-		59.500.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	6.000.000,00	20.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.403.200,00	96.403.200,00	96.403.200,00	0,00			-	- -	-		85.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.403.200,00	18.403.200,00	18.403.200,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN GONDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.600.000,00	174.200.000,00	156.740.000,00	104.140.000,00			-	- -	-		280.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	39.600.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	12.000.000,00	9.540.000,00	1.540.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	125.000.000,00	110.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.687.000,00**	**7.000.000,00**							**17.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	7.687.000,00	-2.313.000,00			-	- -	-		17.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.687.000,00	-2.313.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**				**100% Persen**	**100% Persen**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**88.362.400,00**	**45.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	120.000.000,00	120.000.000,00	88.362.400,00	-31.637.600,00			-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat	-		165.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			60.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	39.862.400,00	-30.137.600,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			105.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan**				**100% Persen**	**100% Persen**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**48.766.500,00**	**523.000.000,00**							**588.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi*				12 Koordinasi	12 Koordinasi	65.000.000,00	65.000.000,00	48.766.500,00	-16.233.500,00			-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat	-		588.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	48.766.500,00	-16.233.500,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			583.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan**				**100% Persen**	**100% Persen**	**30.000.000,00**	**40.000.000,00**	**35.000.000,00**	**14.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di fasilitasi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00			-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat	-		44.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			44.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**				**100% Persen**	**100% Persen**	**20.000.000,00**	**30.000.000,00**	**17.538.000,00**	**44.000.000,00**							**64.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya*				20 Desa	20 Desa	20.000.000,00	30.000.000,00	17.538.000,00	-2.462.000,00			-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat	-		64.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			6.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	30.000.000,00	17.538.000,00	-2.462.000,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			33.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Gondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			25.000.000,00	KECAMATAN GONDANG
	J U M L A H								**3.901.642.679,00**	**4.441.584.496,00**	**4.318.111.396,00**	**416.468.717,00**							**5.385.978.544,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KALIDAWIR TAHUN 2025



KECAMATAN KALIDAWIR

KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2025 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja 2025 ini dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Kalidawir,08 Juli 2025
CAMAT KALIDAWIR

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KALIDAWIR

RUSDIYANTO, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19790324 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kalidawir s/d Triwulan I tahun 2025

Tabel T-C.30 Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem *top-down* (dari atas ke bawah) menjadi *bottom-up* (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingka pusat dan daerah. Didalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangka tdaerah untuk menyusun dokumen Renja perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (renstra) dan RPJMD.

Sebagai unsur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Kalidawir memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Kalidawir.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);

12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

25 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran Perubahan DPPA) Kecamatan Kalidawir.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalidawir adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Mengendalikan program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat tetap selaras dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan guna pencapaian tujuan dan sasaran kinerja secara maksimal.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Selain mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I juga mengukur perkiraan capaian Renstra Kecamatan Kalidawir Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan- kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 juga memperhatikan hal –hal sebagai berikut:

a. Evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2025 sebagai entrypoint dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi terhadap hasil Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Tribulan I	Tingkat Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
7				UNSUR KEWILAYAHAN						
	7.01			KECAMATAN						
		0.00.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah (%)	100	100	100	18,75	18,75
			0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja (Dokumen)	3	3	3	0	33,33
			0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	1	50
			0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	1	50
			0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (Dokumen)	5	5	5	1	20
			0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	21	21	21	100
			0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	0	0
			0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD (Dokumen)	1	1	1	0	0
			0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	28	28	27	0	0
			0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP (%)	100	100	100	25	25
			0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1	0	0
			0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1	0	0

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Tribulan I	Tingkat Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
			0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	0	0
			0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	0	0
			0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	1	
			0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia (Unit)	1	1	1	0	16,67
			0.00.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	0	
			0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Yang Tersedia (Dokumen)	2	2	1	0	200
			0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	1	1	
			0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2	1	1	
			0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (%)	100	100	100	25	125
			0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1	1	
			0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5	6	0	
			0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	0	
		7.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP (%)	100	100	100	24,6	124,6
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan PATEN (%)	100	100	100	25	125
			7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		0	0	0	

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Tribulan I	Tingkat Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
			7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	3	0	
		7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)	100	100	100	31,25	131,25
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi (Kegiatan)	4	2	2	0	50
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)		2	17	1	
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	4	0	
		7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Desa tertib peraturan perundangan (%)	100				
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib Yang Difasilitasi (Kegiatan)	3			0	0
			7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2	1	0	
		7.01.05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan (%)	100		0	0	0
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi (Kegiatan)	2	1	2	0	50
			7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		17	17	0	
		7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100	79,2	179,2
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya (desa)	17	17	17	0	100

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Tribulan I	Tingkat Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
			7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		2	1	0	
			7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0	1	1	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Kalidawir disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Kalidawir turut mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu mendukung sisi prioritas penunjang pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalidawir Tahun 2025 sebagai pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel T-C.30 berikut ini:

Tabel T-C.30 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Sub Unit Organisasi : 7.0.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KALIDAWIR

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3		5	6	7	8	9	10	11=10-9
7				UNSUR KEWILAYAHAN							3.752.824.827	3.446.441.627	-306.383.200
	7.01			KECAMATAN							3.752.824.827	3.446.441.627	-306.383.200
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah (%)		1	1			3.462.824.827	3.199.581.127	-263.243.700
		7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja (Dokumen)	Dokumen	3	3			7.060.000	5.575.000	-1.485.000
			7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	4.212.000	3.912.000	-300.000
			7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	2.848.000	1.663.000	-1.185.000
		7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	5	5			2.968.192.027	2.806.892.027	-161.300.000
			7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	2.950.412.027	2.789.112.027	-161.300.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
			7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	17.780.000	17.780.000	0
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD		1	1			19.600.000	8.400.000	-11.200.000
			7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		27	27	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	19.600.000	8.400.000	-11.200.000
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP		100	100			141.241.600	112.332.900	-28.908.700
			7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	1.641.700	1.641.700	0
			7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	75.116.600	59.744.900	-15.371.700
			7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	3.878.500	3.878.500	0
			7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	7.288.800	7.288.800	0

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
			7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	7.082.000	7.082.000	0
			7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	46.234.000	32.697.000	-13.537.000
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Unit	1	0					0
			7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	0	0	0
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Yang Tersedia		1	1			150.411.200	150.411.200	0
			7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	86.000.000	86.000.000	0
			7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	64.411.200	64.411.200	0
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		100	100			176.320.000	115.970.000	-60.350.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
			7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	36.000.000	36.000.000	0
			7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6	6	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	7.500.000	7.500.000	0
			7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi		1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	132.820.000	72.470.000	-60.350.000
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100			20.000.000	9.824.500	-10.175.500
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan PATEN	%	100	100			20.000.000	9.824.500	-10.175.500
			7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	0	0	0
			7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	3	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	20.000.000	9.824.500	-10.175.500
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100			110.000.000	94.458.000	-15.542.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi		4	4			110.000.000	94.458.000	-15.542.000
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		17	17	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	35.000.000	35.000.000	0
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4	4	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	75.000.000	59.458.000	-15.542.000
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa tertib peraturan perundangan		100	100			65.000.000	57.421.000	-7.579.000
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib Yang Difasilitasi	Kegiatan	3	3			65.000.000	57.421.000	-7.579.000
			7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	65.000.000	57.421.000	-7.579.000
				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan		1	1			45.000.000	45.000.000	0
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi	Kegiatan	2	2			45.000.000	45.000.000	0

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
			7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		17	17	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	45.000.000	45.000.000	0
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100			50.000.000	40.157.000	-9.843.000
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya		17	17			50.000.000	40.157.000	-9.843.000
			7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	0	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	0	0	0
			7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Kalidawir, Semua Kel/Desa	50.000.000	40.157.000	-9.843.000
JUMLAH											3.752.824.827	3.446.441.627	-306.383.200

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalidawir yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik.

Penyusunan kebijakan perubahan renja ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja baik kinerja utama maupun kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua. Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar penentuan strategi peningkatan kinerja Kecamatan Kalidawir.

Adanya dokumen Perubahan Rencana kerja ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Kalidawir beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang, oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dapat tercapai dengan lebih baik.

Kalidawir, 08 Juli 2025
CAMAT KALIDAWIR



RUSDIYANTO, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19790324 199912 1 001



RENCANA KERJA

PERUBAHAN

KECAMATAN KARANGREJO

KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk memberikan kepastian arah kebijakan pembangunan seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2024 - 2026 Kantor Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangrejo tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karangrejo tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangrejo yang dapat kami persembahkan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Kantor Kecamatan Pucanglaban mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Karangrejo, 06 Agustus 2025

CAMAT KARANGREJO

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KARANGREJO

SUHARTONO, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196901261989031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Karangrejo agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Karangrejo memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Karangrejo.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangrejo untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Karangrejo.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karangrejo.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangrejo adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Karangrejo.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Karangrejo selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Karangrejo disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN 1

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan

BAB III. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan pada Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun bersangkutan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi

dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Perubahan Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Selain mengevaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 juga mengukur perkiraan capaian kinerja Renja Perubahan tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Karangrejo Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pelaksanaan evaluasi, sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan mana yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/ tindakan perancanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Karangrejo s/d Tahun 2025

Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN KARANGREJO** Lembar : .....

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	**Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025**		
					Target	Realisasi s/d TW I	Tingkat Realisasi (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(7/6)***
	KECAMATAN KARANGREJO						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	100	**100%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja***	**11 dokumen**	11	**11 dokumen**		
	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 dokumen	4	4 dokumen		
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 dokumen	7	7 dokumen		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi keuangan***	2 dokumen	2	2 dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 org/ bulan	22	24 org/ bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 dokumen	12	12 dokumen		
	Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD***	1 dokumen	1	1 dokumen		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	22 Paket	22	22 Paket		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP***	100%	100	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	52 Paket	52	52 Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	40 Paket	40	40 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	22 Paket	22	22 Paket		

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	10	10 Paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	26 Laporan	26	26 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	26	3 Laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia***	-	2	-		
	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12	12 Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah barang milik daerah yang terpelihara***	-	21	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 unit	10	10 unit		

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	10	10 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	1 Unit	100	1 Unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP***	100%	100	100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN*	100%	2	100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	2 laporan	100	2 laporan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi***	100%	1	100%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi*	2 kegiatan	100	2 kegiatan		
	Peningkatan Partisipas iMasyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang*	13 Lembaga Kemasyarakat an	1	13 Lembaga Kemasyaraka tan		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah partisipasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa*	1 Laporan	100	1 Laporan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***Persentase desa tertib peraturan perundangan***	100%	1	100%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi*	1 kegiatan	24	1 kegiatan		
	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	*Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi*	1 Laporan	100	1 Laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan*	100%	1	100%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi*	1 kegiatan	13	1 kegiatan		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	200 orang	100	200 orang		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi*	100%	13	100%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya*	13 Desa	13	13 Desa		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 KabupatenTulungagung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**KECAMATAN**					**KECAMATAN**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Karang rejo	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	2.726.987.738	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Karang rejo	**Rata-rata tingkat Capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	2.726.987.738	
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**11 dokumen**	2.939.400	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**11 dokumen**	2.939.400	
	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Kec. Karang rejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.427.000	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Kec. Karang rejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.427.000	
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Karang rejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	1.512.400	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Karang rejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	1.512.400	

b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	2 dokumen	2.520.384.538	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	2 dokumen	2.520.384.538	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karang rejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org/ bulan	2.505.384.538	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kec. Karang rejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org / bulan	2.505.384.538	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karang rejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	15.000.000	Penyediaan AdministrasiPelaksana an Tugas ASN	Kec. Karang rejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	15.000.000	
c	**Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian**	Kec. Karang rejo	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	1 dokumen	11.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	1 dokumen	11.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Karang rejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	11.000.000	Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapanny a	Kec. Karang rejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	11.000.000	
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	100%	75.755.200	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Karang rejo	**persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	100%	75.755.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karang rejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 Paket	8.905.400	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBa ngunan Kantor	Kec. Karang rejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 Paket	8.905.400	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	16.815.200	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	16.815.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	8.426.900	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	8.426.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.365.700	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kec. Karangrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.365.700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	6.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	6.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	31.342.000	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	31.342.000	

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangrejo	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	-	69.993.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangrejo	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	-	69.993.600	
	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.590.400	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.590.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.403.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.403.200	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangrejo	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-	46.915.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangrejo	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-	46.915.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karangrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	24.815.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karangrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	24.815.000	

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Karangrejo	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.100.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Karangrejo	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 Unit	10.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangrejo	Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangrejo	Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi	100%	10.000.000	
			kecamatan yang sesuai SOP					Kecamatan yang sesuai SOP			
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangrejo	Persentase Pelaksanaan pelayanan PATEN	100%	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangrejo	Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN	100%	10.000.000	

	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangrejo	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	100%	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangrejo	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	100%	100.000.000	
-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangrejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	2 kegiatan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangrejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	2 kegiatan	100.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangrejo	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	13 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangrejo	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	13 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangrejo	Jumlah partisipasi kegiatan	1 Laporan	65.000.000	Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyar	Kec. Karangrejo	Jumlah partisipasi kegiatan	1 Laporan	65.000.000	
			pemberdayaan masyarakat desa			akat di WilayahKecamatan		pemberdayaan masyarakat desa			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangrejo	Persentase desa tertib peraturan perundangan	100%	60.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangrejo	Prosentase desa tertib peraturan perundangan	100%	60.000.000	
-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangrejo	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi	1 kegiatan	60.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangrejo	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi	1 kegiatan	60.000.000	
	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	Kec. Karangrejo	Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi	1 Laporan	60.000.000	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	Kec. Karangrejo	Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi	1 Laporan	60.000.000	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangrejo	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	100%	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangrejo	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	100%	30.000.000	
-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangrejo	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangrejo	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	30.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Kec. Karangrejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	30.000.000	Fasilitasi,Koordinasi danPembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Kec. Karangrejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	30.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karangrejo	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	20.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karangrejo	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	20.000.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangrejo	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya	13 Desa	20.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangrejo	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya	13 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Karangrejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi PenyusunanPerencana an PembangunanPartisip atif	Kec. Karangrejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	20.000.000	

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	88	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	88	Program penyelenggaraan dan pelayanan publik	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

2	Meningkatnya Efektifitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Desa yang Telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	100	Meningkatnya Efektifitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Desa yang Telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Fasilitas , Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
							Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
							Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepada daerah
							Program koordinasi ketentraman dan ketertiban	- Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan pada Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024- 2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Karangrejo mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu mendukung pada sisi prioritas penunjang tepatnya pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum adalah sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel 3.2 pada Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangrejo

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025					Perkiraan Maju Tahun 2026				
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**
(1)	***(2)***	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.331.645.815**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.191.558.500**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.074.684.216**					**2.970.258.500**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*24 Orang*	3.057.404.216	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	*24 Orang*	2.952.258.500
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	17.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	18.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0					14.000.000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	14.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**147.271.600**					**81.800.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kecamatan Karangrejo*	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	31.554.600	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	*Kecamatan Karangrejo*	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor penyediaan alat tulis kantor	4 Paket	78.125.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor penyediaan alat tulis kantor	4 Paket	38.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang sediakan	1 Paket	1.031.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang sediakan	1 Paket	1.600.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.530.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.700.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.779.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.555.200					51.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Laporan	31.152.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Laporan	32.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.403.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.134.799,92					74.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	1 Unit	23.354.799,92	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	28.000.000

			habilitasi					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	10.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	6.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	26.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40.000.000
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**5.866.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				11.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**5.866.800**					11.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	5.866.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 LAPORAN	11.000.000

			Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan					Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**93.210.900**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**94.500.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**93.210.900,**					94.500.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	34.347.000,	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	36.750.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	58.863.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	57.750.000
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**60.727.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**66.000.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan				**60.727.800**					**66.000.000**

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.727.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.000.000
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	5 Kegiatan	**25.857.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	5 Kegiatan	**42.000.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**25.857.000**					**42.000.000**
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah desa yang di fasilitasi pembinaan wawasJumlah Orang yang Mengikuti	7 Desa	25.857.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Kecamatan Karangrejo*	jumlah desa yang di fasilitasi pembinaan wawasJumlah Orang yang Mengikuti	7 Desa	42.000.000

			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaan					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaan		
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**9.645.400**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**23.100.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**9.645.400**					**23.100.000**
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	9.645.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Kecamatan Karangrejo*	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	23.100.000
	J U M L A H				**3.526.953.715,92**					**3.428.158.500**

BAB V
PENUTUP

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangrejo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026, disusun dengan mengacu pada sasaran dan Prioritas Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Dalam pelaksanaan Tahun berjalan, apabila Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangrejo Tahun 2025, merupakan perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Karangrejo secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) kantor Kecamatan Karangrejo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Karangrejo. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran pegawai Kantor Kecamatan Karangrejo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan kantor Kecamatan Karangrejo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Karangrejo, 06 Agustus 2025

CAMAT KARANGREJO



SUHARTONO, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196901261989031004

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

KECAMATAN KAUMAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayah Alloh SWT telah tersusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya. Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kauman Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Kauman, 8 Juli 2025

Camat Kauman

Ir. UMAR SERADUDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19670829 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

2.1 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 2

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 5

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Kauman 9

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kauman..... 10

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB IV PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangkatdaerah untuk menyusun Dokumen Renja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Dokumen Renja, Perangkat Daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Kauman Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Renstra Kecamatan Kauman Tahun 2024 - 2026. Sebagai unsur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Kauman memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Kauman.

1.2 Landasan Hukum.

Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung

1.2 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kauman untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra Kecamatan Kauman.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kauman.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kauman adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Kauman.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Kauman selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.3 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Renja Kecamatan kauman disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kauman Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Tribulan kesatu 2025

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kauman tahun anggaran 2025 sampai dengan Bulan April 2025 sebesar Rp. 998.743.337,- atau 26,61% dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 3.753.359.036,- dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran 2025 sampai dengan Bulan April 2025 sebesar Rp. 1.174.934.905,- atau 29,97% dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 3.919.901.520,- Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra s/d Triwulan I (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kauman

Lembar : .....

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tengun tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
				KECAMATAN KAUMAN						
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatanlayan	91 Indeks				
				Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	2 Dokumen	25%
				Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	3 Dokumen	25%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum yang sesuai SOP	100 %	100 %	100%	25 %	25 %
				Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100%	25 %	25 %
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik	**Prosentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**100 %**	100 %	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Prosentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**	100 %	25 %	25%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	16,6%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**	**100 %**	**100 %**	100 %	25 %	25%
					Prosentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggu Ketentreraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggu Ketentreraman dan Ketertiban Umum	12 kali	12 kali	100 %	3 kali	25%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan**	**100 %**	**100 %**	100 %	-	-
					Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN	**Prosentase Program Pembinaan dan**	100 %	100 %	100 %	25 %	25%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaurau Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kelaurau Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Pengawasan Pemerintahan Desa**					
					Jumlah desa yang diawasi	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	23%

Kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam mencapai target sampai dengan triwulan I adalah karena kegiatan yang dilakukan masih mencapai 26,61% maka pencapaian kinerja belum maksimal. Solusi yang akan dilakukan untuk mencapai target sampai akhir periode renja adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya ikut andil dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas sehingga proses pelayanan menjadi semakin cepat dan mudah.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu pendukung berjalannya pelayanan dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Isu yang dihadapi oleh Kecamatan Kauman dalam memberikan pelayanan prima pada saat ini terfokus pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, serta sistem pengawasan perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta pemanfaatan teknologi informasi yang dinilai kurang.

		terpenuhi								
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	Tuhung ugung	Tuhung ugung	1,010,200	1,969,000	[41,200]
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	Tuhung ugung	Tuhung ugung	62,009,000	47,391,000	[10,618,000]
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	17	Tuhung ugung	Tuhung ugung	4,376,400	5,035,000	647,800
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	Tuhung ugung	Tuhung ugung	3,491,400	2,460,000	(1,031,400)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo rtan	20	20	Tuhung ugung	Tuhung ugung	9,460,000	9,460,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo rtan	5	5	Tuhung ugung	Tuhung ugung	13,289,000	6,161,200	(7,126,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	4,680,000	4,680,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.07.03	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	Tuhung ugung	Tuhung ugung	4,680,000	4,680,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terbatasnya jasa penunjang yang terpenuhi**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	101,850,300	95,304,300	(6,546,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo rtan	12	12	Tuhung ugung	Tuhung ugung	61,800,000	61,800,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	Lapo rtan	4	4	Tuhung ugung	Tuhung ugung	16,486,300	9,900,000	(6,586,300)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo rtan	12	12	Tuhung ugung	Tuhung ugung	27,604,800	27,604,800	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	35,300,000	35,300,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah	5	5	Tuhung ugung	Tuhung ugung	35,300,000	35,300,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0002.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0002.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0002.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kesejahteraan pada Urusan Pemerintahan	Lapo rtan	1	1	Tuhung ugung	Tuhung ugung	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	Perse ntase	100	100	Tuhung ugung	Tuhung ugung	95,000,000	60,000,000	(35,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi**	Kegia tan	2	2	Tuhung ugung	Tuhung ugung	95,000,000	60,000,000	(35,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Penetapan Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LK	13	13	Tuhung ugung	Tuhung ugung	25,000,000	25,000,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Lapo rtan	3	3	Tuhung ugung	Tuhung ugung	60,000,000	35,000,000	(25,000,000)

		terpenuhi								
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	Tahun agung	Tahun agung	1,910,000	1,869,000	(41,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	Tahun agung	Tahun agung	62,035,000	47,201,000	(17,218,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	17	Tahun agung	Tahun agung	4,376,400	3,935,000	(441,400)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	Tahun agung	Tahun agung	3,451,400	2,960,000	(1,001,400)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	80	80	Tahun agung	Tahun agung	9,460,000	9,460,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	5	5	Tahun agung	Tahun agung	12,587,000	6,061,000	(6,526,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	4,680,000	4,680,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.07.05	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Jumlah Paket Meja Kerja Pejabat yang Disediakan	Paket	1	1	Tahun agung	Tahun agung	4,680,000	4,680,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang terpenuhi**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	105,856,800	99,204,800	(6,652,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo rtan	12	12	Tahun agung	Tahun agung	61,800,000	61,800,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	4	4	Tahun agung	Tahun agung	15,486,000	6,900,000	(8,586,000)
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo rtan	12	12	Tahun agung	Tahun agung	27,558,800	27,504,800	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	35,300,000	35,300,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah	5	5	Tahun agung	Tahun agung	35,300,000	35,300,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0002.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	10,200,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0002.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0002.2.09.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Lapo ran	1	1	Tahun agung	Tahun agung	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	Perse ntase	100	100	Tahun agung	Tahun agung	93,000,000	60,000,000	(33,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi**	Kegia tan	2	2	Tahun agung	Tahun agung	93,000,000	60,000,000	(33,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LK	13	13	Tahun agung	Tahun agung	33,000,000	25,040,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0003.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Lapo ran	3	3	Tahun agung	Tahun agung	60,000,000	35,000,000	(25,000,000)

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.0.00.0.09.08.0004	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase	100	100	Tahunan	Tahunan	60,000,000	52,000,000	(8,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0004.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi penyelengaraan tantib yang difasilitasi**	Kali	12	12	Tahunan	Tahunan	60,000,000	52,000,000	(8,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0004.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	Tahunan	Tahunan	60,000,000	52,000,000	(8,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0005.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase	100	100	Tahunan	Tahunan	30,000,000	30,000,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0005.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi**	kegiatan	1	1	Tahunan	Tahunan	90,000,000	90,000,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0005.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Binwas, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Binwas, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	350	350	Tahunan	Tahunan	30,000,000	30,000,000	-
7.01.0.00.0.00.08.0006.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase	100	100	Tahunan	Tahunan	15,000,000	12,000,000	(3,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0006.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase	100	100	Tahunan	Tahunan	15,000,000	12,000,000	(3,000,000)
7.01.0.00.0.00.08.0006.2.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi (tabel) angka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	Tahunan	Tahunan	15,000,000	12,000,000	(3,000,000)

BAB IV

PENUTUP

A. Catatan Penting

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Kauman Tahun 2025 perlu mendapat perhatian pada beberapa hal berikut:

1. Kegiatan yang memiliki capaian kinerja dan serapan anggaran rendah sampai dengan Triwulan I perlu mendapatkan percepatan pelaksanaan pada triwulan berikutnya, baik melalui optimalisasi sumber daya, percepatan proses administrasi, maupun koordinasi dengan pihak terkait.
2. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian prioritas agar target utama tetap dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
3. Perlu penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Koordinasi internal antarbidang serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah dan instansi terkait harus diperkuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas pembangunan daerah pada Triwulan II, III dan IV.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
3. Mengidentifikasi potensi hambatan dan menyiapkan langkah antisipatif agar target kinerja dan sasaran Renstra Kecamatan Kauman tetap dapat tercapai.

Renja Perubahan Kecamatan Kauman Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 di lingkup Kecamatan Kauman yang ditargetkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam upaya mencapai target Tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/ kegiatan Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Kecamatan Kauman dapat mempedomani isi dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.

Kauman, 8 Juli 2025

CAMAT KAUMAN



Ir. UMAR SERAJUDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19670829 199703 1 002

PERUBAHAN

RENJA 2025

KECAMATAN KEDUNGWARU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Namun demikian penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 masih jauh dari kriteria sempurna sehingga masih banyak kekurangan dalam penyajian data. Oleh karena itu, kami mengharap saran, masukan serta bimbingan dari Pihak terkait terutama Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang kami susun, dengan memohon petunjuk dan Bimbingan dari Allah SWT, semoga Kecamatan Kedungwaru dapat melaksanakan Kinerja dan tugas dengan sebaik-baiknya.

CAMAT KEDUNGWARU



RACHMAD ADHITYO KUNCORO,S.STP,M.M
Pembina Tingkat I
NIP.198009151999121002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kedungwaru yang selanjutnya disebut (P-RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kedungwaru, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kecamatan Kedungwaru dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan dayaguna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangkat daerah untuk menyusun dokumen Perubahan Renja perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen tersebut tentu dengan memperhatikan seluruh

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD. Kecamatan Kedungwaru memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Kedungwaru.

Sesuai amanat tersebut, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kedungwaru tahun 2025. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum.

Dalam menyusun dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

25. Peraturan Bupati Tulungagung SOTK Perangkat Daerah masing-masing

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Kedungwaru
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kedungwaru.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedungwaru adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Kedungwaru.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Kedungwaru selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Renja Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Evaluasi Perubahan Renja Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025- 2030 dan Renstra Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2030.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungwaru

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatab (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun L2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
1				Urusan Kewilayahan						
1	01			Bidang Urusan Kewilayahan						
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	95%	100%	100%		
1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21 orang	20 orang	20 org/bulan	596.894.824	
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2 paket	1 paket	33 paket	-	
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 paket	2 paket	-	-	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2 paket	2 paket	-	-	
01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 paket	2 paket	1 paket	1.684.800	
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jomlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 paket	4.192.500	
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	-	-	
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%			
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1 laporan	3 laaporan	25.779.961	
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1 laporan	3 laporan	19.013.800	
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (Persen)	100%	100%	100%		
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.870.800	
01	01	2.09	0010	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	-	-	
01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	-	-	-
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	100		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6
7	01	02.2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan PATEN (%)	100%	100%	-		
7	01	02.2	04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	-	-	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Persen)	100%	100%	100	34.848.000	
7	01	03.2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
7	01	03.2	01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	5 lembaga	7 lembaga	3	34.848.000	
7	01	03.2	01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	1 laporan	-	-	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan (Persen)			100		
7	01	04.2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
7	01	04.2	01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan	2 laporan	-	-	
7	01	04.2	01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2 laporan	2 laporan	-	-	
7	01	05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi (%)	100%	100%			
7	01	05.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan (Persen)			-	-	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6
7	01	05.2	01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			-	-	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Kedungwaru turut mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu mendukung sisi prioritas penunjang pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kedungwaru Tahun 2025 sebagai pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan.

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Kedungwaru

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				KECAMATAN KEDUNGWARU									
				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN									
7	01	01.2		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	3.391.683.333	3.265.367.855	-126.315.478
7	01	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	6 Dokumen	6 Dokumen	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	3.809.000	2.009.000	-1.800.00
7	01	01.2	01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	3.809.000	2.009.000	-1.800.00
7	01	01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersedia	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	2.823.668.933	2.823.668.933	-35.570.178
7	01	01.2	02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	2.823.668.933	2.823.668.933	-35.570.178
7	01	01.2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	12.000.000	12.000.000	0
7	01	01.2	05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	33 paket	33 paket	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	12.000.000	12.000.000	0
7	01	01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	103.425.900	74.410.500,	-29.015.400

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
7	01	01.2	06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 paket	2 paket	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	56.500.000	45.324.400	-11.175.600
7	01	01.2	06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	4.196.600	2.979.800	-1.216.800
7	01	01.2	06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 paket	2 paket	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	4.227.300	3.381.300	-846.000
7	01	01.2	06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	14.000.000	14.000.000	0
7	01	01.2	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	24.502.000	8.725.000	-15.777.000
7	01	01.2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang yang tersedia	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	199.792.800	199.792.800	0
7	01	01.2	08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	108.000.000	108.000.000	0
7	01	01.2	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	91.792.800	91.792.800	0
7	01	01.2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100%	100%	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	40.585.100	34.962.800	-5.622.300
7	01	01.2	09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	21.632.300	21.660.000	27.700
7	01	01.2	09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	14.380.000	8.730.000	-5.650.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
7	01	01.2	09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	Kec .Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	4.572.800	4.572.800	0
7	01	02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi kecamatan yang sesuai SOP**	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	10.000.000	5.779.600	-4.220.400
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan PATEN Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	10.000.000	5.779.600	-4.220.400
7	01	03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	105.000.000	67.783.800	-37.216.200
7	01	03.2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	105.000.000	67.783.800	-37.216.200
7	01	03.2	01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	3 lembaga	3 lembaga	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	35.000.000	35.000.000	0
7	01	03.2	01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1 laporan	1 laporan	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	70.000.000	32.783.800	-37.216.200
7	01	04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	63.402.000	50.531.000	-12.871.000
7	01	04.2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	63.402.000	50.531.000	-12.871.000
7	01	04.2	01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	laporan	2 laporan	2 laporan	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	63.402.000	50.531.000	-12.871.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
					Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7	01	04.2	01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	0	0	0
7	01	04		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan**	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	29.999.600	29.999.600	0
7	01	04.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan	%	100%	100%	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	29.999.600	29.999.600	0
7	01	04.2	01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	1 laporan	1 laporan	Kec. Kedungwaru	. Kec. Kedungwaru	29.999.600	29.999.600	0

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kedungwaru yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik.

Adanya dokumen Perubahan Rencana kerja ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Kedungwaru beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparent dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang, oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat tercapai dengan lebih baik.

Kedungwaru, 8 Juli 2025

CAMAT KEDUNGWARU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KEDUNGWARU

RACHMAD ADHITYO KUNCORO,S.STP,M.M
Pembina Tingkat I
NIP.198009151999121001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KECAMATAN NGANTRU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2024-2026 Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran - sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

Demikian Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru yang dapat kami persembahkan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan Kinerja yang lebih baik.

Ngantru, 08 Juli 2025

CAMAT NGANTRU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN NGANTRU

SUMARJI KUSWANTORO.,S.Pd.,M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19680413 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... *i*

DAFTAR ISI..... *ii*

DAFTAR TABEL ..... *iii*

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

BAB IV PENUTUP.....42

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.....12

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 24

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026.....39

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Ngantru yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ngantru, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Perubagan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2024 adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Penyusunan dokumen tersebut tentu dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut diatas, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ngantru tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngantru tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja kantor Kecamatan Ngantru tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.
25. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngantru Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sesuai dengan Agenda Prioritas Kabupaten Tulungagung dan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Stategis Kecamatan Ngantru Tahun 2024-2026;
2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngantru.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Ngantru selama 1 Tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngantru tahun 2025 tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan

BAB III. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan pada Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun bersangkutan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Pelaksanaan evaluasi, sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan mana yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/ tindakan perancanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

TabelT-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngantru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	**Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025**		
					Target	Realisasi s/d TW I	Tingkat Realisasi (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(7/6)***
	KECAMATAN NGANTRU						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	100	**100%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja***	**11 dokumen**	11	**11 dokumen**		
	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 dokumen	4	4 dokumen		
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 dokumen	7	7 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi keuangan***	2 dokumen	2	2 dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 org/ bulan	22	24 org/ bulan		

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 dokumen	12	12 dokumen		
	Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD***	1 dokumen	1	1 dokumen		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	22 Paket	22	22 Paket		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP***	100%	100	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	52 Paket	52	52 Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	40 Paket	40	40 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	22 Paket	22	22 Paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	10	10 Paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	26 Laporan	26	26 Laporan		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	26	3 Laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia***	-	2	-		
	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12	12 Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah barang milik daerah yang terpelihara***	-	21	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 unit	10	10 unit		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	10	10 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	1 Unit	100	1 Unit		

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP***	100%	100	100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN*	100%	2	100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	2 laporan	100	2 laporan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi***	100%	1	100%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi*	2 kegiatan	100	2 kegiatan		
	Peningkatan Partisipas iMasyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang*	13 Lembaga Kemasyarakatan	1	13 Lembaga Kemasyarakatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah partisipasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa*	1 Laporan	100	1 Laporan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***Persentase desa tertib peraturan perundangan***	100%	1	100%		

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi*	1 kegiatan	24	1 kegiatan		
	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	*Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi*	1 Laporan	100	1 Laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan*	100%	1	100%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi*	1 kegiatan	13	1 kegiatan		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	200 orang	100	200 orang		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi*	100%	13	100%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya*	13 Desa	13	13 Desa		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
KabupatenTulungagung

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Ngantru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**KECAMATAN**					**KECAMATAN**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Ngantru	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	2.726.987.738	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Ngantru	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progam penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	2.726.987.738	
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**11 dokumen**	2.939.400	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja**	**11 dokumen**	2.939.400	
	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.427.000	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.427.000	
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	1.512.400	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	1.512.400	

b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	2 dokumen	2.520.384.538	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	2 dokumen	2.520.384.538	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngantru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org/ bulan	2.505.384.538	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kec. Ngantru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org / bulan	2.505.384.538	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	15.000.000	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	15.000.000	
c	**Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	1 dokumen	11.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	1 dokumen	11.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	11.000.000	Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapanny a	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	11.000.000	
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	100%	75.755.200	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Ngantru	**persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP**	100%	75.755.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 Paket	8.905.400	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 Paket	8.905.400	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	16.815.200	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	16.815.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	8.426.900	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	8.426.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.365.700	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kec. Ngantru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.365.700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	6.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	6.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	31.342.000	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	31.342.000	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia**	-	69.993.600	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia**	-	69.993.600	
	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.590.400	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.590.400	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.403.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.403.200	
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	-	46.915.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ngantru	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	-	46.915.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ngantru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	24.815.000	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ngantru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	24.815.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Ngantru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.100.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Ngantru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Ngantru	**Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi**	100%	10.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Ngantru	**Persentase Pelayanan Prosentase Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi**	100%	10.000.000	

			kecamatan yang sesuai SOP					**kecamatan yang sesuai SOP**			
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ngantru	Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN	100%	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ngantru	Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN	100%	10.000.000	
	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Ngantru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Ngantru	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**	100%	100.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Ngantru	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**	100%	100.000.000	
-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ngantru	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	2 kegiatan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ngantru	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	2 kegiatan	100.000.000	
	Peningkatan Partisipas iMasyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ngantru	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	13 Lembaga Kemasyara katan	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ngantru	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	13 Lembaga Kemasyar akatan	35.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ngantru	Jumlah partisipasi kegiatan	1 Laporan	65.000.000	Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyar	Kec. Ngantru	Jumlah partisipasi kegiatan	1 Laporan	65.000.000	

			pemberdayaan masyarakat desa			akat di WilayahKecamatan		pemberdayaan masyarakat desa			
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Ngantru	**Persentase desa tertib peraturan perundangan**	100%	60.000.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Ngantru	**Prosentase desa tertib peraturan perundangan**	100%	60.000.000	
-	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Ngantru	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi	1 kegiatan	60.000.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Ngantru	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi	1 kegiatan	60.000.000	
	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	Kec. Ngantru	Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi	1 Laporan	60.000.000	Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	Kec. Ngantru	Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi	1 Laporan	60.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Ngantru	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	100%	30.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Ngantru	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	100%	30.000.000	
-	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Ngantru	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	30.000.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Ngantru	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	30.000.000	

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Kec. Ngantru	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	30.000.000	Fasilitasi, Koordinasi danPembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Kec. Ngantru	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	30.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Ngantru	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	20.000.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Ngantru	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	20.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ngantru	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya	13 Desa	20.000.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Ngantru	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya	13 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif	Kec. Ngantru	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	20.000.000	

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	88	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	88	Program penyelenggaraan dan pelayanan publik	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
2	Meningkatnya Efektifitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Desa yang Telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	100	Meningkatnya Efektifitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Desa yang Telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Fasilitas , Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
							Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
							Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepada daerah
							Program koordinasi ketentraman dan ketertiban	- Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan pada Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD Kecamatan Ngantru Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Ngantru mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu mendukung pada sisi prioritas penunjang tepatnya pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Ngantru Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum adalah sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel 3.2 pada Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNG JAWAB OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkembang/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							BIDELUAN	BERSUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NGANTRU							**2.846.867.730,00**	**3.219.990.240,00**	**3.121.211.440,83**	**119.223.707,00**							**3.366.023.073,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.846.867.730,00**	**3.219.990.240,00**	**3.121.211.440,83**	**119.223.707,00**							**3.366.023.073,00**	
	1.01	**KECAMATAN**							**2.846.867.730,00**	**3.219.990.240,00**	**3.121.211.440,83**	**119.223.707,00**							**3.366.023.073,00**	
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.726.867.730,00**	**2.999.990.240,00**	**2.994.999.140,83**	**-444.868.589,00**							**3.143.023.073,00**	
	1.01.01.2.01	Penyelenggaraan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja				11 dokumen	11 dokumen	2.339.900,00	2.003.400,00	2.225.000,00	-912.900,00			Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Aktif Kec.Ngantru		2.231.100,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah dokumen Rancangan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.217.300,00	1.221.300,00	1.111.000,00	-114.000,00	Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			1.111.100,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	-555.900,00	Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			1.111.100,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.530.304.530,00	2.723.137.340,00	2.744.437.940,00	224.372.507,00			Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Aktif Kec.Ngantru		2.923.437.920,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	2.530.304.530,00	2.708.337.340,00	2.729.637.940,00	224.372.507,29	Kec. Tulungagung, Kantor Kecamatan, Semua Kel/Desa Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			2.897.537.920,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.02.0002	Pelayanan Administrasi Perkantoran Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Perkantoran Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kec. Tulungagung, Semua Kantor/Dinas Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (SK)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	-5.000.000,00			Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kec.Ngantru		17.235.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perangkat Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Perangkat				23 Paket	28 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	-5.000.000,00	Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			13.235.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah/Jenis pelayanan administrasi umum yang sesuai SOP				100 %	120 %	74.700.000,00	76.852.900,00	84.404.200,00	10.166.300,00			Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kec.Ngantru		113.867.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Paket	7 Paket	6.900.000,00	6.900.400,00	2.220.000,00	-4.680.400,00	Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			17.220.979,00	KECAMATAN NGANTRU
	1.01.01.2.06.0002	Pemeliharaan/Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor																		
			Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Dilaksanakan				40 Paket	21 Paket	18.972.240,00	19.795.900,00	14.758.000,00	-3.918.900,00	Kec. Tulungagung, Ngantru, Kedoya Kedhiri Barat	DANA KL DANA UMUM (DAU)	Meningkatnya ketersediaan prasarana publik, fasilitas dan fasilitas umum, serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kelompok rentan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			20.680.000,00	KECAMATAN NGANTRU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (12-13)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	17 Paket	9.626.000,00	9.626.000,00	2.980.000,00	-5.940.484,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			8.271.620,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	2 Paket	3.305.700,00	3.349.000,00	2.491.400,00	-810.300,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			3.009.300,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	4.830.000,00	-2.070.000,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	4 Laporan	31.342.000,00	31.342.000,00	18.570.400,00	-12.700.000,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			55.227.100,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perkantoran Untuk Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	11 Laporan	89.893.600,00	89.983.600,00	75.360.800,00	-5.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kec Ngantru		83.217.800,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Layanan	12 Laporan	91.900.400,00	91.949.400,00	66.950.400,00	-5.400.000,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			93.193.926,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rutin yang Disediakan				12 Layanan	12 Laporan	18.400.200,00	18.400.200,00	14.920.200,00	0,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			20.113.900,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.08	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	31 Unit	89.915.000,00	82.363.000,00	78.380.900,00	31.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	-		107.281.900,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	34.815.000,00	41.283.000,00	41.280.900,00	16.465.500,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			27.999.400,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	10 Unit	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			13.281.800,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kec. Talunpagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			68.000.000,00	KECAMATAN NGANTRU
3	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan/Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.279.700,00**	**-3.840.380,00**							**6.060.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimplikasikan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan ITNTN				100 %	100 %	10.000.000,00	16.000.000,00	5.279.700,00	-4.720.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec Ngantru		6.060.000,00	KECAMATAN NGANTRU
	7.01.02.2.04.0012	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.279.700,00	-4.720.300,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sinkronisasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			6.050.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.300.000,00**	**73.108.400,00**	**8.900.000,00**							**100.900.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi*				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	73.108.400,00	-26.891.600,00			-	-	-		100.900.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.350.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	7.01.03.2.01.0000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	38.108.400,00	-26.891.600,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.550.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**				**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**49.312.100,00**	**-10.687.900,00**							**78.650.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantib yang difasilitasi*				1 kegiatan	1 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	49.312.100,00	-10.687.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kelahanan bencana dan pelestarian budaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kelahanan bencana dan pelestarian budaya	Masyarakat Kec. Ngantru		78.650.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	49.312.100,00	-10.687.900,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kelahanan bencana dan pelestarian budaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kelahanan bencana dan pelestarian budaya			78.650.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**36.300.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi*				1 kegiatan	1 kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat	Masyarakat Kec. Ngantru		36.300.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	39 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			36.300.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi [deleted] Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**				**100 100% % 100 persen**	**100% 100 persen %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**12.852.100,00**	**4.200.000,00**							**24.200.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya*				13 Desa	13 Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	12.852.100,00	-7.147.900,00			-	-	-		24.200.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.852.100,00	-7.147.900,00	Kab. Tulungagung, Ngantru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.200.000,00	KE CAMATAN NGANTRU
	JUMLAH								**2.948.967.738,00**	**3.219.960.245,00**	**3.121.211.445,00**	**174.223.707,00**							**3.396.023.573,00**	

BAB V
P E N U T U P

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngantru Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026, disusun dengan mengacu pada sasaran dan Prioritas Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Dalam pelaksanaan Tahun berjalan, apabila Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngantru Tahun 2025, merupakan perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Ngantru secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubagan Rencana Kerja (RENJA) kantor Kecamatan Ngantru selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Ngantru. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran pegawai Kantor Kecamatan Ngantru. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan kantor Kecamatan Ngantru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Ngantru, 08 Juli 2025

CAMAT NGANTRU

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN NGANTRU

SUMARJI KUSWANTORO.,S.Pd.,M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19680413 199103 1 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

KECAMATAN NGUNUT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngunut Tahun 2025 dapat diselesaikan tanpa adanya halangan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngunut Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2024 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja 2025 ini dikerjakan dengan fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngunut Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaporan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Ngunut.

Ngunut, 8 Oktober 2025
CAMAT NGUNUT

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN NGUNUT

SUTRISNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720504 199201 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iiiii
DAFTAR TABEL iiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang. 1
1.2. Landasan Hukum. 2
1.3. Maksud dan Tujuan. 2
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 10
BAB IV PENUTUP 17

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025.....7

TABEL 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Ngunut Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Kecamatan Ngunut Tahun 2024-2026. Sebagai unsur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Ngunut memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Ngunut.

1.2. Landasan Hukum.

Dalam menyusun dokumen rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngunut Tahun 2025 yang mempunyai maksud:

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Ngunut.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngunut.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngunut adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Ngunut.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Ngunut selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata urutan sistematika penulisan Rancangan Renja Kecamatan Ngunut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Kecamatan Ngunut Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Ngunut Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngunut Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi perubahan Renja Kecamatan Ngunut tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Ngunut** Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029-2030)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**	88,5	87	87,5	87,5	87,5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	10	10	10	3	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang	12	12	12	3	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Milik	100	100	100	100	100

				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang Terpelihara					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan public yang Memenuhi Standar Pelayanan	100	100	100	100	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi	2	2	2	2	2
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Tertib Peraturan dan Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang Difasilitasi	3	3	3	3	3

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	5	5	5	5	5
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	100%	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	18	18	18	18	18

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ngunut Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Ngunut turut mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yaitu mendukung sisi prioritas penunjang pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rancangan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ngunut Tahun 2024 sebagai pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel 3.2.2.1 pada Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ngunut

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
	KECAMATAN NGUNUT							3.451.136.776	3.372.905.576	224.606.520
7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.451.136.776,00	3.372.905.576,00	224.606.520,00
7.01	KECAMATAN							3.451.136.776,00	3.372.905.576,00	224.606.520,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**3.211.136.776,00**	**3.218.961.776,00**	**757.695.798,00**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan***	**dokumen**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**2.987.108.776,00**	**3.003.708.776,00**	**319.437.720,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	2.971.928.776,00	2.988.528.776,00	319.437.720,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**73.350.000,00**	**64.575.000,00**	**-8.195.000,00**

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	131 paket	12 paket	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	3.370.500,00	3.370.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	559 paket	12 paket	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	18.828.000,00	18.828.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	25 paket	25 paket	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	4.512.900,00	4.512.900,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	5500 paket	12 paket	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	4.732.000,00	4.732.000,00	580.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Laporan	10 laporan	10 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	24.333.600,00	24.333.600,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	7 laporan	7 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	17.573.000,00	8.798.000,00	-8.775.000,00

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedi***	**Unit**	**7 unit**	**7 unit**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Unit	8 unit	8 unit	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia***	**Dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**100.208.000,00**	**100.208.000,00**	**0,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	46.008.000,00	46.008.000,00	0,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**39.970.000,00**	**39.970.000,00**	**-580.000,00**

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	1 unit	1 unit	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	35.100.000,00	35.100.000,00	-3.340.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	10 unit	10 unit	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	4.870.000,00	4.870.000,00	2.760.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**10.000.000,00**	**3.149.600,00**	**500.000,00**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	***Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**10.000.000,00**	**3.149.600,00**	**-6.850.400,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Laporan	2 laporan	2 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.149.600,00	-6.850.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**105.000.000,00**	**66.504.400,00**	**5.250.000,00**

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**105.000.000,00**	**66.504.400,00**	**-38.495.600,00**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga Kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	6 laporan	6 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	31.504.400,00	-38.495.600,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**65.000.000,00**	**44.404.000,00**	**3.250.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	***Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang Difasilitasi***	**Kali**	**24 kali**	**24 kali**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**65.000.000,00**	**44.404.000,00**	**-20.596.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	3 laporan	3 laporan	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	44.404.000,00	-20.596.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**1.500.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Orang	100 orang	100 orang	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**9.885.800,00**	**1.500.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Jumlah Desa yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya***	**Desa**	**18 Desa**	**18 Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**9.885.800,00**	**-20.114.200,00**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Ngunut, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	9.885.800,00	-20.114.200,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngunut Tahun 2025 yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik.

Adanya dokumen Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Ngunut beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang, oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Rencana Kerja dapat tercapai dengan lebih baik.

Ngunut, 8 Oktober 2025

CAMAT NGUNUT

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN NGUNUT

SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720504 199201 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAGERWOJO



RENCANA KERJA
RENJA
PERUBAHAN
KECAMATAN PAGERWOJO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAGERWOJO
JALAN RAYA PAGERWOJO NO. 02 TELP. 0355-41029
PAGERWOJO - KODE POS 66262

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029 Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung

Renja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, serta memperhatikan dinamika dan perubahan kondisi aktual di lapangan.

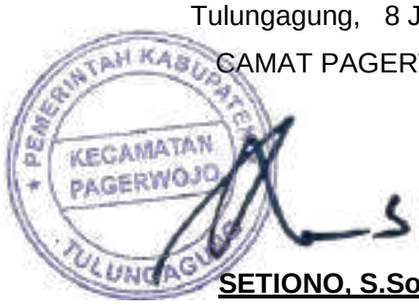
Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan target kinerja dan alokasi sumber daya agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Pagerwojo tetap efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masihbanyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerwojo yang dapat kami sajikan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat.

Semoga dokumen Renja Perubahan Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pagerwojo.

Tulungagung, 8 Juli 2025

CAMAT PAGERWOJO



SETIONO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710319 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
..... 14
BAB V PENUTUP 19

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pagerwojo s/d Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung 8

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pagerwojo.....16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (renstra) dan RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Kecamatan Pagerwojo Tahun 2024-2026. Sebagai unsur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Pagerwojo memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Pagerwojo.

1.2 Landasan Hukum.

Dalam menyusun dokumen rencana kerja perubahan tahun 2025 Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan terbaru, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pagerwojo tetap efektif, efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja Perubahan PD dengan

RKPD 2025 dan RPJMD. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan 2025 ini adalah:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta perkembangan kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja Kecamatan Pagerwojo.
3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antara Renja Perubahan Kecamatan Pagerwojo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk lingkup Kecamatan Pagerwojo.
5. Memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Pagerwojo berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagerwojo untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Pagerwojo.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pagerwojo.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagerwojo adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Pagerwojo.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Pagerwojo selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Renja Kecamatan Pagerwojo disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara

Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD.

1.2. Landasan Hukum.
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagerwojo Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan anggaran dalam APBD serta mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerwojo tahun 2025-2029, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Pagerwojo menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing sub kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja yang mendekati target tahunan, namun terdapat pula kegiatan yang realisasinya masih rendah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagerwojo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Pagerwojo.

Pada triwulan pertama, kegiatan masih berfokus pada tahapan persiapan pelaksanaan, koordinasi lintas bidang, serta penyelesaian administrasi dan dokumen pendukung pelaksanaan program. Beberapa kegiatan rutin pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan telah mulai dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Realisasi keuangan hingga Triwulan I Tahun 2025 berada pada kisaran **15–20%** dari total anggaran, sementara realisasi fisik mencapai sekitar **20–25%**. Capaian ini tergolong wajar mengingat sebagian besar kegiatan baru memasuki tahap awal pelaksanaan dan masih menunggu proses pengadaan serta pencairan anggaran tahap pertama.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian kinerja di antaranya adalah penyesuaian terhadap kebijakan baru pada tingkat daerah, keterlambatan administrasi pencairan dana, serta proses revisi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Namun demikian, seluruh kegiatan prioritas tetap berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan tidak terdapat hambatan signifikan yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Dari sisi capaian kinerja, indikator program dan kegiatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pelayanan publik tetap berjalan optimal, koordinasi dengan pemerintah desa semakin meningkat, dan pembinaan masyarakat dapat dilaksanakan secara rutin. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 untuk melakukan penyesuaian target, strategi pelaksanaan, serta optimalisasi sumber daya aparatur agar pelaksanaan program di triwulan berikutnya dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Secara umum, pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerwojo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan. Ke depan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan fisik, peningkatan koordinasi antarbidang, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar capaian kinerja dapat semakin meningkat pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Pagerwojo s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Pagerwojo** Lembar : .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)					
							Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)**	**100**	**3.249.359.164,00**	**50**	**3.522.666.783,00**	**100**	**3.182.056.274,00**	**25**	**631.042.340,00**	**25,00**	**19,83**
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Laporan Kinerja (Dokumen)	4	1.814.600,00	1	880.000,00		1.750.000,00		-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1.249.600,00	2	880.000,00	4	1.250.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	565.000,00	0	-	4	500.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat_Daerah (Dokumen)	22	2.922.238.074,00	4	3.100.399.029,00		2.948.157.474,00		598.370.086,00		**20,30**
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	2.910.207.474,00	89	3.062.149.029,00	23	2.935.257.474,00	23	598.370.086,00	**100,00**	**20,39**
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	10.660.000,00	3	38.250.000,00	4	11.500.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	720.600,00	0	-	4	750.000,00	0	-		**0,00**

0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	650.000,00	0	-	4	650.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah (Dokumen)	1	6.600.000,00	5	16.905.000,00		11.000.000,00		-		**0,00**
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	6.600.000,00	23	16.905.000,00	1	11.000.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)	1	21.310.990,00	100	101.414.700,00		86.906.000,00		12.126.700,00	**0,00**	**13,95**
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	205.000,00	1	2.140.500,00	1	2.650.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.015.700,00	4	62.896.100,00	1	31.754.000,00	1	5.693.900,00	**100,00**	**17,93**
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.451.200,00	0	5.891.000,00	1	9.524.000,00	1	-	**100,00**	**0,00**
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	259.090,00	3	6.091.100,00	1	13.500.000,00	1	2.932.800,00	**100,00**	**21,72**
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	2.500.000,00	9	8.990.000,00	12	10.000.000,00	3	3.020.000,00		**30,20**
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1.880.000,00	12	15.406.000,00	12	19.478.000,00	3	480.000,00	**25,00**	**2,46**
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milih daerah yang tersedia (Unit)	1	1.865.000,00	4	3.000.000,00		7.800.000,00		-		
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1.865.000,00	4	3.000.000,00	2	7.800.000,00	0	-		**0,00**
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (Dokumen)	12	51.997.200,00	100	71.404.837,00		70.198.800,00		13.070.554,00	**0,00**	**18,62**
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	10.194.000,00	12	18.377.463,00	12	19.194.000,00	3	2.321.929,00	**25,00**	**12,10**
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	41.803.200,00	12	53.027.374,00	12	51.004.800,00	3	10.748.625,00	**25,00**	**21,07**
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)	1	46.959.500,00	75	228.663.217,00		56.244.000,00		7.475.000,00		**13,29**

0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	42.600.000,00	7	26.564.800,00	1	42.600.000,00	1	5.721.000,00	**100,00**	**13,43**
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4.060.000,00	3	3.200.000,00	1	12.500.000,00	1	610.000,00		
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	299.500,00	2	198.898.417,00	1	1.144.000,00	1	1.144.000,00		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP (%)***	**100**	**5.000.000,00**	**100**	**4.920.000,00**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	1	5.000.000,00	100	4.920.000,00		10.000.000,00		-	**0,00**	**0,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	5.000.000,00	12	4.920.000,00	1	10.000.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi (%)**	**100**	**82.621.800,00**	**125**	**83.213.500,00**	**100**	**85.000.000,00**	**100**	**45.894.000,00**	**100,00**	**53,99**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (Kegiatan)	4	47.621.800,00	7	83.213.500,00		85.000.000,00		45.894.000,00	**0,00**	**53,99**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	66	35.000.000,00	0	34.805.000,00		35.000.000,00		34.378.800,00	**0,00**	**98,23**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	**100**	**65.000.000,00**	12	48.408.500,00	4	50.000.000,00	1	11.515.200,00	**25,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan (%)**	100	65.000.000,00	100	-	**100**	**75.000.000,00**	**0**	**7.549.200,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)	12	65.000.000,00	12	-		75.000.000,00		7.549.200,00	**0,00**	**10,07**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	55.000.000,00	12	313.270.500,00	12	60.000.000,00	3	640.000,00		

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	**1**	**10.000.000,00**			2	15.000.000,00	1	6.909.200,00	**50,00**	**46,06**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan (%)**	1	28.952.000,00	50	35.528.000,00	**100**	**30.000.000,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (Kegiatan)	1	28.952.000,00	1	35.528.000,00		30.000.000,00		-	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	100	28.952.000,00	100	35.528.000,00	60	30.000.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)**	11	15.000.000,00	100	19.742.500,00	**100**	**20.000.000,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (Desa)	11	15.000.000,00	33	19.742.500,00		20.000.000,00		-	**0,00**	**0,00**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	15.000.000,00	2	19.742.500,00	4	20.000.000,00	0	-	**0,00**	**0,00**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pagerwojo tahun anggaran 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar Rp. 631.042.340 atau 20,08 % dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 3.182.056.274 Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 1.750.000
Indikator : Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran , evaluasi perangkat daerah
Target Kinerja : 4 Dokumen
Realisasi Kinerja : 0 Dokumen
Realisasi keuangan : Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 2.948.157.474
Indikator : Jumlah dokumen administrasi keuangan
Target Kinerja : 23 Dokumen
Realisasi Kinerja : 3 Dokumen
Realisasi keuangan : Rp. 598.370.086 atau 17,64 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa/ gaji dan tunjangan, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 11.000.000
Indikator : Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0 %
Realisasi keuangan : Rp. 0,- atau 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi umum perangkat daerah

Pagu : Rp. 86.906.000
Indikator : Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 10 %
Realisasi keuangan : Rp. 12.126.700 atau 10,53 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu : Rp. 70.198.800
Indikator : Presentase jasa penunjang yang tersedia
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 10 %
Realisasi keuangan : Rp. 13.070.554 atau 9,17 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 56.244.000
Indikator : Jumlah Barang yang diperoleh
Target Kinerja : 1 unit
Realisasi Kinerja : 1 unit
Realisasi keuangan : Rp. 7.475.000 atau 4,2 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Pagu : Rp. 10.000.000
Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelayanan sesuai SOP
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0%
Realisasi Keuangan: Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pagu : Rp. 85.000.000
Indikator : Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi
Target Kinerja : 11 Desa
Realisasi Kinerja : 40 %
Realisasi keuangan: 45.894.000 atau 39 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pagu : Rp. 75.000.000
Indikator : Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 6 %
Realisasi keuangan: Rp. 7.549.200 atau 5,66 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Pagu : Rp. 30.000.000,-
Indikator : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0 %
Realisasi keuangan : Rp. 0 atau %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu : Rp. 20.000.000,-
Indikator : Jumlah desa yang difasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0 %
Realisasi keuangan: Rp. 0 atau 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pagerwojo.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Selain itu, rencana kerja ini disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Pagerwojo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai Triwulan I, beberapa target kinerja pada kegiatan prioritas mengalami penyesuaian untuk memastikan ketercapaian sasaran pada akhir tahun, terutama pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, program peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, program pelayanan administrasi pemerintahan, dan program pengadaan serta pemeliharaan sarana/prasarana penunjang. Penyesuaian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat strategis dan mendukung langsung pelayanan kepada masyarakat, serta menunda atau mengurangi kegiatan yang realisasinya dinilai kurang mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, Perubahan Renja Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen operasional yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Pagerwojo, serta memperkuat kontribusi kecamatan terhadap target RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Adapun Rencana kerja perubahan dan pendanaan Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025

Kecamatan Pagerwojo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Taget Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Tambah/Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)**	**Indeks**	**100**	**100**	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**3.182.056.274,00**	**3.138.940.174,00**	- 43.116.100,00
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Laporan Kinerja (Dokumen)	Dokumen	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	1.750.000,00	1.750.000,00	-
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	1.250.000,00	1.250.000,00	-
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	500.000,00	500.000,00	-
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat_Daerah (Dokumen)		22	22	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	2.948.157.474,00	2.948.157.474,00	-
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/ Bulan	22	22	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	2.935.257.474,00	2.935.257.474,00	-
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	11.500.000,00	11.500.000,00	-
0.00.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	750.000,00	750.000,00	-

0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Paket	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	650.000,00	650.000,00	-
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah (Dokumen)		1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	11.000.000,00	11.000.000,00	-
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	11.000.000,00	11.000.000,00	-
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP (%)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	86.906.000,00	63.199.900,00	- 23.706.100,00
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	2.650.000,00	1.650.000,00	- 1.000.000,00
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	31.754.000,00	26.021.000,00	- 5.733.000,00
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	9.524.000,00	4.021.700,00	- 5.502.300,00
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	13.500.000,00	9.941.200,00	- 3.558.800,00
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	10.000.000,00	10.000.000,00	-
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	19.478.000,00	11.566.000,00	- 7.912.000,00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milih daerah yang tersedia (Unit)	Laporan	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	7.800.000,00	2.350.000,00	- 5.450.000,00
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	7.800.000,00	2.350.000,00	- 5.450.000,00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia (Dokumen)	Laporan	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	70.198.800,00	61.798.800,00	- 8.400.000,00

0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	19.194.000,00	10.794.000,00	- 8.400.000,00
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	51.004.800,00	51.004.800,00	-
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)		1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	56.244.000,00	50.684.000,00	- 5.560.000,00
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	42.600.000,00	42.600.000,00	-
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	12.500.000,00	6.940.000,00	- 5.560.000,00
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	1.144.000,00	1.144.000,00	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP (%)**	Persen	**100**	**100**	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**10.000.000,00**	**7.477.200,00**	- 2.522.800,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	Persen	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	10.000.000,00	7.477.200,00	- 2.522.800,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Laporan	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	10.000.000,00	7.477.200,00	- 2.522.800,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi (%)**	Persen	**100**	**100**	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**85.000.000,00**	**63.912.400,00**	- 21.087.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (Kegiatan)	Kegiatan	4	4	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	85.000.000,00	63.912.400,00	- 21.087.600,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga	66	66	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	35.000.000,00	35.000.000,00	-

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	Laporan	**100**	**100**	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	50.000.000,00	28.912.400,00	- 21.087.600,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	100	100	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**75.000.000,00**	**53.531.400,00**	- 21.468.600,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan (%)**	Persen	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	75.000.000,00	53.531.400,00	- 21.468.600,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)	Laporan	12	12	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	60.000.000,00	46.457.200,00	- 13.542.800,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	**1**	**1**	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**15.000.000,00**	**7.074.200,00**	- 7.925.800,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Kegiatan	2	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	30.000.000,00	28.192.500,00	- 1.807.500,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan (%)**	Persen	1	1	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	30.000.000,00	28.192.500,00	- 1.807.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (Kegiatan)	Laporan	100	100	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	**30.000.000,00**	**28.192.500,00**	- 1.807.500,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Desa	11	11	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	20.000.000,00	8.377.200,00	- 11.622.800,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)**	Dokumen	11	11	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	20.000.000,00	8.377.200,00	- 11.622.800,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (Desa)	Dokumen	11	11	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	20.000.000,00	8.377.200,00	- 11.622.800,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Dokumen	11	11	Kecamatan Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo		8.377.200,00	8.377.200,00

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I serta mempertimbangkan dinamika dan perubahan kondisi aktual di lapangan.

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan target kinerja, prioritas kegiatan, dan alokasi anggaran agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pagerwojo tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Pagerwojo Tahun 2025–2029.

Melalui Renja Perubahan Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Pagerwojo dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan rencana kerja ini juga menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan terukur.

Kecamatan Pagerwojo berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa, serta memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Kasi, Kasubbag dan seluruh jajaran staf Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya seseuai tugas dan kewenangannya
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksananaan Renja tahun 2025.

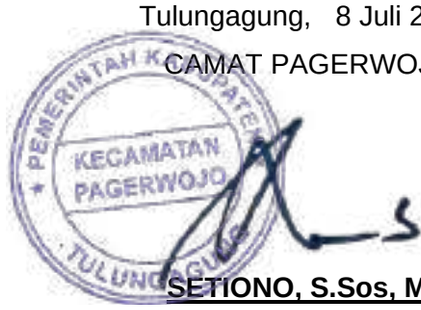
Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu

Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Pagerwojo Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Tulungagung, 8 Juli 2025

CAMAT PAGERWOJO



SETIONO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710319 199503 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



KECAMATAN PAKEL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan HidayahNya telah tersusun Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029 Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakel Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pakel tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masihbanyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakel yang dapat kami sajikan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahuwata'ala, semoga Kecamatan Pakel mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja..

Pakel, 8 Juli 2025
Plt. CAMAT PAKEL



IMAM SUWOYO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701022 199201 1 002

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk memberikan kepastian arah kebijakan pembangunan seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
BAB I P E N D A H U L U A N 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV 22
PENUTUP 22
4.1 Catatan Penting 22
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 22
4.3 Rencana Tindak Lanjut 23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pakel s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung..... 8

Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pakel... 16

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Pakel Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakel Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan target, sasaran, dan program kegiatan tahun berjalan dengan perkembangan kondisi aktual, baik karena adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah, dinamika sosial ekonomi masyarakat, maupun kondisi geografis dan lingkungan di wilayah Kecamatan Pakel. Perubahan ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja, serta masukan dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kecamatan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2025–2029. Pada periode ini, Kecamatan Pakel dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

1. **Perubahan kebijakan pembangunan daerah** yang mengharuskan adanya penyesuaian prioritas program.
2. **Dinamika kebutuhan masyarakat** yang menuntut pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan merata.
3. **Faktor eksternal** seperti perkembangan ekonomi, inflasi daerah, dan potensi bencana alam yang dapat memengaruhi capaian target.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Kecamatan Pakel tetap sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung, selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan kerja bagi seluruh perangkat di lingkungan Kecamatan Pakel dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar penganggaran dan alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Pakel Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;

24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

25 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Pakel Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan terbaru, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pakel tetap efektif, efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta perkembangan kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja Kecamatan Pakel.

3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antara Renja Perubahan Kecamatan Pakel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk lingkup Kecamatan Pakel.
5. Memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Pakel berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan sistematika penulisan Renja Kecamatan Pakel disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakel Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan anggaran dalam APBD serta mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakel tahun 2025-2029, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Pakel menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing sub kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja yang mendekati target tahunan, namun terdapat pula kegiatan yang realisasinya masih rendah.

Dari sisi capaian kinerja, target kumulatif yang ditetapkan dalam Perubahan Renja sampai akhir tahun mengacu pada indikator-indikator Renstra SKPD. Sampai dengan Triwulan I, capaian kinerja rata-rata berada pada kisaran **10–30%** dari target tahunan, dengan beberapa kegiatan yang sudah melampaui separuh target, khususnya pada program penunjang urusan pemerintahan daerah seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I umumnya berkisar **10–30%** dari total pagu anggaran Perubahan Renja. Realisasi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran relatif sejalan dengan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan, meskipun masih terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya belum signifikan karena sifat pelaksanaannya yang akan terealisasi pada triwulan berikutnya.

Bila dibandingkan dengan target capaian Renstra Kecamatan Pakel, realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren positif namun masih memerlukan percepatan, terutama pada kegiatan yang strategis dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran Renstra. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pada bidang peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dengan demikian, untuk mencapai target tahunan dan target Renstra SKPD, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan I, II dan IV, melalui percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan ketercapaian indikator kinerja sesuai perencanaan.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pakel s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung

Nama Perangkat Daerah :**Kecamatan Pakel** Lembar : .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)					
							Target		Realisasi s.d. Triwulan I		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	83,5	2,960,973,691.00		3,116,087,065,00		3,555,996,404.00		942,250,022.00	12.87	3.74
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,686,473,691.00		2,753,794,700.00	14	3,342,891,604.00		441,794,356.00	13,22	3.86
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	2,663,973,691.00		2,716,883,100.00	25	3,325,791,604.00	25	441,794,356.00	13.28	3.88
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	18,900,000.00		33,680,000.00	12	17,100,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000.00		11,500,000.00		11,500,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	12,500,000.00 -		11,500,000.00	25	11,500,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			94,500,000.00		118 ,465,459.00		63,218,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7,500,000.00		350,000.00	1	2,223,100.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	28,000,000.00		66,153,500.00	36	27,104,800.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	13,000,000.00		6,119,000.00	7	6,337,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	13,000,000.00		16,933,000.00	1	9,809,900.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	16,000,000.00		1,835,000.00	1	4,105,200.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	17,000,000.00		26,857,600.00	1	13,638,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12,000,000.00		-		8,892,000.00	0	-		0.00

0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	12,000,000,00		-	3	8,892,000.00	0	-	0.00	0.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103,000,000.00		84,099,012.00		88,504,800.00	0	7,736,886.00	8,74	4.45
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	67,500,000.00		56,704,512.00	12	60,900,000.00	3	3,171,136.00	5,21	2.72
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	28,500,000.00		27,394,500.00	12	27,604,800.00	3	4,565,750.00	16.54	8.27
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	52,500,000.00		148,445,253.00	100	40,990,000.00	100	2,257,030.00	5,51	0,00
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihaaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	37,500,000.00		34,875,253.00	3	35,100,000.00	2	2,257,030.00	6,43	0,00
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	14,000,000.00		10,645,00,00	15	5,890,000.00	0	-	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP (%)	100	14,000,000.00		162,644,500.00	100	10,000,000.00	0	-	0.00	0.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	100	14,000,000.00		162,644,500.00	100	10,000,000.00	0	-	0.00	0.00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	5,000,000.00		162,644,500.00	1	4,211,900,00	0	-	0.00	0.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)	100	93,500,000.00		89,349,000.00	100	105,000,000.00	50	35,368,600.00	33.68	33,68
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	19	93,500,000.00		89,349,000.00	19	105,000,000.00	19	35,368,600.00	33.68	33,68
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	19	34,919,800.00		34,599,000.00	19	35,000,000.00	19	34,728,600.00	99.22	99.22
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	52,250,000.00		54,750,000.00	7	37,617,300.00	3	640,000.00	0.91	0,91
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa tertib peraturan perundangan (%)	100	57,750,000.00		452,123,000.00	100	51,830,100,00	0	-	0.00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (%)	100	57,750,000.00		452,123,000.00	100	51,830,100,00	0	-	0.00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	57,750,000.00		452,123,000.00	12	51,830,100.00	0	-	0.00	0.00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan (%)	100	35,750,000.00		31,675,000.00	100	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)		35,750,000.00		31,675,000.00	10	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	100	35,750,000.00		31,675,000.00	50	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	12,100,000.00		19,728,000.00	100	7,923,800.00	0	-	0.00	0.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (desa)		12,100,000.00		19,728,000.00	10	7,923,800.00	0	-	0.00	0.00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	12,100,000.00		19,728,000.00	1	7,923,800.00	0	-	0.00	0.00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pakel tahun anggaran 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar Rp. 487.156.872,- atau 12,87% dari total rencana anggaran APBD sebesar Rp. 3.578.277.304,- Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 3.342.891.604,- (APBD)
Indikator : Jumlah dokumen administrasi keuangan
Target Kinerja : 14 Dokumen
Realisasi Kinerja : 3 Dokumen
Realisasi keuangan : Rp. 441.794.356,00,- atau 13,22 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa/ gaji dan tunjangan, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 11.500.00,- (APBD)
Indikator : Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar
Target Kinerja : 2 Dokumen
Realisasi Kinerja : 1 Dokumen
Realisasi keuangan : -

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya bagi ASN

c. Administrasi umum perangkat daerah

Pagu : Rp. 63.218.000,- (APBD)
Indikator : Persentase penyediaan administrasi umum
Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 0 %
Realisasi keuangan : -

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 8.892.000,- (APBD)

Indikator : Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi

Target Kinerja : 3 unit

Realisasi Kinerja : 0 %

Realisasi keuangan : -

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan mebel.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu : Rp. 88.504.800,- (APBD)

Indikator : Presentase jasa penunjang yang tersedia

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 25%

Realisasi keuangan : Rp. 7.736.886,- atau 8,74 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 40.990.000,- (APBD)

Indikator : Jumlah Barang yang diperoleh

Target Kinerja : 6 unit

Realisasi Kinerja : 2 unit

Realisasi keuangan : Rp. 2.257.030,- atau 5,51 %

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan,pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Pagu : Rp. 4.211.900,- (APBD)

Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelayanan sesuai SOP

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100%

Realisasi Keuangan: -

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pagu : Rp. 72.617.300,- (APBD)

Indikator : Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi

Target Kinerja : 19 Desa

Realisasi Kinerja : 46%

Realisasi keuangan: Rp 35.368.600,- atau 56,48 %

Kegiatan ini dilaksanakan berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pagu : Rp. 51.830.100,- (APBD)

Indikator : Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : %

Realisasi keuangan: -

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Pagu : Rp. 30.000.000,-

Indikator : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : -

Realisasi keuangan : Rp.,- atau %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu : Rp. 7.923.800,-

Indikator : Jumlah desa yang difasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : %

Realisasi keuangan: -

Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Pakel Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pakel.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Selain itu, rencana kerja ini disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Pakel dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai Triwulan I, beberapa target kinerja pada kegiatan prioritas mengalami penyesuaian untuk memastikan ketercapaian sasaran pada akhir tahun, terutama pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, program peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, program pelayanan administrasi pemerintahan, dan program pengadaan serta pemeliharaan sarana/prasarana penunjang. Penyesuaian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat strategis dan mendukung langsung pelayanan kepada masyarakat, serta menunda atau mengurangi kegiatan yang realisasinya dinilai kurang mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, Perubahan Renja Kecamatan Pakel Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen operasional yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Pakel, serta memperkuat kontribusi kecamatan terhadap target RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029. Adapun Rencana kerja perubahan dan pendanaan Kecamatan Pakel Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pakel

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Taget Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(10-9)	11=10-9
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**Indeks**	**87**	**87**			**3.555.996.404,00**	**3.411.694.204,00**	**-144.302.200,00**
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.342.891.604,00	3.223.391.504,00	-119.500.100,00
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/ Bulan	25	25	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	3.325.791.604,00	3.206.291.504,00	-119.500.100,00
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11.500.000,00	11.500.000,00	0,00

0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	2	2	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							63.218.000,00	33.915.900,00	-29.302.100,00
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	2.223.100,00	1.213.600,00	-1.009.500,00
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	27.104.800,00	12.311.600,00	-14.793.200,00
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	6.337.000,00	4.565.700,00	-1.771.300,00
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	9.809.900,00	9.004.800,00	-805.100,00
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	4.105.200,00	1.805.200,00	-2.300.000,00
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	6	6	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	13.638.000,00	5.015.000,00	-8.623.000,00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah							8.892.000,00	8.892.00,00	0,00

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	8.892.000,00	8.892.000,00	0,00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							88.504.800,00	88.504.800,00	0,00
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	27.604.800,00	27.604.800,00	0,00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40.990.000,00	40.990.000,00	0,00
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	6	6	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**10.000.000,00**	**4.211.900,00**	-5.788.100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan pelayanan PATEN (%)	**Persen**	100	100			10.000.000,00	4.211.900,00	-5.788.100,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	**Laporan**	1	1	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	10.000.000,00	4.211.900,00	-5.788.100,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**105.000.000,00**	**72.617.300,00**	-32.382.700,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	**Kegiatan**	19	19			105.000.000,00	72.617.300,00	-32.382.700,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	**Lembaga**	60	60	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	**Laporan**	7	7	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	70.000.000,00	37.617.300,00	-32.382.700,00

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)								
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**65.000.000,00**	**51.830.100,00**	-13.169.900,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi (%)	**Persen**	100	100			65.000.000,000	51.830.100,00	-13.169.900,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	**Laporan**	12	12	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	65.000.000,00	51.830.100,00	-13.169.900,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (Kegiatan)	**Kegiatan**	19	19			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	**Orang**	50	50	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)								
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (%)**	**Persen**	**100**	**100**			**20.000.000,00**	**7.923.800,00**	-12.076.200,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya (desa)	**Desa**	19	19			20.000.000,00	7.923.800,00	-12.076.200,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	**Dokumen**	1	1	KECAMATAN PAKEL	KECAMATAN PAKEL	20.000.000,00	7.923.800,00	-12.076.200,00

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pakel merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pakel Tahun 2025 – 2029. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Pakel sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pakel.

Perubahan Rencana Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

4.1 Catatan Penting

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pakel Tahun 2025 perlu mendapat perhatian pada beberapa hal berikut:

1. Kegiatan yang memiliki capaian kinerja dan serapan anggaran rendah sampai dengan Triwulan I perlu mendapatkan percepatan pelaksanaan pada triwulan berikutnya, baik melalui optimalisasi sumber daya, percepatan proses administrasi, maupun koordinasi dengan pihak terkait.
2. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan rIl pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian prioritas agar target utama tetap dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
3. Perlu penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Koordinasi internal antarbidang serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah dan instansi terkait harus diperkuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas pembangunan daerah pada Triwulan II, III dan IV.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
3. Mengidentifikasi potensi hambatan dan menyiapkan langkah antisipatif agar target kinerja dan sasaran Renstra Kecamatan Pakel tetap dapat tercapai.

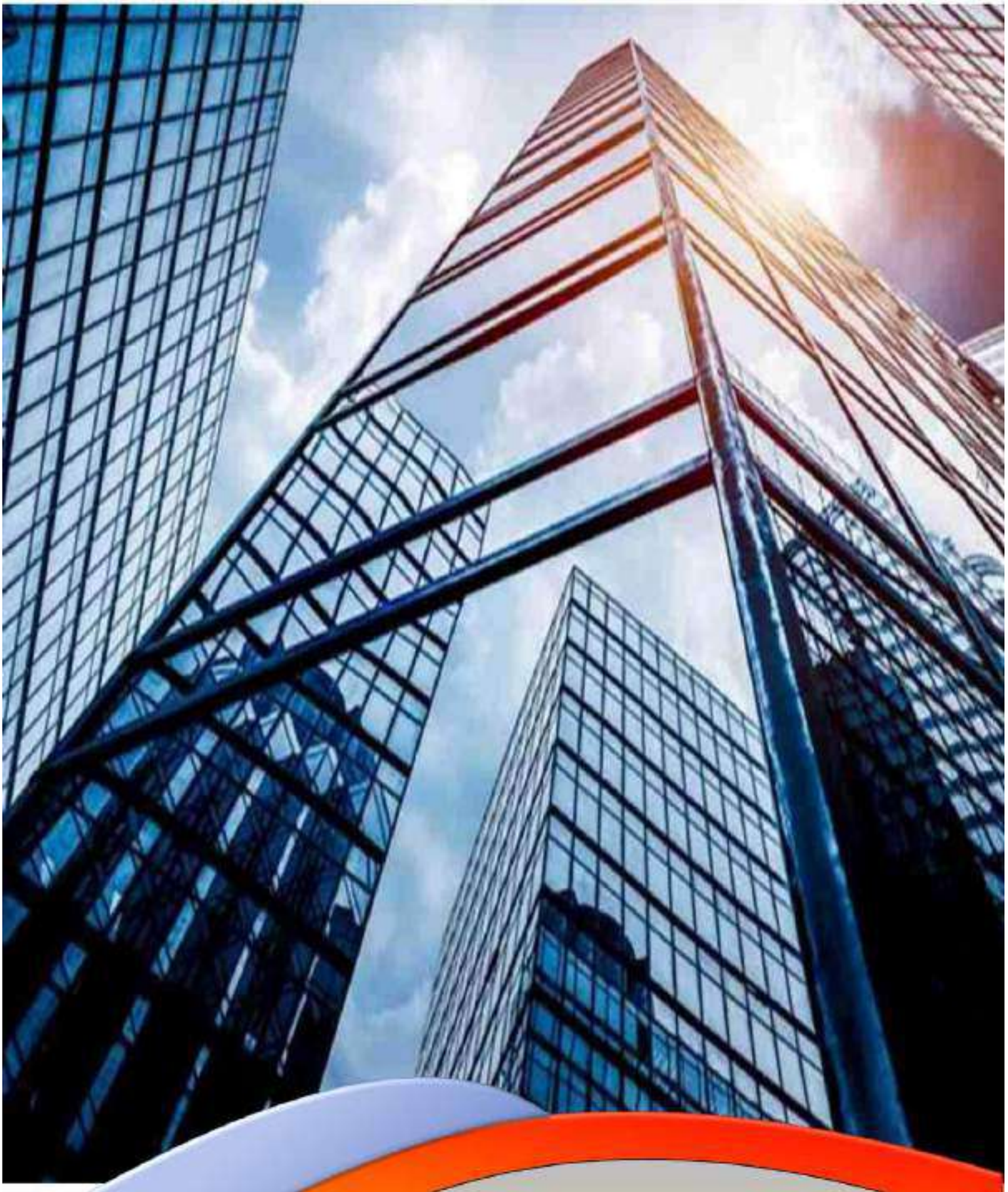
Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pakel Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Triwulan I dan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan secara optimal, selaras dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pakel, 8 Juli 2025
CAMAT PAKEL

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAKEL

IMAM SUWOYO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701022 199201 1 002



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KECAMATAN PUCANGLABAN

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memberikan pedoman tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta berbagai aspek lainnya terkait rencana pembangunan daerah. Ketentuan ini juga berlandaskan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2025 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja 2025 ini dikerjakan dengan fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaporan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami percaya, melalui kerja sama yang baik dan upaya maksimal, program serta kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini dapat terlaksana sesuai rencana, membawa manfaat yang luas, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Pucanglaban, 28 Juli 2025
CAMAT PUCANGLABAN

YUDI IRWANTO, SSTP. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197906151999121010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **14**

BAB IV PENUTUP **20**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pucanglaban.....	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pucanglaban Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Pucanglaban agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Pucanglaban memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 05 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Pucanglaban.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tulungagung.
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pucanglaban untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Pucanglaban.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pucanglaban.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Pucanglaban adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Pucanglaban.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Pucanglaban selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PRAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pucanglaban sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Kecamatan Pucanglaban mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Kecamatan Pucanglaban dan/atau realisasi APBD Kecamatan Pucanglaban

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Kecamatan Pucanglaban dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut;

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pucanglaban Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pucanglaban tahun 2024-2026.

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Pucanglaban menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing program maupun kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja sesuai target pada Triwulan I, namun terdapat pula program maupun kegiatan yang belum terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan pada Triwulan III seperti pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dimana aktivitasnya berupa rangkaian Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dilaksanakan di bulan agustus 2025.

Cara perhitungan capaian target kinerja pada Program di Kecamatan Pucanglaban ada yang secara komulatif dan non komulatif, untuk yang komulatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rata-Rata Tingkatan Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarajat Desa yang di fasilitasi,
3. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dengan indikator Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan, dan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi.

Komulatif disini berarti Perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun dilakukan dengan menjumlahkan atau mengakumulasi seluruh pencapaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Sedangkan cara perhitungan non komulatif terdapat pada :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP, dan

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase desa tertib peraturan perundang undangan.

Bila dibandingkan dengan target capaian Renstra Kecamatan Pucanglaban, realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren positif namun masih memerlukan percepatan, terutama pada kegiatan yang strategis dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran Renstra. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pada bidang peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dengan demikian, untuk mencapai target tahunan dan target Renstra SKPD, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, III dan IV, melalui percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan ketercapaian indikator kinerja sesuai perencanaan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Pucanglaban**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi S/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	KECAMATAN PUCANGLABAN						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah*	**100%**	**100%**	**100%**	**29,17%**	**29,17%**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	2	2	2	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	100%	100%	100%	44,4%	44,4%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	33,33%	33,33%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	4	4	4	1	33,33%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase desa tertib peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi	2	2	2	-	0%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di fasilitasi	2	2	2	0	0%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	9	9	9	9	9

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Pucanglaban Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pucanglaban.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Pucanglaban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pucanglaban

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Pucanglaban

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Pucanglaban

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
	KECAMATAN PUCANGLABAN							**2.919.435.802,00**	**2.822.078.780,00**	**179.341.724,00**
7	UNSUR KEWILAYAHAN							**2.919.435.802,00**	**2.822.078.780,00**	**179.341.724,00**
7.01	KECAMATAN							**2.919.435.802,00**	**2.822.078.780,00**	**179.341.724,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**2.689.435.802,00**	**2.644.635.780,00**	**179.661.444,00**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan***	**dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**2.427.286.202,00**	**2.427.419.880,00**	**276.832.424,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	2.412.286.202,00	2.412.419.880,00	276.832.424,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD***	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	15.408.000,00	5.808.000,00	-9.600.000,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	**Paket**	**2 Paket**	**2 Paket**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	15.408.000,00	5.808.000,00	-9.600.000,00

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP*	Persen	100 Persen	100 Persen	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	97.492.000,00	65.928.300,00	-28.223.700,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	27 Paket	27 Paket	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	1.946.200,00	1.324.100,00	-622.100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	610 paket	513 paket	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	57.610.400,00	44.144.200,00	-10.126.200,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	250 paket	250 paket	Kab.Tulungagung , Pucanglaban Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	5.434.000,00	2.506.000,00	-2.928.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	1555 paket	1555 paket	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	5.141.400,00	4.680.000,00	-461.400,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	8.032.000,00	5.332.000,00	-2.700.000,00

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	19.328.000,00	7.942.000,00	-11.386.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia***	**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Kab.Tulungagung** Pucanglaban, **Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung** Pucanglaban, **Semua Kel/Desa**	96.949.600,00	96.949.600,00	**0,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung , Pucanglaban Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	55.209.600,00	55.209.600,00	0,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung** Pucanglaban, **Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung** , Pucanglaban, **Semua Kel/Desa**	52.300.000,00	48.530.000,00	-7.110.000,00

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Unit	9 unit	9 unit	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	Unit	9 unit	10 unit	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	3.330.000,00	-2.070.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	2 Unit	2 Unit	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	8.500.000,00	-1.700.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**10.000.000,00**	**5.174.200,00**	**2.000.000,00**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	***Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Pucanglaban Semua Kel/Desa**	**10.000.000,00**	5.174.200,00	-4.825.800,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Laporan	2 laporan	2 laporan	Kab.Tulungagung , Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.174.200,00	-4.825.800,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**105.000.000,00**	**78.575.700,00**	**8.500.000,00**

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**105.000.000,00**	78.575.700,00	-26.424.300,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	2 laporan	2 laporan	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	43.575.700,00	-26.424.300,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**65.000.000,00**	**51.219.700,00**	**7.000.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	***Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang Difasilitasi***	**Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**65.000.000,00**	51.219.700,00	-13.780.300,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	2 laporan	2 laporan	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	51.219.700,00	-13.780.300,00

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**1.500.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Orang	100 orang	100 orang	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**20.000.000,00**	**12.473.400,00**	**2.000.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Jumlah Desa yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya***	**Desa**	**9 Desa**	**9 Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa**	**20.000.000,00**	12.473.400,00	-7.526.600,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab.Tulungagung Pucanglaban, Semua Kel/Desa	Kab.Tulungagung, Pucanglaban, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.473.400,00	-7.526.600,00

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pucanglaban Tahun 2025 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pucanglaban Tahun 2024 – 2026. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Pucanglaban sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pucanglaban.

Perubahan Rencana Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Kasi, Kasubbag dan seluruh jajaran staf Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya seseuai tugas dan kewenangannya

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksananaan Renja tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Pucanglaban Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pucanglaban, 28 Juli 2025

CAMAT PUCANGLABAN

YUDI IRWANTO, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790615 199912 1 010

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

KECAMATAN REJOTANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025 dapat diselesaikan tanpa adanya halangan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2024 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja 2025 ini dikerjakan dengan fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaporan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Rejotangan.

Rejotangan, 8 Juli 2025

CAMAT REJOTANGAN

DIDI JAROT WIDODO NURSAMSU, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19740524 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iiii
DAFTAR TABEL iiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang. 1
1.2. Landasan Hukum. 2
1.3. Maksud dan Tujuan. 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025..... 7

TABEL 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Rejotangan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Kecamatan Rejotangan Tahun 2024-2026. Sebagai unsur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Rejotangan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Rejotangan.

1.2. Landasan Hukum.

Dalam menyusun dokumen rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025 yang mempunyai maksud:

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Rejotangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rejotangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rejotangan adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Rejotangan.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Rejotangan selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang

lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata urutan sistematika penulisan Rancangan Renja Kecamatan Rejotangan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Kecamatan Rejotangan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Rejotangan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi perubahan Renja Kecamatan Rejotangan tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Rejotangan** Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan	Jumlah bulan pemenuhan gaji tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				Tunjangan ASN						
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	80 paket	80 paket	80 paket	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 paket	70 paket	70 paket	70 paket	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5000 paket	5000 paket	5000 paket	5000 paket	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
					yang Disediakan					
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	32 laporan	32 laporan	32 laporan	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				PELAYANAN PUBLIK						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
				Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
				PROGRAM						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*
				Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rejotangan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Rejotangan turut mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yaitu mendukung sisi prioritas penunjang pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rancangan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rejotangan Tahun 2024 sebagai pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel 3.2.2.1 pada Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Rejotangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
	KECAMATAN REJOTANGAN							**3.417.901.699**	**3.204.498.999**	**-213.402.700**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.417.901.699**	**3.204.498.999**	**-213.402.700**
7.01	**KECAMATAN**							**3.417.901.699**	**3.204.498.999**	**-213.402.700**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**3.157.901.699**	**2.957.114.599**	**-200.787.100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran,evaluasi dan laporan kinerja***	**dokumen**	**10 dokumen**	**0 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	575.000	57.500	-517.500
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**dokumen**	**6 dokumen**	**0 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**0**	**0**	0
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**laporan**	**6 laporan**	**6 laporan**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	575.000	57.500	-517.500
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan***	**dokumen**	**16 dokumen**	**16 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**2.941.496.899**	**2.770.496.899**	-171.000.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	2.924.096.899	2.753.096.899	-171.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	17.400.000	17.400.000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah***	**Dokumen**	**8 dokumen**	**8 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**5.600.000**	**350.000**	-5.599.650
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	***Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan***	Paket	20 Paket	20 Paket	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	5.600.000	350.000	-5.599.650
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai SOP***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**75.945.000**	**58.675.400**	-17.269.600
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	60 paket	60 paket	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	2.185.000	2.052.400	-132.600
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	80 paket	80 paket	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	15.834.400	10.666.800	-5.167.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	70 paket	70 paket	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	8.819.400	7.052.600	-1.766.800
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	5000 paket	5000 paket	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	2.619.000	1.860.000	-759.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Laporan	10 laporan	10 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	20.773.200	18.667.600	-2.105.600
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	7 laporan	7 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	25.714.000	18.376.000	-7.338.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedi***	**Unit**	**25 unit**	**25 unit**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**2.080.000**	**0**	-2.080.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Unit	20 unit	20 unit	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**2.080.000**	**0**	-2.080.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia***	**Dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**100.464.800**	**95.794.800**	-4.670.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	63.600.000	63.600.000	0
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	9.260.000	4.590.000	-4.670.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12 laporan	12 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	27.604.800	27.604.800	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	31.740.000	31.740.000	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	1 unit	1 unit	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	31.740.000	31.740.000	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	10 unit	10 unit	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	4.870.000	4.870.000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang Sesuai SOP**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**10.000.000**	5.981.000	-4.019.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	***Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN***	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**10.000.000**	5.981.000	-4.019.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Laporan	2 laporan	2 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**10.000.000**	5.981.000	-4.019.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**105.000.000**	143.874.300	38.874.300
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**105.000.000**	143.874.300	38.874.300
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga Kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	35.000.000	35.000.000	0
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	6 laporan	6 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	70.000.000	108.874.300	38.874.300

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**65.000.000**	52.229.700	-12.770.300
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	***Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantib yang Difasilitasi***	**Kali**	**24 kali**	**24 kali**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**65.000.000**	52.229.700	-12.770.300
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	3 laporan	3 laporan	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**65.000.000**	52.229.700	-12.770.300
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**35.000.000**	**35.000.000**	0
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi***	**Kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**35.000.000**	**35.000.000**	0
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Orang	100 orang	100 orang	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**35.000.000**	**35.000.000**	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**45.000.000**	10.299.400	-34.700.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TAMBAH / KURANG PAGU
				TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	LOKASI SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI SETELAH PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 10-9*
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Jumlah Desa yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya***	**Desa**	**18 Desa**	**18 Desa**	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**45.000.000**	10.299.400	-34.700.600
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**Kab.Tulungagung, Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**Kab.Tulungagung , Rejotangan, Semua Kel/Desa**	**45.000.000**	10.299.400	-34.700.600

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rejotangan Tahun 2025 yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik.

Adanya dokumen Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Rejotangan beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang, oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Rencana Kerja dapat tercapai dengan lebih baik.

Rejotangan, 8 Juli 2025

CAMAT REJOTANGAN



DIDI JAROT WIDODO NURSAMSU, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19740524 199412 1 001

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Kecamatan Sendang

Rancangan Akhir

RENJA PERUBAHAN 2025



SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sendang Tahun 2025 dapat diselesaikan tanpa adanya halangan.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sendang Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2024 dan Renstra 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja Prubahan Tahun 2025 ini dikerjakan dengan fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Sendang ini terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan serta analisis kebutuhan anggaran untuk tahun yang akan datang. Tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sendang Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaporan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Sendang.

Tulungagung, 08 Juli 2025

CAMAT SENDANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN SENDANG

NOVI CAHYO PUTRANTO, S.STP, MM.
Pembina Tk. 1
NIP. 19771030 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN) 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025……..…. 9

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sendang……...….....… 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perubahan Kecamatan Sendang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Sendang agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Sendang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Sendang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun dokumen rencana kerja perubahan tahun 2025 Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah Tahun 2025.
24. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sendang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Sendang.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sendang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sendang adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Sendang.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Sendang selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Rancangan Akhir Renja Perubahan 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang memuat :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sendang

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sendang sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra Kecamatan Sendang mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I Kecamatan Sendang dan/atau realisasi APBD Kecamatan Sendang

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Sendang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Kecamatan Sendang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut;

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN N

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sendang Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2025, yang mengacu pada data realisasi kinerja dan mengaitkannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sendang tahun 2024-2026, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Sendang menunjukkan progres yang bervariasi pada masing-masing program maupun kegiatan. Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi kinerja sesuai target pada Triwulan I, namun terdapat pula program maupun kegiatan yang belum terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan pada Triwulan III seperti pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dimana aktivitasnya berupa rangkaian Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dilaksanakan di bulan agustus 2025.

Cara perhitungan capaian target kinerja pada Program di Kecamatan Sendang ada yang secara komulatif dan non komulatif, untuk yang komulatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rata-Rata Tingkatan Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarajat Desa yang di fasilitasi,
3. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dengan indikator Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan, dan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi.

Komulatif disini berarti Perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun dilakukan dengan menjumlahkan atau mengakumulasi seluruh pencapaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Sedangkan cara perhitungan non komulatif terdapat pada :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP, dan

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase desa tertib peraturan perundang undangan.

Bila dibandingkan dengan target capaian Renstra Kecamatan Sendang, realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren positif namun masih memerlukan percepatan, terutama pada kegiatan yang strategis dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran Renstra. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pada bidang peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dengan demikian, untuk mencapai target tahunan dan target Renstra SKPD, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, III dan IV, melalui percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan ketercapaian indikator kinerja sesuai perencanaan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Sendang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	KECAMATAN SENDANG						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**29,17%**	**29,17%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, Evaluasi perangkat daerah	**10**	**10**	**10**	**3**	**30%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PD	6	6	6	2	33,33%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	4	4	4	1	25%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3	3	3	1	33,33%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	17	19	17	89,47%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	1	1	0	0%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	15	4	26,66%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	18	18	18	4	22,22%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	12	3	25 %
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1	1	1	0	0

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas Beserta atribut kelengkapannya	20	34	34	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umumyang sesuai SOP	100%	100%	100%	60%	60%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instlasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yangdisediakan	1	1	1	0,50	50 %
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	0,25	25%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1	1	1	0	0%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan tamu	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	4	4	0	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.08.0002	PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	3	25%

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantoryang disediakan	12	12	12	3	25%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	23,33%	23,33%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	1	1	1	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	29	29	29	0	0%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlahgedungkantordan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	0	0%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	PersentasePelayananadministrasi kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1	0	0	0	0

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	1	1	1	0	0%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yangdifasilitasi	100%	100%	100%	33,33%	33,33%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	3	3	3	1	33,33%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	11	11	11	11	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	3	5	2	40%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase desa tertib peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi	12	12	12	3	25%

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,TentaraNasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasioanal indonesia dan instansi vertikal di wilayahkecamatan	12	12	12	3	25%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	0	0	0%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan PemerintahanUmumyangdi fasilitasi	5	5	5	0	0%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan Dan ketahanan nasional	80	80	80	0	0%

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	11	11	11	0	0%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	11	11	11	0	0%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan Pembangunan partisipasif	11	11	0	0	0%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Sendang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan ini dilakukan melalui penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan atas hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengakomodir perkembangan dan dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sendang.

Penyesuaian rencana kerja ini diarahkan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sendang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan Sendang untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sendang

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sendang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sendang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/Kurang Pagu
				Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11=10-9)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**2.731.130.937,00**	**2.830.249.292,00**	**99.118.355,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , evaluasi perangkat daerah	Dokumen	10	10	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	3.478.900,00	912.800,00	-2.566.100,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PD	Dokumen	6	6	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	1.757,400,00	462.800,00	-1.294.600,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja PD	Laporan	4	4	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	1.721.500,00	450.000,00	-1.271.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan	Dokumen	4	4	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	2.292.168.237,00	2.511.908.892,00	219.740.655,00

7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bln	19	19	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	2.273.035.737,00	2.493.797.392,00	220.761.655,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	16.080.000,00	17.780.000,00	1.700.000,00
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	15	15	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	907.500,00	99.000,00	-808.500,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	990.000,00	105.000,00	-885.000,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	1.155.000,00	127.500,00	-1.027.500,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	14.850.000,00	3.600.000,00	-11.250.000,00

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	34	18	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	14.850.000,00	3.600.000,00	-11.250.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	62.019.600,00	28.328.100,00	-33.691.500,00
		Administrasi umum yang sesuai SOP								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	3.330.200,00	2.321.600,00	-1.008.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	21.725.900,00	8.109.900,00	-13.616.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Paket	2	2	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	2.017.500,00	615.600,00	-1.401.900,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	4.250.000,00	2.550.000,00	-1.700.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasiSKPD	Laporan	4	4	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	30.696.000,00	14.731.000,00	-15.965.000,00

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	Dokumen	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	67.113.200,00	63.593.500,00	-3.519.700,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	43.092.000,00	43.092.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	5.618.000,00	2.098.300,00	-3.519.700,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	18.403.200,00	18.403.200,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100%	100%	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	51.501.000,00	45.335.000,00	-6.166.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	37.201.000,00	34.460.000,0	-2.741.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	29	29	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	5.000.000,00	2.970.000,00	-2.030.000,00

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	9.300.000,00	7.905.000,00	-1.395.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuaiSOP**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**10.000.000,00**	**7.142.000,00**	**-2.858.000,00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Persen	100%	100%	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	10.000.000,00	7.142.000,00	-2.858.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	0	0	0
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizina	jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	10.000.000,00	7.142.000,00	-2.858.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Programdan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang difasilitasi**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**105.000.000,00**	**76.860.000,00**	**-28.140.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	3	3	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	105.000.000,00	76.860.000,00	-28.140.000,00

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	20	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan	Laporan	5	5	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	70.000.000,00	41.860.000,00	-28.140.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase desa tertib peraturan perundangan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**65.000.000,00**	51.012.000,00	-13.988.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi	Koordinasi	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	65.000.000,00	51.012.000,00	-13.988.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasioanal indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Laporan	12	12	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	65.000.000,00	51.012.000,00	-13.988.000,00

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Laporan	0	0	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	0	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaandan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	80	80	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**	**100%**	**100%**	**Kecamatan Sendang**	**Kecamatan Sendang**	**30.000.000,00**	**11.557.000,00**	-18.443.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa Yang Dievaluasi Kinerja Administrasinya	Desa	11	11	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	30.000.000,00	11.557.000,00	-18.443.000,00

	Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	11	11	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	30.000.000,00	11.557.000,00	-18.443.000,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipasif	Dokumen	0	0	Kecamatan Sendang	Kecamatan Sendang	0	0	0

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sendang Tahun 2025 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sendang Tahun 2024 – 2026. Fungsi Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Sendang sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sendang.

Perubahan Rencana Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai kerangka acuan dalam mengusulkan atau membuat kegiatan tetap berpedoman pada program yang sudah ada dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal inilah yang merupakan garis kebijakan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan dan kelengkapan data sehingga penyerapan dananya akan efektif dengan capaian kinerja yang maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan efisiensi anggaran selalu diprioritaskan sehingga semua pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daesah (RPD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Kasi, Kasubbag dan seluruh jajaran staf Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya seseuai tugas dan kewenangannya
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksananaan Renja tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu Perubahan Renja ini juga menjadi sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Sendang Desa Kabupaten Tulungagung.

Perubahan Renja juga menjadi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Tulungagung, 08 Juli 2025

CAMAT SENDANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN SENDANG

NOVI CAHYO PUTRANTO, S.STP, MM.
Pembina Tk. 1
NIP. 19771030 199612 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SENDANG KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SENDANG							**2.731.130.937,00**	**2.951.491.592,00**	**2.830.249.292,00**	**99.118.355,00**							**3.200.668.374,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.731.130.937,00**	**2.951.491.592,00**	**2.830.249.292,00**	**99.118.355,00**							**3.200.668.374,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.731.130.937,00**	**2.951.491.592,00**	**2.830.249.292,00**	**99.118.355,00**							**3.200.668.374,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**2.491.130.937,00**	**2.711.491.592,00**	**2.653.678.292,00**	**315.599.112,00**							**2.806.730.049,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*				10 Dokumen	10 Dokumen	3.478.900,00	3.478.900,00	912.800,00	-2.566.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		3.966.300,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.757.400,00	1.757.400,00	462.800,00	-1.294.600,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			1.984.500,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.721.500,00	1.721.500,00	450.000,00	-1.271.500,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			1.981.800,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				2 Laporan 4 Dokumen	2 Laporan 4 Dokumen	2.292.168.237,00	2.514.629.892,00	2.511.908.892,00	219.740.655,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		2.430.756.040,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.273.035.737,00	2.493.797.392,00	2.493.797.392,00	220.761.655,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			2.409.611.290,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	16.080.000,00	17.780.000,00	17.780.000,00	1.700.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			17.787.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	907.500,00	907.500,00	99.000,00	-808.500,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			998.250,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	990.000,00	990.000,00	105.000,00	-885.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			1.089.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.155.000,00	1.155.000,00	127.500,00	-1.027.500,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			1.270.500,00	KECAMATAN SENDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Tahun	1 Tahun	14.850.000,00	14.850.000,00	3.600.000,00	-11.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		16.456.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	34 Paket	14.850.000,00	14.850.000,00	3.600.000,00	-11.250.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			16.456.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Tahun	1 Tahun	62.019.600,00	62.019.600,00	28.328.100,00	-33.691.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		159.550.465,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.330.200,00	3.330.200,00	2.321.600,00	-1.008.600,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			24.025.474,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.725.900,00	21.725.900,00	8.109.900,00	-13.616.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			96.397.947,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.017.500,00	2.017.500,00	615.600,00	-1.401.900,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			2.191.794,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	2.550.000,00	-1.700.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			5.747.500,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.696.000,00	30.696.000,00	14.731.000,00	-15.965.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			31.187.750,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Tahun	1 Tahun	67.113.200,00	67.113.200,00	63.593.500,00	-3.519.700,00			-	- -	ASN di Kecamatan Sendang		97.599.199,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.092.000,00	43.092.000,00	43.092.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.141.320,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.618.000,00	5.618.000,00	2.098.300,00	-3.519.700,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.362.680,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.403.200,00	18.403.200,00	18.403.200,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.095.199,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Tahun	1 Tahun	51.501.000,00	49.400.000,00	45.335.000,00	-6.166.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		98.402.045,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.201.000,00	35.100.000,00	34.460.000,00	-2.741.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			46.881.345,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	2.970.000,00	-2.030.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			8.554.700,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.300.000,00	9.300.000,00	7.905.000,00	-1.395.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			42.966.000,00	KECAMATAN SENDANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.142.000,00**	**17.705.000,00**							**27.705.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.142.000,00	-2.858.000,00			-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Kecamatan Sendang		27.705.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.142.000,00	-2.858.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.705.000,00	KECAMATAN SENDANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**76.860.000,00**	**3.900.000,00**							**108.900.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Peremcanaan Pembangunan di Desa*				3 Lembaga kemasyarakat	3 Lembaga kemasyarakat	105.000.000,00	105.000.000,00	76.860.000,00	-28.140.000,00			-	- -	ASN di Kecamatan Sendang		108.900.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.350.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	41.860.000,00	-28.140.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.550.000,00	KECAMATAN SENDANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**				**100 %**	**100 %**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**51.012.000,00**	**89.833.325,00**							**154.833.325,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	51.012.000,00	-13.988.000,00			-	- -	ASN di Kecamatan Sendang		154.833.325,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	51.012.000,00	-13.988.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			134.833.325,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN SENDANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi dalam Kegiatan Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**45.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	ASN di Kecamatan Sendang		75.000.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	80 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pembangunan sosial masyarakat Peningkatan pembangunan sosial masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN SENDANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Tertib Peraturan Perundangan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**11.557.000,00**	**-2.500.000,00**							**27.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	11.557.000,00	-18.443.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	ASN di Kecamatan Sendang		27.500.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	11.557.000,00	-18.443.000,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SENDANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Sendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SENDANG
	J U M L A H								**2.731.130.937,00**	**2.951.491.592,00**	**2.830.249.292,00**	**99.118.355,00**							**3.200.668.374,00**	

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG

KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2024 - 2026 Kantor Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tanggunggunung tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung yang dapat kami persembahkan, dengan harapan mendapat masukan dan saran serta petunjuk dari masyarakat. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Kantor Kecamatan Tanggunggunung mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Tanggunggunung, 08 Juli 2025

CAMAT TANGGUNGGUNUNG



DEDDY EKA PURNAMA,S.STP.,MM

Pembina Tingkat 1

NIP. 19810515 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk penyesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Tanggunggunung agar selaras dengan dinamika kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah. Kecamatan Tanggunggunung memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Tanggunggunung.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023
11. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabuapten tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Thaun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Tanggunggunung.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tanggunggunung.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Tanggunggunung.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Tanggunggunung selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan.

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Perubahan disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Tabel 2.1

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Tanggunggunung

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG** Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan gaji tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumentasi Akuntasi SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	31 Paket	31 Paket	31 Paket	31 Paket	0%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi 11istrik penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2026. Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan umum, Kecamatan Tanggunggunung turut mendukung Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu mendukung sisi prioritas penunjang pada sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2025.

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Tanggunggunung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01			**KECAMATAN**							**3.330.447.245,00**	**3.526.953.715,92**	**196.506.470,92**
7	01	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Perangkat Daerah***	%	**100 %**	**91.88 %**			**3.100.447.245,00**	**3.331.645.815,92**	**91.111.255,00**
7	01	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi*	Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	2.884.372.045,00	3.074.684.216,00	**91.111.255,00**
7	01	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang	24 Orang	24 Orang	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	2.867.092.045,00	3.057.404.216,00	190.312.171,00
7	01	01	2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
7	01	01	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar*	%	4 Dokumen	100%	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	50 Paket	52 Paket	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
7	01	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi*	%	100%	100%	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	79.805.200,00	147.271.600,00	67.466.400,00

7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	2.216.000,00	31.554.600,00	29.338.600,00
7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	4 Paket	4 Paket	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	37.794.200,00	78.125.800,00	40.331.600,00
7	01	01	2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.031.700,00	-468.300,00
7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	10 Paket	2 Paket	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	3.615.000,00	2.530.500,00	-1.084.500,00
7	01	01	2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Paket	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	5.250.000,00	-3.000.000,00
7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	26.430.000,00	28.779.000,00	2.349.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi*	%	12 Dokumen	100%	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	49.555.200,00	49.555.200,00	0,00
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	31.152.000,00	31.152.000,00	0,00
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	18.403.200,00	18.403.200,00	0,00

7	01	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi*	%	100 %	100 %	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	73.714.800,00	60.134.799,92	-13.580.000,08
7	01	01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Unit	7 Unit	7 Unit	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	39.940.000,00	26.350.000,00	-13.590.000,00 Kab.
7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	10 Unit	22 Unit	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	6.170.000,00	15.300.000,00	4.260.000,00
7	01	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1 Unit	1 Unit	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	27.604.800,00	23.354.799,92	-4.250.000,08
7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP***	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.866.800,00**	**1.000.000,00**
7	01	02	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN*	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.866.800,00	-4.133.200,00
7	01	02	2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.866.800,00	-4.133.200,00
7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi***	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**93.210.900,00**	**-10.500.000,00**
7	01	03	2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang di fasilitasi*	Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	93.210.900,00	-11.789.100,00

7	01	03	2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	34.347.000,00	-653.000,00
7	01	03	2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	58.863.900,00	-11.136.100,00
7	**01**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase desa tertib peraturan perundangan***	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**60.727.800,00**	**1.000.000,00**
7	01	04	2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi*	Koordinasi	12 Koordinasi	12 Koordinasi	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	60.727.800,00	-4.272.200,00
7	01	04	2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	60.727.800,00	-4.272.200,00
7	**01**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase desa tertib peraturan perundangan***	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**25.857.000,00**	**12.000.000,00**
7	01	05	2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi*	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.857.000,00	-4.143.000,00
7	01	05	2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Orang	50 Orang	50 Orang	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.857.000,00	-4.143.000,00
7	**01**	**06**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi***	%	**100 %**	**100 %**	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung,	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung,	**20.000.000,00**	**9.645.400,00**	**3.100.000,00**

									Semua Kel/Desa	Semua Kel/Desa			
7	01	06	2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya*	Desa	7 Desa	7 Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.645.400,00	-10.354.600,00
7	01	06	2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	Kab. Tulungagung, Tanggunggunung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.645.400,00	-10.354.600,00

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanggunggunung yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan publik.

Adanya dokumen Perubahan Rencana kerja ini diharapkan perangkat daerah Kecamatan Tanggunggunung beserta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparent dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang, oleh karena itu masukan yang positif untuk penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dapat tercapai dengan lebih baik.

Tanggunggunung, 08 Juli 2025

CAMAT TANGGUNGGUNUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG

DEDDY EKA PURNAMA,S.STP.,MM

Pembina Tingkat 1

NIP. 19810515 200012 1 003

PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025



Jl. P. Diponegoro No. 40
Telp. (0355) 321820

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Renja 2025 dan Renstra 2024 - 2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan 2025 ini dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Tulungagung Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata, kami berharap agar Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 8 Juli 2025

Camat Tulungagung,



HARI PRASTIJO
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041988091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35
BAB IV PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025 11
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tulungagung 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tulungagung yang selanjutnya disebut (P-RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Tulungagung, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kecamatan Tulungagung dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan dayaguna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah di sisa waktu tahun anggaran bersangkutan. Kecamatan Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung tak luput dari kewajiban tersebut. Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja, perangkat daerah tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen tersebut tentu dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD. Kecamatan Tulungagung memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang

dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung, maka dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Tulungagung.

Sesuai amanat tersebut, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tulungagung tahun 2025. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulungagung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
25. SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tulungagung Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra kecamatan Tulungagung;
2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Tulungagung.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja kecamatan Tulungagung Tahun 2025 ini adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
2. Mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Tulungagung selama 1 (satu) Tahun dengan mengacu pada Renstra serta sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai dan memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata urutan sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evalusi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sistematika Penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Tulungagung.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Beberapa kegiatan telah mulai direalisasikan, terutama yang bersifat non-fisik dan administrasi persiapan, sementara kegiatan fisik mayoritas masih dalam proses perencanaan atau pengadaan. Kendala utama meliputi keterlambatan penyesuaian anggaran, proses administrasi, serta koordinasi lintas sektor. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk penyusunan Renja Perubahan agar program dan kegiatan menjadi lebih realistis, adaptif terhadap kondisi aktual, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi juga mencakup identifikasi capaian output kegiatan, kendala yang dihadapi, dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk optimalisasi pelaksanaan program di triwulan berikutnya guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tulungagung

Lembar : ……..

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01				KECAMATAN TULUNGAGUNG						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 orang/bulan	144 orang/bulan	148 orang/bulan	146 orang/bulan	98,65 %
01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	0	0%
01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	3 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	3 Paket	12 Paket	3 Paket	25 %

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan					
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	12 Paket	3 Paket	25 %
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	10 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	6 Unit	6 Unit	0	0 %
01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	1 unit	0	0 %
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	11 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	11 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	11 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	4 Unit	1 unit	1 unit	100 %
01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	5 Unit	5 unit	0	0 %
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	10 Unit	12 Unit	3 unit	25 %

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	100%	100%	100%	100%	100%
01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	28 Kegiatan	28 Kegiatan	28 Kegiatan	8 Kegiatan	28,57 %
01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	100 %
01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	8 Laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%
01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi	12 kali	12 kali	8 kali	3 kali	37,5 %
01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11 laporan	12 laporan	3 Laporan	25 %
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	12 kegiatan	1 kegiatan	0	0 %
01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	140 orang	200 orang	140 orang	0	0 %
				KELURAHAN SEMBUNG						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	0	0 %
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0 %
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
					Disediakan					
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	7,15%
				KELURAHAN BOTORAN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
					daerah yang terpenuhi					
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas	1	14	1	1	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	Pokmas/ Ormas	Pokmas/ Ormas	Pokmas/Ormas	
				KELURAHAN KEPATIHAN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Daerah						
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN TERTEK						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN PANGGUNGREJO						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				KABUPATEN/KOTA						
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN KAMPUNGDALEM						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN KARANGWARU						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian sesuai standar					
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				KELURAHAN	Masyarakat					
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN JEPUN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
					Disediakan					
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN TAMANAN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
					daerah yang terpenuhi					
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas	1	14	1	1	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	Pokmas/ Ormas	Pokmas/ Ormas	Pokmas/Ormas	
				KELURAHAN KEDUNGSOKO						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Daerah						
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN KAUMAN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN BAGO						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				KABUPATEN/KOTA						
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN KENAYAN						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	1 Paket	100%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	11	12	3 Laporan	25%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
				Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	Laporan		
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%
				KELURAHAN KUTOANYAR						
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	91	89	90	0	0 %
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	86%	0%	85%	0	0 %
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
					standar					
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	1 paket	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	0	0%
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
								Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/Ormas	100%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evalusi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Penetapan Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Tulungagung

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01				**KECAMATAN TULUNGAGUNG**									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung			
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Dokumen	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	18.109.978.271	17.867.258.271	(242.720.000)
01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	148	148	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	17.886.118.271	17.647.118.271	(239.000.000)
01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	223.860.000	220.140.000	(3.720.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	256.984.000	204.718.000	(52.266.000)
01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	596.800	2.138.000	1.541.200
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	12	12	Kecamatan	Kecamatan	71.977.200	55.477.200	(16.500.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Tulungagung	Tulungagung			
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	12.535.000	14.715.000	2.180.000
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	171.875.000	132.387.800	(39.487.200)
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	3.000.000	0	(3.000.000)
01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	3.000.000	0	(3.000.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	246.678.400	254.188.400	7.510.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	55.662.000	55.662.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	14.410.000	21.920.000	7.510.000
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	176.606.400	176.606.400	0
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	74.731.000	75.500.000	769.000
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	20.500.000	20.500.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	Unit	12	12	Kecamatan	Kecamatan	54.231.000	55.000.000	769.000

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Tulungagung	Tulungagung			
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
					Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung			
01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan PATEN	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	5.000.000	5.000.000	0
01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	5.000.000	5.000.000	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	135.000.000	81.866.600	(53.133.400)
01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	35.000.000	35.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	14	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	60.000.000	38.411.600	(21.588.400)
01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	40.000.000	8.455.000	(31.545.000)
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung			
01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi	Kali	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	65.000.000	50.805.000	(14.195.000)
01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	65.000.000	50.805.000	(14.195.000)
				KELURAHAN SEMBUNG									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	2.200.000	0	(2.200.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	2.200.000	0	(2.200.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	12.750.000	12.750.000	0
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	9.180.000	9.180.000	0
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	3.570.000	3.570.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	105.756.400	109.946.400	4.190.000

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Daerah	terpenuhi								
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	10.200.000	12.600.000	2.400.000
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	2.070.000	2.070.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	93.486.400	95.276.400	1.790.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	1.500.000	1.500.000	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	500.000	500.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	1.000.000	1.000.000	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	347.830.000	331.684.100	(16.145.900)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	219.000.000	219.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung	128.830.000	112.684.100	(16.145.900)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Masyarakat di Kelurahan								
				KELURAHAN BOTORAN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	3.600.000	0	(3.600.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	3.600.000	0	(3.600.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	15.690.000	8.744.100	(6.945.900)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	12.690.000	8.744.100	(3.945.900)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	3.000.000	0	(3.000.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	107.146.400	108.566.400	1.420.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	9.360.000	9.360.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	1.460.000	0	(1.460.000)
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	96.326.400	99.206.400	2.880.000

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	250.000	250.000	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	250.000	250.000	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	546.354.000	505.477.600	(40.876.400)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	9	9	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	350.000.000	350.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran	196.354.000	155.477.600	(40.876.400)
				KELURAHAN KEPATIHAN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	7.000.000	0	(7.000.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	7.000.000	0	(7.000.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	8.640.000	7.484.900	(1.155.100)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	7.360.000	6.944.900	(415.100)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	1.280.000	540.000	(740.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	151.636.400	158.866.400	7.230.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	12.600.000	13.800.000	1.200.000
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	4.910.000	4.910.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	134.126.400	140.156.400	6.030.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	530.000	530.000	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	130.000	130.000	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN									

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	449.438.000	435.070.700	(14.367.300)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	299.520.000	289.640.000	(9.880.000)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan	149.918.000	145.430.700	(4.487.300)
				KELURAHAN TERTEK									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	5.000.000	0	(5.000.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	5.000.000	0	(5.000.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	16.010.000	15.247.800	(762.200)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	10.010.000	9.247.800	(762.200)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	6.000.000	6.000.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	111.829.600	119.629.600	7.800.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	8.400.000	12.300.000	3.900.000
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	1.420.000	1.420.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	102.009.600	105.909.600	3.900.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	570.000	400.000	(170.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	170.000	0	(170.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	414.753.000	396.418.000	(18.335.000)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	276.000.000	261.000.000	(15.000.000)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek	138.753.000	135.418.000	(3.335.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
				KELURAHAN PANGGUNGREJO									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	6.000.000	0	(6.000.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	6.000.000	0	(6.000.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	14.513.500	14.513.500	0
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	7.013.500	7.013.500	0
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	7.500.000	7.500.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	89.628.000	92.028.000	2.400.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	12.750.000	12.750.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	2.070.000	2.070.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					yang Disediakan								
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	74.808.000	77.208.000	2.400.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	416.500	416.500	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	16.500	16.500	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo			
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	230.000.000	209.000.000	(21.000.000)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Panggungrejo	Kelurahan Panggungrejo	150.404.000	149.404.000	(1.000.000)
				KELURAHAN KAMPUNGDALEM									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem			

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	6.000.000	0	(6.000.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	6.000.000	0	(6.000.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	12.840.000	8.164.000	(4.676.000)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	5.140.000	3.544.000	(1.596.000)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	7.700.000	4.620.000	(3.080.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	85.966.400	88.406.400	2.440.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	7.200.000	7.200.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	1.400.000	1.340.000	(60.000)
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	77.366.400	79.866.400	2.500.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	1.800.000	1.650.000	(150.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	2	2	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	800.000	800.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	1.000.000	850.000	(150.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	347.792.000	337.437.400	(10.354.600)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	240.000.000	240.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem	107.792.000	97.437.400	(10.354.600)
				KELURAHAN KARANGWARU									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	4.500.000	0	(4.500.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	4.500.000	0	(4.500.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	14.550.000	14.370.000	(180.000)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	8.850.000	8.850.000	0
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	5.700.000	5.520.000	(180.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	138.359.600	144.509.600	6.150.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	7.200.000	7.200.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	2.150.000	2.150.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	129.009.600	135.159.600	6.150.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	1.800.000	800.000	(1.000.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	800.000	800.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	1.000.000	0	(1.000.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru			

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Masyarakat								
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	386.468.000	406.745.500	20.277.500
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	257.325.000	248.662.500	(8.662.500)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru	129.143.000	158.083.000	28.940.000
				KELURAHAN JEPUN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	4.000.000	0	(4.000.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	4.000.000	0	(4.000.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	16.514.600	15.162.800	(1.351.800)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	15.034.600	13.682.800	(1.351.800)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	1.480.000	1.480.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	123.658.000	128.288.000	4.630.000

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	15.600.000	15.600.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	730.000	730.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	107.328.000	111.958.000	4.630.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	570.000	400.000	(170.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	170.000	0	(170.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	400.420.000	380.770.000	(19.650.000)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	240.000.000	240.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun	160.420.000	140.770.000	(19.650.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Kelurahan								
				KELURAHAN TAMANAN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	3.800.000	0	(3.800.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	3.800.000	0	(3.800.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	12.060.400	9.320.300	(2.740.100)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	8.052.900	7.632.800	(420.100)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	4.007.500	1.687.500	(2.320.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	111.219.600	113.379.600	2.160.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	7.800.000	7.800.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	3.570.000	3.570.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	99.849.600	102.009.600	2.160.000

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Kantor yang Disediakan								
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	2.129.600	2.129.600	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	500.000	500.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	1.629.600	1.629.600	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	371.301.000	357.049.100	(14.251.900)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	237.700.000	232.760.000	(4.940.000)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan	133.601.000	124.289.100	(9.311.900)
				KELURAHAN KEDUNGSOKO									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko			

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	5.500.000	0	(5.500.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	5.500.000	0	(5.500.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	13.950.000	11.865.300	(2.084.700)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	8.400.000	7.315.300	(1.084.700)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	5.550.000	4.550.000	(1.000.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	51.071.600	53.041.600	1.970.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	7.320.000	7.320.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	2.150.000	1.420.000	(730.000)
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	41.601.600	44.301.600	2.700.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	0	0	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	0	0	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	414.712.000	400.971.400	(13.740.600)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	270.000.000	270.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko	144.712.000	130.971.400	(13.740.600)
				KELURAHAN KAUMAN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	2.600.000	0	(2.600.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	2.600.000	0	(2.600.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	14.130.000	14.130.000	0
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	1	1	Kelurahan	Kelurahan	10.130.000	10.130.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kauman	Kauman			
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	4.000.000	4.000.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	57.394.800	62.696.400	5.301.600
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	7.320.000	11.121.600	3.801.600
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	4.470.000	4.470.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	45.604.800	47.104.800	1.500.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	1.800.000	1.800.000	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	300.000	300.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	1.500.000	1.500.000	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	320.353.000	300.273.900	(20.079.100)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	179.121.400	179.121.400	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	141.231.600	121.152.500	(20.079.100)
				KELURAHAN BAGO									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	150.000	0	(150.000)
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	150.000	0	(150.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	17.717.200	14.197.200	(3.520.000)
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	15.797.200	13.197.200	(2.600.000)
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	1.920.000	1.000.000	(920.000)
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	179.461.200	185.091.200	5.630.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	11.400.000	11.400.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	3.370.000	2.030.000	(1.340.000)
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	164.691.200	171.661.200	6.970.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	483.200	483.200	0
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	400.000	400.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	83.200	83.200	0
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Bago	Kelurahan Bago			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	448.732.000	529.087.000	80.355.000
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	229.840.000	319.840.000	90.000.000
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Bago	Kelurahan Bago	218.892.000	209.247.000	(9.645.000)
				KELURAHAN KENAYAN									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	3.200.000	3.200.000	0
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	3.200.000	3.200.000	0
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	16.740.000	16.740.000	0
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	12.440.000	12.440.000	0
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	4.300.000	4.300.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	83.664.800	87.714.800	4.050.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	6.000.000	6.000.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	1.460.000	1.460.000	0
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	76.204.800	80.254.800	4.050.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	1.600.000	600.000	(1.000.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	2	2	Kelurahan	Kelurahan	600.000	600.000	0

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Kenayan	Kenayan			
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	1.000.000	0	(1.000.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan			
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	395.803.000	378.495.500	17.307.500)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	250.000.000	236.480.000	(13.520.000)
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan	145.803.000	142.015.500	(3.787.500)
				KELURAHAN KUTOANYAR									
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar			
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar			
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	3.500.000	0	(3.500.000)

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	3.500.000	0	(3.500.000)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	14.300.000	14.300.000	0
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	8.900.000	8.900.000	0
01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	5.400.000	5.400.000	0
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	125.678.000	131.238.000	5.560.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	8.070.000	8.070.000	0
01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	1.600.000	1.460.000	(140.000)
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	116.008.000	121.708.000	5.700.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	1.000.000	1.000.000	0
01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	1.000.000	0	(1.000.000)
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN					Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar			

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)*	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tambahan / Kurang Pagu
							Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=10-9*
				KELURAHAN									
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar			
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	12	12	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	411.640.000	393.815.000	(17.825.000)
01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	240.000.000	240.000.000	0
01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	1	Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	171.640.000	153.815.000	(17.825.000)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tulungagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 di lingkup Kecamatan Tulungagung yang ditargetkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam upaya mencapai target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/ kegiatan tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Kecamatan Tulungagung dapat mempedomani isi dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ini dengan sebaik- baiknya.

TULUNGAGUNG, 8 Juli 2025

Camat Tulungagung,



HARI PRASTIJO
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041988091001

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TULUNGAGUNG



Disusun Oleh:

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. YOS SUDARSO III NO. 7 TELP. 0355-320726/327356
KODE POS 66217

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 256 /20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
GATUT SUNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.3.1. Maksud 8
1.3.2. Tujuan 8
1.4 Sistematika Penyusunan 8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan II 10
BAB III **23**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **23**
3.1 Program dan Kegiatan 23
3.1.1 Program-Program. 23
3.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan. 23
BAB IV **34**
PENUTUP **34**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 13

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada perubahan renja Tahun 2025 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun. Untuk menuju proses penyusunan RKPD Daerah maka sebelumnya disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Bakesbangpol yang selanjutnya disebut Renja Bakesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan. Di dalam Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah tertuang dalam RPD 2024-2026. Perubahan Renja merupakan implementasi dan perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sebagaimana yang ditetapkan dan disusun pada tahun sebelumnya. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BAKESBANGPOL dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pengukuran keberhasilan Pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahun berjalan akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh BAKESBANGPOL serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daera (LKJiP).

1.2 Landasan Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
25 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatyen Tulungagung;
26 SK Bupati Nomor 100.3.3.2/256/20.01.03/2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025. Mohon batang tubuh SK Bupati ini dijadikan satu kesatuan dengan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung ini adalah penjabaran tentang maksud dari penyusunan dokumen rencana kerja,

sedangkan tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai sebagai tujuan dari penyusunan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2025.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025;
2. Sebagai pengarah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas aparatur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat kontrol / kendali dalam pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan overlap;
4. Sebagai jaminan obyektif dan sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja hasil pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar bekanag, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

Memuat catatan paling penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja. Program dan kegiatan tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2025 triwulan I dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 6 (enam) program yang diwujudkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target.

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja yang akan dicapai yakni Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja 100%. Capaian realisasi keuangan dari target Rp. 4.495.971.036 telah dicapai Rp 703.996.283 atau sekitar 0.34%. Rata-rata Capaian kinerja fisik program ini adalah 24.33%. Kegiatan dalam program ini yang sudah terealisasi antara lain: penyelenggaraan rapat dan koordinasi, fasilitasi kunjungan tamu, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta barang cetak dan penggandaan, jasa komunikasi dan jasa orang perorang serta pemeliharaan barang milik daerah.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan

   Indikator dari program ini yaitu persentase penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Target keuangan Rp959.137.500 telah tercapai Rp 17.974.500 atau baru sekitar 0.01%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta, seperti pembagian bendera ke masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan dan mengampu

kegiatan paskibraka. Kegiatan pembentukan paskibraka diawali dengan proses sosialisasi ke selokah, lalu pendaftaran calon peserta seleksi secara online, dan seleksi calon paskibraka sampai nantinya terpilih sebanyak 86 orang calon anggota paskibraka tahun 2025.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poilitik

   Indikator program ini yaitu persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.Target keuangan sebesar Rp 4.666.323.200 telah tercapai Rp 4.170.000 atau 0.001%. Rata-Rata capaian kinerja fisik sebesar 20%. Program ini berisikan kegiatan-kegiatan yang menunjang kepemiluan, seperti pendidikan politik dan hibah kepada partai politik.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Indikator untuk program ini yaitu persentase pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target fisik telah tercapai 25%, sedangkan untuk target keuangan Rp 5.360.123.000, pada triwulan ini belum terealiasasi keuangannya namun kinerja fisik sudah tercapai 10%. Program ini berisikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi ormas yang ada di Kabupaten Tulungagung melalui baik melalui sosialisasi dan maupun hibah keuangan kepada ormas.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

   Indikator dari program ini yaitu Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Target fisik telah tercapai 10% Sedangkan untuk target keuangan sebesar Rp 77.984.000 sampai dengan triwuan II belum terealisasi

keuangannya. Program ini berisikan pembinaan terkait P4GN, fasilitasi FKUB, dan koordinasi dengan BNNK.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Indikator program ini adalah Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Target fisik terealisasi 15% sedangkan untuk target keuangan Rp 1.831.418.200 telah terealisasi sebesar Rp 3.600.000 atau sekitar 0.001%

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung adalah sebagaimana tetuang dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025		
					Target	Realisasi s.d. Triwulan II (Bulan Maret)	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*
	Urusan Pemerintahan Umum						
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)***	*100%*		**4.495.970.236**	**703.996.283**	*0,34*
0.00.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja (Dokumen)***		5	**18.408.700**	**0** **-**	*0,00*
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		3	18.408.700	0 -	*0,00*

0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (Dokumen)*	80	3.683.551.836	5	**576.953.105**	*0,16*
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	25	3.576.991.836	3	576.953.105	*0,16*
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	25	106.560.000	0	-	*0,00*
0.00.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah (Dokumen)***	124	**23.500.000**	**0**	**-**	*0,00*
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	40	20.000.000	0	-	*0,00*
0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	5	3.500.000	0	-	*0,00*
0.00.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat_Daerah yang Sesuai SOP (%)***	100	**370.524.300**	**10**	**43.672.400**	*0,12*
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	12	9.593.000	3	1.367.000	*0,14*

0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	10	215.402.500	1	5.133.000	*0,02*
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	100	30.542.400	30	13.360.400	*0,44*
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12	24.709.400	3	4.029.500	*0,16*
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	12	90.277.000	3	19.782.500	*0,22*
0.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	100	**259.677.400**	**20**	**50.081.878**	*0,19*
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	12	128.775.000	3	17.421.624	*0,14*
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	12	130.902.400	3	32.660.254	*0,25*
0.00.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia (%)***	100	**140.308.000**	**14**	**33.288.900**	*0,24*

0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	10	46.642.000	2	12.498.900	*0,27*
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	25	74.216.000	8	15.725.000	*0,21*
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	10	19.450.000	2	5.065.000	*0,26*
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	1	-	0	-	*0,00*
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	1	-	0	-	*0,00*
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)***	**100**	**959.137.500**	**5**	**17.974.500**	*0,02*
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Prosentase penguatan ideologi pancasila (Persen)*	100	959.137.500	5	17.974.500	*0,02*

8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*	200	231.720.000	0	-	*0,00*
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)*	300	727.417.500	300	17.974.500	*0,02*
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)***	**100**	**4.666.323.200**	**10**	**4.170.000**	*0,001*
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik (%)*	100	4.666.323.200	10	4.170.000	*0,001*

8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)*	1	91.114.600	0	860.000	*0,01*
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)*	100	4.575.208.600	0	3.310.000,00	*0,001*
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan (%)***	**100**	**5.360.123.000**	**0**	**0**	*0,00*

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)*	1	5.360.123.000	0	**0**	*0,00*
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*	100	5.336.000.000	0	0,00	*0,00*
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)*	1	24.123.000	0	0	*0,00*
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)***	**100**	**77.984.000**	**0**	**0**	*0,00*
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang*	1	77.984.000	0	0	*0,00*

	dan Budaya	*Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dokumen)*						
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*	100	77.984.000	0	0	*0,00*
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)***	**100**	**1.831.418.200**	**0**	**3.600.000,00**	*0,002*
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)*	*1*	1.831.418.200	0	**3.600.000,00**	*0,002*

8.01.06.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	***Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)***	**1**	**314.338.200**	**0**	3.600.000,00	*0,002*
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*	100	1.500.000.000	0	0	*0,00*

8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)*	1	17.080.000	0	0	*0,00*

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

3.1.1 Program-Program.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.

Program-program yang dipilih untuk dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung dalam rangka mencapai tujuan sasaran tersebut diatas antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial;

3.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan

keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Adapun Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada perubahan renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada perubahan renja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (8-7)	LOKASI
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**17.007.030.788,00**	**17.792.356.936,00**	**785.326.148,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**17.007.030.788,00**	**17.792.356.936,00**	**785.326.148,00**	
8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**17.007.030.788,00**	**17.792.356.936,00**	**785.326.148,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100 100 60.54 79.38 Persen % Nilai Nilai**	**100 %**	**4.144.187.788,00**	**4.161.871.036,00**	**3.150.812.212,00**	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja*	*Dokumen*	5 Dokumen	3 Dokumen	28.612.700,00	18.408.700,00	-10.204.000,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	3 Dokumen	5 Dokumen	28.612.700,00	18.408.700,00	-10.204.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	*Dokumen*	80 Dokumen	80 Dokumen	3.340.350.388,00	3.256.451.836,00	-83.898.552,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang*	25 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.233.790.388,00	3.149.891.836,00	-83.898.552,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Dokumen*	25 Dokumen	25 Dokumen	106.560.000,00	106.560.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen*	124 Dokumen	124 Dokumen	45.000.000,00	23.500.000,00	-21.500.000,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Paket*	40 Paket	40 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai SOP*	*Persen*	100 %	100 %	268.413.300,00	400.525.100,00	132.111.800,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	12 Paket	12 Paket	9.669.000,00	9.593.800,00	-75.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Paket*	10 Paket	7 Paket	45.060.000,00	215.402.500,00	170.342.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	100 Paket	110 Paket	30.542.400,00	45.542.400,00	15.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Laporan*	12 Laporan	12 Laporan	35.468.900,00	24.709.400,00	-10.759.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporan*	12 Laporan	6 Laporan	147.673.000,00	105.277.000,00	-42.396.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dokumen*	100 %	100 %	259.677.400,00	304.677.400,00	45.000.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	12 Laporan	15 Laporan	128.775.000,00	173.775.000,00	45.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	12 Laporan	12 Laporan	130.902.400,00	130.902.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*	*Unit*	100 %	100 %	202.134.000,00	158.308.000,00	-43.826.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Unit*	10 Unit	1 Unit	94.772.000,00	64.642.000,00	-30.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	25 Unit	21 Unit	87.912.000,00	74.216.000,00	-13.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	10 Unit	20 Unit	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	*Persen*	**100 %**	**100 %**	**800.000.000,00**	**1.164.637.500,00**	**1.225.000.000,00**	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Prosentase penguatan ideologi pancasila*	*Persen*	100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	1.164.637.500,00	364.637.500,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Orang*	200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	331.720.000,00	281.720.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka								
		Jumlah Paskibraka	*Orang*	300 Orang	90 Orang	750.000.000,00	832.917.500,00	82.917.500,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persen**	**100 100 Persen %**	**100 %**	**4.857.443.000,00**	**4.716.323.200,00**	**592.557.000,00**	

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik*	*Dokumen*	100 % 100 Persen	1 Dokumen	4.857.443.000,00	4.716.323.200,00	-141.119.800,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Orang*	1 Orang	150 Orang	150.000.000,00	141.114.600,00	-8.885.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Orang*	100 Orang	100 Orang	4.707.443.000,00	4.575.208.600,00	-132.234.400,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan**	**Persen**	**100 100 Persen %**	**100 %**	**5.405.400.000,00**	**5.765.123.000,00**	**-695.400.000,00**	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Prosentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*	*Dokumen*	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen 1 Dokumen	5.405.400.000,00	5.765.123.000,00	359.723.000,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Orang*	100 Orang	150 Orang	5.355.400.000,00	5.741.000.000,00	385.600.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Laporan*	1 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	24.123.000,00	-25.877.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persen**	**100 100 Persen %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**127.984.000,00**	**127.500.000,00**	

8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	*Dokumen*	100 % 100 Persen 1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	127.984.000,00	-22.016.000,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Orang*	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	127.984.000,00	-22.016.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**Persen**	**100 100 % Persen**	**100 %**	**1.650.000.000,00**	**1.856.418.200,00**	**970.000.000,00**	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Dirumuskan dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	*Dokumen*	100 % 100 Persen	1 Dokumen	1.650.000.000,00	1.856.418.200,00	206.418.200,00	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	*Dokumen*	1 Dokumen	15 Dokumen	350.000.000,00	339.338.200,00	-10.661.800,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*orang*	100 Orang	120 Orang	1.250.000.000,00	1.500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Laporan*	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	17.080.000,00	-32.920.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
J U M L A H						**17.007.030.788,00**	**17.792.356.936,00**	**73.601.135.619,71**	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik dari aspek kebijakan nasional maupun kondisi faktual di daerah. Penyusunan perubahan Renja ini tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Tulungangung 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan isu strategis aktual.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol, khususnya dalam mendukung stabilitas politik, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan ketahanan sosial dan ideologi di tengah masyarakat. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi

Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Segenap aparatur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, para Pemangku Kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Realisasi program kegiatan hendaknya dengan tetap memperhatikan hasil koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta petunjuk dari Bupati Tulungagung.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan Bakesbangpol yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tulungagung, 8 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

AGUS PRIJANTO UTOMO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690814 199803 1 007